

JIHAD DAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
WASKITO JATI
NIM: 10370042**

**PEMBIMBING:
PROF. NOORHAIDI HASAN, M. A., M.PHIL., PH.D.**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Diantara pembahasan dalam ranah hukum Islam yang lain, topik jihad saat adalah sebuah diskursus yang penting dan krusial untuk dibahas. Terdapat dua spek Akan tetapi pembahasan topic ini belumlah semaju tema lainnya seperti feminisme atau diskursus kepemimpinan. Padahal dalam dunia internasional topik ini juga mendapat kritikan pedas dari banyak pihak. Skeptisisme terhadap jihad ini muncul kembali setelah sekian lama seolah mati suri di masa kolonisasi barat. Skeptisisme ini muncul sebagai respon dari sebagian umat Islam yang mengklaim jihad sebagai alasan mereka untuk melancarkan tindakan terorisme mereka. Dalam menanggapi hal ini banyak umat muslim yang secara sederhana hanya menjawab dengan sederhana tanpa menganalisa dan memberi jawaban yang lebih ilmiah karena itu muncullah pendapat yang *apologetic* yang dengan sederhana mengatakan bahwa Islam adalah agama yang damai dan seolah tidak menghiraukan ayat-ayat pedang yang digunakan oleh para teroris muslim dalam meneror dunia. Sedangkan umat Islam yang radikal dan cenderung mendukung kegiatan terorisme tersebut terus berkembang dengan sedikit perlawanan ilmiah untuk meruntuhkan argumen mereka. Oleh karena itu dibutuhkan pembahasan lebih dalam mengenai ayaat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan jihad untuk mencari apa makna sebenarnya yang ada dalam aturan tersebut. Langkah yang diambil adalah dengan melihat dalil-dalil tersebut dengan perspektif keadaan perang di masa itu. Langkah selanjutnya adalah membandingkan fiqih jihad tersebut dengan Hukum Humaniter Internasional sebagai peraturan yang mengatur perang di masa ini. Dengan melihat keidentikan yang ada di antara keduanya, pembahasan ini akan dapat menjawab tuduhan orang yang skeptis dengan Islam sekaligus juga kelompok radikal yang mempromosikan terorisme.

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa hadis dan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan jihad setelah menganalisa keadaan di masa itu. Hal ini dilakukan dengan menggunakan data-data primer yang terdapat dalam kitab hadis dan kitab fiqih klasik yang membahas tentang jihad. sedangkan dari segi Hukum Humaniter Internasional, akan dianalisa pasal-pasal dan peraturan-peraturan yang terkandung di dalamnya. . Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-yuridis. Normatif, yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan norma-norma yang berlaku. Yuridis, yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan pada hukum serta perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research atau telaah pustaka.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pertama bahwa peraturan yang ada dalam fiqih jihad adalah peraturan yang mengatur pelaksanaan secara spesifik sebagai keadaan yang umum di saat itu. Hasil dari pengaruh keadaan inilah yang menyebabkan banyak peraturan mengenai jihad banyak yang terlihat kejam dan

seolah brutal. Peraturan-peraturan inilah yang diikuti oleh kelompok radikal yang berujung kepada terorisme dan diikuti oleh orang-orang yang skeptis yang berpuncak pada Islamophobia. Dengan analisa yang lebih seksama dan dengan dibandingkan dengan peraturan perang yang ada di dunia moderen, dapat dilihat bahwa peraturan yang dibuat di masa Nabi itu adalah peraturan yang wajar ada dalam keadaan perang. Hal ini dapat dibuktikan dengan peraturan-peraturan yang ada dalam Hukum Humaniter Internasional dan praktek perang moderen yang menggunakan kebijakan yang sama. Hasil dari penelitian ini adalah penekanan pada konteks perang sebagai salah satu aspek yang perlu untuk diperhatikan dalam mengaplikasikan jihad di zaman moderen saat ini.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Waskito Jati

NIM : 10370042

Jurusan : Jinayah Siyasah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 7 September 2014

Yang menyatakan



WASKITO JATI
NIM:10370042

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : **Persetujuan Pembimbing**
Lampiran : 3

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Waskito Jati
NIM : 10370042
Judul Skripsi : **Jihad dan Hukum Humaniter Internasional**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 7 September 2014
Pembimbing



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN SIYASAH

Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/2067/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : JIHAD DAN HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Waskito jati
NIM : 10370042
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 8 Oktober 2014
dengan nilai : A (99)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH

Penguji I/Ketua Sidang

Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

Penguji II

Dr. Subaidi, S. Ag., M.Si.
NIP. 19750517 200501 1 004

Penguji III

Lindra Darnela, S. Ag., M.Hum.
NIP. 19600327 199203 1 003

Yogyakarta, 8 Oktober 2014

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص			

ض	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ط	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ع	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
غ	'ain	ʿ	koma terbalik di atas
ف	gain	g	ge
ق	fa'	f	ef
ك	qaf	q	qi
ل	kaf	k	ka
م	lam	ʿl	'el
ن	mim	'm	'em
و	nun	'n	'en
ه	waw	w	w
ء	ha'	h	ha
ي	hamzah	'	apostrof
	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القرآن	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

MOTTO

**LIFE IS ALL ABOUT DECISION MAKING,
MAKE ONE AND ENJOY BOTH FOR ITS
REWARDS AND CONCEQUENCES**

**DEDICATION FOR SERVICE AND HUMAN
RACE BEFORE GLORY FOR OUR OWN**

GOD IS GOOD

PERSEMBAHAN

*Untuk Tuhan, Kekuasaan-Nya
dan Perdamaian Dunia*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين. و به نستعين على امور الدنيا والدين.

اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا

لا نبي بعده. اللهم صلّ و سلّم على سيّدنا محمّد و على رسوله

اله و صحبه اجمعين. اّمّا بعد.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan kenikmatan-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Merupakan satu tugas bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini, dan alhamdulillah dengan kerjasama yang baik antara pihak Universitas dan Fakultas, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Jihad dan Hukum Humaniter Internasional”**. Untuk itu sebagai ungkapan rasa syukur, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy'ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan., M. A., M. Phil., Ph. D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga

pembimbing skripsi penulis yang telah terus mendorong dan menantang penulis untuk membuat penelitian sebaik mungkin.

3. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah.
4. Bapak Drs. H. Oman Fathurrohman, SW. M. Ag. selaku Penasehat Akademik.
5. Ibunda Rebyantanti dan keluarga, terima kasih atas semua perhatian, bimbingan, kasih sayang dan cintanya, semoga saya selalu menjadi anak yang berguna.
6. Teman-teman di Jurusam Jinayah Siyasah khususnya terima kasih kepada Lisa, Hanum, Nut, Sela, Hafid, dan Alfi yang selalu mengingatkan saya dengan jadwal kuliah, jadwal ujian, ruang kelas, dan banyak hal yang penulis sering lupakan dan paling utama adalah karena perhatian dan persahabatan yang telah terjalin. Doa penulis akan selalu menyertai kita semua agar diberikan nikmat kesuksesan dan kebahagiaan.
7. Teman-teman yang tergabung dalam AFS Bina Antarbudaya Chapter Yogyakarta khususnya pengurus harian tahun 2012-2014 yang telah juga menjadi teman yang baik dan motivator yang dapat diandalkan.
8. Sahabat penulis, Afif dan Prita yang selalu menjadi orang yang dapat penulis sms setiap saat dan banyak memberikan *guidance* dan *wisdom* kepada penulis dalam menghadapi tantangan hidup dan keraguan. Begitu juga terima kasih kepada Mas Ahlul, Mbak Primi, Mbak Nita, Mbak Yeyen,

Yeyen, Arsyad, dan Ifah yang percaya dan selalu memberi dorongan semangat kepada penulis.

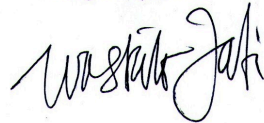
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini teriring dengan do'a *Jazākumullāh Aḥsan al-Jazā'*.

Penyusun menyadari adanya banyak kekurangan untuk dikatakan sempurna, dari itu penyusun menghargai saran dan kritik untuk akhir yang lebih baik.

Yogyakarta, 11 September 2014

Yang menyatakan



Waskito Jati
NIM: 10370042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR LAMPIRAN	

BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teori	15
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	22

BAB II: PERATURAN DAN PETUNJUK PERANG DALAM FIQIH	
JIHAD	22
A. Perang dalam Fiqih Jihad	22
B. Memperkuat Moral dan Semangat Umat Dalam Berjihad.....	27
C. Petunjuk Praktis Dalam Berperang.....	32
1. Syarat Wajib Perang	32
2. Peraturan Sebelum Melakukan Serangan	33

3. Kerusakan yang Sah Untuk Ditimbulkan	34
4. Perlakuan Terhadap Wanita dan Anak-anak	36
5. Perlakuan Terhadap Tawanan Perang.....	38
6. Status Amān (Safe Conduct)	41
7. Strategi Perang	42
8. Perjanjian Damai	44
D. Tujuan Perang Dalam Fiqih Jihad	45

BAB III: PERATURAN PERANG DALAM FIQIH JIHAD DAN HUKUM

INTERNASIONAL..... 48

A. Pembahasan Fiqih Jihad Dalam Diskursus

Penggunaan Perang Yang Sah (Jus ad Bellum)	65
--	----

B. Peraturan Perang Dalam Fiqih Jihad dan Hukum Humaniter

Internasional

(Jus in Bello)

1. Status Individu Dalam Perang	69
2. Perlindungan Terhadap Masyarakat Sipil	72
3. Perlindungan Terhadap Personel Medis dan Agama.....	80
4. Perlakuan Terhadap Tawanan Perang	82
5. Perlindungan Terhadap Orang yang Terluka, Sakit, Dan terdampar	85
6. Peraturan Persenjataan.....	86

BAB IV: ASPEK KEMANUSIAAN DAN PERDAMAIAN DALAM FIQIH

JIHAD DAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL.....91

BAB V: PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran-Saran	104

DAFTAR PUSTAKA.....	105
----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|-----------------|--------------------------------|
| 1. Lampiran I | : Daftar Terjemah |
| 2. Lampiran II | : Biografi Tokoh |
| 3. Lampiran III | : Peraturan Perundang-undangan |
| 4. Lampiran IV | : Curriculum Vitae |

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai umat muslim, kita percaya bahwa islam adalah agama yang diturunkan untuk menjadi rahmat bagi manusia dan memberikan solusi terhadap segala permasalahan yang ada. Akan tetapi, saat ini konsep tersebut sedang mendapatkan pertentangan yang sangat kuat dari komunitas internasional. Bukannya dipandang sebagai sebuah kekuatan yang mendorong nilai-nilai kebaikan di dunia akan tetapi Islam semakin diasosiasikan dengan kekerasan, keterbelakangan dan ketidakadilan.

Hal ini akan dapat kita lihat dengan jelas dalam pembahasan tentang jihad. Sebagai sebuah konsep yang mengatur hubungan antar kelompok, jihad yang awalnya dibuat sebagai sebuah hukum untuk menanggapi keadaan yang ada di masa Nabi dan para sahabat, oleh para muslim radikal di masa sekarang dijadikan sebagai sebuah ideologi yang harus diterapkan apa adanya tanpa interpretasi dengan menyesuaikan konteks hubungan antar negara saat ini.

Hal tersebut semakin memperparah fenomena *Islamophobia* dimana masyarakat barat cenderung sangat skeptis dan curiga terhadap Islam. Persepsi Barat terhadap Islam tersebut telah terjadi sejak Islam pertama kali muncul atau bahkan sebelum Islam muncul di dunia. Kawasan timur tengah selalu menjadi sebuah misteri bagi orang barat sejak dahulu. Kawasan yang keras dengan penduduk suku bar-bar

yang berpindah-pindah dan tidak memiliki peradaban. Persepsi tentang Timur Tengah ini menjadi semakin buruk dengan penaklukan wilayah besar-besaran yang berhasil dilakukan oleh Islam pada awal abad ke delapan. Dibawah pemerintahan empat *Khulafā' Ar-Rāsyidīn*, Muslim arab berhasil menaklukkan kerajaan Sassanid Persia hingga sebagian Kerajaan Bizantium. Hingga runtuhnya Dinasti Abasiyah pada tahun 1258 kekuatan politik Islam terbagi dalam beberapa kerajaan besar. Kesultanan Ottoman yang memerintah dari Eropa Selatan, Timur Tengah, Hingga Afrika Utara, Kesultanan Safawid yang memerintah di Iran, hingga Kerajaan Mughal yang memerintah Sub-Benua India (yang sekarang termasuk didalamnya Pakistan, Bangladesh, sebagian besar India, dan sebagian Afghanistan).¹ Terutama dengan ditaklukkannya Spanyol, hingga serangan Turki Ottoman terhadap Vienna di tahun 1683. Kejadian kejadian ini semakin memperburuk persepsi Islam di Barat. Islam mulai dilihat sebagai sebuah ancaman bagi Peradaban Kristen.² Persepsi ini dimulai pada saat Kristen masih lemah dan Islam sebagai sebuah kekuatan besar, dan berlanjut hingga sekarang.

Akibat dari distorsi pandangan terhadap Islam ini, terdapat beberapa hal yang salah persepsi dan terlanjur menjadi pendapat umum di dunia. Terutama jika berkaitan dengan pembahasan mengenai jihad. Sebuah pembahasan yang seolah hilang pada

¹ M. Raquibuz Zaman dkk, *Islamic Political Ethics*, (New Jersey: Princeton University Press, 2002), hlm 12.

² Reuven Firestone, *Jihad The Origin of Holy War in Islam*, (New York: Oxford University Pers, Inc., 2002), hlm 13.

masa kolonialisme Barat dari sekitar abad 15 hingga 18. Di masa ini kata jihad dapat dibuang hilang dari perbendaharaan kosakata dunia barat.³ Kata ini mulai muncul kembali terutama dalam beberapa dekade terakhir ini. Distorsi terhadap arti konsep jihad semakin diperparah dengan tindakan-tindakan sekelompok muslim yang memilih jalan yang sangat radikal dalam menyikapi permasalahan dunia. Salah satunya dimulai dengan terjadinya pemboman di Kedutaan Besar Israel di Buenos Aires, Argentina pada 17 Maret 1992. Sebuah truk yang berisi bahan eksplosif ditabrakkan ke Kedutaan Besar Israel dan ledakannya menghancurkan kantor kedutaan, sebuah gereja, dan sebuah sekolah disampingnya. Sebanyak dua puluh Sembilan orang tewas dan dua ratus lainnya luka-luka.⁴ Bom bunuh diri tersebut diketahui dilakukan oleh sebuah organisasi bernama *Islamic Jihad Organization* sebuah organisasi Shiah fundamental yang muncul pada saat Perang Sipil Lebanon.⁵

Kemudian terjadi dua kali serangan berturut-turut yang secara langsung dilakukan oleh Al-Qaeda di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Nairobi Kenya dan Dar El Salam di Tanzania pada tanggal 7 Agustus tahun 1998 yang menewaskan 224 orang dan melukai lebih dari empat ribu orang. Salah satu pelaku yang pemboman yang

³ Paul Fregosi, *Jihad in the West, Muslim Conquest from the 7th to the 21st Centuries*, (New York: Prometheus Books, 1998) hlm 16.

⁴ http://en.wikipedia.org/wiki/1992_attack_on_Israeli_embassy_in_Buenos_Aires. Di akses pada tanggal 5 Desember 2013.

⁵ http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_Jihad_Organization. Di akses pada tanggal 5 Desember 2013.

bernama Abu Anas Al Libi, anak buah dari Osama Bin Laden ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2013 di Tripoli, Libya.⁶

Hingga kemudian terjadi serangan paling besar yang pernah terjadi di tanah Amerika Serikat yang akan menjadi penanda dimulainya perang global terhadap terorisme di dunia. Tanggal 11 September 2001 masih hangat menghantui pikiran baik masyarakat barat secara umum dan juga pemerintahan negara barat pada khususnya pada saat pesawat American Airlines flight 11 menabrak gedung bagian utara dari World Trade Center. Beberapa menit selanjutnya Pesawat United Airlines flight 175 menabrak gedung bagian selatan dari WTC. Kedua pesawat yang dibajak tersebut menyebabkan Amerika Serikat menutup semua penerbangan dan perbatasan dengan Meksiko dan Kanada. Serangan ini menewaskan lebih dari 3000 korban jiwa.⁷

Setelah kejadian di tahun 2001 itu, sejumlah aksi terorisme juga terjadi di beberapa wilayah di dunia. Diantaranya adalah bom bunuh diri di Sinagog Grhiba di Tunisia pada tanggal 11 April 2002, hingga bom bunuh diri yang terjadi di transportasi Umum London pada tanggal 7 Juli 2005.⁸

⁶ <http://edition.cnn.com/2013/10/06/world/africa/africa-embassy-bombings-fast-facts/> diakses pada tanggal 2 Desember 2012.

⁷ http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/september/11/newsid_2514000/2514627.stm diakses pada tanggal 2 Desember 2012.

⁸ Jalil Roshandel dan Sharon Chada, *Jihad and International Security*, (New York: Palgrave Macmillan, 2006) hlm 9

Kejadian-kejadian diatas semakin menggiring opini Barat menuju kearah yang semakin salah. Anggapan bahwa jihad adalah sebuah ancaman bagi non-muslim pun bermunculan. Walaupun dalam pidatonya pada tanggal 20 September 2001, Presiden George W. Bush menyampaikan secara langsung kepada umat Islam bahwa masyarakat Amerika menghormati agama Islam dan percaya bahwa Islam adalah agama cinta damai dan orang-orang yang melakukan tindakan terorisme ini menghinakan Allah⁹, seorang penulis kelahiran Australia menuliskan bagaimana Jihad adalah seperti komet *Halley*. Ditulis dalam bukunya bagaimana seorang temannya mendeskripsikan Jihad seperti komet *Halley* yang melintas diudara, kemudian menghilang lagi, akan tetapi selalu ada disana yang akan muncul kembali dan akan menghilang kembali. Fregosi menambahkan, deskripsi tersebut kurang akurat karena komet *Halley* muncul tanpa menimbulkan kerusakan, sedangkan Jihad sering muncul dan menimbulkan kerusakan.¹⁰ Lebih jauh lagi Paul Fregosi menuliskan bagaimana tujuan utama jihad adalah untuk menaklukkan seluruh dunia dibawah payung Islam. Selain itu, dengan jihad, selama lebih dari seribu tahun Islam telah menjadi yang pertama dan yang terdepan dalam melancarkan gencatan senjata, perang imperialisme

⁹http://www.washingtonpost.com/wpsrv/nation/specials/attacked/transcripts/bushaddress_092001.html diakses pada tanggal 10 Desember 2013.

¹⁰ Paul Fregosi, *Jihad in the West, Muslim Conquest from the 7th to the 21st Centuries*, (New York: Prometheus Books, 1998) hlm 21.

layaknya kolonialisme Romawi, Inggris, Prancis, Spanyol, Jerman dan Amerika Serikat.¹¹

Osama bin Laden pada bulan Februari tahun 1998 mengeluarkan sebuah fatwa yang dapat dibilang sebagai pemberitahuan kepada dunia barat tentang akan adanya serangan dari kelompok Osama bin Laden. Dalam fatwa yang diterbitkan di majalah *Al-Quds Al-Rābi* ‘ Osama bin Laden secara gamblang memerintahkan untuk “Bunuhlah orang Amerika dan rampaslah harta mereka dimanapun kami bertemu dengan mereka dan kapanpun kamu bisa”.¹² Fatwa ini dapat dipandang sebagai deklarasi perang global melawan Amerika Serikat pada umumnya dan dunia barat pada umumnya. Ada tiga hal yang membuat Osama bin Laden mengeluarkan fatwa tersebut. Alasan-alasan ini adalah tiga dosa dan kriminalitas yang dilakukan Amerika Serikat. Pertama adalah keberadaan tentara Amerika di Saudi Arabia, kedua adalah fakta bahwa Amerika loyal kepada Israel dan ketiga adalah sanksi yang dikenakan oleh PBB terhadap Irak.

Apabila kita melihat fatwa yang dikeluarkan oleh Osama bin Laden diatas, dengan jelas Osama bin Laden mendeklarasikan perang melawan Amerika. Dapat dibilang bahwa apa yang dilakukan oleh Osama bin Laden ini adalah sebuah strategi

¹¹ Paul Fregosi, *Jihad in the West, Muslim Conquest from the 7th to the 21st Centuries*, (New York: Prometheus Books, 1998) hlm 16.

¹² Jalil Roshandel dan Sharon Chada, *Jihad and International Security*, (New York: Palgrave Macmillan, 2006) hlm 4.

perang yang menurutnya adalah *Islamic*, atau sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, sebagai perlawanan terhadap apa yang Al-Qaeda tuduhkan pada Amerika.

Dua jenis peristiwa yang mengatas namakan jihad ini, yaitu penaklukan wilayah besar-besaran oleh Islam sejak awal kebangkitan Islam hingga masa Ottoman dan terorisme yang mengatas namakan Islam di masa modern, menjadi dasar utama pertanyaan untuk masyarakat Islam. Apakah benar apa yang dituduhkan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kolonialisme dan mengizinkan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan kolonialismenya?

Sering kali dalam pembahasan tentang jihad atau dalam jawaban menanggapi tindakan teroris muslim tersebut, umat Islam mengatakan bahwa jihad bukanlah seperti itu. Namun kita juga tidak dapat menutup mata bahwa salah satu makna dari jihad adalah perang dan keikutsertaan kita dalam melaksanakannya.¹³ Ini adalah sebuah definisi jihad yang valid dan didukung oleh banyak ayat Quran serta sejarah. Pembahasan tentang jihad perang ini seharusnya diarahkan kepada tahap selanjutnya yaitu tentang peraturan jihad dalam bentuk perang yang diatur oleh Islam dan tidak lagi hanya mengeluarkan tanggapan defensif.

Cara yang dapat ditempuh untuk menjawab dan menganalisa pertanyaan dunia yang diarahkan kepada Islam tentang jihad ini adalah dengan membandingkan jihad

¹³ Reuven Firestone, *Jihad The Origin of Holy War in Islam*, (New York: Oxford University Pers, Inc., 2002), hlm 19.

dengan peraturan yang saat ini digunakan untuk mengatur peperangan yaitu Hukum Humaniter Internasional dan juga Hukum Internasional lainnya. Baik Fiqh Jihad maupun HHI mengandung peraturan-peraturan tentang perang.

HHI sebagai suatu instrumen kebijakan dan sekaligus pedoman teknis yang dapat digunakan oleh semua aktor Internasional untuk mengatasi isu internasional berkaitan dengan kerugian dan korban perang.¹⁴ Hingga akhir tahun 2013, hampir semua negara di dunia (191 negara) telah meratifikasi Konvensi Jenewa yang mana merupakan salah satu bagian utama dari Hukum Humaniter Internasional.¹⁵ HHI menjadi bagian terbesar dari Hukum Internasional yang pada saat keadaan konflik muncul berusaha untuk melindungi orang-orang yang tidak mengikuti atau tidak lagi mengikuti peperangan, serta membatasi metode dan juga cara berperang.¹⁶ Lebih jauh lagi, HHI yang diberlakukan untuk keadaan konflik bersenjata dan adalah sebuah perjanjian internasional yang secara spesifik dimaksudkan untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan masalah kemanusiaan yang muncul secara langsung dari konflik bersenjata baik yang internasional ataupun non-internasional.

¹⁴ Ambarwati, Denny Ramadhan, Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012) hlm 27.

¹⁵ *International Humanitarian Law Answer to Your Question*, (Geneva: International Committee of the Red Cross, 2002) hlm 12.

¹⁶ *International Humanitarian Law Answer to Your Question*, (Geneva: International Committee of the Red Cross, 2002) hlm 4.

Dengan membandingkan fiqih jihad dengan Hukum Humaniter Internasional ini diharapkan akan dapat menghasilkan pendapat alternatif dalam diskursus pembahasan mengenai jihad dalam Islam.

B. Rumusan Masalah

Dengan berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah disampaikan sebelumnya, dapat dirangkum beberapa pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. Rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimanakah fiqih jihad mengatur pelaksanaan perang?
2. Bagaimanakah konstruksi Hukum Humaniter Internasional dalam mengatur perang?
3. Apakah peraturan dalam Islam mengenai jihad dengan bentuk perang sejalan dengan peraturan yang tertulis dalam Hukum Humaniter Internasional?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dengan berpegangan dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini akan berusaha memetakan dan membandingkan peraturan tentang perang dari dua sumber hukum yang berbeda tersebut. Berikut adalah uraian tujuan yang akan berusaha dicapai melalui penelitian ini:

1. Untuk mengetahui peraturan perang yang dicantumkan dalam fiqh jihad dari masa-masa.
2. Untuk mengetahui peraturan perang yang dicantumkan dalam Hukum Humaniter Internasional
3. Membandingkan kedua peraturan perang dalam fiqh jihad dan HHI
4. Mencari tahu apakah fiqh jihad berjalan sejalan dengan peraturan dalam HHI

Penelitian ini memiliki manfaat yang besar terutama dalam bidang hukum Islam. Berikut adalah manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan wawasan baru dalam bidang hukum Islam yang berkaitan dengan perang dan strateginya.
 - b. Menambah khasanah keilmuan dalam bidang hukum politik Islam yang berkaitan dengan hubungan internasional.
 - c. Menambah khasanah keilmuan dalam hukum Islam yang menyentuh permasalahan modern dan konsep politik modern non Islam.

- d. Memberi pandangan yang jelas dan lebih terperinci tentang peraturan dalam perang yang tercantum dalam hukum Islam
- e. Memperkaya khasanah keilmuan hukum Islam dalam bidang hukum Internasional yang belum banyak dikaji.

2. Manfaat Praktis

Isu yang dibahas dalam penelitian ini adalah isu yang penting namun masih terpendam dalam masyarakat. Akan tetapi isu ini adalah isu yang sangat penting untuk dibahas karena bila terjadi pemahaman yang salah akan berdampak konflik yang buruk karena cakupan isu ini adalah hubungan internasional. Berikut adalah manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini:

- a. Memberikan pandangan yang lebih menyeluruh terhadap isu perang dan metode yang digunakan dengan berdasarkan pada hukum Islam.
- b. Menghindari pemahaman fanatis dan irrasional yang dapat membahayakan agama Islam sendiri dan juga masyarakat umum lainnya.
- c. mengembangkan hukum Islam yang lebih progresif, humanis, dan objektif.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang jihad adalah pembahasan yang semakin digali selama waktu berjalan. Terutama dalam situasi dunia Internasional kali ini yang sedang dipenuhi oleh rasa benci dan kekerasan. Telah banyak penulis yang membahas tentang masalah ini.

Buku paling komprehensif yang membahas tentang jihad secara luas adalah buku karangan Yusuf Qardhawi yang berjudul *Fiqih Jihad*. Buku ini membahas jihad dalam bentuk *Al- Qitāl* (perang) dengan sangat terperinci. Pembahasan mulai dari pengertian jihad hingga perang yang diperbolehkan, hingga jihadnya perempuan dikupas dengan detail dalam buku ini. Karya monumental ini adalah salah satu sumber sekunder yang akan banyak penyusun jadikan referensi.

Dr. H. Zulfi Mubaraq dalam karyanya yang berjudul *Tafsir Jihad* mengupas teori jihad yang dipercayai oleh para terpidana Bom Bali tahun 2002. Dr. Mubaraq meneliti mulai dari penafsiran yang digunakan oleh Amrozi, Ali Ghufroon, dan Imam Samudra, alasan melakukan pemboman di Bali, motivasi yang berada di balik tindakan itu juga mengenai ideologi terorisme secara umum. Setelah itu dalam bab terakhir, beliau menuliskan mengenai re-interpretasi jihad yang lebih modern dan humanis disertai dengan indeks jihad dalam Quran.¹⁷ Namun sayangnya pembahasan pada bab tentang re-interpretasi jihad tersebut hanya sebagian kecil saja dari pembahasan buku

¹⁷ Dr. H. Zulfi Mubaraq, *Tafsir Jihad Menyingkap Tabir Fenomena Terorisme Global*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011).

secara keseluruhan. Hal ini dapat dipahami karena memang buku yang bearawal dari thesis ini memang berkonsentrasi pada latar belakang tindakan terorisme bom Bali.

Untuk mengetahui perspektif barat dalam memandang Islam, jihad, dan terorisme, buku-buku yang membahas tentang hal itu juga penulis jadikan sebagai sebagian sumber pustaka. Diantaranya adalah buku yang berjudul *Jihad and International Security* tulisan Jalil Roshandel dan Sharon Chada. Buku ini menarik karena yang dibahas didalamnya adalah murni tentang analisa terorisme dan jihad yang terjadi di dunia. Banyak penulis temukan fakta mengenai banyak tindakan terorisme dari buku ini. Oleh karena itu buku ini tidak berfokus pada pertanyaan apa itu jihad dan jihad seperti apa yang boleh atau tidak boleh. Buku ini secara sederhana merekam kejadian sejarah terorisme yang dilakukan dengan latar belakang Islam.¹⁸

Buku selanjutnya yang penulis jadikan sumber pustaka adalah buku yang cukup objektif dan tidak memojokkan Islam karya Reuven Firestone. Dalam bukunya yang berjudul *Jihad, The Origein of Holy War in Islam* Firestone sejak awal mengatakan bahwa jihad adalah sebuah konsep yang salah diartikan oleh masyarakat negara barat dan karena itu diperlukan analisa yang mendalam dalam menanggapi fenomena ini. Dalam bukunya Firestone berusaha untuk objektif dalam memandang jihad dan menyampaikan fakta hasil penelitiannya saja. Fokus pada buku ini adalah jihad dalam

¹⁸ Jalil Roshandel dan Sharon Chada, *Jihad and International Security*, (New York: Palgrave Macmillan, 2006).

literatur Islam. Firestone menuliskan sejarah jihad dalam literatur mulai dari masa pra-Islam hingga masa modern.¹⁹

Buku lain yang juga membahas perkembangan jihad dalam sejarah adalah buku berjudul *Jihad in Islamic History Doctrines and Practice* karya Michael Bonner. Buku ini secara rinci menerangkan tentang perkembangan penggunaan perang sejak masa pra Islam hingga masa modern.²⁰

Dalam membahas tentang peraturan perang dalam ranah dunia Internasional akan digunakan beberapa buku. Salah satunya adalah buku karangan Paul Christopher yang berjudul *The Ethics of War and Peace An Introduction to Legal and Moral Issues*. Buku ini tidak hanya membahas tentang peraturan yang ada akan tetapi juga membahas alasan filosofis dan historis dibalik peraturan perang yang tercantum dalam HHI.²¹

Dalam skripsi yang berjudul “*Perlindungan Penduduk Sipil Pada Saat Terjadi Konflik Bersenjata, Studi Komparatif Antara Hukum Humaniter Internasional Dengan Hukum Islam*” karya Saiful Rizal tema perang ini juga dibahas. Akan tetapi penulis kurang memberikan pandangan tentang jihad yang lebih menyeluruh. Dalam tulisannya hanya disebutkan peraturan-peraturan yang sesuai dengan HHI sedangkan banyak sumber lain yang memiliki pemikiran yang jauh berbeda. Skripsi ini juga

¹⁹ Reuven Firestone, *Jihad The Origin of Holy War in Islam*, (New York: Oxford University Press, Inc., 2002) hlm 67.

²⁰ Michael Bonner, *Jihad in Islamic History Doctrines and Practice*, (New Jersey: Princeton University Press, 2006) hlm 87.

²¹ Paul Christopher, *The Ethics of War and Peace An Introduction to Legal and Moral Issues*, (New Jersey: Prentice Hall, 1999) hlm 237.

kurang menekankan pada konsep *Jus in Bello* dan *Jus ad Bellum* dari dua peraturan tersebut.²²

Disamping buku-buku diatas banyak juga dokumen-dokumen dalam bentuk perjanjian, keputusan pengadilan, dan deklarasi lainnya yang akan digunakan dalam penelitian ini.

E. Kerangka Konsep

Dalam meneliti tentang perang dalam persepsi jihad dan juga hak asasi manusia diperlukan konsep yang dapat mendukung penelitian yang baik. Konsep yang akan digunakan untuk tujuan tersebut dalam penelitian ini adalah pertama konsep mengenai hak asasi manusia, dan juga konsep tentang jihad dalam hukum Islam, dan yang terakhir adalah konsep tentang perang dan perkembangannya.

Hak asasi manusia adalah seringkali diartikan sebagai suatu hak yang dimiliki oleh seseorang sejak dia lahir. Definisi ini tidak dapat mencakup semua definisi dari hak asasi manusia itu sendiri. HAM tidak hanya sebuah hak dimiliki karena seseorang adalah manusia, naum hak-hak itu adalah hak yang sangat penting, yang dibentuk untuk melindungi kepentingan manusia yang valid secara moral dan mendasar, terutama dari penyalahgunaan kekuatan politik.²³

²² Saiful Rizal, *Perlindungan Penduduk Sipil Pada Saat Terjadi Konflik Bersenjata, Studi Komparatif Antara Hukum Humaniter Internasional Dengan Hukum Islam*, skripsi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga 2009.

²³ Michael Freeman, *Human Rights An Interdisciplinary Approach*, (Massachussets: Blackwell Publisher Inc, 2002) hlm 61.

Dalam usaha untuk memperjuangkan HAM ini disusul Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang disahkan pada tahun 1948. Didalamnya ada beberapa pasal yang mengindikasikan tentang penghormatan kepada jiwa manusia yang juga menjadi acuan dibuatnya peraturan perang untuk menjaga hak dasar ini.

Dalam pasal tiga disebutkan:

“Setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu.”²⁴

Kemudian dalam pasal lima disebutkan:

“Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya.”²⁵

Ulama-ulama juga berbeda pendapat dalam mendefinisikan jihad. Imam Asy-Syafi‘i membagi jihad menjadi dua. Jihad sebelum perang diperbolehkan adalah dalam bentuk hijrah. Hijrah adalah wajib bagi seseorang yang memeluk Islam di negara musuh yang tidak bebas menjalankan agamanya. sesuai dengan firman Allah:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُم الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا²⁶

²⁴ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pasal 3.

²⁵ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pasal 3.

²⁶ An-Nisā’ (4): 7.

Sedangkan bentuk kedua adalah jihad dalam bentuk perang setelah perang itu diizinkan dengan turunnya surat Al Baqarah ayat 190-191.²⁷

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يِقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (١٩٠) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تَقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يِقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جِزَاءُ الْكَافِرِينَ²⁸

Menurut Imam Asy-Syafi'i semua ayat yang sebelumnya melarang berperang dihapus dengan turunnya ayat ini.²⁹ Disamping pendapat Imam Asy-Syafi'i tersebut, beliau juga mengatakan bahwa tujuan utama jihad bukanlah untuk membunuh kaum kafir. Apabila mereka dapat memperoleh hidayah dengan menyampaikan bukti nyata dengan tanpa berjihad, maka sesungguhnya hal tersebut adalah lebih baik.³⁰

Al-Qardhawi memberikan penjelasan yang lebih menyeluruh dengan menjelaskan bahwa kata jihad yang berasal dari bahasa Arab *jāhada-yujāhidu-jihādan* berarti mencurahkan usaha dan kekuatan untuk membela dan menyebarkan dakwah Islam. Dalam mencurahkan tenaga untuk membela dakwah Islam ini, jihad dibagi menjadi tiga yang dimulai dengan jihad terhadap keburukan yang ada dalam dirinya

²⁷ Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm: Jilid IV*, terj. Prof. TK. H. Ismail Yukub SH. MA., (Jakarta Selatan: CV Faizan, 1995), hlm 177.

²⁸ Al-Baqarah (2) 190-191.

²⁹ Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm: Jilid IV*, terj. Prof. TK. H. Ismail Yukub SH. MA., (Jakarta Selatan: CV Faizan, 1995), hlm 174.

³⁰ Prof. Dr. Wahhab Zuhaili, *Fiqh Imam Asy-Syafi'i*, cet ke-2 (Jakarta Timur: Almahira, 2012), hlm 390.

dalam bentuk godaan setan, dilanjutkan dengan melawan keburukan di sekitar masyarakat, dan berakhir dengan melawan keburukan di mana pun sesuai dengan kemampuannya.³¹

Al-Qardhawi termasuk ulama yang tidak *apologetic* dan juga tidak radikal. Beliau menuliskan bahwa jihad memang berarti perlawanan terhadap diri sendiri dan juga perlawanan terhadap kekuatan asing yang mengancam. Dengan kata lain Al-Qardhawi tidak meniscayakan adanya jihad dalam bentuk perang bersenjata. Dalam kaitannya dengan jihad dalam bentuk perang bersenjata Al-Qardhawi membaginya menjadi dua bentuk perang yaitu:

1. Perang Defensif (*Jihād al-Dafʿ*)

Jihād al-Dafʿ adalah jihad melawan musuh yang masuk ke negeri Islam untuk menduduki, menyerang jiwa, harta, kekayaan, dan kehormatan umat islam. Jihad ini juga bermakna perlawanan terhadap perbuatan penindasan akidah, membuat fitnah dalam agama, mengancam umat Islam untuk meninggalkan agamanya sendiri, dan juga termasuk jihad perlawanan adalah menghadapi musuh dengan senjata seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada perang Uhud dan Khandaq.³²

³¹Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad*, terj. Irfan Maulana Hakim dkk, (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), hlm 5.

³²Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad*, terj. Irfan Maulana Hakim dkk, (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), hlm 5.

2. Perang Ofensif (*Jihād al-Ṭalāb*)

Jihād al-Ṭalāb adalah jihad dimana musuh berada di negerinya sendiri sedangkan umat Islam menyerang dengan tujuan meluaskan atau mengamankan negeri Islam. Dengan kata lain umat Islam memulai peperangan tersebut. Jihad ini seperti jihad yang dilakukan oleh sahabat dan orang-orang yang melakukan pembebasan negeri-negeri Islam (*Al-Futūḥāt al-Islāmiyyah*)³³

Dapat dilihat dalam definisi dua ulama besar diatas bahwa terdapat sedikit perbedaan mengenai definisi dari jihad itu sendiri. Perbedaan yang akan lebih kontras lagi akan ditemui lebih lanjut dalam pembahasan yang lebih mendetail mengenai perang dalam Islam.

Dalam pembahasan tentang perang tidak akan lepas dari dua istilah yang merepresentasikan pembahasan perang secara keseluruhan. Kedua teori ini dikembangkan dari nilai-nilai perang di masa lalu dan mulai disusun dengan lebih tertata oleh Hugo Grotius dalam bukunya *The Law of War and Peace* yang ditulis pada tahun 1625 dan ditujukan kepada raja Prancis Louis XIII. Dalam tulisannya dibahas teori *jus ad bellum* yang berarti sebuah set kriteria yang detail untuk digunakan oleh

³³Ibid., hlm. 5.

negara-negara dalam mengevaluasi situasi yang mungkin dapat membenarkan penggunaan kekerasan.³⁴

Teori selanjutnya adalah teori *Jus in Bello*. Teori ini mengatur tentang cara berperang yang diperbolehkan. Secara tradisional teori ini mencakup siapa yang dapat diserang, cara apa saja yang dapat digunakan untuk menyerang, dan cara memperlakukan tahanan perang.³⁵ dalam keadaan modern sekarang, apa yang ditulis oleh Grotius tersebut telah dikembangkan dengan lebih modern mengikuti nilai-nilai yang ada di zaman sekarang.

Tiga teori diatas adalah landasan teori yang akan digunakan dalam melaksanakan penelitian ini. Dengan menganalisa baik dari segi Islam maupun dari segi Barat, diharapkan tujuan penelitian ini dapat tercapai.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian kali ini akan digunakan metode penelitian sebagai berikut

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*). Data-data akan dikumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berkaitan dengan dua hal yang menjadi objek penelitian ini. Buku-buku tersebut adalah buku yang membahas tentang jihad dalam bentuk perang dan

³⁴ Paul Christopher, *The Ethics of War and Peace An Introduction to Legal and Moral Issues*, (New Jersey: Prentice Hall, 1999) hlm 82.

³⁵ Paul Christopher, *The Ethics of War and Peace An Introduction to Legal and Moral Issues*, (New Jersey: Prentice Hall, 1999) hlm 91.

perturannya dan buku yang membahas tentang Hukum Humaniter Internasional.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik. Peneliti akan mendeskripsikan dua objek penelitian ini dan kemudian membandingkan apa yang ditemukan sesuai dengan apa yang tertulis dalam rumusan masalah.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, filosofis, yuridis. Dimana masalah akan dipandang dari segi norma-norma dan nilai-nilai yang ada di dunia dalam kesempatan kali ini adalah hak asasi manusia. Kemudian juga akan dilihat dari segi agama dan juga dari segi yuridis atau hukum yang berlaku saat ini.

4. Sumber Data

Sumber data dari penelitian kali ini adalah sumber data sekunder. Sumber-sumber sekunder ini berasal dari berbagai macam buku, kitab, keputusan pengadilan, serta surat kabar baik cetak maupun *online*.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis akan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif ini dimulai dengan mempelajari dengan rinci teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya dari data-data yang terkumpulkan akan ditarik sebuah kesimpulan mengenai masalah yang sedang dibahas.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi dalam lima bab. Berikut adalah uraian mengenai pembahasa setiap bab yang ada. Bab pertama, pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini ditulis untuk menjadi dasar dari penelitian ini dalam hal penulisan dan juga alasan membuat penelitian.

Dilanjutkan dengan bab kedua yang akan diterangkan mengenai peraturan perang yang ada dalam Islam dari sumber-sumber yang ada. Dalam bab ini akan disampaikan berbagai macam peraturan tentang fiqh jihad yang diambil dari Al-Quran, hadist, dan pendapat para ulama klasik.

Dalam bab ketiga akan dituliskan hasil temuan dari penelitian dalam bentuk apakah ada atau tidaknya kesamaan peraturan yang tercantum dalam fiqh jihad dan Hukum Humaniter Internasional dalam hal peraturan mengenai perang.

Bab keempat akan membahas tentang pandangan ulama modern berkaitan dengan jihad dan bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan penelitian dan juga saran-saran. Dalam bab ini akan disampaikan jawaban dari rumusan masalah dan kemudian dari sana akan disampaikan saran untuk perkembangan pembahasan selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fiqih jihad sebagai bagian dari syariah Islam mengajarkan peraturan yang cukup detail berkaitan dengan pelaksanaan perang di masa itu. Mulai dari usaha yang dilakukan oleh Nabi Muhammad untuk memotivasi umatnya agar bersemangat untuk berjihad melawan opresi kaum kafir Makkah, hingga petunjuknya yang berkaitan dengan strategi perang dan perlindungan kepada mereka yang lemah. Peraturan-peraturan ini sebagian terlihat kejam dan tidak manusiawi yang sering kali menjadi bahan ejekan bagi mereka yang ingin memojokkan umat Islam dan juga bagi menjadi inspirasi bagi kaum radikal untuk melakukan kebrutalan mereka. Pandangan yang perlu untuk dikembangkan adalah bahwa peraturan-peraturan yang tercantum dalam hadist dan Al-Quran yang berkaitan dengan jihad adalah tumbuh dalam konteks keadaan perang yang berkepanjangan. Apabila dilihat dari sudut pandang ini, dalil-dalil yang sekilas tidak baik itu akan lebih terlihat normal. Usaha untuk melihat kenormalan peraturan jihad ini adalah dengan membandingkannya dengan Hukum Humaniter Internasional yang menjadi hukum yang mengatur perang saat ini.
2. Antara Hukum Humaniter Internasional dan fiqih jihad terdapat banyak persamaan peraturan terutama dalam hal *jus in bello* nya. Islam telah menerapkan banyak peraturan yang saat ini tercantum dalam HHI seperti perlakuan terhadap wanita, anak-anak, dan tawanan perang. Akan tetapi dalam pembahasan *Jus ad bellum* hukum yang ada dalam fiqih jihad memerlukan

apropriasi dengan keadaan di zaman sekarang dengan berubah totalnya dinamika hubungan antar negara saat ini. Persamaan yang ada dalam dalam fiqih jihad dan Hukum Humaniter Internasional diantaranya adalah dilindunginya hak-hak pihak yang tidak menjadi bagian dari perang seperti anak-anak, kaum wanita, dan juga properti milik warga sipil.

3. Perbedaan penafsiran yang ada di kalangan para ulama adalah bersumber baik pada metode pencarian hukumnya dan juga pada bagian filosofi hukum Islam mereka. Bagi ulama yang percaya dengan stagnannya hukum Islam akan menolak perkembangan hukum dalam fiqih jihad dan akan menggunakan metode pencarian hukum yang tradisional pula. Sedangkan bagi ulama yang lebih progresif, mereka akan memperhatikan konteks keadaan di mana peraturan tentang jihad muncul untuk mencari hukum yang baru yang lebih sesuai dengan keadaan saat ini.

B. Saran-Saran

1. Diskursus tentang jihad seharusnya dapat lebih dikembangkan dan dipopulerkan lagi. Hal ini dikarenakan krusialnya topik ini dan selain itu juga karena jihad adalah topik di mana kita dapat melihat perkembangan dan perubahan hukum yang ada dalam sejarah Islam dengan lebih jelas. Hal ini adalah bagian dari usaha untuk dapat membumikan hukum Islam tanpa dengan menjadi *apologetic* atau radikal. Terutama perlu difokuskan pada *ushul fiqih* dan juga sejarah perkembangan hukum Islam.
2. Sebagai penduduk Indonesia yang relatif lebih rukun dan berwawasan Bhineka Tunggal Ika, Indonesian harus dapat maju dengan lebih mantap ke garda depan dalam perdebatan tentang jihad dan hubungannya dengan terorisme dan perang

pertahanan. Terutama dalam pemberantasan radikalisme teroris dan juga dalam perjuangan dan perlawanan masyarakat yang teropresi di dunia.

DAFTAR PUSTAKA

I. Kelompok Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CC J-ART, 2004.

II. Kelompok Al-Hadis/Ilmu Hadis

Bukhōriy, Abū 'Abdillāh Muhammad ibn Ismā'il al-, *al-Jāmi al-Ṣaḥīḥ*, Kairo: Maktabah al-Salfiyyah, t.t.

Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahid*, Beirut : Dar al- Fikr, t.t.

Anas, Mālik Ibnu, *Al-Muwatta'*, Beirut: Dār al-Ilmiyyah, t. t.

III. Kelompok Fiqh/ Islam

Azzam, Abdullah, *Perang Jihad di Jaman Modern*, terj. H. Salim Basyaril, Jakarta:Gema Insani Press, 1994.

Bonner, Michael, *Jihad in Islamic History Doctrines and Practice*, (New Jersey: Princeton University Press, 2006)

Cook, David, *Understanding Jihad*, California: University of California Press, 2005.

Firestone, Reuven, *Jihad The Origin of Holy War in Islam*, New York: Oxford University Pers, Inc., 2002.

Fregosi, Paul, *Jihad in the West, Muslim Conquest from the 7th to the 21st Centuries*, New York: Promotheus Books, 1998

Kamali, Mohammad Hashim, *Principles of Islamic Jurisprudenc*, Cambridge:

The Islamic Text Society, 1991.

Mubaraq, Zulfi, *Tafsir Jihad Menyingkap Tabir Fenomena Terorisme Global*,

Malang: UIN Maliki Press, 2011.

Qutb, Sayyid, *Manjah Hubungan Sosial Muslim Non Muslim*, Jakarta: Gema

Insani Press, 2005.

Peters, Rudolph, *Jihad in Classical and Modern Islam*, New Jersey: Markus

Wiener, 1995.

Roshandel, Jalil dan Sharon Chada, *Jihad and International Security*, New

York: Palgrave Macmillan, 2006.

Syāfī, Imām al-, *Al-Umm: Jilid IV*, terj. Prof. TK. H. Ismail Yukub SH. MA.,

Jakarta Selatan: CV Faizan, 1995.

Taimiyyah, Ibnu, *al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Iṣlāḥ al- Rā'iy wa al-Ra'iyyah*,

Beirut: Dār al-Afāq al-Jadīdah, t.t.

Zaman, M. Raquibuz, *Islamic Political Ethics*, New Jersey: Princeton University

Press, 2002.

Zuhaili, Wahhab, *Fiqh Imam Asy-Syaff'i*, cet ke-2, Jakarta Timur: Almahira, 2012.

IV. Kelompok Hukum

Ambarwati dkk, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan*

Internasional, Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Christopher, Paul, *The Etchics of War and Peace An Introduction to Legal and*

Moral Issues, New Jersey: Prentice Hall, 1999.

Detter, Ingrid, *The law of War*, Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

Fleck, Dieter, *The Handbook of International Humanitarian Law*, Oxford: Oxford University Press, 2009.

Freeman, Michael, *Human Rights An Interdisciplinary Approach*, Massachussets: Blackwell Publisher Inc, 2002.

Kalshoven, Frits, Liesbeth Zegveld, *Constraint on the Waging of War An Introduction to International Humanitarian Law*, Cambridge: University Press, 2001.

Malnczuk, Peter, *Akehurst's Modern Introduction to International Law Seventh Revised Edition*, New York: Routledge, 1997.

Said, Edward, *Culture and Imperialism*, New York: Vintage Books, 1991

V. Jurnal

Murphy, Sean, *Jus ad Bellum, Values, and The Contemporary Structure of International Law*, *Journal of Religious Ethics*, no. 20, 2013.

---, *Protean Jus AD Bellum*, *Berkeley Journal of International Law*, no. 27 issue 1 2009s.

VI. Kelompok Perundang-undangan

Piagam PBB

Konvensi Jenewa Pertama yaitu Konvensi Mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Darat Konvensi

Konvensi Jenewa Kedua Tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka, Sakit, dan Karam di Laut

Konvensi Jenewa Ketiga Mengenai Perlakuan Terhadap Tawanan Perang
Konvensi Jenewa Keempat Mengenai Perlindungan Terhadap Orang Sipil di Masa Perang

Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa

Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa

Protokol Tambahan III Konvensi Jenewa

Protokol Gas Jenewa 1925 (Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare)

Konvensi Senjata Biologis 1972

Konvensi Tentang Senjata-Senjata Konvensional 1980 (Convention on Certain Conventional Weapons

Konvensi Den Hague IV

VII. Lain-lain

International Humanitarian Law Answer to Your Question, Geneva: International Committee of the Red Cross, 2002.

VIII. Kelompok Website

<http://edition.cnn.com/2013/10/06/world/africa/africa-embassy-bombings-fast-facts/> diakses pada tanggal 2 Desember 2012.

http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/september/11/newsid_2514000/2514627.stm diakses pada tanggal 2 Desember 2012.

http://en.wikipedia.org/wiki/1992_attack_on_Israeli_embassy_in_Buenos_Aires. Di akses pada tanggal 5 Desember 2013.

http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_Jihad_Organization. Di akses pada tanggal 5 Desember 2013.

http://www.washingtonpost.com/wpsrv/nation/specials/attacked/transcripts/bushaddress_092001.html diakses pada tanggal 10 Desember 2013.

<http://www.icrc.org/eng/war-and-law/overview-war-and-law.htm>, diakses 4 Mei 2014.

<http://www.icrc.org/eng/war-and-law/ihl-other-legal-regimes/jus-in-bello-jus-ad-bellum/overview-jus-ad-bellum-jus-in-bello.htm>, diakses 2 Mei 2014.

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm	Foot Note	Terjemahan
BAB I			
1	16	27	Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendir, (kepada mereka) malaikat bertanya : "Dalam keadaan bagaimana kamu ini?." Mereka menjawab: "Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah)." Para malaikat berkata: "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?." Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali,
2	17	28	Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah ^[117] itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir
BAB II			
3	28	6	Dan sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan sabar; sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
4	29	9	
5	29	10	Karena itu hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah.

			Barangsiapa yang berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan maka kelak akan Kami berikan kepadanya pahala yang besar.
6	30	12	Apakah (orang-orang) yang memberi minuman orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidilharam kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah?
7	31	14	
8	31	15	Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!."
9	32	16	Apakah (orang-orang) yang memberi minuman orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidilharam kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim
10	33	18	dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.
11	35	21	Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW berkata kepada Jarir Ibn Abdullah Al-Bajali "Maukah engkau membuatku beristirahat dari gangguan <i>Dzul Khalashah?</i> ". Yaitu sebuah rumah di Khats'am yang diberi nama Ka'bah Al-Yamaniyah, Jarir pun berangkat bersama 150 penunggang kuda yang berasal dari Ahmas. Mereka adalah orang-orang yang mahir mengendarai kuda. Dia berkata "Adapun aku tidak mahir menunggang kuda. Maka beliau memukul dadaku seraya berkata "Ya Allah, jadikanlah dia penunggang yang mahir dan berikan petunjuk yang mendapatkan petunjuk". Dia berangkat ke tempat itu dan menghancurkan dan membakarnya kemudian mengirim utusan kepada Rasulullah untuk mengabarkan kepada beliau. Utusan Jarir berkata, "Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, au tidak mendatangimu hingga aku meninggalkannya. Seakan-akan ia unta yang bercap atau berkudis. Dia berkat, "Nabi memohon keberkahan untuk

			kuda-kuda Ahmas dan kaum laki-lakinya sebanyak lima kali.” ¹
12	35	22	
13	36	25	Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Bukhori dan Muslim, ketika beliau melewati “Abwa atau Waddan, beliau ditanya apakah diizinkan menyerang penduduk kampung tersebut dari kelompok musyrik pada waktu malam, yang mungkin bisa membahayakan wanita dan anak-anak? Beliau menjawab “Mereka (wanita dan anak-anak) adalah termasuk orang yang musyrikin
14	37	27	Dari Umar RA, dia berkata, “Pernah seorang wanita ditemukan dalam keadaan terbunuh dalam sebagian peperangan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW melarang membunuh wanita dan anak-anak.”
15	39	33	Dari Anas bin Malik RA, bahwa Rasulullah SAW masuk pada perang pembebasan kota Makkah dan di atas kepalanya terdapat topi baja. Ketika beliau melepaskannya, seseorang datang berkata, “Sesungguhnya Ibnu Khattal bergantung di tirai Ka’bah.” Beliau SAW berkata, “Bunuhlah ia.”
16	39	34	Dari Abi Musa RA, dia berkata, “Bebaskanlah yang tertekan-yakni tawanan-, berilah makan orang yang kelaparan, dan jenguklah orang yang sakit.
17	40	35	Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanolah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir. Demikianlah apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Dan orang-orang yang syahid pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiaakan amal mereka.
18	42	38	Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi

¹ Fathul Bari 3020 hal475

			peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya
19	43	39	Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan ketahuilah, bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertaqwa
20	44	41	Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Bukhori dan Muslim, ketika beliau melewati “Abwa atau Waddan, beliau ditanya apakah diizinkan menyerang penduduk kampung tersebut dari kelompok musyrik pada waktu malam, yang mungkin bisa membahayakan wanita dan anak-anak? Beliau menjawab “Mereka (wanita dan anak-anak) adalah termasuk orang yang musyrikin
21	45	47	Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah ^[638] dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.
22	46	49	Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang.
22	46	51	Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim
23	47	52	Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas
24	47	53	Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah ^[117] itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di

			tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.
BAB III			
25	52	10	Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya
26	53	11	(yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah." Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah.
27	56	14	Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan ^[631] . Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang
28	56	15	Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim
29	57	17	Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Quran dengan jihad yang besar
30	60	20	Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk
31	60	21	Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka

			menemui kekerasan daripadamu, dan ketahuilah, bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertaqwa.
32	61	22	Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat
	62	23	Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya
	62	24	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
	75	47	Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas
	76	49	Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas
	78	53	Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Bukhori dan Muslim, ketika beliau melewati “Abwa atau Waddan, beliau ditanya apakah diizinkan menyerang penduduk kampung tersebut dari kelompok musyrik pada waktu malam, yang mungkin bisa membahayakan wanita dan anak-anak? Beliau menjawab “Mereka (wanita dan anak-anak) adalah termasuk orang yang musyrikin
	79	54	Dari Umar RA, dia berkata, “Pernah seorang wanita ditemukan dalam keadaan terbunuh dalam sebagian peperangan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW melarang membunuh wanita dan anak-anak.”
	81	57	Dari Rubayyi’ Binti Mu’awwidz, dia berkata, “Kamu bersama Nabi SAW memberi minum, mengobati orang-orang yang terluka dan mengembalikan yang terbunuh ke Madinah

	84	62	Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan
	90	77	Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan
BAB IV			
	93	3	Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui
	93	4	Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil
	93	5	Di antara manusia ada yang mengatakan: "Kami beriman kepada Allah dan Hari kemudian," pada hal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman
	101	18	Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

Imam Asy-Syafi'i

Imam Syāfi'ī adalah pendiri mazhab Syāfi'ī yang mempunyai nama lengkap Muhammad bin Idris asy-Syāfi'ī al-Quraissy. Beliau lahir di Gazza Palestina Selatan, bertepatan dengan tahun wafatnya Imam Abū Hanīfah yakni tahun 150H/769 M. Beliau meninggalkan Makkah untuk mempelajari ilmu fiqh dari Imam Mālik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau kemudian pergi ke Iraq untuk mempelajari fiqh dari muridnya Abū Hanīfah. Pada tahun 198 H, beliau pergi ke negeri Mesir dan mengajar di masjid Amru bin 'Aṣ. Imam Syāfi'ī terkenal dengan *qaul qadīm* (fatwa-fatwa di Baghdad) dan *qaul jadīd* (fatwa-fatwa di Mesir). Beliau meninggal pada tahun 204H/820 M. Di antara karya-karya beliau yang terkenal adalah ar-Risalah (ushul fiqh) dan al-Umm (Fiqh).

Imam Mālik

Imam Mālik adalah pendiri mazhab Maliki yang anti tesis dari Imam Abu Hanifah. Sebab itu Beliau cenderung berpikir tradisional, dan kurang menggunakan rasio di dalam corak pemikiran hukumnya. Beliau diberi gelar sebagai fiqh yang tradisional. Sikap Beliau ini disebabkan karena Beliau adalah keturunan Arab yang bertempat tinggal di Hijazz. Daerah ini merupakan pusat perbendaharaan hadis Nabi SAW., sehingga setiap ada masalah, Beliau dengan mudah menjawab dengan menggunakan sumber hadis Nabi SAW. Karya Beliau yang paling terkenal adalah kitab *al-Muwatta'*. Guru yang mempengaruhi pemikiran Imam Mālik diantaranya adalah Nāfi' ibn Mu'ain tentang bacaan al-Qur'an dan Nāfi' Maulana tentang Hadis. Beliau lahir pada tahun 93 H dan wafat tahun 179 H.

I

**GENEVA CONVENTION
FOR THE AMELIORATION OF THE
CONDITION OF THE WOUNDED AND SICK
IN ARMED FORCES IN THE FIELD
OF 12 AUGUST 1949**

CHAPTER I

General Provisions

Article 1	Respect for the Convention	36
Article 2	Application of the Convention	36
Article 3	Conflicts not of an international character	36
Article 4	Application by neutral Powers.....	37
Article 5	Duration of application	37
Article 6	Special agreements.....	37
Article 7	Non-renunciation of rights.....	38
Article 8	Protecting Powers	38
Article 9	Activities of the International Committee of the Red Cross	38
Article 10	Substitutes for Protecting Powers	38
Article 11	Conciliation procedure	39

CHAPTER II

Wounded and Sick

Article 12	Protection and care.....	40
Article 13	Protected persons.....	40
Article 14	Status	41
Article 15	Search for casualties. Evacuation.....	41
Article 16	Recording and forwarding of information.....	41
Article 17	Prescriptions regarding the dead. Graves Registration Service	42
Article 18	Role of the population	43

CHAPTER III

Medical Units and Establishments

Article 19	Protection.....	43
Article 20	Protection of hospital ships	44
Article 21	Discontinuance of protection of medical establishments and units.....	44
Article 22	Conditions not depriving medical units and establishments of protection	44
Article 23	Hospital zones and localities	44

CHAPTER IV

Personnel

Article 24	Protection of permanent personnel	45
Article 25	Protection of auxiliary personnel	45
Article 26	Personnel of aid societies.....	45
Article 27	Societies of neutral countries	46
Article 28	Retained personnel	46
Article 29	Status of auxiliary personnel	47
Article 30	Return of medical and religious personnel.....	47
Article 31	Selection of personnel for return.....	47
Article 32	Return of personnel belonging to neutral countries.....	47

CHAPTER V

Buildings and Material

Article 33	Buildings and stores.....	48
Article 34	Property of aid societies	48

CHAPTER VI

Medical Transports

Article 35	Protection.....	49
Article 36	Medical aircraft	49
Article 37	Flight over neutral countries. Landing of wounded.....	49

CHAPTER VII

The Distinctive Emblem

Article 38	Emblem of the Convention.....	50
Article 39	Use of the emblem	50
Article 40	Identification of medical and religious personnel	50
Article 41	Identification of auxiliary personnel	51
Article 42	Marking of medical units and establishments	51
Article 43	Marking of units of neutral countries	52
Article 44	Restrictions in the use of the emblem. Exceptions	52

CHAPTER VIII

Execution of the Convention

Article 45	Detailed execution. Unforeseen cases.....	53
Article 46	Prohibition of reprisals	53
Article 47	Dissemination of the Convention	53
Article 48	Translations. Rules of application	53

CHAPTER IX

Repression of Abuses and Infractions

Article 49	Penal sanctions: I. General observations.....	53
Article 50	II. Grave breaches.....	54
Article 51	III. Responsibilities of the Contracting Parties	54
Article 52	Enquiry procedure.....	54
Article 53	Misuse of the emblem.....	54
Article 54	Prevention of misuse.....	55

Final provisions

Article 55	Languages.....	55
Article 56	Signature	55
Article 57	Ratification	55
Article 58	Coming into force	56
Article 59	Relation to previous Conventions	56
Article 60	Accession	56
Article 61	Notification of accessions	56
Article 62	Immediate effect	56
Article 63	Denunciation	56
Article 64	Registration with the United Nations	57

ANNEX I

Draft Agreement Relating to Hospital Zones and Localities.....	58
--	----

ANNEX II

Identity Card for Members of Medical and Religious Personnel attached to the Armed Forces	60
--	----

A. GENEVA CONVENTIONS AND ADDITIONAL PROTOCOLS

I

GENEVA CONVENTION FOR THE AMELIORATION OF THE CONDITION OF THE WOUNDED AND SICK IN ARMED FORCES IN THE FIELD OF 12 AUGUST 1949

CHAPTER I

General Provisions

*Respect
for the
Convention¹*

ARTICLE 1. — The High Contracting Parties undertake to respect and to ensure respect for the present Convention in all circumstances.

*Application
of the
Convention*

ART 2. — In addition to the provisions which shall be implemented in peacetime, the present Convention shall apply to all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them.

The Convention shall also apply to all cases of partial or total occupation of the territory of a High Contracting Party, even if the said occupation meets with no armed resistance.

Although one of the Powers in conflict may not be a party to the present Convention, the Powers who are parties thereto shall remain bound by it in their mutual relations. They shall furthermore be bound by the Convention in relation to the said Power, if the latter accepts and applies the provisions thereof.

*Conflicts not
of an
international
character*

ART. 3. — In the case of armed conflict not of an international character occurring in the territory of one of the High Contracting Parties, each Party to the conflict shall be bound to apply, as a minimum, the following provisions:

- 1) Persons taking no active part in the hostilities, including members of armed forces who have laid down their arms and those

¹ The marginal notes or titles of articles have been drafted by the Swiss Federal Department of Foreign Affairs.

placed *hors de combat* by sickness, wounds, detention, or any other cause, shall in all circumstances be treated humanely, without any adverse distinction founded on race, colour, religion or faith, sex, birth or wealth, or any other similar criteria.

To this end, the following acts are and shall remain prohibited at any time and in any place whatsoever with respect to the above-mentioned persons:

- a) violence to life and person, in particular murder of all kinds, mutilation, cruel treatment and torture;
- b) taking of hostages;
- c) outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment;
- d) the passing of sentences and the carrying out of executions without previous judgment pronounced by a regularly constituted court, affording all the judicial guarantees which are recognized as indispensable by civilized peoples.

2) The wounded and sick shall be collected and cared for.

An impartial humanitarian body, such as the International Committee of the Red Cross, may offer its services to the Parties to the conflict.

The Parties to the conflict should further endeavour to bring into force, by means of special agreements, all or part of the other provisions of the present Convention.

The application of the preceding provisions shall not affect the legal status of the Parties to the conflict.

ART. 4. — Neutral Powers shall apply by analogy the provisions of the present Convention to the wounded and sick, and to members of the medical personnel and to chaplains of the armed forces of the Parties to the conflict, received or interned in their territory, as well as to dead persons found.

*Application
by neutral
Powers*

ART. 5. — For the protected persons who have fallen into the hands of the enemy, the present Convention shall apply until their final repatriation.

*Duration of
application*

ART. 6. — In addition to the agreements expressly provided for in Articles 10, 15, 23, 28, 31, 36, 37 and 52, the High Contracting Parties may conclude other special agreements for all matters concerning which they may deem it suitable to make separate provision. No special agreement shall adversely affect the situation of the wounded and sick, of members of the medical personnel or of

*Special
agreements*

chaplains, as defined by the present Convention, nor restrict the rights which it confers upon them.

Wounded and sick, as well as medical personnel and chaplains, shall continue to have the benefit of such agreements as long as the Convention is applicable to them, except where express provisions to the contrary are contained in the aforesaid or in subsequent agreements, or where more favourable measures have been taken with regard to them by one or other of the Parties to the conflict.

*Non-
renunciation
of rights*

ART. 7. — Wounded and sick, as well as members of the medical personnel and chaplains, may in no circumstances renounce in part or in entirety the rights secured to them by the present Convention, and by the special agreements referred to in the foregoing Article, if such there be.

*Protecting
Powers*

ART. 8. — The present Convention shall be applied with the co-operation and under the scrutiny of the Protecting Powers whose duty it is to safeguard the interests of the Parties to the conflict. For this purpose, the Protecting Powers may appoint, apart from their diplomatic or consular staff, delegates from amongst their own nationals or the nationals of other neutral Powers. The said delegates shall be subject to the approval of the Power with which they are to carry out their duties.

The Parties to the conflict shall facilitate, to the greatest extent possible, the task of the representatives or delegates of the Protecting Powers.

The representatives or delegates of the Protecting Powers shall not in any case exceed their mission under the present Convention. They shall, in particular, take account of the imperative necessities of security of the State wherein they carry out their duties. Their activities shall only be restricted, as an exceptional and temporary measure, when this is rendered necessary by imperative military necessities.

*Activities
of the
International
Committee of
the Red Cross*

ART. 9. — The provisions of the present Convention constitute no obstacle to the humanitarian activities which the International Committee of the Red Cross or any other impartial humanitarian organization may, subject to the consent of the Parties to the conflict concerned, undertake for the protection of wounded and sick, medical personnel and chaplains, and for their relief.

*Substitutes for
Protecting
Powers*

ART. 10. — The High Contracting Parties may at any time agree to entrust to an organization which offers all guarantees of impartiality and efficacy the duties incumbent on the Protecting Powers by virtue of the present Convention.

When wounded and sick, or medical personnel and chaplains do not benefit or cease to benefit, no matter for what reason, by the activities of a Protecting Power or of an organization provided for in the first paragraph above, the Detaining Power shall request a neutral State, or such an organization, to undertake the functions performed under the present Convention by a Protecting Power designated by the Parties to a conflict.

If protection cannot be arranged accordingly, the Detaining Power shall request or shall accept, subject to the provisions of this Article, the offer of the services of a humanitarian organization, such as the International Committee of the Red Cross, to assume the humanitarian functions performed by Protecting Powers under the present Convention.

Any neutral Power, or any organization invited by the Power concerned or offering itself for these purposes, shall be required to act with a sense of responsibility towards the Party to the conflict on which persons protected by the present Convention depend, and shall be required to furnish sufficient assurances that it is in a position to undertake the appropriate functions and to discharge them impartially.

No derogation from the preceding provisions shall be made by special agreements between Powers one of which is restricted, even temporarily, in its freedom to negotiate with the other Power or its allies by reason of military events, more particularly where the whole, or a substantial part, of the territory of the said Power is occupied.

Whenever in the present Convention mention is made of a Protecting Power, such mention also applies to substitute organizations in the sense of the present Article.

ART. 11. — In cases where they deem it advisable in the interest of protected persons, particularly in cases of disagreement between the Parties to the conflict as to the application or interpretation of the provisions of the present Convention, the Protecting Powers shall lend their good offices with a view to settling the disagreement.

*Conciliation
procedure*

For this purpose, each of the Protecting Powers may, either at the invitation of one Party or on its own initiative, propose to the Parties to the conflict a meeting of their representatives, in particular of the authorities responsible for the wounded and sick, members of medical personnel and chaplains, possibly on neutral territory suitably chosen. The Parties to the conflict shall be bound to give effect to the proposals made to them for this purpose. The Protecting Powers may, if necessary, propose for approval by the Parties to the conflict a person belonging to a neutral Power or delegated by the International Committee of the Red Cross, who shall be invited to take part in such a meeting.

CHAPTER II

Wounded and Sick*Protection
and care*

ART. 12. — Members of the armed forces and other persons mentioned in the following Article, who are wounded or sick, shall be respected and protected in all circumstances.

They shall be treated humanely and cared for by the Party to the conflict in whose power they may be, without any adverse distinction founded on sex, race, nationality, religion, political opinions, or any other similar criteria. Any attempts upon their lives, or violence to their persons, shall be strictly prohibited; in particular, they shall not be murdered or exterminated, subjected to torture or to biological experiments; they shall not wilfully be left without medical assistance and care, nor shall conditions exposing them to contagion or infection be created.

Only urgent medical reasons will authorize priority in the order of treatment to be administered.

Women shall be treated with all consideration due to their sex.

The Party to the conflict which is compelled to abandon wounded or sick to the enemy shall, as far as military considerations permit, leave with them a part of its medical personnel and material to assist in their care.

*Protected
persons*

ART. 13. — The Present Convention shall apply to the wounded and sick belonging to the following categories:

- 1) Members of the armed forces of a Party to the conflict as well as members of militias or volunteer corps forming part of such armed forces.
- 2) Members of other militias and members of other volunteer corps, including those of organized resistance movements, belonging to a Party to the conflict and operating in or outside their own territory, even if this territory is occupied, provided that such militias or volunteer corps, including such organized resistance movements, fulfil the following conditions:
 - a) that of being commanded by a person responsible for his subordinates;
 - b) that of having a fixed distinctive sign recognizable at a distance;
 - c) that of carrying arms openly;
 - d) that of conducting their operations in accordance with the laws and customs of war.

- 3) Members of regular armed forces who profess allegiance to a Government or an authority not recognized by the Detaining Power.
- 4) Persons who accompany the armed forces without actually being members thereof, such as civilian members of military aircraft crews, war correspondents, supply contractors, members of labour units or of services responsible for the welfare of the armed forces, provided that they have received authorization from the armed forces which they accompany.
- 5) Members of crews including masters, pilots and apprentices of the merchant marine and the crews of civil aircraft of the Parties to the conflict, who do not benefit by more favourable treatment under any other provisions in international law.
- 6) Inhabitants of a non-occupied territory who, on the approach of the enemy, spontaneously take up arms to resist the invading forces, without having had time to form themselves into regular armed units, provided they carry arms openly and respect the laws and customs of war.

ART. 14. — Subject to the provisions of Article 12, the wounded and sick of a belligerent who fall into enemy hands shall be prisoners of war, and the provisions of international law concerning prisoners of war shall apply to them.

Status

ART. 15. — At all times, and particularly after an engagement, Parties to the conflict shall, without delay, take all possible measures to search for and collect the wounded and sick, to protect them against pillage and ill-treatment, to ensure their adequate care, and to search for the dead and prevent their being despoiled.

*Search for
casualties.
Evacuation*

Whenever circumstances permit, an armistice or a suspension of fire shall be arranged, or local arrangements made, to permit the removal, exchange and transport of the wounded left on the battlefield.

Likewise, local arrangements may be concluded between Parties to the conflict for the removal or exchange of wounded and sick from a besieged or encircled area, and for the passage of medical and religious personnel and equipment on their way to that area.

ART. 16. — Parties to the conflict shall record as soon as possible, in respect of each wounded, sick or dead person of the adverse Party falling into their hands, any particulars which may assist in his identification.

*Recording and
forwarding of
information*

These records should if possible include:

- a) designation of the Power on which he depends;
- b) army, regimental, personal or serial number;
- c) surname;
- d) first name or names;
- e) date of birth;
- f) any other particulars shown on his identity card or disc;
- g) date and place of capture or death;
- h) particulars concerning wounds or illness, or cause of death.

As soon as possible the above mentioned information shall be forwarded to the Information Bureau described in Article 122 of the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949, which shall transmit this information to the Power on which these persons depend through the intermediary of the Protecting Power and of the Central Prisoners of War Agency.

Parties to the conflict shall prepare and forward to each other through the same bureau, certificates of death or duly authenticated lists of the dead. They shall likewise collect and forward through the same bureau one half of a double identity disc, last wills or other documents of importance to the next of kin, money and in general all articles of an intrinsic or sentimental value, which are found on the dead. These articles, together with unidentified articles, shall be sent in sealed packets, accompanied by statements giving all particulars necessary for the identification of the deceased owners, as well as by a complete list of the contents of the parcel.

*Prescriptions
regarding the
dead. Graves
Registration
Service*

ART. 17. — Parties to the conflict shall ensure that burial or cremation of the dead, carried out individually as far as circumstances permit, is preceded by a careful examination, if possible by a medical examination, of the bodies, with a view to confirming death, establishing identity and enabling a report to be made. One half of the double identity disc, or the identity disc itself if it is a single disc, should remain on the body.

Bodies shall not be cremated except for imperative reasons of hygiene or for motives based on the religion of the deceased. In case of cremation, the circumstances and reasons for cremation shall be stated in detail in the death certificate or on the authenticated list of the dead.

They shall further ensure that the dead are honourably interred, if possible according to the rites of the religion to which they belonged, that their graves are respected, grouped if possible according to the nationality of the deceased, properly maintained and marked so that they may always be found. For this purpose,

they shall organize at the commencement of hostilities an Official Graves Registration Service, to allow subsequent exhumations and to ensure the identification of bodies, whatever the site of the graves, and the possible transportation to the home country. These provisions shall likewise apply to the ashes, which shall be kept by the Graves Registration Service until proper disposal thereof in accordance with the wishes of the home country.

As soon as circumstances permit, and at latest at the end of hostilities, these Services shall exchange, through the Information Bureau mentioned in the second paragraph of Article 16, lists showing the exact location and markings of the graves together with particulars of the dead interred therein.

ART. 18. — The military authorities may appeal to the charity of the inhabitants voluntarily to collect and care for, under their direction, the wounded and sick, granting persons who have responded to this appeal the necessary protection and facilities. Should the adverse Party take or retake control of the area, it shall likewise grant these persons the same protection and the same facilities.

*Role of the
population*

The military authorities shall permit the inhabitants and relief societies, even in invaded or occupied areas, spontaneously to collect and care for wounded or sick of whatever nationality. The civilian population shall respect these wounded and sick, and in particular abstain from offering them violence.

No one may ever be molested or convicted for having nursed the wounded or sick.

The provisions of the present Article do not relieve the occupying Power of its obligation to give both physical and moral care to the wounded and sick.

CHAPTER III

Medical Units and Establishments

ART. 19. — Fixed establishments and mobile medical units of the Medical Service may in no circumstances be attacked, but shall at all times be respected and protected by the Parties to the conflict. Should they fall into the hands of the adverse Party, their personnel shall be free to pursue their duties, as long as the capturing Power has not itself ensured the necessary care of the wounded and sick found in such establishments and units.

Protection

The responsible authorities shall ensure that the said medical establishments and units are, as far as possible, situated in such a manner that attacks against military objectives cannot imperil their safety.

*Protection
of hospital
ships*

ART. 20. — Hospital ships entitled to the protection of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea of August 12, 1949, shall not be attacked from the land.

*Discontinu-
ance of
protection of
medical
establish-
ments and
units*

ART. 21. — The protection to which fixed establishments and mobile medical units of the Medical Service are entitled shall not cease unless they are used to commit, outside their humanitarian duties, acts harmful to the enemy. Protection may, however, cease only after a due warning has been given, naming, in all appropriate cases, a reasonable time limit and after such warning has remained unheeded.

*Conditions
not depriving
medical units
and establish-
ments of
protection*

ART. 22. — The following conditions shall not be considered as depriving a medical unit or establishment of the protection guaranteed by Article 19:

1. That the personnel of the unit or establishment are armed, and that they use the arms in their own defence, or in that of the wounded and sick in their charge.
2. That in the absence of armed orderlies, the unit or establishment is protected by a picket or by sentries or by an escort.
3. That small arms and ammunition taken from the wounded and sick and not yet handed to the proper service, are found in the unit or establishment.
4. That personnel and material of the veterinary service are found in the unit or establishment, without forming an integral part thereof.
5. That the humanitarian activities of medical units and establishments or of their personnel extend to the care of civilian wounded or sick.

*Hospital zones
and localities*

ART. 23. — In time of peace, the High Contracting Parties and, after the outbreak of hostilities, the Parties to the conflict, may establish in their own territory and, if the need arises, in occupied areas, hospital zones and localities so organized as to protect the wounded and sick from the effects of war, as well as the personnel entrusted with the organization and administration of these zones and localities and with the care of the persons therein assembled.

Upon the outbreak and during the course of hostilities, the Parties concerned may conclude agreements on mutual recognition of the hospital zones and localities they have created. They may for this purpose implement the provisions of the Draft Agreement annexed to the present Convention, with such amendments as they may consider necessary.

The Protecting Powers and the International Committee of the Red Cross are invited to lend their good offices in order to facilitate the institution and recognition of these hospital zones and localities.

CHAPTER IV

Personnel

ART. 24. — Medical personnel exclusively engaged in the search for, or the collection, transport or treatment of the wounded or sick, or in the prevention of disease, staff exclusively engaged in the administration of medical units and establishments, as well as chaplains attached to the armed forces, shall be respected and protected in all circumstances.

*Protection of
permanent
personnel*

ART. 25. — Members of the armed forces specially trained for employment, should the need arise, as hospital orderlies, nurses or auxiliary stretcher-bearers, in the search for or the collection, transport or treatment of the wounded and sick shall likewise be respected and protected if they are carrying out these duties at the time when they come into contact with the enemy or fall into his hands.

*Protection of
auxiliary
personnel*

ART. 26. — The staff of National Red Cross Societies and that of other Voluntary Aid Societies, duly recognized and authorized by their Governments, who may be employed on the same duties as the personnel named in Article 24, are placed on the same footing as the personnel named in the said Article, provided that the staff of such societies are subject to military laws and regulations.

*Personnel of
aid societies*

Each High Contracting Party shall notify to the other, either in time of peace or at the commencement of or during hostilities, but in any case before actually employing them, the names of the societies which it has authorized, under its responsibility, to render assistance to the regular medical service of its armed forces.

*Societies of
neutral
countries*

ART. 27. — A recognized Society of a neutral country can only lend the assistance of its medical personnel and units to a Party to the conflict with the previous consent of its own Government and the authorization of the Party to the conflict concerned. That personnel and those units shall be placed under the control of that Party to the conflict.

The neutral Government shall notify this consent to the adversary of the State which accepts such assistance. The Party to the conflict who accepts such assistance is bound to notify the adverse Party thereof before making any use of it.

In no circumstances shall this assistance be considered as interference in the conflict.

The members of the personnel named in the first paragraph shall be duly furnished with the identity cards provided for in Article 40 before leaving the neutral country to which they belong.

*Retained
personnel*

ART. 28. — Personnel designated in Articles 24 and 26 who fall into the hands of the adverse Party, shall be retained only in so far as the state of health, the spiritual needs and the number of prisoners of war require.

Personnel thus retained shall not be deemed prisoners of war. Nevertheless they shall at least benefit by all the provisions of the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949. Within the framework of the military laws and regulations of the Detaining Power, and under the authority of its competent service, they shall continue to carry out, in accordance with their professional ethics, their medical and spiritual duties on behalf of prisoners of war, preferably those of the armed forces to which they themselves belong. They shall further enjoy the following facilities for carrying out their medical or spiritual duties:

- a) They shall be authorized to visit periodically the prisoners of war in labour units or hospitals outside the camp. The Detaining Power shall put at their disposal the means of transport required.
- b) In each camp the senior medical officer of the highest rank shall be responsible to the military authorities of the camp for the professional activity of the retained medical personnel. For this purpose, from the outbreak of hostilities, the Parties to the conflict shall agree regarding the corresponding seniority of the ranks of their medical personnel, including those of the societies designated in Article 26. In all questions arising out of their duties, this medical officer, and the chaplains, shall have direct access to the military and medical authorities of the camp who shall grant them the facilities they may require for correspondence relating to these questions.

- c) Although retained personnel in a camp shall be subject to its internal discipline, they shall not, however, be required to perform any work outside their medical or religious duties.

During hostilities the Parties to the conflict shall make arrangements for relieving where possible retained personnel, and shall settle the procedure of such relief.

None of the preceding provisions shall relieve the Detaining Power of the obligations imposed upon it with regard to the medical and spiritual welfare of the prisoners of war.

ART. 29. — Members of the personnel designated in Article 25 who have fallen into the hands of the enemy, shall be prisoners of war, but shall be employed on their medical duties in so far as the need arises.

*Status of
auxiliary
personnel*

ART. 30. — Personnel whose retention is not indispensable by virtue of the provisions of Article 28 shall be returned to the Party to the conflict to whom they belong, as soon as a road is open for their return and military requirements permit.

*Return of
medical and
religious
personnel*

Pending their return, they shall not be deemed prisoners of war. Nevertheless they shall at least benefit by all the provisions of the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949. They shall continue to fulfil their duties under the orders of the adverse Party and shall preferably be engaged in the care of the wounded and sick of the Party to the conflict to which they themselves belong.

On their departure, they shall take with them the effects, personal belongings, valuables and instruments belonging to them.

ART. 31. — The selection of personnel for return under Article 30 shall be made irrespective of any consideration of race, religion or political opinion, but preferably according to the chronological order of their capture and their state of health.

*Selection of
personnel for
return*

As from the outbreak of hostilities, Parties to the conflict may determine by special agreement the percentage of personnel to be retained, in proportion to the number of prisoners and the distribution of the said personnel in the camps.

ART. 32. — Persons designated in Article 27 who have fallen into the hands of the adverse Party may not be detained.

Unless otherwise agreed, they shall have permission to return to their country, or if this is not possible, to the territory of the Party to the conflict in whose service they were, as soon as a route for their return is open and military considerations permit.

*Return of
personnel
belonging to
neutral
countries*

Pending their release, they shall continue their work under the direction of the adverse Party; they shall preferably be engaged in the care of the wounded and sick of the Party to the conflict in whose service they were.

On their departure, they shall take with them their effects, personal articles and valuables and the instruments, arms and if possible the means of transport belonging to them.

The Parties to the conflict shall secure to this personnel, while in their power, the same food, lodging, allowances and pay as are granted to the corresponding personnel of their armed forces. The food shall in any case be sufficient as regards quantity, quality and variety to keep the said personnel in a normal state of health.

CHAPTER V

Buildings and Material

Buildings and stores

ART. 33. — The material of mobile medical units of the armed forces which fall into the hands of the enemy, shall be reserved for the care of wounded and sick.

The buildings, material and stores of fixed medical establishments of the armed forces shall remain subject to the laws of war, but may not be diverted from that purpose as long as they are required for the care of wounded and sick. Nevertheless, the commanders of forces in the field may make use of them, in case of urgent military necessity, provided that they make previous arrangements for the welfare of the wounded and sick who are nursed in them.

The material and stores defined in the present Article shall not be intentionally destroyed.

Property of aid societies

ART. 34. — The real and personal property of aid societies which are admitted to the privileges of the Convention shall be regarded as private property.

The right of requisition recognized for belligerents by the laws and customs of war shall not be exercised except in case of urgent necessity, and only after the welfare of the wounded and sick has been ensured.

CHAPTER VI

Medical Transports

ART. 35. — Transports of wounded and sick or of medical equipment shall be respected and protected in the same way as mobile medical units.

Protection

Should such transports or vehicles fall into the hands of the adverse Party, they shall be subject to the laws of war, on condition that the Party to the conflict who captures them shall in all cases ensure the care of the wounded and sick they contain.

The civilian personnel and all means of transport obtained by requisition shall be subject to the general rules of international law.

ART. 36. — Medical aircraft, that is to say, aircraft exclusively employed for the removal of wounded and sick and for the transport of medical personnel and equipment, shall not be attacked, but shall be respected by the belligerents, while flying at heights, times and on routes specifically agreed upon between the belligerents concerned.

*Medical
aircraft*

They shall bear, clearly marked, the distinctive emblem prescribed in Article 38, together with their national colours, on their lower, upper and lateral surfaces. They shall be provided with any other markings or means of identification that may be agreed upon between the belligerents upon the outbreak or during the course of hostilities.

Unless agreed otherwise, flights over enemy or enemy-occupied territory are prohibited.

Medical aircraft shall obey every summons to land. In the event of a landing thus imposed, the aircraft with its occupants may continue its flight after examination, if any.

In the event of an involuntary landing in enemy or enemy-occupied territory, the wounded and sick, as well as the crew of the aircraft shall be prisoners of war. The medical personnel shall be treated according to Article 24 and the Articles following.

ART. 37. — Subject to the provisions of the second paragraph, medical aircraft of Parties to the conflict may fly over the territory of neutral Powers, land on it in case of necessity, or use it as a port of call. They shall give the neutral Powers previous notice of their passage over the said territory and obey all summons to alight, on land or water. They will be immune from attack only when flying on routes, at heights and at times specifically agreed upon between the Parties to the conflict and the neutral Power concerned.

*Flight over
neutral
countries.
Landing of
wounded*

The neutral Powers may, however, place conditions or restrictions on the passage or landing of medical aircraft on their territory. Such possible conditions or restrictions shall be applied equally to all Parties to the conflict.

Unless agreed otherwise between the neutral Power and the Parties to the conflict, the wounded and sick who are disembarked, with the consent of the local authorities, on neutral territory by medical aircraft, shall be detained by the neutral Power, where so required by international law, in such a manner that they cannot again take part in operations of war. The cost of their accommodation and internment shall be borne by the Power on which they depend.

CHAPTER VII

The Distinctive Emblem

Emblem of the Convention

ART. 38. — As a compliment to Switzerland, the heraldic emblem of the red cross on a white ground, formed by reversing the Federal colours, is retained as the emblem and distinctive sign of the Medical Service of armed forces.

Nevertheless, in the case of countries which already use as emblem, in place of the red cross, the red crescent or the red lion and sun¹ on a white ground, those emblems are also recognized by the terms of the present Convention.

Use of the emblem

ART. 39. — Under the direction of the competent military authority, the emblem shall be displayed on the flags, armlets and on all equipment employed in the Medical Service.

Identification of medical and religious personnel

ART. 40. — The personnel designated in Article 24 and in Articles 26 and 27 shall wear, affixed to the left arm, a water-resistant armlet bearing the distinctive emblem, issued and stamped by the military authority.

Such personnel, in addition to wearing the identity disc mentioned in Article 16, shall also carry a special identity card bearing the

¹ The Government of Iran, the only country using the red lion and sun emblem on a white ground, advised Switzerland, depositary State of the Geneva Conventions, on 4 September 1980, of the adoption of the red crescent in lieu and place of its former emblem. This was duly communicated by the depositary on 20 October 1980 to the States party to the Geneva Conventions.

distinctive emblem. This card shall be water-resistant and of such size that it can be carried in the pocket. It shall be worded in the national language, shall mention at least the surname and first names, the date of birth, the rank and the service number of the bearer, and shall state in what capacity he is entitled to the protection of the present Convention. The card shall bear the photograph of the owner and also either his signature or his finger-prints or both. It shall be embossed with the stamp of the military authority.

The identity card shall be uniform throughout the same armed forces and, as far as possible, of a similar type in the armed forces of the High Contracting Parties. The Parties to the conflict may be guided by the model which is annexed, by way of example, to the present Convention. They shall inform each other, at the outbreak of hostilities, of the model they are using. Identity cards should be made out, if possible, at least in duplicate, one copy being kept by the home country.

In no circumstances may the said personnel be deprived of their insignia or identity cards nor of the right to wear the armlet. In case of loss, they shall be entitled to receive duplicates of the cards and to have the insignia replaced.

ART. 41. — The personnel designated in Article 25 shall wear, but only while carrying out medical duties, a white armlet bearing in its centre the distinctive sign in miniature; the armlet shall be issued and stamped by the military authority.

*Identification
of auxiliary
personnel*

Military identity documents to be carried by this type of personnel shall specify what special training they have received, the temporary character of the duties they are engaged upon, and their authority for wearing the armlet.

ART. 42. — The distinctive flag of the Convention shall be hoisted only over such medical units and establishments as are entitled to be respected under the Convention, and only with the consent of the military authorities.

*Marking of
medical units
and
establish-
ments*

In mobile units, as in fixed establishments, it may be accompanied by the national flag of the Party to the conflict to which the unit or establishment belongs.

Nevertheless, medical units which have fallen into the hands of the enemy shall not fly any flag other than that of the Convention.

Parties to the conflict shall take the necessary steps, in so far as military considerations permit, to make the distinctive emblems indicating medical units and establishments clearly visible to the enemy land, air or naval forces, in order to obviate the possibility of any hostile action.

*Marking of
units of
neutral
countries*

ART. 43. — The medical units belonging to neutral countries, which may have been authorized to lend their services to a belligerent under the conditions laid down in Article 27, shall fly, along with the flag of the Convention, the national flag of that belligerent, wherever the latter makes use of the faculty conferred on him by Article 42.

Subject to orders to the contrary by the responsible military authorities, they may, on all occasions, fly their national flag, even if they fall into the hands of the adverse Party.

*Restrictions
in the use of
the emblem.
Exceptions*

ART. 44. — With the exception of the cases mentioned in the following paragraphs of the present Article, the emblem of the red cross on a white ground and the words “Red Cross”, or “Geneva Cross” may not be employed, either in time of peace or in time of war, except to indicate or to protect the medical units and establishments, the personnel and material protected by the present Convention and other Conventions dealing with similar matters. The same shall apply to the emblems mentioned in Article 38, second paragraph, in respect of the countries which use them. The National Red Cross Societies and other Societies designated in Article 26 shall have the right to use the distinctive emblem conferring the protection of the Convention only within the framework of the present paragraph.

Furthermore, National Red Cross (Red Crescent, Red Lion and Sun) Societies may, in time of peace, in accordance with their national legislation, make use of the name and emblem of the Red Cross for their other activities which are in conformity with the principles laid down by the International Red Cross Conferences. When those activities are carried out in time of war, the conditions for the use of the emblem shall be such that it cannot be considered as conferring the protection of the Convention; the emblem shall be comparatively small in size and may not be placed on armlets or on the roofs of buildings.

The international Red Cross organizations and their duly authorized personnel shall be permitted to make use, at all times, of the emblem of the red cross on a white ground.

As an exceptional measure, in conformity with national legislation and with the express permission of one of the National Red Cross (Red Crescent, Red Lion and Sun) Societies, the emblem of the Convention may be employed in time of peace to identify vehicles used as ambulances and to mark the position of aid stations exclusively assigned to the purpose of giving free treatment to the wounded or sick.

CHAPTER VIII

Execution of the Convention

ART. 45. — Each Party to the conflict, acting through its commanders-in-chief, shall ensure the detailed execution of the preceding Articles, and provide for unforeseen cases, in conformity with the general principles of the present Convention.

*Detailed
execution.
Unforeseen
cases*

ART. 46. — Reprisals against the wounded, sick, personnel, buildings or equipment protected by the Convention are prohibited.

*Prohibition
of reprisals*

ART. 47. — The High Contracting Parties undertake, in time of peace as in time of war, to disseminate the text of the present Convention as widely as possible in their respective countries, and, in particular, to include the study thereof in their programmes of military and, if possible, civil instruction, so that the principles thereof may become known to the entire population, in particular to the armed fighting forces, the medical personnel and the chaplains.

*Dissemination
of the
Convention*

ART. 48. — The High Contracting Parties shall communicate to one another through the Swiss Federal Council and, during hostilities, through the Protecting Powers, the official translations of the present Convention, as well as the laws and regulations which they may adopt to ensure the application thereof.

*Translations.
Rules of
application*

CHAPTER IX

Repression of Abuses and Infractions

ART. 49. — The High Contracting Parties undertake to enact any legislation necessary to provide effective penal sanctions for persons committing, or ordering to be committed, any of the grave breaches of the present Convention defined in the following Article.

*Penal
sanctions
I.
General
observations*

Each High Contracting Party shall be under the obligation to search for persons alleged to have committed, or to have ordered to be committed, such grave breaches, and shall bring such persons, regardless of their nationality, before its own courts. It may also, if it prefers, and in accordance with the provisions of its own legislation,

hand such persons over for trial to another High Contracting Party concerned, provided such High Contracting Party has made out a *prima facie* case.

Each High Contracting Party shall take measures necessary for the suppression of all acts contrary to the provisions of the present Convention other than the grave breaches defined in the following Article.

In all circumstances, the accused persons shall benefit by safeguards of proper trial and defence, which shall not be less favourable than those provided by Article 105 and those following of the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949.

II.
*Grave
breaches*

ART. 50. — Grave breaches to which the preceding Article relates shall be those involving any of the following acts, if committed against persons or property protected by the Convention: wilful killing, torture or inhuman treatment, including biological experiments, wilfully causing great suffering or serious injury to body or health, and extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly.

III.
*Responsibilities
of the
Contracting
Parties*

ART. 51. — No High Contracting Party shall be allowed to absolve itself or any other High Contracting Party of any liability incurred by itself or by another High Contracting Party in respect of breaches referred to in the preceding Article.

*Enquiry
procedure*

ART. 52. — At the request of a Party to the conflict, an enquiry shall be instituted, in a manner to be decided between the interested Parties, concerning any alleged violation of the Convention.

If agreement has not been reached concerning the procedure for the enquiry, the Parties should agree on the choice of an umpire who will decide upon the procedure to be followed.

Once the violation has been established, the Parties to the conflict shall put an end to it and shall repress it with the least possible delay.

*Misuse of
the emblem*

ART. 53. — The use by individuals, societies, firms or companies either public or private, other than those entitled thereto under the present Convention, of the emblem or the designation “Red Cross” or “Geneva Cross”, or any sign or designation constituting an imitation thereof, whatever the object of such use, and irrespective of the date of its adoption, shall be prohibited at all times.

By reason of the tribute paid to Switzerland by the adoption of the reversed Federal colours, and of the confusion which may arise

between the arms of Switzerland and the distinctive emblem of the Convention, the use by private individuals, societies or firms, of the arms of the Swiss Confederation, or of marks constituting an imitation thereof, whether as trademarks or commercial marks, or as parts of such marks, or for a purpose contrary to commercial honesty, or in circumstances capable of wounding Swiss national sentiment, shall be prohibited at all times.

Nevertheless, such High Contracting Parties as were not party to the Geneva Convention of July 27, 1929, may grant to prior users of the emblems, designations, signs or marks designated in the first paragraph, a time limit not to exceed three years from the coming into force of the present Convention to discontinue such use, provided that the said use shall not be such as would appear, in time of war, to confer the protection of the Convention.

The prohibition laid down in the first paragraph of the present Article shall also apply, without effect on any rights acquired through prior use, to the emblems and marks mentioned in the second paragraph of Article 38.

ART. 54. — The High Contracting Parties shall, if their legislation is not already adequate, take measures necessary for the prevention and repression, at all times, of the abuses referred to under Article 53.

*Prevention of
misuse*

Final Provisions

ART. 55. — The present Convention is established in English and in French. Both texts are equally authentic.

Languages

The Swiss Federal Council shall arrange for official translations of the Convention to be made in the Russian and Spanish languages.

ART. 56. — The present Convention, which bears the date of this day, is open to signature until February 12, 1950, in the name of the Powers represented at the Conference which opened at Geneva on April 21, 1949; furthermore, by Powers not represented at that Conference but which are parties to the Geneva Conventions of 1864, 1906 or 1929 for the Relief of the Wounded and Sick in Armies in the Field.

Signature

ART. 57. — The present Convention shall be ratified as soon as possible and the ratifications shall be deposited at Berne.

Ratification

A record shall be drawn up of the deposit of each instrument of ratification and certified copies of this record shall be transmitted

by the Swiss Federal Council to all the Powers in whose name the Convention has been signed, or whose accession has been notified.

*Coming into
force*

ART. 58. — The present Convention shall come into force six months after not less than two instruments of ratification have been deposited.

Thereafter, it shall come into force for each High Contracting Party six months after the deposit of the instrument of ratification.

*Relation to
previous
Conventions*

ART. 59. — The present Convention replaces the Conventions of August 22, 1864, July 6, 1906 and July 27, 1929, in relations between the High Contracting Parties.

Accession

ART. 60. — From the date of its coming into force, it shall be open to any Power in whose name the present Convention has not been signed, to accede to this Convention.

*Notification
of accessions*

ART. 61. — Accessions shall be notified in writing to the Swiss Federal Council, and shall take effect six months after the date on which they are received.

The Swiss Federal Council shall communicate the accessions to all the Powers in whose name the Convention has been signed, or whose accession has been notified.

*Immediate
effect*

ART. 62. — The situations provided for in Articles 2 and 3 shall give immediate effect to ratifications deposited and accessions notified by the Parties to the conflict before or after the beginning of hostilities or occupation. The Swiss Federal Council shall communicate by the quickest method any ratifications or accessions received from Parties to the conflict.

Denunciation

ART. 63. — Each of the High Contracting Parties shall be at liberty to denounce the present Convention.

The denunciation shall be notified in writing to the Swiss Federal Council, which shall transmit it to the Governments of all the High Contracting Parties.

The denunciation shall take effect one year after the notification thereof has been made to the Swiss Federal Council. However, a denunciation of which notification has been made at a time when the denouncing Power is involved in a conflict shall not take effect until peace has been concluded, and until after operations connected with the release and repatriation of the persons protected by the present Convention have been terminated.

The denunciation shall have effect only in respect of the denouncing Power. It shall in no way impair the obligations which the Parties to the conflict shall remain bound to fulfil by virtue of the principles of the law of nations, as they result from the usages established among civilized peoples, from the laws of humanity and the dictates of the public conscience.

ART. 64. — The Swiss Federal Council shall register the present Convention with the Secretariat of the United Nations. The Swiss Federal Council shall also inform the Secretariat of the United Nations of all ratifications, accessions and denunciations received by it with respect to the present Convention.

*Registration
with the
United
Nations*

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, having deposited their respective full powers, have signed the present Convention.

DONE at Geneva this twelfth day of August 1949, in the English and French languages. The original shall be deposited in the Archives of the Swiss Confederation. The Swiss Federal Council shall transmit certified copies thereof to each of the signatory and acceding States.

ANNEX I

DRAFT AGREEMENT RELATING TO HOSPITAL ZONES AND LOCALITIES

ARTICLE 1. — Hospital zones shall be strictly reserved for the persons named in Article 23 of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in the Armed Forces in the Field of August 12, 1949, and for the personnel entrusted with the organization and administration of these zones and localities, and with the care of the persons therein assembled.

Nevertheless, persons whose permanent residence is within such zones shall have the right to stay there.

ART. 2. — No persons residing, in whatever capacity, in a hospital zone shall perform any work, either within or without the zone, directly connected with military operations or the production of war material.

ART. 3. — The Power establishing a hospital zone shall take all necessary measures to prohibit access to all persons who have no right of residence or entry therein.

ART. 4. — Hospital zones shall fulfil the following conditions:

- a) They shall comprise only a small part of the territory governed by the Power which has established them.
- b) They shall be thinly populated in relation to the possibilities of accommodation.
- c) They shall be far removed and free from all military objectives, or large industrial or administrative establishments.
- d) They shall not be situated in areas which, according to every probability, may become important for the conduct of the war.

ART. 5. — Hospital zones shall be subject to the following obligations:

- a) The lines of communication and means of transport which they possess shall not be used for the transport of military personnel or material, even in transit.
- b) They shall in no case be defended by military means.

ART. 6. — Hospital zones shall be marked by means of red crosses (red crescents, red lions and suns) on a white background placed on the outer precincts and on the buildings. They may be similarly marked at night by means of appropriate illumination.

ART. 7. — The Powers shall communicate to all the High Contracting Parties in peacetime or on the outbreak of hostilities, a list of the hospital zones in the territories governed by them. They shall also give notice of any new zones set up during hostilities.

As soon as the adverse Party has received the above-mentioned notification, the zone shall be regularly constituted.

If, however, the adverse Party considers that the conditions of the present agreement have not been fulfilled, it may refuse to recognize the zone by giving immediate notice thereof to the Party responsible for the said zone, or may make its recognition of such zone dependent upon the institution of the control provided for in Article 8.

ART. 8. — Any Power having recognized one or several hospital zones instituted by the adverse Party shall be entitled to demand control by one or more Special Commissions, for the purpose of ascertaining if the zones fulfil the conditions and obligations stipulated in the present agreement.

For this purpose, the members of the Special Commissions shall at all times have free access to the various zones and may even reside there permanently. They shall be given all facilities for their duties of inspection.

ART. 9. — Should the Special Commissions note any facts which they consider contrary to the stipulations of the present agreement, they shall at once draw the attention of the Power governing the said zone to these facts, and shall fix a time limit of five days within which the matter should be rectified. They shall duly notify the Power who has recognized the zone.

If, when the time limit has expired, the Power governing the zone has not complied with the warning, the adverse Party may declare that it is no longer bound by the present agreement in respect of the said zone.

ART. 10. — Any Power setting up one or more hospital zones and localities, and the adverse Parties to whom their existence has been notified, shall nominate or have nominated by neutral Powers, the persons who shall be members of the Special Commissions mentioned in Articles 8 and 9.



ART. 11. — In no circumstances may hospital zones be the object of attack. They shall be protected and respected at all times by the Parties to the conflict.

ART. 12. — In the case of occupation of a territory, the hospital zones therein shall continue to be respected and utilized as such.

Their purpose may, however, be modified by the Occupying Power, on condition that all measures are taken to ensure the safety of the persons accommodated.

ART. 13. — The present agreement shall also apply to localities which the Powers may utilize for the same purposes as hospital zones.

Front



(Space reserved for the name of the country and military authority issuing this card)

IDENTITY CARD

for members of medical and religious personnel attached to the armed forces

Surname
First names
Date of birth
Rank
Army Number
The bearer of this card is protected by the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949, in his capacity as
.....
Date of issue Number of Card
.....

Reverse side

Photo of bearer

Signature of bearer or finger-prints or both

Embossed stamp of military authority issuing card

Height	Eyes	Hair
.....

Other distinguishing marks:
.....
.....
.....
.....
.....

II

GENEVA CONVENTION FOR THE AMELIORATION OF THE CONDITION OF WOUNDED, SICK AND SHIPWRECKED MEMBERS OF ARMED FORCES AT SEA OF 12 AUGUST 1949

CHAPTER I

General Provisions

Article 1	Respect for the Convention	64
Article 2	Application of the Convention	64
Article 3	Conflicts not of an international character	64
Article 4	Field of application	65
Article 5	Application by neutral Powers.....	65
Article 6	Special agreements.....	66
Article 7	Non-renunciation of rights.....	66
Article 8	Protecting Powers	66
Article 9	Activities of the International Committee of the Red Cross	66
Article 10	Substitutes for Protecting Powers	67
Article 11	Conciliation procedure	67

CHAPTER II

Wounded, Sick and Shipwrecked

Article 12	Protection and care.....	68
Article 13	Protected persons.....	68
Article 14	Handing over to a belligerent	69
Article 15	Wounded taken on board a neutral warship.....	69
Article 16	Wounded falling into enemy hands.....	70
Article 17	Wounded landed in a neutral port	70
Article 18	Search for casualties after an engagement	70
Article 19	Recording and forwarding of information.....	70
Article 20	Prescriptions regarding the dead.....	71
Article 21	Appeals to neutral vessels	71

CHAPTER III

Hospital Ships

Article 22	Notification and protection of military hospital ships	72
Article 23	Protection of medical establishments ashore.....	72
Article 24	Hospital ships utilized by relief societies and private individuals of: I. Parties to the conflict	72

Article 25	II. Neutral countries	72
Article 26	Tonnage	72
Article 27	Coastal rescue craft	73
Article 28	Protection of sick-bays	73
Article 29	Hospital ships in occupied ports	73
Article 30	Employment of hospital ships and small craft	73
Article 31	Right of control and search	73
Article 32	Stay in a neutral port	74
Article 33	Converted merchant vessels	74
Article 34	Discontinuance of protection	74
Article 35	Conditions not depriving hospital ships of protection	74

CHAPTER IV

Personnel

Article 36	Protection of the personnel of hospital ships	75
Article 37	Medical and religious personnel of other ships	75

CHAPTER V

Medical Transports

Article 38	Ships used for the conveyance of medical equipment	75
Article 39	Medical aircraft	76
Article 40	Flight over neutral countries. Landing of wounded	76

CHAPTER VI

The Distinctive Emblem

Article 41	Use of the emblem	77
Article 42	Identification of medical and religious personnel	77
Article 43	Marking of hospital ships and small craft	77
Article 44	Limitation in the use of markings	78
Article 45	Prevention of misuse	78

CHAPTER VII

Execution of the Convention

Article 46	Detailed execution. Unforeseen cases	79
Article 47	Prohibition of reprisals	79
Article 48	Dissemination of the Convention	79
Article 49	Translations. Rules of application	79

CHAPTER VIII

Repression of Abuses and Infractions

Article 50	Penal sanctions: I. General observations	79
Article 51	II. Grave breaches	80
Article 52	III. Responsibilities of the Contracting Parties	80
Article 53	Enquiry procedure	80

Final Provisions

Article 54	Languages.....	80
Article 55	Signature	81
Article 56	Ratification	81
Article 57	Coming into force	81
Article 58	Relation to the 1907 Convention	81
Article 59	Accession	81
Article 60	Notification of accessions	81
Article 61	Immediate effect	81
Article 62	Denunciation	82
Article 63	Registration with the United Nations.....	82

ANNEX

Identity Card for Members of Medical and Religious Personnel attached to the Armed Forces at Sea.....	83
--	----

II

GENEVA CONVENTION FOR THE AMELIORATION OF THE CONDITION OF WOUNDED, SICK AND SHIPWRECKED MEMBERS OF ARMED FORCES AT SEA OF 12 AUGUST 1949

CHAPTER I

General Provisions

*Respect
for the
Convention¹*

ARTICLE 1. — The High Contracting Parties undertake to respect and to ensure respect for the present Convention in all circumstances.

*Application of
the Convention*

ART. 2. — In addition to the provisions which shall be implemented in peacetime, the present Convention shall apply to all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them.

The Convention shall also apply to all cases of partial or total occupation of the territory of a High Contracting Party, even if the said occupation meets with no armed resistance.

Although one of the Powers in conflict may not be a party to the present Convention, the Powers who are parties thereto shall remain bound by it in their mutual relations. They shall furthermore be bound by the Convention in relation to the said Power, if the latter accepts and applies the provisions thereof.

*Conflicts not of
an international
character*

ART. 3. — In the case of armed conflict not of an international character occurring in the territory of one of the High Contracting Parties, each Party to the conflict shall be bound to apply, as a minimum, the following provisions:

- 1) Persons taking no active part in the hostilities, including members of armed forces who have laid down their arms and

¹ The marginal notes or titles of articles have been drafted by the Swiss Federal Department of Foreign Affairs.

those placed *hors de combat* by sickness, wounds, detention, or any other cause, shall in all circumstances be treated humanely, without any adverse distinction founded on race, colour, religion or faith, sex, birth or wealth, or any other similar criteria.

To this end, the following acts are and shall remain prohibited at any time and in any place whatsoever with respect to the above-mentioned persons:

- a) violence to life and person, in particular murder of all kinds, mutilation, cruel treatment and torture;
- b) taking of hostages;
- c) outrages upon personal dignity, in particular, humiliating and degrading treatment;
- d) the passing of sentences and the carrying out of executions without previous judgment pronounced by a regularly constituted court, affording all the judicial guarantees which are recognized as indispensable by civilized peoples.

- 2) The wounded, sick and shipwrecked shall be collected and cared for.

An impartial humanitarian body, such as the International Committee of the Red Cross, may offer its services to the Parties to the conflict.

The Parties to the conflict should further endeavour to bring into force, by means of special agreements, all or part of the other provisions of the present Convention.

The application of the preceding provisions shall not affect the legal status of the Parties to the conflict.

ART. 4. — In case of hostilities between land and naval forces of Parties to the conflict, the provisions of the present Convention shall apply only to forces on board ship.

*Field of
application*

Forces put ashore shall immediately become subject to the provisions of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949.

ART. 5. — Neutral Powers shall apply by analogy the provisions of the present Convention to the wounded, sick and shipwrecked, and to members of the medical personnel and to chaplains of the armed forces of the Parties to the conflict received or interned in their territory, as well as to dead persons found.

*Application
by neutral
Powers*

*Special
agreements*

ART. 6. — In addition to the agreements expressly provided for in Articles 10, 18, 31, 38, 39, 40, 43 and 53, the High Contracting Parties may conclude other special agreements for all matters concerning which they may deem it suitable to make separate provision. No special agreement shall adversely affect the situation of wounded, sick and shipwrecked persons, of members of the medical personnel or of chaplains, as defined by the present Convention, nor restrict the rights which it confers upon them.

Wounded, sick, and shipwrecked persons, as well as medical personnel and chaplains, shall continue to have the benefit of such agreements as long as the Convention is applicable to them, except where express provisions to the contrary are contained in the aforesaid or in subsequent agreements, or where more favourable measures have been taken with regard to them by one or other of the Parties to the conflict.

*Non-
renunciation
of rights*

ART. 7. — Wounded, sick and shipwrecked persons, as well as members of the medical personnel and chaplains, may in no circumstances renounce in part or in entirety the rights secured to them by the present Convention, and by the special agreements referred to in the foregoing Article, if such there be.

*Protecting
Powers*

ART. 8. — The present Convention shall be applied with the co-operation and under the scrutiny of the Protecting Powers whose duty it is to safeguard the interests of the Parties to the conflict. For this purpose, the Protecting Powers may appoint, apart from their diplomatic or consular staff, delegates from amongst their own nationals or the nationals of other neutral Powers. The said delegates shall be subject to the approval of the Power with which they are to carry out their duties.

The Parties to the conflict shall facilitate to the greatest extent possible the task of the representatives or delegates of the Protecting Powers.

The representatives or delegates of the Protecting Powers shall not in any case exceed their mission under the present Convention. They shall, in particular, take account of the imperative necessities of security of the State wherein they carry out their duties. Their activities shall only be restricted as an exceptional and temporary measure when this is rendered necessary by imperative military necessities.

*Activities
of the
International
Committee of
the Red Cross*

ART. 9. — The provisions of the present Convention constitute no obstacle to the humanitarian activities which the International Committee of the Red Cross or any other impartial humanitarian organization may, subject to the consent of the Parties to the conflict

concerned, undertake for the protection of wounded, sick and shipwrecked persons, medical personnel and chaplains, and for their relief.

ART. 10. — The High Contracting Parties may at any time agree to entrust to an organization which offers all guarantees of impartiality and efficacy the duties incumbent on the Protecting Powers by virtue of the present Convention.

*Substitutes
for Protecting
Powers*

When wounded, sick and shipwrecked, or medical personnel and chaplains do not benefit or cease to benefit, no matter for what reason, by the activities of a Protecting Power or of an organization provided for in the first paragraph above, the Detaining Power shall request a neutral State, or such an organization, to undertake the functions performed under the present Convention by a Protecting Power designated by the Parties to a conflict.

If protection cannot be arranged accordingly, the Detaining Power shall request or shall accept, subject to the provisions of this Article, the offer of the services of a humanitarian organization, such as the International Committee of the Red Cross, to assume the humanitarian functions performed by Protecting Powers under the present Convention.

Any neutral Power, or any organization invited by the Power concerned or offering itself for these purposes, shall be required to act with a sense of responsibility towards the Party to the conflict on which persons protected by the present Convention depend, and shall be required to furnish sufficient assurances that it is in a position to undertake the appropriate functions and to discharge them impartially.

No derogation from the preceding provisions shall be made by special agreements between Powers one of which is restricted, even temporarily, in its freedom to negotiate with the other Power or its allies by reason of military events, more particularly where the whole, or a substantial part, of the territory of the said Power is occupied.

Whenever, in the present Convention, mention is made of a Protecting Power, such mention also applies to substitute organizations in the sense of the present Article.

ART. 11. — In cases where they deem it advisable in the interest of protected persons, particularly in cases of disagreement between the Parties to the conflict as to the application or interpretation of the provisions of the present Convention, the Protecting Powers shall lend their good offices with a view to settling the disagreement.

*Conciliation
procedure*

For this purpose, each of the Protecting Powers may, either at the invitation of one Party or on its own initiative, propose to the

Parties to the conflict a meeting of their representatives, in particular of the authorities responsible for the wounded, sick and shipwrecked, medical personnel and chaplains, possibly on neutral territory suitably chosen. The Parties to the conflict shall be bound to give effect to the proposals made to them for this purpose. The Protecting Powers may, if necessary, propose for approval by the Parties to the conflict, a person belonging to a neutral Power or delegated by the International Committee of the Red Cross, who shall be invited to take part in such a meeting.

CHAPTER II

Wounded, Sick and Shipwrecked

Protection and care

ART. 12. — Members of the armed forces and other persons mentioned in the following Article, who are at sea and who are wounded, sick or shipwrecked, shall be respected and protected in all circumstances, it being understood that the term “shipwreck” means shipwreck from any cause and includes forced landings at sea by or from aircraft.

Such persons shall be treated humanely and cared for by the Parties to the conflict in whose power they may be, without any adverse distinction founded on sex, race, nationality, religion, political opinions, or any other similar criteria. Any attempts upon their lives, or violence to their persons, shall be strictly prohibited; in particular, they shall not be murdered or exterminated, subjected to torture or to biological experiments; they shall not wilfully be left without medical assistance and care, nor shall conditions exposing them to contagion or infection be created.

Only urgent medical reasons will authorize priority in the order of treatment to be administered.

Women shall be treated with all consideration due to their sex.

Protected persons

ART. 13. — The present Convention shall apply to the wounded, sick and shipwrecked at sea belonging to the following categories:

- 1) Members of the armed forces of a Party to the conflict, as well as members of militias or volunteer corps forming part of such armed forces.
- 2) Members of other militias and members of other volunteer corps, including those of organized resistance movements,

belonging to a Party to the conflict and operating in or outside their own territory, even if this territory is occupied, provided that such militias or volunteer corps, including such organized resistance movements, fulfil the following conditions:

- a) that of being commanded by a person responsible for his subordinates;
 - b) that of having a fixed distinctive sign recognizable at a distance;
 - c) that of carrying arms openly;
 - d) that of conducting their operations in accordance with the laws and customs of war.
- 3) Members of regular armed forces who profess allegiance to a Government or an authority not recognized by the Detaining Power.
 - 4) Persons who accompany the armed forces without actually being members thereof, such as civilian members of military aircraft crews, war correspondents, supply contractors, members of labour units or of services responsible for the welfare of the armed forces, provided that they have received authorization from the armed forces which they accompany.
 - 5) Members of crews, including masters, pilots and apprentices of the merchant marine and the crews of civil aircraft of the Parties to the conflict, who do not benefit by more favourable treatment under any other provisions of international law.
 - 6) Inhabitants of a non-occupied territory who, on the approach of the enemy, spontaneously take up arms to resist the invading forces, without having had time to form themselves into regular armed units, provided they carry arms openly and respect the laws and customs of war.

ART. 14. — All warships of a belligerent Party shall have the right to demand that the wounded, sick or shipwrecked on board military hospital ships, and hospital ships belonging to relief societies or to private individuals, as well as merchant vessels, yachts and other craft shall be surrendered, whatever their nationality, provided that the wounded and sick are in a fit state to be moved and that the warship can provide adequate facilities for necessary medical treatment.

*Handing
over to a
belligerent*

ART. 15. — If wounded, sick or shipwrecked persons are taken on board a neutral warship or a neutral military aircraft, it shall be ensured, where so required by international law, that they can take no further part in operations of war.

*Wounded
taken on
board a
neutral
warship*

*Wounded
falling into
enemy hands*

ART. 16. — Subject to the provisions of Article 12, the wounded, sick and shipwrecked of a belligerent who fall into enemy hands shall be prisoners of war, and the provisions of international law concerning prisoners of war shall apply to them. The captor may decide, according to circumstances, whether it is expedient to hold them, or to convey them to a port in the captor's own country, to a neutral port or even to a port in enemy territory. In the last case, prisoners of war thus returned to their home country may not serve for the duration of the war.

*Wounded
landed in a
neutral port*

ART. 17. — Wounded, sick or shipwrecked persons who are landed in neutral ports with the consent of the local authorities, shall, failing arrangements to the contrary between the neutral and the belligerent Powers, be so guarded by the neutral Power, where so required by international law, that the said persons cannot again take part in operations of war.

The costs of hospital accommodation and internment shall be borne by the Power on whom the wounded, sick or shipwrecked persons depend.

*Search for
casualties
after an
engagement*

ART. 18. — After each engagement, Parties to the conflict shall, without delay, take all possible measures to search for and collect the shipwrecked, wounded and sick, to protect them against pillage and ill-treatment, to ensure their adequate care, and to search for the dead and prevent their being despoiled.

Whenever circumstances permit, the Parties to the conflict shall conclude local arrangements for the removal of the wounded and sick by sea from a besieged or encircled area and for the passage of medical and religious personnel and equipment on their way to that area.

*Recording
and
forwarding of
information*

ART. 19. — The Parties to the conflict shall record as soon as possible, in respect of each shipwrecked, wounded, sick or dead person of the adverse Party falling into their hands, any particulars which may assist in his identification. These records should if possible include:

- a) designation of the Power on which he depends;
- b) army, regimental, personal or serial number;
- c) surname;
- d) first name or names;
- e) date of birth;
- f) any other particulars shown on his identity card or disc;

- g) date and place of capture or death;
- h) particulars concerning wounds or illness, or cause of death.

As soon as possible the above-mentioned information shall be forwarded to the Information Bureau described in Article 122 of the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949, which shall transmit this information to the Power on which these persons depend through the intermediary of the Protecting Power and of the Central Prisoners of War Agency.

Parties to the conflict shall prepare and forward to each other through the same bureau, certificates of death or duly authenticated lists of the dead. They shall likewise collect and forward through the same bureau one half of the double identity disc, or the identity disc itself if it is a single disc, last wills or other documents of importance to the next of kin, money and in general all articles of an intrinsic or sentimental value, which are found on the dead. These articles together with unidentified articles, shall be sent in sealed packets, accompanied by statements giving all particulars necessary for the identification of the deceased owners, as well as by a complete list of the contents of the parcel.

ART. 20. — Parties to the conflict shall ensure that burial at sea of the dead, carried out individually as far as circumstances permit, is preceded by a careful examination, if possible by a medical examination, of the bodies, with a view to confirming death, establishing identity and enabling a report to be made. Where a double identity disc is used, one half of the disc should remain on the body.

*Prescriptions
regarding
the dead*

If dead persons are landed, the provisions of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949, shall be applicable.

ART. 21. — The Parties to the conflict may appeal to the charity of commanders of neutral merchant vessels, yachts or other craft, to take on board and care for wounded, sick or shipwrecked persons, and to collect the dead.

*Appeals to
neutral
vessels*

Vessels of any kind responding to this appeal, and those having of their own accord collected wounded, sick or shipwrecked persons, shall enjoy special protection and facilities to carry out such assistance.

They may, in no case, be captured on account of any such transport; but, in the absence of any promise to the contrary, they shall remain liable to capture for any violations of neutrality they may have committed.

CHAPTER III

Hospital Ships

*Notification
and
protection of
military
hospital ships*

ART. 22. — Military hospital ships, that is to say, ships built or equipped by the Powers specially and solely with a view to assisting the wounded, sick and shipwrecked, to treating them and to transporting them, may in no circumstances be attacked or captured, but shall at all times be respected and protected, on condition that their names and descriptions have been notified to the Parties to the conflict ten days before those ships are employed.

The characteristics which must appear in the notification shall include registered gross tonnage, the length from stem to stern and the number of masts and funnels.

*Protection of
medical
establishments
ashore*

ART. 23. — Establishments ashore entitled to the protection of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949, shall be protected from bombardment or attack from the sea.

*Hospital
ships utilized
by relief
societies and
private
individuals of*

ART. 24. — Hospital ships utilized by National Red Cross Societies, by officially recognized relief societies or by private persons shall have the same protection as military hospital ships and shall be exempt from capture, if the Party to the conflict on which they depend has given them an official commission and in so far as the provisions of Article 22 concerning notification have been complied with.

*I.
Parties to
the conflict*

These ships must be provided with certificates from the responsible authorities, stating that the vessels have been under their control while fitting out and on departure.

*II.
Neutral
countries*

ART. 25. — Hospital ships utilized by National Red Cross Societies, officially recognized relief societies, or private persons of neutral countries shall have the same protection as military hospital ships and shall be exempt from capture, on condition that they have placed themselves under the control of one of the Parties to the conflict, with the previous consent of their own governments and with the authorization of the Party to the conflict concerned, in so far as the provisions of Article 22 concerning notification have been complied with.

Tonnage

ART. 26. — The protection mentioned in Articles 22, 24 and 25 shall apply to hospital ships of any tonnage and to their lifeboats, wherever they are operating. Nevertheless, to ensure the maximum

comfort and security, the Parties to the conflict shall endeavour to utilize, for the transport of wounded, sick and shipwrecked over long distances and on the high seas, only hospital ships of over 2,000 tons gross.

ART. 27. — Under the same conditions as those provided for in Articles 22 and 24, small craft employed by the State or by the officially recognized lifeboat institutions for coastal rescue operations, shall also be respected and protected, so far as operational requirements permit.

*Coastal
rescue craft*

The same shall apply so far as possible to fixed coastal installations used exclusively by these craft for their humanitarian missions.

ART. 28. — Should fighting occur on board a warship, the sick-bays shall be respected and spared as far as possible. Sick-bays and their equipment shall remain subject to the laws of warfare, but may not be diverted from their purpose so long as they are required for the wounded and sick. Nevertheless, the commander into whose power they have fallen may, after ensuring the proper care of the wounded and sick who are accommodated therein, apply them to other purposes in case of urgent military necessity.

*Protection of
sick-bays*

ART. 29. — Any hospital ship in a port which falls into the hands of the enemy shall be authorized to leave the said port.

*Hospital ships
in occupied
ports*

ART. 30. — The vessels described in Articles 22, 24, 25 and 27 shall afford relief and assistance to the wounded, sick and shipwrecked without distinction of nationality.

*Employment
of hospital
ships and
small craft*

The High Contracting Parties undertake not to use these vessels for any military purpose.

Such vessels shall in no wise hamper the movements of the combatants.

During and after an engagement, they will act at their own risk.

ART. 31. — The Parties to the conflict shall have the right to control and search the vessels mentioned in Articles 22, 24, 25 and 27. They can refuse assistance from these vessels, order them off, make them take a certain course, control the use of their wireless and other means of communication, and even detain them for a period not exceeding seven days from the time of interception, if the gravity of the circumstances so requires.

*Right of
control and
search*

They may put a commissioner temporarily on board whose sole task shall be to see that orders given in virtue of the provisions of the preceding paragraph are carried out.

As far as possible, the Parties to the conflict shall enter in the log of the hospital ship, in a language he can understand, the orders they have given the captain of the vessel.

Parties to the conflict may, either unilaterally or by particular agreements, put on board their ships neutral observers who shall verify the strict observation of the provisions contained in the present Convention.

*Stay in a
neutral port*

ART. 32. — Vessels described in Articles 22, 24, 25 and 27 are not classed as warships as regards their stay in a neutral port.

*Converted
merchant
vessels*

ART. 33. — Merchant vessels which have been transformed into hospital ships cannot be put to any other use throughout the duration of hostilities.

*Discontinu-
ance of
protection*

ART. 34. — The protection to which hospital ships and sick-bays are entitled shall not cease unless they are used to commit, outside their humanitarian duties, acts harmful to the enemy. Protection may, however, cease only after due warning has been given, naming in all appropriate cases a reasonable time limit, and after such warning has remained unheeded.

In particular, hospital ships may not possess or use a secret code for their wireless or other means of communication.

*Conditions
not depriving
hospital ships
of protection*

ART. 35. — The following conditions shall not be considered as depriving hospital ships or sick-bays of vessels of the protection due to them:

- 1) The fact that the crews of ships or sick-bays are armed for the maintenance of order, for their own defence or that of the sick and wounded.
- 2) The presence on board of apparatus exclusively intended to facilitate navigation or communication.
- 3) The discovery on board hospital ships or in sick-bays of portable arms and ammunition taken from the wounded, sick and shipwrecked and not yet handed to the proper service.
- 4) The fact that the humanitarian activities of hospital ships and sick-bays of vessels or of the crews extend to the care of wounded, sick or shipwrecked civilians.
- 5) The transport of equipment and of personnel intended exclusively for medical duties, over and above the normal requirements.

CHAPTER IV

Personnel

ART. 36. — The religious, medical and hospital personnel of hospital ships and their crews shall be respected and protected; they may not be captured during the time they are in the service of the hospital ship, whether or not there are wounded and sick on board.

*Protection of
the personnel
of hospital
ships*

ART. 37. — The religious, medical and hospital personnel assigned to the medical or spiritual care of the persons designated in Articles 12 and 13 shall, if they fall into the hands of the enemy, be respected and protected; they may continue to carry out their duties as long as this is necessary for the care of the wounded and sick. They shall afterwards be sent back as soon as the Commander-in-Chief, under whose authority they are, considers it practicable. They may take with them, on leaving the ship, their personal property.

*Medical and
religious
personnel of
other ships*

If, however, it proves necessary to retain some of this personnel owing to the medical or spiritual needs of prisoners of war, everything possible shall be done for their earliest possible landing.

Retained personnel shall be subject, on landing, to the provisions of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949.

CHAPTER V

Medical Transports

ART. 38. — Ships chartered for that purpose shall be authorized to transport equipment exclusively intended for the treatment of wounded and sick members of armed forces or for the prevention of disease, provided that the particulars regarding their voyage have been notified to the adverse Power and approved by the latter. The adverse Power shall preserve the right to board the carrier ships, but not to capture them or to seize the equipment carried.

*Ships used
for the
conveyance
of medical
equipment*

By agreement amongst the Parties to the conflict, neutral observers may be placed on board such ships to verify the equipment carried. For this purpose, free access to the equipment shall be given.

*Medical
aircraft*

ART. 39. — Medical aircraft, that is to say, aircraft exclusively employed for the removal of wounded, sick and shipwrecked, and for the transport of medical personnel and equipment, may not be the object of attack, but shall be respected by the Parties to the conflict, while flying at heights, at times and on routes specifically agreed upon between the Parties to the conflict concerned.

They shall be clearly marked with the distinctive emblem prescribed in Article 41, together with their national colours, on their lower, upper and lateral surfaces. They shall be provided with any other markings or means of identification which may be agreed upon between the Parties to the conflict upon the outbreak or during the course of hostilities.

Unless agreed otherwise, flights over enemy or enemy-occupied territory are prohibited.

Medical aircraft shall obey every summons to alight on land or water. In the event of having thus to alight, the aircraft with its occupants may continue its flight after examination, if any.

In the event of alighting involuntarily on land or water in enemy or enemy-occupied territory, the wounded, sick and shipwrecked, as well as the crew of the aircraft shall be prisoners of war. The medical personnel shall be treated according to Articles 36 and 37.

*Flight over
neutral
countries.
Landing of
wounded*

ART. 40. — Subject to the provisions of the second paragraph, medical aircraft of Parties to the conflict may fly over the territory of neutral Powers, land thereon in case of necessity, or use it as a port of call. They shall give neutral Powers prior notice of their passage over the said territory, and obey every summons to alight, on land or water. They will be immune from attack only when flying on routes, at heights and at times specifically agreed upon between the Parties to the conflict and the neutral Power concerned.

The neutral Powers may, however, place conditions or restrictions on the passage or landing of medical aircraft on their territory. Such possible conditions or restrictions shall be applied equally to all Parties to the conflict.

Unless otherwise agreed between the neutral Powers and the Parties to the conflict, the wounded, sick or shipwrecked who are disembarked with the consent of the local authorities on neutral territory by medical aircraft shall be detained by the neutral Power, where so required by international law, in such a manner that they cannot again take part in operations of war. The cost of their accommodation and internment shall be borne by the Power on which they depend.

CHAPTER VI

The Distinctive Emblem

ART. 41. — Under the direction of the competent military authority, the emblem of the red cross on a white ground shall be displayed on the flags, armlets and on all equipment employed in the Medical Service.

Use of the emblem

Nevertheless, in the case of countries which already use as emblem, in place of the red cross, the red crescent or the red lion and sun on a white ground, these emblems are also recognized by the terms of the present Convention.

ART. 42. — The personnel designated in Articles 36 and 37 shall wear, affixed to the left arm, a water-resistant armlet bearing the distinctive emblem, issued and stamped by the military authority.

Identification of medical and religious personnel

Such personnel, in addition to wearing the identity disc mentioned in Article 19, shall also carry a special identity card bearing the distinctive emblem. This card shall be water-resistant and of such size that it can be carried in the pocket. It shall be worded in the national language, shall mention at least the surname and first names, the date of birth, the rank and the service number of the bearer, and shall state in what capacity he is entitled to the protection of the present Convention. The card shall bear the photograph of the owner and also either his signature or his fingerprints or both. It shall be embossed with the stamp of the military authority.

The identity card shall be uniform throughout the same armed forces and, as far as possible, of a similar type in the armed forces of the High Contracting Parties. The Parties to the conflict may be guided by the model which is annexed, by way of example, to the present Convention. They shall inform each other, at the outbreak of hostilities, of the model they are using. Identity cards should be made out, if possible, at least in duplicate, one copy being kept by the home country.

In no circumstances may the said personnel be deprived of their insignia or identity cards nor of the right to wear the armlet. In cases of loss they shall be entitled to receive duplicates of the cards and to have the insignia replaced.

ART. 43. — The ships designated in Articles 22, 24, 25 and 27 shall be distinctively marked as follows:

Marking of hospital ships and small craft

- a) All exterior surfaces shall be white.

b) One or more dark red crosses, as large as possible, shall be painted and displayed on each side of the hull and on the horizontal surfaces, so placed as to afford the greatest possible visibility from the sea and from the air.

All hospital ships shall make themselves known by hoisting their national flag and further, if they belong to a neutral state, the flag of the Party to the conflict whose direction they have accepted. A white flag with a red cross shall be flown at the mainmast as high as possible.

Lifeboats of hospital ships, coastal lifeboats and all small craft used by the Medical Service shall be painted white with dark red crosses prominently displayed and shall, in general, comply with the identification system prescribed above for hospital ships.

The above-mentioned ships and craft, which may wish to ensure by night and in times of reduced visibility the protection to which they are entitled, must, subject to the assent of the Party to the conflict under whose power they are, take the necessary measures to render their painting and distinctive emblems sufficiently apparent.

Hospital ships which, in accordance with Article 31, are provisionally detained by the enemy, must haul down the flag of the Party to the conflict in whose service they are or whose direction they have accepted.

Coastal lifeboats, if they continue to operate with the consent of the Occupying Power from a base which is occupied, may be allowed, when away from their base, to continue to fly their own national colours along with a flag carrying a red cross on a white ground, subject to prior notification to all the Parties to the conflict concerned.

All the provisions in this Article relating to the red cross shall apply equally to the other emblems mentioned in Article 41.

Parties to the conflict shall at all times endeavour to conclude mutual agreements, in order to use the most modern methods available to facilitate the identification of hospital ships.

*Limitation in
the use of
markings*

ART. 44. — The distinguishing signs referred to in Article 43 can only be used, whether in time of peace or war, for indicating or protecting the ships therein mentioned, except as may be provided in any other international Convention or by agreement between all the Parties to the conflict concerned.

*Prevention of
misuse*

ART. 45. — The High Contracting Parties shall, if their legislation is not already adequate, take the measures necessary for the prevention and repression, at all times, of any abuse of the distinctive signs provided for under Article 43.

CHAPTER VII

Execution of the Convention

ART. 46. — Each Party to the conflict, acting through its Commanders-in-Chief, shall ensure the detailed execution of the preceding Articles and provide for unforeseen cases, in conformity with the general principles of the present Convention.

*Detailed
execution.
Unforeseen
cases*

ART. 47. — Reprisals against the wounded, sick and shipwrecked persons, the personnel, the vessels or the equipment protected by the Convention are prohibited.

*Prohibition
of reprisals*

ART. 48. — The High Contracting Parties undertake, in time of peace as in time of war, to disseminate the text of the present Convention as widely as possible in their respective countries, and, in particular, to include the study thereof in their programmes of military and, if possible, civil instruction, so that the principles thereof may become known to the entire population, in particular to the armed fighting forces, the medical personnel and the chaplains.

*Dissemination
of the
Convention*

ART. 49. — The High Contracting Parties shall communicate to one another through the Swiss Federal Council and, during hostilities, through the Protecting Powers, the official translations of the present Convention, as well as the laws and regulations which they may adopt to ensure the application thereof.

*Translations.
Rules of
application*

CHAPTER VIII

Repression of Abuses and Infractions

ART. 50. — The High Contracting Parties undertake to enact any legislation necessary to provide effective penal sanctions for persons committing, or ordering to be committed, any of the grave breaches of the present Convention defined in the following Article.

*Penal
sanctions*

Each High Contracting Party shall be under the obligation to search for persons alleged to have committed, or to have ordered to be committed, such grave breaches, and shall bring such persons, regardless of their nationality, before its own courts. It may also, if it

*I.
General
observations*

prefers, and in accordance with the provisions of its own legislation, hand such persons over for trial to another High Contracting Party concerned, provided such High Contracting Party has made out a *prima facie* case.

Each High Contracting Party shall take measures necessary for the suppression of all acts contrary to the provisions of the present Convention other than the grave breaches defined in the following Article.

In all circumstances, the accused persons shall benefit by safeguards of proper trial and defence, which shall not be less favourable than those provided by Article 105 and those following of the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949.

II.
*Grave
breaches*

ART. 51. — Grave breaches to which the preceding Article relates shall be those involving any of the following acts, if committed against persons or property protected by the Convention: wilful killing, torture or inhuman treatment, including biological experiments, wilfully causing great suffering or serious injury to body or health, and extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly.

III.
*Responsi-
bilities of the
Contracting
Parties*

ART. 52. — No High Contracting Party shall be allowed to absolve itself or any other High Contracting Party of any liability incurred by itself or by another High Contracting Party in respect of breaches referred to in the preceding Article.

*Enquiry
procedure*

ART. 53. — At the request of a Party to the conflict, an enquiry shall be instituted, in a manner to be decided between the interested Parties, concerning any alleged violation of the Convention.

If agreement has not been reached concerning the procedure for the enquiry, the Parties should agree on the choice of an umpire, who will decide upon the procedure to be followed.

Once the violation has been established, the Parties to the conflict shall put an end to it and shall repress it with the least possible delay.

Final Provisions

Languages

ART. 54. — The present Convention is established in English and in French. Both texts are equally authentic.

The Swiss Federal Council shall arrange for official translations of the Convention to be made in the Russian and Spanish languages.

ART. 55. — The present Convention, which bears the date of this day, is open to signature until February 12, 1950, in the name of the Powers represented at the Conference which opened at Geneva on April 21, 1949; furthermore, by Powers not represented at that Conference, but which are parties to the Xth Hague Convention of October 18, 1907, for the adaptation to Maritime Warfare of the principles of the Geneva Convention of 1906, or to the Geneva Conventions of 1864, 1906 or 1929 for the Relief of the Wounded and Sick in Armies in the Field.

Signature

ART. 56. — The present Convention shall be ratified as soon as possible and the ratifications shall be deposited at Berne.

Ratification

A record shall be drawn up of the deposit of each instrument of ratification and certified copies of this record shall be transmitted by the Swiss Federal Council to all the Powers in whose name the Convention has been signed, or whose accession has been notified.

ART. 57. — The present Convention shall come into force six months after not less than two instruments of ratification have been deposited.

Coming into force

Thereafter, it shall come into force for each High Contracting Party six months after the deposit of the instruments of ratification.

ART. 58. — The present Convention replaces the Xth Hague Convention of October 18, 1907, for the adaptation to Maritime Warfare of the principles of the Geneva Convention of 1906, in relations between the High Contracting Parties.

Relation to the 1907 Convention

ART. 59. — From the date of its coming into force, it shall be open to any Power in whose name the present Convention has not been signed, to accede to this Convention.

Accession

ART. 60. — Accessions shall be notified in writing to the Swiss Federal Council, and shall take effect six months after the date on which they are received.

Notification of accessions

The Swiss Federal Council shall communicate the accessions to all the Powers in whose name the Convention has been signed, or whose accession has been notified.

ART. 61. — The situations provided for in Articles 2 and 3 shall give immediate effect to ratifications deposited and accessions notified by the Parties to the conflict before or after the beginning of hostilities or occupation. The Swiss Federal Council shall communicate by the quickest method any ratifications or accessions received from Parties to the conflict.

Immediate effect

Denunciation

ART. 62. — Each of the High Contracting Parties shall be at liberty to denounce the present Convention.

The denunciation shall be notified in writing to the Swiss Federal Council, which shall transmit it to the Governments of all the High Contracting Parties.

The denunciation shall take effect one year after the notification thereof has been made to the Swiss Federal Council. However, a denunciation of which notification has been made at a time when the denouncing Power is involved in a conflict shall not take effect until peace has been concluded, and until after operations connected with the release and repatriation of the persons protected by the present Convention have been terminated.

The denunciation shall have effect only in respect of the denouncing Power. It shall in no way impair the obligations which the Parties to the conflict shall remain bound to fulfil by virtue of the principles of the law of nations, as they result from the usages established among civilized peoples, from the laws of humanity and the dictates of the public conscience.



*Registration
with the
United
Nations*

ART. 63. — The Swiss Federal Council shall register the present Convention with the Secretariat of the United Nations. The Swiss Federal Council shall also inform the Secretariat of the United Nations of all ratifications, accessions and denunciations received by it with respect to the present Convention.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, having deposited their respective full powers, have signed the present Convention.

DONE at Geneva this twelfth day of August 1949, in the English and French languages. The original shall be deposited in the Archives of the Swiss Confederation. The Swiss Federal Council shall transmit certified copies thereof to each of the signatory and acceding States.

Front



(Space reserved for the name of the country and military authority issuing this card)

IDENTITY CARD

for members of medical and religious personnel attached to the armed forces at sea _____

Surname
First names.....
Date of birth.....
Rank.....
Army Number.....
The bearer of this card is protected by the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea of August 12, 1949, in his capacity as

Date of issue Number of Card

.....

Reverse side

Photo of bearer

Signature of bearer or finger-prints or both

Embossed stamp of military authority issuing card

Height	Eyes	Hair
.....

Other distinguishing marks:
.....
.....
.....
.....
.....

III

GENEVA CONVENTION RELATIVE TO THE TREATMENT OF PRISONERS OF WAR OF 12 AUGUST 1949

PART I

General Provisions

Article 1	Respect for the Convention	91
Article 2	Application of the Convention	91
Article 3	Conflicts not of an international character	91
Article 4	Prisoners of war	92
Article 5	Beginning and end of application	94
Article 6	Special agreements	94
Article 7	Non-renunciation of rights	94
Article 8	Protecting Powers	95
Article 9	Activities of the International Committee of the Red Cross	95
Article 10	Substitutes for Protecting Powers	95
Article 11	Conciliation procedure	96

PART II

General Protection of Prisoners of War

Article 12	Responsibility for the treatment of prisoners	96
Article 13	Humane treatment of prisoners	97
Article 14	Respect for the person of prisoners	97
Article 15	Maintenance of prisoners	97
Article 16	Equality of treatment	97

PART III

Captivity

SECTION I –	<i>Beginning of Captivity</i>	
Article 17	Questioning of prisoners	98
Article 18	Property of prisoners	98
Article 19	Evacuation of prisoners	99
Article 20	Conditions of evacuation.	99

SECTION II – *Internment of Prisoners of War*

CHAPTER I – GENERAL OBSERVATIONS

Article 21	Restriction of liberty of movement	100
------------	--	-----

Article 22	Places and conditions of internment.....	101
Article 23	Security of prisoners.....	101
Article 24	Permanent transit camps.....	101
CHAPTER II – QUARTERS, FOOD AND CLOTHING OF PRISONERS OF WAR		
Article 25	Quarters	102
Article 26	Food	102
Article 27	Clothing.....	102
Article 28	Canteens.....	103
CHAPTER III – HYGIENE AND MEDICAL ATTENTION		
Article 29	Hygiene	103
Article 30	Medical attention	103
Article 31	Medical inspections	104
Article 32	Prisoners engaged on medical duties	104
CHAPTER IV – MEDICAL PERSONNEL AND CHAPLAINS RETAINED TO ASSIST PRISONERS OF WAR		
Article 33	Rights and privileges of retained personnel.....	105
CHAPTER V – RELIGIOUS, INTELLECTUAL AND PHYSICAL ACTIVITIES		
Article 34	Religious duties	106
Article 35	Retained chaplains	106
Article 36	Prisoners who are ministers of religion.....	106
Article 37	Prisoners without a minister of their religion	106
Article 38	Recreation, study, sports and games.....	107
CHAPTER VI – DISCIPLINE		
Article 39	Administration. Saluting.....	107
Article 40	Badges and decorations	107
Article 41	Posting of the Convention, and of regulations and orders concerning prisoners.....	108
Article 42	Use of weapons	108
CHAPTER VII – RANK OF PRISONERS OF WAR		
Article 43	Notification of ranks.....	108
Article 44	Treatment of officers.....	108
Article 45	Treatment of other prisoners.....	109
CHAPTER VIII – TRANSFER OF PRISONERS OF WAR AFTER THEIR ARRIVAL IN CAMP		
Article 46	Conditions.....	109

Article 47	Circumstances precluding transfer.....	109
Article 48	Procedure for transfer.....	109
SECTION III – <i>Labour of Prisoners of War</i>		
Article 49	General observations	110
Article 50	Authorized work	110
Article 51	Working conditions	111
Article 52	Dangerous or humiliating labour	111
Article 53	Duration of labour.....	111
Article 54	Working pay. Occupational accidents and diseases	112
Article 55	Medical supervision.....	112
Article 56	Labour detachments	112
Article 57	Prisoners working for private employers	112
SECTION IV – <i>Financial Resources of Prisoners of War</i>		
Article 58	Ready money.....	113
Article 59	Amounts in cash taken from prisoners.....	113
Article 60	Advances of pay.....	113
Article 61	Supplementary pay	114
Article 62	Working pay.....	115
Article 63	Transfer of funds.....	115
Article 64	Prisoners' accounts.....	116
Article 65	Management of prisoners' accounts.....	116
Article 66	Winding up of accounts.....	116
Article 67	Adjustments between Parties to the conflict	117
Article 68	Claims for compensation.....	117
SECTION V – <i>Relations of Prisoners of War with the Exterior</i>		
Article 69	Notification of measures taken.....	117
Article 70	Capture card	118
Article 71	Correspondence.....	118
Article 72	Relief shipments: I. General principles.....	119
Article 73	II. Collective relief	119
Article 74	Exemption from postal and transport charges	119
Article 75	Special means of transport	120
Article 76	Censorship and examination.....	121
Article 77	Preparation, execution and transmission of legal documents..	121
SECTION VI – <i>Relations between Prisoners of War and the Authorities</i>		
CHAPTER I – COMPLAINTS OF PRISONERS OF WAR RESPECTING THE CONDITIONS OF CAPTIVITY		
Article 78	Complaints and requests	121

CHAPTER II – PRISONER OF WAR REPRESENTATIVES

Article 79	Election	122
Article 80	Duties	123
Article 81	Prerogatives	123

CHAPTER III – PENAL AND DISCIPLINARY SANCTIONS

I. General Provisions

Article 82	Applicable legislation	124
Article 83	Choice of disciplinary or judicial proceedings	124
Article 84	Courts.....	124
Article 85	Offences committed before capture	124
Article 86	“Non bis in idem”	124
Article 87	Penalties	125
Article 88	Execution of penalties.....	125

II. Disciplinary Sanctions

Article 89	General observations: I. Forms of punishment.....	125
Article 90	II. Duration of punishments.....	126
Article 91	Escapes: I. Successful escape.....	126
Article 92	II. Unsuccessful escape.....	126
Article 93	III. Connected offences	127
Article 94	IV. Notification of recapture	127
Article 95	Procedure: I. Confinement awaiting hearing	127
Article 96	II. Competent authorities and right of defence	127
Article 97	Execution of punishment: I. Premises	128
Article 98	II. Essential safeguards.....	128

III. Judicial Proceedings

Article 99	Essential rules: I. General principles.....	129
Article 100	II. Death penalty	129
Article 101	III. Delay in execution of the death penalty	129
Article 102	Procedure: I. Conditions for validity of sentence.....	129
Article 103	II. Confinement awaiting trial (Deduction from sentence, treatment)	130
Article 104	III. Notification of proceedings	130
Article 105	IV. Rights and means of defence	130
Article 106	V. Appeals	131
Article 107	VI. Notification of findings and sentence	131
Article 108	Execution of penalties. Penal regulations.....	132

PART IV

Termination of Captivity

SECTION I –	<i>Direct Repatriation and Accommodation in Neutral Countries</i>	
Article 109	General observations	133
Article 110	Cases of repatriation and accommodation	133
Article 111	Internment in a neutral country	134
Article 112	Mixed Medical Commissions	134
Article 113	Prisoners entitled to examination by Mixed Medical Commissions	135
Article 114	Prisoners meeting with accidents	135
Article 115	Prisoners serving a sentence	135
Article 116	Costs of repatriation	136
Article 117	Activity after repatriation	136
SECTION II –	<i>Release and Repatriation of Prisoners of War at the close of Hostilities</i>	
Article 118	Release and repatriation	136
Article 119	Details of procedure	137
SECTION III –	<i>Death of Prisoners of War</i>	
Article 120	Wills, death certificates, burial, cremation	137
Article 121	Prisoners killed or injured in special circumstances	138

PART V

Information Bureaux and Relief Societies for Prisoners of War

Article 122	National Bureaux	139
Article 123	Central Agency	140
Article 124	Exemption from charges	141
Article 125	Relief societies and other organizations	141

PART VI

Execution of the Convention

SECTION I –	<i>General Provisions</i>	
Article 126	Supervision	142
Article 127	Dissemination of the Convention	142
Article 128	Translations. Rules of application	143
Article 129	Penal sanctions: I. General observations	143
Article 130	II. Grave breaches	143
Article 131	III. Responsibilities of the Contracting Parties	143
Article 132	Enquiry procedure	143

SECTION II –	<i>Final Provisions</i>	
Article 133	Languages.....	144
Article 134	Relation to the 1929 Convention	144
Article 135	Relation to the Hague Convention	144
Article 136	Signature	144
Article 137	Ratification	144
Article 138	Coming into force	145
Article 139	Accession.....	145
Article 140	Notification of accessions	145
Article 141	Immediate effect	145
Article 142	Denunciation	145
Article 143	Registration with the United Nations.....	146

ANNEX I

Model Agreement concerning Direct Repatriation and Accommodation in Neutral Countries of Wounded and Sick Prisoners of War	147
I. Principles for direct repatriation and accommodation in neutral countries	147
A. Direct repatriation.....	147
B. Accommodation in neutral countries	150
II. General observations	150

ANNEX II

Regulations concerning Mixed Medical Commissions.....	152
---	-----

ANNEX III

Regulations concerning Collective Relief	154
--	-----

ANNEX IV

A. Identity Card	156
B. Capture Card.....	157
C. Correspondence Card and Letter	158
D. Notification of Death	160
E. Repatriation Certificate	161

ANNEX V

Model Regulations concerning Payments sent by Prisoners to their own Country	162
---	-----

III

GENEVA CONVENTION RELATIVE TO THE TREATMENT OF PRISONERS OF WAR OF 12 AUGUST 1949

PART I

GENERAL PROVISIONS

ARTICLE 1. — The High Contracting Parties undertake to respect and to ensure respect for the present Convention in all circumstances.

*Respect
for the
Convention¹*

ART. 2. — In addition to the provisions which shall be implemented in peacetime, the present Convention shall apply to all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them.

*Application
of the
Convention*

The Convention shall also apply to all cases of partial or total occupation of the territory of a High Contracting Party, even if the said occupation meets with no armed resistance.

Although one of the Powers in conflict may not be a party to the present Convention, the Powers who are parties thereto shall remain bound by it in their mutual relations. They shall furthermore be bound by the Convention in relation to the said Power, if the latter accepts and applies the provisions thereof.

ART. 3. — In the case of armed conflict not of an international character occurring in the territory of one of the High Contracting Parties, each Party to the conflict shall be bound to apply, as a minimum, the following provisions:

*Conflicts
not of an
international
character*

- 1) Persons taking no active part in the hostilities, including members of armed forces who have laid down their arms and those placed *hors de combat* by sickness, wounds, detention, or any other cause, shall in all circumstances be treated humanely,

¹ The marginal notes or titles of articles have been drafted by the Swiss Federal Department of Foreign Affairs.

without any adverse distinction founded on race, colour, religion or faith, sex, birth or wealth, or any other similar criteria.

To this end, the following acts are and shall remain prohibited at any time and in any place whatsoever with respect to the above-mentioned persons:

- a) violence to life and person, in particular murder of all kinds, mutilation, cruel treatment and torture;
- b) taking of hostages;
- c) outrages upon personal dignity, in particular, humiliating and degrading treatment;
- d) the passing of sentences and the carrying out of executions without previous judgment pronounced by a regularly constituted court affording all the judicial guarantees which are recognized as indispensable by civilized peoples.

- 2) The wounded and sick shall be collected and cared for.

An impartial humanitarian body, such as the International Committee of the Red Cross, may offer its services to the Parties to the conflict.

The Parties to the conflict should further endeavour to bring into force, by means of special agreements, all or part of the other provisions of the present Convention.

The application of the preceding provisions shall not affect the legal status of the Parties to the conflict.

*Prisoners
of war*

ART. 4. — A. Prisoners of war, in the sense of the present Convention, are persons belonging to one of the following categories, who have fallen into the power of the enemy:

- 1) Members of the armed forces of a Party to the conflict as well as members of militias or volunteer corps forming part of such armed forces;
- 2) Members of other militias and members of other volunteer corps, including those of organized resistance movements, belonging to a Party to the conflict and operating in or outside their own territory, even if this territory is occupied, provided that such militias or volunteer corps, including such organized resistance movements, fulfil the following conditions:
 - a) that of being commanded by a person responsible for his subordinates;
 - b) that of having a fixed distinctive sign recognizable at a distance;

- c) that of carrying arms openly;
 - d) that of conducting their operations in accordance with the laws and customs of war.
- 3) Members of regular armed forces who profess allegiance to a government or an authority not recognized by the Detaining Power.
 - 4) Persons who accompany the armed forces without actually being members thereof, such as civilian members of military aircraft crews, war correspondents, supply contractors, members of labour units or of services responsible for the welfare of the armed forces, provided that they have received authorization from the armed forces which they accompany, who shall provide them for that purpose with an identity card similar to the annexed model.
 - 5) Members of crews, including masters, pilots and apprentices of the merchant marine and the crews of civil aircraft of the Parties to the conflict, who do not benefit by more favourable treatment under any other provisions of international law.
 - 6) Inhabitants of a non-occupied territory who, on the approach of the enemy, spontaneously take up arms to resist the invading forces, without having had time to form themselves into regular armed units, provided they carry arms openly and respect the laws and customs of war.

B. The following shall likewise be treated as prisoners of war under the present Convention:

- 1) Persons belonging, or having belonged, to the armed forces of the occupied country, if the occupying Power considers it necessary by reason of such allegiance to intern them, even though it has originally liberated them while hostilities were going on outside the territory it occupies, in particular where such persons have made an unsuccessful attempt to rejoin the armed forces to which they belong and which are engaged in combat, or where they fail to comply with a summons made to them with a view to internment.
- 2) The persons belonging to one of the categories enumerated in the present Article, who have been received by neutral or non-belligerent Powers on their territory and whom these Powers are required to intern under international law, without prejudice to any more favourable treatment which these Powers may choose to give and with the exception of Articles 8, 10, 15, 30, fifth paragraph, 58-67, 92, 126 and,

where diplomatic relations exist between the Parties to the conflict and the neutral or non-belligerent Power concerned, those Articles concerning the Protecting Power. Where such diplomatic relations exist, the Parties to a conflict on whom these persons depend shall be allowed to perform towards them the functions of a Protecting Power as provided in the present Convention, without prejudice to the functions which these Parties normally exercise in conformity with diplomatic and consular usage and treaties.

C. This Article shall in no way affect the status of medical personnel and chaplains as provided for in Article 33 of the present Convention.

*Beginning
and end of
application*

ART. 5. — The present Convention shall apply to the persons referred to in Article 4 from the time they fall into the power of the enemy and until their final release and repatriation.

Should any doubt arise as to whether persons having committed a belligerent act and having fallen into the hands of the enemy belong to any of the categories enumerated in Article 4, such persons shall enjoy the protection of the present Convention until such time as their status has been determined by a competent tribunal.

*Special
agreements*

ART. 6. — In addition to the agreements expressly provided for in Articles 10, 23, 28, 33, 60, 65, 66, 67, 72, 73, 75, 109, 110, 118, 119, 122 and 132, the High Contracting Parties may conclude other special agreements for all matters concerning which they may deem it suitable to make separate provision. No special agreement shall adversely affect the situation of prisoners of war, as defined by the present Convention, nor restrict the rights which it confers upon them.

Prisoners of war shall continue to have the benefit of such agreements as long as the Convention is applicable to them, except where express provisions to the contrary are contained in the aforesaid or in subsequent agreements, or where more favourable measures have been taken with regard to them by one or other of the Parties to the conflict.

*Non-
renunciation
of rights*

ART. 7. — Prisoners of war may in no circumstances renounce in part or in entirety the rights secured to them by the present Convention, and by the special agreements referred to in the foregoing Article, if such there be.

ART. 8. — The present Convention shall be applied with the co-operation and under the scrutiny of the Protecting Powers whose duty it is to safeguard the interests of the Parties to the conflict. For this purpose, the Protecting Powers may appoint, apart from their diplomatic or consular staff, delegates from amongst their own nationals or the nationals of other neutral Powers. The said delegates shall be subject to the approval of the Power with which they are to carry out their duties.

*Protecting
Powers*

The Parties to the conflict shall facilitate to the greatest extent possible the task of the representatives or delegates of the Protecting Powers.

The representatives or delegates of the Protecting Powers shall not in any case exceed their mission under the present Convention. They shall, in particular, take account of the imperative necessities of security of the State wherein they carry out their duties.

ART. 9. — The provisions of the present Convention constitute no obstacle to the humanitarian activities which the International Committee of the Red Cross or any other impartial humanitarian organization may, subject to the consent of the Parties to the conflict concerned, undertake for the protection of prisoners of war and for their relief.

*Activities
of the
International
Committee of
the Red Cross*

ART. 10. — The High Contracting Parties may at any time agree to entrust to an organization which offers all guarantees of impartiality and efficacy the duties incumbent on the Protecting Powers by virtue of the present Convention.

*Substitutes
for Protecting
Powers*

When prisoners of war do not benefit or cease to benefit, no matter for what reason, by the activities of a Protecting Power or of an organization provided for in the first paragraph above, the Detaining Power shall request a neutral State, or such an organization, to undertake the functions performed under the present Convention by a Protecting Power designated by the Parties to a conflict.

If protection cannot be arranged accordingly, the Detaining Power shall request or shall accept, subject to the provisions of this Article, the offer of the services of a humanitarian organization, such as the International Committee of the Red Cross, to assume the humanitarian functions performed by Protecting Powers under the present Convention.

Any neutral Power or any organization invited by the Power concerned or offering itself for these purposes, shall be required to act with a sense of responsibility towards the Party to the conflict on which persons protected by the present Convention depend, and

shall be required to furnish sufficient assurances that it is in a position to undertake the appropriate functions and to discharge them impartially.

No derogation from the preceding provisions shall be made by special agreements between Powers one of which is restricted, even temporarily, in its freedom to negotiate with the other Power or its allies by reason of military events, more particularly where the whole, or a substantial part, of the territory of the said Power is occupied.

Whenever in the present Convention mention is made of a Protecting Power, such mention applies to substitute organizations in the sense of the present Article.

*Conciliation
procedure*

ART. 11. — In cases where they deem it advisable in the interest of protected persons, particularly in cases of disagreement between the Parties to the conflict as to the application or interpretation of the provisions of the present Convention, the Protecting Powers shall lend their good offices with a view to settling the disagreement.

For this purpose, each of the Protecting Powers may, either at the invitation of one Party or on its own initiative, propose to the Parties to the conflict a meeting of their representatives, and in particular of the authorities responsible for prisoners of war, possibly on neutral territory suitably chosen. The Parties to the conflict shall be bound to give effect to the proposals made to them for this purpose. The Protecting Powers may, if necessary, propose for approval by the Parties to the conflict a person belonging to a neutral Power, or delegated by the International Committee of the Red Cross, who shall be invited to take part in such a meeting.

PART II

GENERAL PROTECTION OF PRISONERS OF WAR

*Responsibility
for the
treatment
of prisoners*

ART. 12. — Prisoners of war are in the hands of the enemy Power, but not of the individuals or military units who have captured them. Irrespective of the individual responsibilities that may exist, the Detaining Power is responsible for the treatment given them.

Prisoners of war may only be transferred by the Detaining Power to a Power which is a party to the Convention and after the Detaining Power has satisfied itself of the willingness and ability of such transferee Power to apply the Convention. When prisoners of

war are transferred under such circumstances, responsibility for the application of the Convention rests on the Power accepting them while they are in its custody.

Nevertheless if that Power fails to carry out the provisions of the Convention in any important respect, the Power by whom the prisoners of war were transferred shall, upon being notified by the Protecting Power, take effective measures to correct the situation or shall request the return of the prisoners of war. Such requests must be complied with.

ART. 13. — Prisoners of war must at all times be humanely treated. Any unlawful act or omission by the Detaining Power causing death or seriously endangering the health of a prisoner of war in its custody is prohibited, and will be regarded as a serious breach of the present Convention. In particular, no prisoner of war may be subjected to physical mutilation or to medical or scientific experiments of any kind which are not justified by the medical, dental or hospital treatment of the prisoner concerned and carried out in his interest.

*Humane
treatment
of prisoners*

Likewise, prisoners of war must at all times be protected, particularly against acts of violence or intimidation and against insults and public curiosity.

Measures of reprisal against prisoners of war are prohibited.

ART. 14. — Prisoners of war are entitled in all circumstances to respect for their persons and their honour.

*Respect for
the person
of prisoners*

Women shall be treated with all the regard due to their sex and shall in all cases benefit by treatment as favourable as that granted to men.

Prisoners of war shall retain the full civil capacity which they enjoyed at the time of their capture. The Detaining Power may not restrict the exercise, either within or without its own territory, of the rights such capacity confers except in so far as the captivity requires.

ART. 15. — The Power detaining prisoners of war shall be bound to provide free of charge for their maintenance and for the medical attention required by their state of health.

*Maintenance
of prisoners*

ART. 16. — Taking into consideration the provisions of the present Convention relating to rank and sex, and subject to any privileged treatment which may be accorded to them by reason of their state of health, age or professional qualifications, all prisoners of war shall be treated alike by the Detaining Power, without any adverse distinction based on race, nationality, religious belief or political opinions, or any other distinction founded on similar criteria.

*Equality of
treatment*

PART III

CAPTIVITY

SECTION I

BEGINNING OF CAPTIVITY

*Questioning
of prisoners*

ART. 17. — Every prisoner of war, when questioned on the subject, is bound to give only his surname, first names and rank, date of birth, and army, regimental, personal or serial number, or failing this, equivalent information.

If he wilfully infringes this rule, he may render himself liable to a restriction of the privileges accorded to his rank or status.

Each Party to a conflict is required to furnish the persons under its jurisdiction who are liable to become prisoners of war, with an identity card showing the owner's surname, first names, rank, army, regimental, personal or serial number or equivalent information, and date of birth. The identity card may, furthermore, bear the signature or the finger-prints, or both, of the owner, and may bear, as well, any other information the Party to the conflict may wish to add concerning persons belonging to its armed forces. As far as possible the card shall measure 6.5 x 10 cm and shall be issued in duplicate. The identity card shall be shown by the prisoner of war upon demand, but may in no case be taken away from him.

No physical or mental torture, nor any other form of coercion, may be inflicted on prisoners of war to secure from them information of any kind whatever. Prisoners of war who refuse to answer may not be threatened, insulted, or exposed to any unpleasant or disadvantageous treatment of any kind.

Prisoners of war who, owing to their physical or mental condition, are unable to state their identity, shall be handed over to the medical service. The identity of such prisoners shall be established by all possible means, subject to the provisions of the preceding paragraph.

The questioning of prisoners of war shall be carried out in a language which they understand.

*Property of
prisoners*

ART. 18. — All effects and articles of personal use, except arms, horses, military equipment and military documents, shall remain in the possession of prisoners of war, likewise their metal helmets and

gas masks and like articles issued for personal protection. Effects and articles used for their clothing or feeding shall likewise remain in their possession, even if such effects and articles belong to their regulation military equipment.

At no time should prisoners of war be without identity documents. The Detaining Power shall supply such documents to prisoners of war who possess none.

Badges of rank and nationality, decorations and articles having above all a personal or sentimental value may not be taken from prisoners of war.

Sums of money carried by prisoners of war may not be taken away from them except by order of an officer, and after the amount and particulars of the owner have been recorded in a special register and an itemized receipt has been given, legibly inscribed with the name, rank and unit of the person issuing the said receipt. Sums in the currency of the Detaining Power, or which are changed into such currency at the prisoner's request, shall be placed to the credit of the prisoner's account as provided in Article 64.

The Detaining Power may withdraw articles of value from prisoners of war only for reasons of security; when such articles are withdrawn, the procedure laid down for sums of money impounded shall apply.

Such objects, likewise the sums taken away in any currency other than that of the Detaining Power and the conversion of which has not been asked for by the owners, shall be kept in the custody of the Detaining Power and shall be returned in their initial shape to prisoners of war at the end of their captivity.

ART. 19. — Prisoners of war shall be evacuated, as soon as possible after their capture, to camps situated in an area far enough from the combat zone for them to be out of danger.

*Evacuation
of prisoners*

Only those prisoners of war who, owing to wounds or sickness, would run greater risks by being evacuated than by remaining where they are, may be temporarily kept back in a danger zone.

Prisoners of war shall not be unnecessarily exposed to danger while awaiting evacuation from a fighting zone.

ART. 20. — The evacuation of prisoners of war shall always be effected humanely and in conditions similar to those for the forces of the Detaining Power in their changes of station.

*Conditions of
evacuation*

The Detaining Power shall supply prisoners of war who are being evacuated with sufficient food and potable water, and with the necessary clothing and medical attention. The Detaining Power shall take all suitable precautions to ensure their safety during

evacuation, and shall establish as soon as possible a list of the prisoners of war who are evacuated.

If prisoners of war must, during evacuation, pass through transit camps, their stay in such camps shall be as brief as possible.

SECTION II

INTERNMENT OF PRISONERS OF WAR

CHAPTER I

General Observations

*Restriction of
liberty of
movement*

ART. 21. — The Detaining Power may subject prisoners of war to internment. It may impose on them the obligation of not leaving, beyond certain limits, the camp where they are interned, or if the said camp is fenced in, of not going outside its perimeter. Subject to the provisions of the present Convention relative to penal and disciplinary sanctions, prisoners of war may not be held in close confinement except where necessary to safeguard their health and then only during the continuation of the circumstances which make such confinement necessary.

Prisoners of war may be partially or wholly released on parole or promise, in so far as is allowed by the laws of the Power on which they depend. Such measures shall be taken particularly in cases where this may contribute to the improvement of their state of health. No prisoner of war shall be compelled to accept liberty on parole or promise.

Upon the outbreak of hostilities, each Party to the conflict shall notify the adverse Party of the laws and regulations allowing or forbidding its own nationals to accept liberty on parole or promise. Prisoners of war who are paroled or who have given their promise in conformity with the laws and regulations so notified, are bound on their personal honour scrupulously to fulfil, both towards the Power on which they depend and towards the Power which has captured them, the engagements of their paroles or promises. In such cases, the Power on which they depend is bound neither to require nor to accept from them any service incompatible with the parole or promise given.

ART. 22. — Prisoners of war may be interned only in premises located on land and affording every guarantee of hygiene and healthfulness. Except in particular cases which are justified by the interest of the prisoners themselves, they shall not be interned in penitentiaries.

*Places and
conditions of
internment*

Prisoners of war interned in unhealthy areas, or where the climate is injurious for them, shall be removed as soon as possible to a more favourable climate.

The Detaining Power shall assemble prisoners of war in camps or camp compounds according to their nationality, language and customs, provided that such prisoners shall not be separated from prisoners of war belonging to the armed forces with which they were serving at the time of their capture, except with their consent.

ART. 23. — No prisoner of war may at any time be sent to, or detained in areas where he may be exposed to the fire of the combat zone, nor may his presence be used to render certain points or areas immune from military operations.

*Security of
prisoners*

Prisoners of war shall have shelters against air bombardment and other hazards of war, to the same extent as the local civilian population. With the exception of those engaged in the protection of their quarters against the aforesaid hazards, they may enter such shelters as soon as possible after the giving of the alarm. Any other protective measure taken in favour of the population shall also apply to them.

Detaining Powers shall give the Powers concerned, through the intermediary of the Protecting Powers, all useful information regarding the geographical location of prisoner of war camps.

Whenever military considerations permit, prisoner of war camps shall be indicated in the day-time by the letters PW or PG, placed so as to be clearly visible from the air. The Powers concerned may, however, agree upon any other system of marking. Only prisoner of war camps shall be marked as such.

ART. 24. — Transit or screening camps of a permanent kind shall be fitted out under conditions similar to those described in the present Section, and the prisoners therein shall have the same treatment as in other camps.

*Permanent
transit camps*

CHAPTER II

Quarters, Food and Clothing of Prisoners of War*Quarters*

ART. 25. — Prisoners of war shall be quartered under conditions as favourable as those for the forces of the Detaining Power who are billeted in the same area. The said conditions shall make allowance for the habits and customs of the prisoners and shall in no case be prejudicial to their health.

The foregoing provisions shall apply in particular to the dormitories of prisoners of war as regards both total surface and minimum cubic space, and the general installations, bedding and blankets.

The premises provided for the use of prisoners of war individually or collectively, shall be entirely protected from dampness and adequately heated and lighted, in particular between dusk and lights out. All precautions must be taken against the danger of fire.

In any camps in which women prisoners of war, as well as men, are accommodated, separate dormitories shall be provided for them.

Food

ART. 26. — The basic daily food rations shall be sufficient in quantity, quality and variety to keep prisoners of war in good health and to prevent loss of weight or the development of nutritional deficiencies. Account shall also be taken of the habitual diet of the prisoners.

The Detaining Power shall supply prisoners of war who work with such additional rations as are necessary for the labour on which they are employed.

Sufficient drinking water shall be supplied to prisoners of war. The use of tobacco shall be permitted.

Prisoners of war shall, as far as possible, be associated with the preparation of their meals; they may be employed for that purpose in the kitchens. Furthermore, they shall be given the means of preparing, themselves, the additional food in their possession.

Adequate premises shall be provided for messing.

Collective disciplinary measures affecting food are prohibited.

Clothing

ART. 27. — Clothing, underwear and footwear shall be supplied to prisoners of war in sufficient quantities by the Detaining Power, which shall make allowance for the climate of the region where the prisoners are detained. Uniforms of enemy armed forces captured by the Detaining Power should, if suitable for the climate, be made available to clothe prisoners of war.

The regular replacement and repair of the above articles shall be assured by the Detaining Power. In addition, prisoners of war who work shall receive appropriate clothing, wherever the nature of the work demands.

ART. 28. — Canteens shall be installed in all camps, where prisoners of war may procure foodstuffs, soap and tobacco and ordinary articles in daily use. The tariff shall never be in excess of local market prices.

Canteens

The profits made by camp canteens shall be used for the benefit of the prisoners; a special fund shall be created for this purpose. The prisoners' representative shall have the right to collaborate in the management of the canteen and of this fund.

When a camp is closed down, the credit balance of the special fund shall be handed to an international welfare organization, to be employed for the benefit of prisoners of war of the same nationality as those who have contributed to the fund. In case of a general repatriation, such profits shall be kept by the Detaining Power, subject to any agreement to the contrary between the Powers concerned.

CHAPTER III

Hygiene and Medical Attention

ART. 29. — The Detaining Power shall be bound to take all sanitary measures necessary to ensure the cleanliness and healthfulness of camps, and to prevent epidemics.

Hygiene

Prisoners of war shall have for their use, day and night, conveniences which conform to the rules of hygiene and are maintained in a constant state of cleanliness. In any camps in which women prisoners of war are accommodated, separate conveniences shall be provided for them.

Also, apart from the baths and showers with which the camps shall be furnished, prisoners of war shall be provided with sufficient water and soap for their personal toilet and for washing their personal laundry; the necessary installations, facilities and time shall be granted them for that purpose.

ART. 30. — Every camp shall have an adequate infirmary where prisoners of war may have the attention they require, as well as

*Medical
attention*

appropriate diet. Isolation wards shall, if necessary, be set aside for cases of contagious or mental disease.

Prisoners of war suffering from serious disease, or whose condition necessitates special treatment, a surgical operation or hospital care, must be admitted to any military or civilian medical unit where such treatment can be given, even if their repatriation is contemplated in the near future. Special facilities shall be afforded for the care to be given to the disabled, in particular to the blind, and for their rehabilitation, pending repatriation.

Prisoners of war shall have the attention, preferably, of medical personnel of the Power on which they depend and, if possible, of their nationality.

Prisoners of war may not be prevented from presenting themselves to the medical authorities for examination. The detaining authorities shall, upon request, issue to every prisoner who has undergone treatment, an official certificate indicating the nature of his illness or injury, and the duration and kind of treatment received. A duplicate of this certificate shall be forwarded to the Central Prisoners of War Agency

The costs of treatment, including those of any apparatus necessary for the maintenance of prisoners of war in good health, particularly dentures and other artificial appliances, and spectacles, shall be borne by the Detaining Power.

*Medical
inspections*

ART. 31. — Medical inspections of prisoners of war shall be held at least once a month. They shall include the checking and the recording of the weight of each prisoner of war. Their purpose shall be, in particular, to supervise the general state of health, nutrition and cleanliness of prisoners and to detect contagious diseases, especially tuberculosis, malaria and venereal disease. For this purpose the most efficient methods available shall be employed, e.g. periodic mass miniature radiography for the early detection of tuberculosis.

*Prisoners
engaged
on medical
duties*

ART. 32. — Prisoners of war who, though not attached to the medical service of their armed forces, are physicians, surgeons, dentists, nurses or medical orderlies, may be required by the Detaining Power to exercise their medical functions in the interests of prisoners of war dependent on the same Power. In that case they shall continue to be prisoners of war, but shall receive the same treatment as corresponding medical personnel retained by the Detaining Power. They shall be exempted from any other work under Article 49.

CHAPTER IV

**Medical Personnel and Chaplains Retained
to Assist Prisoners of War**

ART. 33. — Members of the medical personnel and chaplains while retained by the Detaining Power with a view to assisting prisoners of war, shall not be considered as prisoners of war. They shall, however, receive as a minimum the benefits and protection of the present Convention, and shall also be granted all facilities necessary to provide for the medical care of, and religious ministrations to prisoners of war.

*Rights and
privileges of
retained
personnel*

They shall continue to exercise their medical and spiritual functions for the benefit of prisoners of war, preferably those belonging to the armed forces upon which they depend, within the scope of the military laws and regulations of the Detaining Power and under the control of its competent services, in accordance with their professional etiquette. They shall also benefit by the following facilities in the exercise of their medical or spiritual functions:

- a) They shall be authorized to visit periodically prisoners of war situated in working detachments or in hospitals outside the camp. For this purpose, the Detaining Power shall place at their disposal the necessary means of transport.
- b) The senior medical officer in each camp shall be responsible to the camp military authorities for everything connected with the activities of retained medical personnel. For this purpose, Parties to the conflict shall agree at the outbreak of hostilities on the subject of the corresponding ranks of the medical personnel, including that of societies mentioned in Article 26 of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949. This senior medical officer, as well as chaplains, shall have the right to deal with the competent authorities of the camp on all questions relating to their duties. Such authorities shall afford them all necessary facilities for correspondence relating to these questions.
- c) Although they shall be subject to the internal discipline of the camp in which they are retained, such personnel may not be compelled to carry out any work other than that concerned with their medical or religious duties.

During hostilities, the Parties to the conflict shall agree concerning the possible relief of retained personnel and shall settle the procedure to be followed.

None of the preceding provisions shall relieve the Detaining Power of its obligations with regard to prisoners of war from the medical or spiritual point of view.

CHAPTER V

Religious, Intellectual and Physical Activities

Religious duties

ART. 34. — Prisoners of war shall enjoy complete latitude in the exercise of their religious duties, including attendance at the service of their faith, on condition that they comply with the disciplinary routine prescribed by the military authorities.

Adequate premises shall be provided where religious services may be held.

Retained chaplains

ART. 35. — Chaplains who fall into the hands of the enemy Power and who remain or are retained with a view to assisting prisoners of war, shall be allowed to minister to them and to exercise freely their ministry amongst prisoners of war of the same religion, in accordance with their religious conscience. They shall be allocated among the various camps and labour detachments containing prisoners of war belonging to the same forces, speaking the same language or practising the same religion. They shall enjoy the necessary facilities, including the means of transport provided for in Article 33, for visiting the prisoners of war outside their camp. They shall be free to correspond, subject to censorship, on matters concerning their religious duties with the ecclesiastical authorities in the country of detention and with international religious organizations. Letters and cards which they may send for this purpose shall be in addition to the quota provided for in Article 71.

Prisoners who are ministers of religion

ART. 36. — Prisoners of war who are ministers of religion, without having officiated as chaplains to their own forces, shall be at liberty, whatever their denomination, to minister freely to the members of their community. For this purpose, they shall receive the same treatment as the chaplains retained by the Detaining Power. They shall not be obliged to do any other work.

Prisoners without a minister of their religion

ART. 37. — When prisoners of war have not the assistance of a retained chaplain or of a prisoner of war minister of their faith, a minister belonging to the prisoners' or a similar denomination, or in

his absence a qualified layman, if such a course is feasible from a confessional point of view, shall be appointed, at the request of the prisoners concerned, to fill this office. This appointment, subject to the approval of the Detaining Power, shall take place with the agreement of the community of prisoners concerned and, wherever necessary, with the approval of the local religious authorities of the same faith. The person thus appointed shall comply with all regulations established by the Detaining Power in the interests of discipline and military security.

ART. 38. — While respecting the individual preferences of every prisoner, the Detaining Power shall encourage the practice of intellectual, educational, and recreational pursuits, sports and games amongst prisoners, and shall take the measures necessary to ensure the exercise thereof by providing them with adequate premises and necessary equipment.

*Recreation,
study, sports
and games*

Prisoners shall have opportunities for taking physical exercise, including sports and games and for being out of doors. Sufficient open spaces shall be provided for this purpose in all camps.

CHAPTER VI

Discipline

ART. 39. — Every prisoner of war camp shall be put under the immediate authority of a responsible commissioned officer belonging to the regular armed forces of the Detaining Power. Such officer shall have in his possession a copy of the present Convention; he shall ensure that its provisions are known to the camp staff and the guard and shall be responsible, under the direction of his government, for its application.

*Administra-
tion. Saluting*

Prisoners of war, with the exception of officers, must salute and show to all officers of the Detaining Power the external marks of respect provided for by the regulations applying in their own forces.

Officer prisoners of war are bound to salute only officers of a higher rank of the Detaining Power; they must, however, salute the camp commander regardless of his rank.

ART. 40. — The wearing of badges of rank and nationality, as well as of decorations, shall be permitted.

*Badges and
decorations*

*Posting of the
Convention,
and of
regulations
and orders
concerning
prisoners*

ART. 41. — In every camp the text of the present Convention and its Annexes and the contents of any special agreement provided for in Article 6, shall be posted, in the prisoners' own language, at places where all may read them. Copies shall be supplied, on request, to the prisoners who cannot have access to the copy which has been posted.

Regulations, orders, notices and publications of every kind relating to the conduct of prisoners of war shall be issued to them in a language which they understand. Such regulations, orders and publications shall be posted in the manner described above and copies shall be handed to the prisoners' representative. Every order and command addressed to prisoners of war individually must likewise be given in a language which they understand.

*Use of
weapons*

ART. 42. — The use of weapons against prisoners of war, especially against those who are escaping or attempting to escape, shall constitute an extreme measure, which shall always be preceded by warnings appropriate to the circumstances.

CHAPTER VII

Rank of Prisoners of War

*Notification
of ranks*

ART. 43. — Upon the outbreak of hostilities, the Parties to the conflict shall communicate to one another the titles and ranks of all the persons mentioned in Article 4 of the present Convention, in order to ensure equality of treatment between prisoners of equivalent rank. Titles and ranks which are subsequently created shall form the subject of similar communications.

The Detaining Power shall recognize promotions in rank which have been accorded to prisoners of war and which have been duly notified by the Power on which these prisoners depend.

*Treatment of
officers*

ART. 44. — Officers and prisoners of equivalent status shall be treated with the regard due to their rank and age.

In order to ensure service in officers' camps, other ranks of the same armed forces who, as far as possible, speak the same language, shall be assigned in sufficient numbers, account being taken of the rank of officers and prisoners of equivalent status. Such orderlies shall not be required to perform any other work.

Supervision of the mess by the officers themselves shall be facilitated in every way.

ART. 45. — Prisoners of war other than officers and prisoners of equivalent status shall be treated with the regard due to their rank and age.

*Treatment
of other
prisoners*

Supervision of the mess by the prisoners themselves shall be facilitated in every way.

CHAPTER VIII

Transfer of Prisoners of War after their Arrival in Camp

ART. 46. — The Detaining Power, when deciding upon the transfer of prisoners of war, shall take into account the interests of the prisoners themselves, more especially so as not to increase the difficulty of their repatriation.

Conditions

The transfer of prisoners of war shall always be effected humanely and in conditions not less favourable than those under which the forces of the Detaining Power are transferred. Account shall always be taken of the climatic conditions to which the prisoners of war are accustomed and the conditions of transfer shall in no case be prejudicial to their health.

The Detaining Power shall supply prisoners of war during transfer with sufficient food and drinking water to keep them in good health, likewise with the necessary clothing, shelter and medical attention. The Detaining Power shall take adequate precautions especially in case of transport by sea or by air, to ensure their safety during transfer, and shall draw up a complete list of all transferred prisoners before their departure.

ART. 47. — Sick or wounded prisoners of war shall not be transferred as long as their recovery may be endangered by the journey, unless their safety imperatively demands it.

*Circumstances
precluding
transfer*

If the combat zone draws closer to a camp, the prisoners of war in the said camp shall not be transferred unless their transfer can be carried out in adequate conditions of safety, or if they are exposed to greater risks by remaining on the spot than by being transferred.

ART. 48. — In the event of transfer, prisoners of war shall be officially advised of their departure and of their new postal address.

*Procedure for
transfer*

Such notifications shall be given in time for them to pack their luggage and inform their next of kin.

They shall be allowed to take with them their personal effects, and the correspondence and parcels which have arrived for them. The weight of such baggage may be limited, if the conditions of transfer so require, to what each prisoner can reasonably carry, which shall in no case be more than twenty-five kilograms per head.

Mail and parcels addressed to their former camp shall be forwarded to them without delay. The camp commander shall take, in agreement with the prisoners' representative, any measures needed to ensure the transport of the prisoners' community property and of the luggage they are unable to take with them in consequence of restrictions imposed by virtue of the second paragraph of this Article.

The costs of transfers shall be borne by the Detaining Power.

SECTION III

LABOUR OF PRISONERS OF WAR

*General
observations*

ART. 49. — The Detaining Power may utilize the labour of prisoners of war who are physically fit, taking into account their age, sex, rank and physical aptitude, and with a view particularly to maintaining them in a good state of physical and mental health.

Non-commissioned officers who are prisoners of war shall only be required to do supervisory work. Those not so required may ask for other suitable work which shall, so far as possible, be found for them.

If officers or persons of equivalent status ask for suitable work, it shall be found for them, so far as possible, but they may in no circumstances be compelled to work.

*Authorized
work*

ART. 50. — Besides work connected with camp administration, installation or maintenance, prisoners of war may be compelled to do only such work as is included in the following classes:

- a) agriculture;
- b) industries connected with the production or the extraction of raw materials, and manufacturing industries, with the exception of metallurgical, machinery and chemical industries; public works and building operations which have no military character or purpose;

- c) transport and handling of stores which are not military in character or purpose;
- d) commercial business, and arts and crafts;
- e) domestic service;
- f) public utility services having no military character or purpose.

Should the above provisions be infringed, prisoners of war shall be allowed to exercise their right of complaint, in conformity with Article 78.

ART. 51. — Prisoners of war must be granted suitable working conditions, especially as regards accommodation, food, clothing and equipment; such conditions shall not be inferior to those enjoyed by nationals of the Detaining Power employed in similar work; account shall also be taken of climatic conditions.

*Working
conditions*

The Detaining Power, in utilizing the labour of prisoners of war, shall ensure that in areas in which prisoners are employed, the national legislation concerning the protection of labour, and, more particularly, the regulations for the safety of workers, are duly applied.

Prisoners of war shall receive training and be provided with the means of protection suitable to the work they will have to do and similar to those accorded to the nationals of the Detaining Power. Subject to the provisions of Article 52, prisoners may be submitted to the normal risks run by these civilian workers.

Conditions of labour shall in no case be rendered more arduous by disciplinary measures.

ART. 52. — Unless he be a volunteer, no prisoner of war may be employed on labour which is of an unhealthy or dangerous nature.

*Dangerous
or
humiliating
labour*

No prisoner of war shall be assigned to labour which would be looked upon as humiliating for a member of the Detaining Power's own forces.

The removal of mines or similar devices shall be considered as dangerous labour.

ART. 53. — The duration of the daily labour of prisoners of war, including the time of the journey to and from, shall not be excessive, and must in no case exceed that permitted for civilian workers in the district, who are nationals of the Detaining Power and employed on the same work.

*Duration
of labour*

Prisoners of war must be allowed, in the middle of the day's work, a rest of not less than one hour. This rest will be the same as that to which workers of the Detaining Power are entitled, if the latter is of longer duration. They shall be allowed in addition a rest of

twenty-four consecutive hours every week, preferably on Sunday or the day of rest in their country of origin. Furthermore, every prisoner who has worked for one year shall be granted a rest of eight consecutive days, during which his working pay shall be paid him.

If methods of labour such as piece work are employed, the length of the working period shall not be rendered excessive thereby.

*Working pay.
Occupational
accidents
and diseases*

ART. 54. — The working pay due to prisoners of war shall be fixed in accordance with the provisions of Article 62 of the present Convention.

Prisoners of war who sustain accidents in connection with work, or who contract a disease in the course, or in consequence of their work, shall receive all the care their condition may require. The Detaining Power shall furthermore deliver to such prisoners of war a medical certificate enabling them to submit their claims to the Power on which they depend, and shall send a duplicate to the Central Prisoners of War Agency provided for in Article 123.

*Medical
supervision*

ART. 55. — The fitness of prisoners of war for work shall be periodically verified by medical examinations at least once a month. The examinations shall have particular regard to the nature of the work which prisoners of war are required to do.

If any prisoner of war considers himself incapable of working, he shall be permitted to appear before the medical authorities of his camp. Physicians or surgeons may recommend that the prisoners who are, in their opinion, unfit for work, be exempted therefrom.

*Labour
detachments*

ART. 56. — The organization and administration of labour detachments shall be similar to those of prisoner of war camps.

Every labour detachment shall remain under the control of and administratively part of a prisoner of war camp. The military authorities and the commander of the said camp shall be responsible, under the direction of their government, for the observance of the provisions of the present Convention in labour detachments.

The camp commander shall keep an up-to-date record of the labour detachments dependent on his camp, and shall communicate it to the delegates of the Protecting Power, of the International Committee of the Red Cross, or of other agencies giving relief to prisoners of war, who may visit the camp.

*Prisoners
working for
private
employers*

ART. 57. — The treatment of prisoners of war who work for private persons, even if the latter are responsible for guarding and protecting them, shall not be inferior to that which is provided for by the present Convention. The Detaining Power, the military

authorities and the commander of the camp to which such prisoners belong shall be entirely responsible for the maintenance, care, treatment, and payment of the working pay of such prisoners of war.

Such prisoners of war shall have the right to remain in communication with the prisoners' representatives in the camps on which they depend.

SECTION IV

FINANCIAL RESOURCES OF PRISONERS OF WAR

ART. 58. — Upon the outbreak of hostilities, and pending an arrangement on this matter with the Protecting Power, the Detaining Power may determine the maximum amount of money in cash or in any similar form, that prisoners may have in their possession. Any amount in excess, which was properly in their possession and which has been taken or withheld from them, shall be placed to their account, together with any monies deposited by them, and shall not be converted into any other currency without their consent.

Ready money

If prisoners of war are permitted to purchase services or commodities outside the camp against payment in cash, such payments shall be made by the prisoner himself or by the camp administration who will charge them to the accounts of the prisoners concerned. The Detaining Power will establish the necessary rules in this respect.

ART. 59. — Cash which was taken from prisoners of war, in accordance with Article 18, at the time of their capture, and which is in the currency of the Detaining Power, shall be placed to their separate accounts, in accordance with the provisions of Article 64 of the present Section.

*Amounts in
cash taken
from
prisoners*

The amounts, in the currency of the Detaining Power, due to the conversion of sums in other currencies that are taken from the prisoners of war at the same time, shall also be credited to their separate accounts.

ART. 60. — The Detaining Power shall grant all prisoners of war a monthly advance of pay, the amount of which shall be fixed by

*Advances
of pay*

conversion, into the currency of the said Power, of the following amounts:

- Category I : Prisoners ranking below sergeants: eight Swiss francs.
- Category II : Sergeants and other non-commissioned officers, or prisoners of equivalent rank: twelve Swiss francs.
- Category III : Warrant officers and commissioned officers below the rank of major or prisoners of equivalent rank: fifty Swiss francs.
- Category IV : Majors, lieutenant-colonels, colonels or prisoners of equivalent rank: sixty Swiss francs.
- Category V : General officers or prisoners of war of equivalent rank: seventy-five Swiss francs.

However, the Parties to the conflict concerned may by special agreement modify the amount of advances of pay due to prisoners of the preceding categories.

Furthermore, if the amounts indicated in the first paragraph above would be unduly high compared with the pay of the Detaining Power's armed forces or would, for any reason, seriously embarrass the Detaining Power, then, pending the conclusion of a special agreement with the Power on which the prisoners depend to vary the amounts indicated above, the Detaining Power:

- a) shall continue to credit the accounts of the prisoners with the amounts indicated in the first paragraph above;
- b) may temporarily limit the amount made available from these advances of pay to prisoners of war for their own use, to sums which are reasonable, but which, for Category I, shall never be inferior to the amount that the Detaining Power gives to the members of its own armed forces.

The reasons for any limitations will be given without delay to the Protecting Power.

Supplementary pay

ART. 61. — The Detaining Power shall accept for distribution as supplementary pay to prisoners of war sums which the Power on which the prisoners depend may forward to them, on condition that the sums to be paid shall be the same for each prisoner of the same category, shall be payable to all prisoners of that category depending on that Power, and shall be placed in their separate accounts, at the earliest opportunity, in accordance with the provisions of Article 64. Such supplementary pay shall not relieve the Detaining Power of any obligation under this Convention.

ART. 62. — Prisoners of war shall be paid a fair working rate of pay by the detaining authorities direct. The rate shall be fixed by the said authorities, but shall at no time be less than one-fourth of one Swiss franc for a full working day. The Detaining Power shall inform prisoners of war, as well as the Power on which they depend, through the intermediary of the Protecting Power, of the rate of daily working pay that it has fixed.

Working pay

Working pay shall likewise be paid by the detaining authorities to prisoners of war permanently detailed to duties or to a skilled or semi-skilled occupation in connection with the administration, installation or maintenance of camps, and to the prisoners who are required to carry out spiritual or medical duties on behalf of their comrades.

The working pay of the prisoners' representative, of his advisers, if any, and of his assistants, shall be paid out of the fund maintained by canteen profits. The scale of this working pay shall be fixed by the prisoners' representative and approved by the camp commander. If there is no such fund, the detaining authorities shall pay these prisoners a fair working rate of pay.

ART. 63. — Prisoners of war shall be permitted to receive remittances of money addressed to them individually or collectively.

*Transfer
of funds*

Every prisoner of war shall have at his disposal the credit balance of his account as provided for in the following Article, within the limits fixed by the Detaining Power, which shall make such payments as are requested. Subject to financial or monetary restrictions which the Detaining Power regards as essential, prisoners of war may also have payments made abroad. In this case payments addressed by prisoners of war to dependents shall be given priority.

In any event, and subject to the consent of the Power on which they depend, prisoners may have payments made in their own country, as follows: the Detaining Power shall send to the aforesaid Power through the Protecting Power, a notification giving all the necessary particulars concerning the prisoners of war, the beneficiaries of the payments, and the amount of the sums to be paid, expressed in the Detaining Power's currency. The said notification shall be signed by the prisoners and countersigned by the camp commander. The Detaining Power shall debit the prisoners' account by a corresponding amount; the sums thus debited shall be placed by it to the credit of the Power on which the prisoners depend.

To apply the foregoing provisions, the Detaining Power may usefully consult the Model Regulations in Annex V of the present Convention.

*Prisoners'
accounts*

ART. 64. — The Detaining Power shall hold an account for each prisoner of war, showing at least the following:

- 1) The amounts due to the prisoner or received by him as advances of pay, as working pay or derived from any other source; the sums in the currency of the Detaining Power which were taken from him; the sums taken from him and converted at his request into the currency of the said Power.
- 2) The payments made to the prisoner in cash, or in any other similar form; the payments made on his behalf and at his request; the sums transferred under Article 63, third paragraph.

*Management
of prisoners'
accounts*

ART. 65. — Every item entered in the account of a prisoner of war shall be countersigned or initialled by him, or by the prisoners' representative acting on his behalf.

Prisoners of war shall at all times be afforded reasonable facilities for consulting and obtaining copies of their accounts, which may likewise be inspected by the representatives of the Protecting Powers at the time of visits to the camp.

When prisoners of war are transferred from one camp to another, their personal accounts will follow them. In case of transfer from one Detaining Power to another, the monies which are their property and are not in the currency of the Detaining Power will follow them. They shall be given certificates for any other monies standing to the credit of their accounts.

The Parties to the conflict concerned may agree to notify to each other at specific intervals through the Protecting Power, the amount of the accounts of the prisoners of war.

*Winding up
of accounts*

ART. 66. — On the termination of captivity, through the release of a prisoner of war or his repatriation, the Detaining Power shall give him a statement, signed by an authorized officer of that Power, showing the credit balance then due to him. The Detaining Power shall also send through the Protecting Power to the government upon which the prisoner of war depends, lists giving all appropriate particulars of all prisoners of war whose captivity has been terminated by repatriation, release, escape, death or any other means, and showing the amount of their credit balances. Such lists shall be certified on each sheet by an authorized representative of the Detaining Power.

Any of the above provisions of this Article may be varied by mutual agreement between any two Parties to the conflict.

The Power on which the prisoner of war depends shall be responsible for settling with him any credit balance due to him from the Detaining Power on the termination of his captivity.

ART. 67. — Advances of pay, issued to prisoners of war in conformity with Article 60, shall be considered as made on behalf of the Power on which they depend. Such advances of pay, as well as all payments made by the said Power under Article 63, third paragraph, and Article 68, shall form the subject of arrangements between the Powers concerned, at the close of hostilities.

*Adjustments
between
Parties to the
conflict*

ART. 68. — Any claim by a prisoner of war for compensation in respect of any injury or other disability arising out of work shall be referred to the Power on which he depends, through the Protecting Power. In accordance with Article 54, the Detaining Power will, in all cases, provide the prisoner of war concerned with a statement showing the nature of the injury or disability, the circumstances in which it arose and particulars of medical or hospital treatment given for it. This statement will be signed by a responsible officer of the Detaining Power and the medical particulars certified by a medical officer.

*Claims for
compensation*

Any claim by a prisoner of war for compensation in respect of personal effects, monies or valuables impounded by the Detaining Power under Article 18 and not forthcoming on his repatriation, or in respect of loss alleged to be due to the fault of the Detaining Power or any of its servants, shall likewise be referred to the Power on which he depends. Nevertheless, any such personal effects required for use by the prisoners of war whilst in captivity shall be replaced at the expense of the Detaining Power. The Detaining Power will, in all cases, provide the prisoner of war with a statement, signed by a responsible officer, showing all available information regarding the reasons why such effects, monies or valuables have not been restored to him. A copy of this statement will be forwarded to the Power on which he depends through the Central Prisoners of War Agency provided for in Article 123.

SECTION V

RELATIONS OF PRISONERS OF WAR WITH THE EXTERIOR

ART. 69. — Immediately upon prisoners of war falling into its power, the Detaining Power shall inform them and the Powers on which they depend, through the Protecting Power, of the measures taken to carry out the provisions of the present Section. They shall

*Notification
of measures
taken*

likewise inform the parties concerned of any subsequent modifications of such measures.

Capture card

ART. 70. — Immediately upon capture, or not more than one week after arrival at a camp, even if it is a transit camp, likewise in case of sickness or transfer to hospital or another camp, every prisoner of war shall be enabled to write direct to his family, on the one hand, and to the Central Prisoners of War Agency provided for in Article 123, on the other hand, a card similar, if possible, to the model annexed to the present Convention, informing his relatives of his capture, address and state of health. The said cards shall be forwarded as rapidly as possible and may not be delayed in any manner.

Correspondence

ART. 71. — Prisoners of war shall be allowed to send and receive letters and cards. If the Detaining Power deems it necessary to limit the number of letters and cards sent by each prisoner of war, the said number shall not be less than two letters and four cards monthly, exclusive of the capture cards provided for in Article 70, and conforming as closely as possible to the models annexed to the present Convention. Further limitations may be imposed only if the Protecting Power is satisfied that it would be in the interests of the prisoners of war concerned to do so owing to difficulties of translation caused by the Detaining Power's inability to find sufficient qualified linguists to carry out the necessary censorship. If limitations must be placed on the correspondence addressed to prisoners of war, they may be ordered only by the Power on which the prisoners depend, possibly at the request of the Detaining Power. Such letters and cards must be conveyed by the most rapid method at the disposal of the Detaining Power; they may not be delayed or retained for disciplinary reasons.

Prisoners of war who have been without news for a long period, or who are unable to receive news from their next of kin or to give them news by the ordinary postal route, as well as those who are at a great distance from their homes, shall be permitted to send telegrams, the fees being charged against the prisoners of war's accounts with the Detaining Power or paid in the currency at their disposal. They shall likewise benefit by this measure in cases of urgency.

As a general rule, the correspondence of prisoners of war shall be written in their native language. The Parties to the conflict may allow correspondence in other languages.

Sacks containing prisoner of war mail must be securely sealed and labelled so as clearly to indicate their contents, and must be addressed to offices of destination.

ART. 72. — Prisoners of war shall be allowed to receive by post or by any other means individual parcels or collective shipments containing, in particular, foodstuffs, clothing, medical supplies and articles of a religious, educational or recreational character which may meet their needs, including books, devotional articles scientific equipment, examination papers, musical instruments, sports outfits and materials allowing prisoners of war to pursue their studies or their cultural activities.

Such shipments shall in no way free the Detaining Power from the obligations imposed upon it by virtue of the present Convention.

The only limits which may be placed on these shipments shall be those proposed by the Protecting Power in the interest of the prisoners themselves, or by the International Committee of the Red Cross or any other organization giving assistance to the prisoners, in respect of their own shipments only, on account of exceptional strain on transport or communications.

The conditions for the sending of individual parcels and collective relief shall, if necessary, be the subject of special agreements between the Powers concerned, which may in no case delay the receipt by the prisoners of relief supplies. Books may not be included in parcels of clothing and foodstuffs. Medical supplies shall, as a rule, be sent in collective parcels.

ART. 73. — In the absence of special agreements between the Powers concerned on the conditions for the receipt and distribution of collective relief shipments, the rules and regulations concerning collective shipments, which are annexed to the present Convention, shall be applied.

The special agreements referred to above shall in no case restrict the right of prisoners' representatives to take possession of collective relief shipments intended for prisoners of war, to proceed to their distribution or to dispose of them in the interest of the prisoners.

Nor shall such agreements restrict the right of representatives of the Protecting Power, the International Committee of the Red Cross or any other organization giving assistance to prisoners of war and responsible for the forwarding of collective shipments, to supervise their distribution to the recipients.

ART. 74. — All relief shipments for prisoners of war shall be exempt from import, customs and other dues.

Correspondence, relief shipments and authorized remittances of money addressed to prisoners of war or despatched by them through the post office, either direct or through the Information

*Relief
shipments*

*I.
General
principles*

*II.
Collective
relief*

*Exemption
from postal
and
transport
charges*

Bureaux provided for in Article 122 and the Central Prisoners of War Agency provided for in Article 123, shall be exempt from any postal dues, both in the countries of origin and destination, and in intermediate countries.

If relief shipments intended for prisoners of war cannot be sent through the post office by reason of weight or for any other cause, the cost of transportation shall be borne by the Detaining Power in all the territories under its control. The other Powers party to the Convention shall bear the cost of transport in their respective territories.

In the absence of special agreements between the Parties concerned, the costs connected with transport of such shipments, other than costs covered by the above exemption, shall be charged to the senders.

The High Contracting Parties shall endeavour to reduce, so far as possible, the rates charged for telegrams sent by prisoners of war, or addressed to them.

*Special
means of
transport*

ART. 75. — Should military operations prevent the Powers concerned from fulfilling their obligation to assure the transport of the shipments referred to in Articles 70, 71, 72 and 77, the Protecting Powers concerned, the International Committee of the Red Cross or any other organization duly approved by the Parties to the conflict may undertake to ensure the conveyance of such shipments by suitable means (railway wagons, motor vehicles, vessels or aircraft, etc.). For this purpose, the High Contracting Parties shall endeavour to supply them with such transport and to allow its circulation, especially by granting the necessary safe-conducts.

Such transport may also be used to convey:

- a) correspondence, lists and reports exchanged between the Central Information Agency referred to in Article 123 and the National Bureaux referred to in Article 122;
- b) correspondence and reports relating to prisoners of war which the Protecting Power, the International Committee of the Red Cross or any other body assisting the prisoners, exchange either with their own delegates or with the Parties to the conflict.

These provisions in no way detract from the right of any Party to the conflict to arrange other means of transport, if it should so prefer, nor preclude the granting of safe-conducts, under mutually agreed conditions, to such means of transport.

In the absence of special agreements, the costs occasioned by the use of such means of transport shall be borne proportionally by the Parties to the conflict whose nationals are benefited thereby.

ART. 76. — The censoring of correspondence addressed to prisoners of war or despatched by them shall be done as quickly as possible. Mail shall be censored only by the despatching State and the receiving State, and once only by each.

*Censorship
and
examination*

The examination of consignments intended for prisoners of war shall not be carried out under conditions that will expose the goods contained in them to deterioration; except in the case of written or printed matter, it shall be done in the presence of the addressee, or of a fellow-prisoner duly delegated by him. The delivery to prisoners of individual or collective consignments shall not be delayed under the pretext of difficulties of censorship.

Any prohibition of correspondence ordered by Parties to the conflict, either for military or political reasons, shall be only temporary and its duration shall be as short as possible.

ART. 77. — The Detaining Power shall provide all facilities for the transmission, through the Protecting Power or the Central Prisoners of War Agency provided for in Article 123, of instruments, papers or documents intended for prisoners of war or despatched by them, especially powers of attorney and wills.

*Preparation,
execution
and
transmission
of legal
documents*

In all cases they shall facilitate the preparation and execution of such documents on behalf of prisoners of war; in particular, they shall allow them to consult a lawyer and shall take what measures are necessary for the authentication of their signatures.

SECTION VI

RELATIONS BETWEEN PRISONERS OF WAR AND THE AUTHORITIES

CHAPTER I

Complaints of Prisoners of War Respecting the Conditions of Captivity

ART. 78. — Prisoners of war shall have the right to make known to the military authorities in whose power they are, their requests regarding the conditions of captivity to which they are subjected.

*Complaints
and requests*

They shall also have the unrestricted right to apply to the representatives of the Protecting Powers either through their prisoners' representative or, if they consider it necessary, direct, in order to draw their attention to any points on which they may have complaints to make regarding their conditions of captivity.

These requests and complaints shall not be limited nor considered to be a part of the correspondence quota referred to in Article 71. They must be transmitted immediately. Even if they are recognized to be unfounded, they may not give rise to any punishment.

Prisoners' representative may send periodic reports on the situation in the camps and the needs of the prisoners of war to the representatives of the Protecting Powers.

CHAPTER II

Prisoner of War Representatives

Election

ART. 79. — In all places where there are prisoners of war, except in those where there are officers, the prisoners shall freely elect by secret ballot, every six months, and also in case of vacancies, prisoners' representatives entrusted with representing them before the military authorities, the Protecting Powers, the International Committee of the Red Cross and any other organization which may assist them. These prisoners' representatives shall be eligible for re-election.

In camps for officers and persons of equivalent status or in mixed camps, the senior officer among the prisoners of war shall be recognized as the camp prisoners' representative. In camps for officers, he shall be assisted by one or more advisers chosen by the officers; in mixed camps, his assistants shall be chosen from among the prisoners of war who are not officers and shall be elected by them.

Officer prisoners of war of the same nationality shall be stationed in labour camps for prisoners of war, for the purpose of carrying out the camp administration duties for which the prisoners of war are responsible. These officers may be elected as prisoners' representatives under the first paragraph of this Article. In such a case the assistants to the prisoners' representatives shall be chosen from among those prisoners of war who are not officers.

Every representative elected must be approved by the Detaining Power before he has the right to commence his duties. Where the

Detaining Power refuses to approve a prisoner of war elected by his fellow prisoners of war, it must inform the Protecting Power of the reason for such refusal.

In all cases the prisoners' representative must have the same nationality, language and customs as the prisoners of war whom he represents. Thus, prisoners of war distributed in different sections of a camp, according to their nationality, language or customs, shall have for each section their own prisoners' representative, in accordance with the foregoing paragraphs.

ART. 80. — Prisoners' representatives shall further the physical, spiritual and intellectual well-being of prisoners of war.

Duties

In particular, where the prisoners decide to organize amongst themselves a system of mutual assistance, this organization will be within the province of the prisoners' representative, in addition to the special duties entrusted to him by other provisions of the present Convention.

Prisoners' representatives shall not be held responsible, simply by reason of their duties, for any offences committed by prisoners of war.

ART. 81. — Prisoners' representatives shall not be required to perform any other work, if the accomplishment of their duties is thereby made more difficult.

Prerogatives

Prisoners' representatives may appoint from amongst the prisoners such assistants as they may require. All material facilities shall be granted them, particularly a certain freedom of movement necessary for the accomplishment of their duties (inspection of labour detachments, receipt of supplies, etc.).

Prisoners' representatives shall be permitted to visit premises where prisoners of war are detained, and every prisoner of war shall have the right to consult freely his prisoners' representative.

All facilities shall likewise be accorded to the prisoners' representatives for communication by post and telegraph with the detaining authorities, the Protecting Powers, the International Committee of the Red Cross and their delegates, the Mixed Medical Commissions and with the bodies which give assistance to prisoners of war. Prisoners' representatives of labour detachments shall enjoy the same facilities for communication with the prisoners' representatives of the principal camp. Such communications shall not be restricted, nor considered as forming a part of the quota mentioned in Article 71.

Prisoners' representatives who are transferred shall be allowed a reasonable time to acquaint their successors with current affairs.

In case of dismissal, the reasons therefor shall be communicated to the Protecting Power.

CHAPTER III

Penal and Disciplinary Sanctions*I. General Provisions**Applicable
legislation*

ART. 82. — A prisoner of war shall be subject to the laws, regulations and orders in force in the armed forces of the Detaining Power; the Detaining Power shall be justified in taking judicial or disciplinary measures in respect of any offence committed by a prisoner of war against such laws, regulations or orders. However, no proceedings or punishments contrary to the provisions of this Chapter shall be allowed.

If any law, regulation or order of the Detaining Power shall declare acts committed by a prisoner of war to be punishable, whereas the same acts would not be punishable if committed by a member of the forces of the Detaining Power, such acts shall entail disciplinary punishments only.

*Choice of
disciplinary
or judicial
proceedings*

ART. 83. — In deciding whether proceedings in respect of an offence alleged to have been committed by a prisoner of war shall be judicial or disciplinary, the Detaining Power shall ensure that the competent authorities exercise the greatest leniency and adopt, wherever possible, disciplinary rather than judicial measures.

Courts

ART. 84. — A prisoner of war shall be tried only by a military court, unless the existing laws of the Detaining Power expressly permit the civil courts to try a member of the armed forces of the Detaining Power in respect of the particular offence alleged to have been committed by the prisoner of war.

In no circumstances whatever shall a prisoner of war be tried by a court of any kind which does not offer the essential guarantees of independence and impartiality as generally recognized, and, in particular, the procedure of which does not afford the accused the rights and means of defence provided for in Article 105.

*Offences
committed
before
capture*

ART. 85. — Prisoners of war prosecuted under the laws of the Detaining Power for acts committed prior to capture shall retain, even if convicted, the benefits of the present Convention.

*“Non bis
in idem”*

ART. 86. — No prisoner of war may be punished more than once for the same act, or on the same charge.

ART. 87. — Prisoners of war may not be sentenced by the military authorities and courts of the Detaining Power to any penalties except those provided for in respect of members of the armed forces of the said Power who have committed the same acts.

Penalties

When fixing the penalty, the courts or authorities of the Detaining Power shall take into consideration, to the widest extent possible, the fact that the accused, not being a national of the Detaining Power, is not bound to it by any duty of allegiance, and that he is in its power as the result of circumstances independent of his own will. The said courts or authorities shall be at liberty to reduce the penalty provided for the violation of which the prisoner of war is accused, and shall therefore not be bound to apply the minimum penalty prescribed.

Collective punishment for individual acts, corporal punishment, imprisonment in premises without daylight and, in general, any form of torture or cruelty, are forbidden.

No prisoner of war may be deprived of his rank by the Detaining Power, or prevented from wearing his badges.

ART. 88. — Officers, non-commissioned officers and men who are prisoners of war undergoing a disciplinary or judicial punishment, shall not be subjected to more severe treatment than that applied in respect of the same punishment to members of the armed forces of the Detaining Power of equivalent rank.

*Execution
of penalties*

A woman prisoner of war shall not be awarded or sentenced to a punishment more severe, or treated whilst undergoing punishment more severely, than a woman member of the armed forces of the Detaining Power dealt with for a similar offence.

In no case may a woman prisoner of war be awarded or sentenced to a punishment more severe, or treated whilst undergoing punishment more severely, than a male member of the armed forces of the Detaining Power dealt with for a similar offence.

Prisoners of war who have served disciplinary or judicial sentences may not be treated differently from other prisoners of war.

II. Disciplinary Sanctions

ART. 89. — The disciplinary punishments applicable to prisoners of war are the following:

*General
observations*

- 1) A fine which shall not exceed 50 per cent of the advances of pay and working pay which the prisoner of war would otherwise receive under the provisions of Articles 60 and 62 during a period of not more than thirty days.

*I.
Forms of
punishment*

- 2) Discontinuance of privileges granted over and above the treatment provided for by the present Convention.
- 3) Fatigue duties not exceeding two hours daily.
- 4) Confinement.

The punishment referred to under 3) shall not be applied to officers.

In no case shall disciplinary punishments be inhuman, brutal or dangerous to the health of prisoners of war.

*II.
Duration of
punishments*

ART. 90. — The duration of any single punishment shall in no case exceed thirty days. Any period of confinement awaiting the hearing of a disciplinary offence or the award of disciplinary punishment shall be deducted from an award pronounced against a prisoner of war.

The maximum of thirty days provided above may not be exceeded, even if the prisoner of war is answerable for several acts at the same time when he is awarded punishment, whether such acts are related or not.

The period between the pronouncing of an award of disciplinary punishment and its execution shall not exceed one month.

When a prisoner of war is awarded a further disciplinary punishment, a period of at least three days shall elapse between the execution of any two of the punishments, if the duration of one of these is ten days or more.

*Escapes
I.
Successful
escape*

ART. 91. — The escape of a prisoner of war shall be deemed to have succeeded when:

- 1) he has joined the armed forces of the Power on which he depends, or those of an allied Power;
- 2) he has left the territory under the control of the Detaining Power, or of an ally of the said Power;
- 3) he has joined a ship flying the flag of the Power on which he depends, or of an allied Power, in the territorial waters of the Detaining Power, the said ship not being under the control of the last named Power.

Prisoners of war who have made good their escape in the sense of this Article and who are recaptured, shall not be liable to any punishment in respect of their previous escape.

*II.
Unsuccessful
escape*

ART. 92. — A prisoner of war who attempts to escape and is recaptured before having made good his escape in the sense of Article 91 shall be liable only to a disciplinary punishment in respect of this act, even if it is a repeated offence.

A prisoner of war who is recaptured shall be handed over without delay to the competent military authority.

Article 88, fourth paragraph, notwithstanding, prisoners of war punished as a result of an unsuccessful escape may be subjected to special surveillance. Such surveillance must not affect the state of their health, must be undergone in a prisoner of war camp, and must not entail the suppression of any of the safeguards granted them by the present Convention.

ART. 93. — Escape or attempt to escape, even if it is a repeated offence, shall not be deemed an aggravating circumstance if the prisoner of war is subjected to trial by judicial proceedings in respect of an offence committed during his escape or attempt to escape.

In conformity with the principle stated in Article 83, offences committed by prisoners of war with the sole intention of facilitating their escape and which do not entail any violence against life or limb, such as offences against public property, theft without intention of self-enrichment, the drawing up or use of false papers, the wearing of civilian clothing, shall occasion disciplinary punishment only.

Prisoners of war who aid or abet an escape or an attempt to escape shall be liable on this count to disciplinary punishment only.

ART. 94. — If an escaped prisoner of war is recaptured, the Power on which he depends shall be notified thereof in the manner defined in Article 122, provided notification of his escape has been made.

ART. 95. — A prisoner of war accused of an offence against discipline shall not be kept in confinement pending the hearing unless a member of the armed forces of the Detaining Power would be so kept if he were accused of a similar offence, or if it is essential in the interests of camp order and discipline.

Any period spent by a prisoner of war in confinement awaiting the disposal of an offence against discipline shall be reduced to an absolute minimum and shall not exceed fourteen days.

The provisions of Articles 97 and 98 of this Chapter shall apply to prisoners of war who are in confinement awaiting the disposal of offences against discipline.

ART. 96. — Acts which constitute offences against discipline shall be investigated immediately.

Without prejudice to the competence of courts and superior military authorities, disciplinary punishment may be ordered only by an officer having disciplinary powers in his capacity as camp

*III.
Connected
offences*

*IV.
Notification
of recapture*

Procedure

*I.
Confinement
awaiting
hearing*

*II.
Competent
authorities
and right of
defence*

commander, or by a responsible officer who replaces him or to whom he has delegated his disciplinary powers.

In no case may such powers be delegated to a prisoner of war or be exercised by a prisoner of war.

Before any disciplinary award is pronounced, the accused shall be given precise information regarding the offences of which he is accused, and given an opportunity of explaining his conduct and of defending himself. He shall be permitted, in particular, to call witnesses and to have recourse, if necessary, to the services of a qualified interpreter. The decision shall be announced to the accused prisoner of war and to the prisoners' representative.

A record of disciplinary punishments shall be maintained by the camp commander and shall be open to inspection by representatives of the Protecting Power.

*Execution of
punishment*

*I.
Premises*

ART. 97. — Prisoners of war shall not in any case be transferred to penitentiary establishments (prisons, penitentiaries, convict prisons, etc.) to undergo disciplinary punishment therein.

All premises in which disciplinary punishments are undergone shall conform to the sanitary requirements set forth in Article 25. A prisoner of war undergoing punishment shall be enabled to keep himself in a state of cleanliness, in conformity with Article 29.

Officers and persons of equivalent status shall not be lodged in the same quarters as non-commissioned officers or men.

Women prisoners of war undergoing disciplinary punishment shall be confined in separate quarters from male prisoners of war and shall be under the immediate supervision of women.

*II.
Essential
safeguards*

ART. 98. — A prisoner of war undergoing confinement as a disciplinary punishment, shall continue to enjoy the benefits of the provisions of this Convention except in so far as these are necessarily rendered inapplicable by the mere fact that he is confined. In no case may he be deprived of the benefits of the provisions of Articles 78 and 126.

A prisoner of war awarded disciplinary punishment may not be deprived of the prerogatives attached to his rank.

Prisoners of war awarded disciplinary punishment shall be allowed to exercise and to stay in the open air at least two hours daily.

They shall be allowed, on their request, to be present at the daily medical inspections. They shall receive the attention which their state of health requires and, if necessary, shall be removed to the camp infirmary or to a hospital.

They shall have permission to read and write, likewise to send and receive letters. Parcels and remittances of money, however, may

be withheld from them until the completion of the punishment; they shall meanwhile be entrusted to the prisoners' representative, who will hand over to the infirmary the perishable goods contained in such parcels.

III. Judicial Proceedings

ART. 99. — No prisoner of war may be tried or sentenced for an act which is not forbidden by the law of the Detaining Power or by international law, in force at the time the said act was committed.

*Essential
rules*

No moral or physical coercion may be exerted on a prisoner of war in order to induce him to admit himself guilty of the act of which he is accused.

*I.
General
principles*

No prisoner of war may be convicted without having had an opportunity to present his defence and the assistance of a qualified advocate or counsel.

ART. 100. — Prisoners of war and the Protecting Powers shall be informed as soon as possible of the offences which are punishable by the death sentence under the laws of the Detaining Power.

*II.
Death
penalty*

Other offences shall not thereafter be made punishable by the death penalty without the concurrence of the Power upon which the prisoners of war depend.

The death sentence cannot be pronounced on a prisoner of war unless the attention of the court has, in accordance with Article 87, second paragraph, been particularly called to the fact that since the accused is not a national of the Detaining Power, he is not bound to it by any duty of allegiance, and that he is in its power as the result of circumstances independent of his own will.

ART. 101. — If the death penalty is pronounced on a prisoner of war, the sentence shall not be executed before the expiration of a period of at least six months from the date when the Protecting Power receives, at an indicated address, the detailed communication provided for in Article 107.

*III.
Delay in
execution of
the death
penalty*

ART. 102. — A prisoner of war can be validly sentenced only if the sentence has been pronounced by the same courts according to the same procedure as in the case of members of the armed forces of the Detaining Power, and if, furthermore, the provisions of the present Chapter have been observed.

Procedure

*I.
Conditions
for validity of
sentence*

II.
*Confinement
 awaiting trial
 (Deduction
 from
 sentence,
 treatment)*

ART. 103. — Judicial investigations relating to a prisoner of war shall be conducted as rapidly as circumstances permit and so that his trial shall take place as soon as possible. A prisoner of war shall not be confined while awaiting trial unless a member of the armed forces of the Detaining Power would be so confined if he were accused of a similar offence, or if it is essential to do so in the interests of national security. In no circumstances shall this confinement exceed three months.

Any period spent by a prisoner of war in confinement awaiting trial shall be deducted from any sentence of imprisonment passed upon him and taken into account in fixing any penalty.

The provisions of Articles 97 and 98 of this Chapter shall apply to a prisoner of war whilst in confinement awaiting trial.

III.
*Notification
 of
 proceedings*

ART. 104. — In any case in which the Detaining Power has decided to institute judicial proceedings against a prisoner of war, it shall notify the Protecting Power as soon as possible and at least three weeks before the opening of the trial. This period of three weeks shall run as from the day on which such notification reaches the Protecting Power at the address previously indicated by the latter to the Detaining Power.

The said notification shall contain the following information:

- 1) surname and first names of the prisoner of war, his rank, his army, regimental, personal or serial number, his date of birth, and his profession or trade, if any;
- 2) place of internment or confinement;
- 3) specification of the charge or charges on which the prisoner of war is to be arraigned, giving the legal provisions applicable;
- 4) designation of the court which will try the case, likewise the date and place fixed for the opening of the trial.

The same communication shall be made by the Detaining Power to the prisoners' representative.

If no evidence is submitted, at the opening of a trial, that the notification referred to above was received by the Protecting Power, by the prisoner of war and by the prisoners' representative concerned, at least three weeks before the opening of the trial, then the latter cannot take place and must be adjourned.

IV.
*Rights and
 means of
 defence*

ART. 105. — The prisoner of war shall be entitled to assistance by one of his prisoner comrades, to defence by a qualified advocate or counsel of his own choice, to the calling of witnesses and, if he deems necessary, to the services of a competent interpreter. He shall

be advised of these rights by the Detaining Power in due time before the trial.

Failing a choice by the prisoner of war, the Protecting Power shall find him an advocate or counsel, and shall have at least one week at its disposal for the purpose. The Detaining Power shall deliver to the said Power, on request, a list of persons qualified to present the defence. Failing a choice of an advocate or counsel by the prisoner of war or the Protecting Power, the Detaining Power shall appoint a competent advocate or counsel to conduct the defence.

The advocate or counsel conducting the defence on behalf of the prisoner of war shall have at his disposal a period of two weeks at least before the opening of the trial, as well as the necessary facilities to prepare the defence of the accused. He may, in particular, freely visit the accused and interview him in private. He may also confer with any witnesses for the defence, including prisoners of war. He shall have the benefit of these facilities until the term of appeal or petition has expired.

Particulars of the charge or charges on which the prisoner of war is to be arraigned, as well as the documents which are generally communicated to the accused by virtue of the laws in force in the armed forces of the Detaining Power, shall be communicated to the accused prisoner of war in a language which he understands, and in good time before the opening of the trial. The same communication in the same circumstances shall be made to the advocate or counsel conducting the defence on behalf of the prisoner of war.

The representatives of the Protecting Power shall be entitled to attend the trial of the case, unless, exceptionally, this is held *in camera* in the interest of State security. In such a case the Detaining Power shall advise the Protecting Power accordingly.

ART. 106. — Every prisoner of war shall have, in the same manner as the members of the armed forces of the Detaining Power, the right of appeal or petition from any sentence pronounced upon him, with a view to the quashing or revising of the sentence or the reopening of the trial. He shall be fully informed of his right to appeal or petition and of the time limit within which he may do so.

V.
Appeals

ART. 107. — Any judgment and sentence pronounced upon a prisoner of war shall be immediately reported to the Protecting Power in the form of a summary communication, which shall also indicate whether he has the right of appeal with a view to the quashing of the sentence or the reopening of the trial. This communication shall likewise be sent to the prisoners' representative concerned. It shall also be sent to the accused

VI.
*Notification
of findings
and sentence*

prisoner of war in a language he understands, if the sentence was not pronounced in his presence. The Detaining Power shall also immediately communicate to the Protecting Power the decision of the prisoner of war to use or to waive his right of appeal.

Furthermore, if a prisoner of war is finally convicted or if a sentence pronounced on a prisoner of war in the first instance is a death sentence, the Detaining Power shall as soon as possible address to the Protecting Power a detailed communication containing:

- 1) the precise wording of the finding and sentence;
- 2) a summarized report of any preliminary investigation and of the trial, emphasizing in particular the elements of the prosecution and the defence;
- 3) notification, where applicable, of the establishment where the sentence will be served.

The communications provided for in the foregoing subparagraphs shall be sent to the Protecting Power at the address previously made known to the Detaining Power.

*Execution
of penalties.
Penal
regulations*

ART. 108. — Sentence pronounced on prisoners of war after a conviction has become duly enforceable shall be served in the same establishments and under the same conditions as in the case of members of the armed forces of the Detaining Power. These conditions shall in all cases conform to the requirements of health and humanity.

A woman prisoner of war on whom such a sentence has been pronounced shall be confined in separate quarters and shall be under the supervision of women.

In any case, prisoners of war sentenced to a penalty depriving them of their liberty shall retain the benefit of the provisions of Articles 78 and 126 of the present Convention. Furthermore, they shall be entitled to receive and despatch correspondence, to receive at least one relief parcel monthly, to take regular exercise in the open air, to have the medical care required by their state of health, and the spiritual assistance they may desire. Penalties to which they may be subjected shall be in accordance with the provisions of Article 87, third paragraph.

PART IV

TERMINATION OF CAPTIVITY

SECTION I

DIRECT REPATRIATION AND ACCOMMODATION
IN NEUTRAL COUNTRIES

ART. 109. — Subject to the provisions of the third paragraph of this Article, Parties to the conflict are bound to send back to their own country, regardless of number or rank, seriously wounded and seriously sick prisoners of war, after having cared for them until they are fit to travel, in accordance with the first paragraph of the following Article.

*General
observations*

Throughout the duration of hostilities, Parties to the conflict shall endeavour, with the co-operation of the neutral Powers concerned, to make arrangements for the accommodation in neutral countries of the sick and wounded prisoners of war referred to in the second paragraph of the following Article.

They may, in addition, conclude agreements with a view to the direct repatriation or internment in a neutral country of able-bodied prisoners of war who have undergone a long period of captivity.

No sick or injured prisoner of war who is eligible for repatriation under the first paragraph of this Article, may be repatriated against his will during hostilities.

ART. 110. — The following shall be repatriated direct;

- 1) Incurably wounded and sick whose mental or physical fitness seems to have been gravely diminished.
- 2) Wounded and sick who, according to medical opinion, are not likely to recover within one year, whose condition requires treatment and whose mental or physical fitness seems to have been gravely diminished.
- 3) Wounded and sick who have recovered, but whose mental or physical fitness seems to have been gravely and permanently diminished.

*Cases of
repatriation
and
accommo-
dation*

The following may be accommodated in a neutral country:

- 1) Wounded and sick whose recovery may be expected within one year of the date of the wound or the beginning of the illness, if treatment in a neutral country might increase the prospects of a more certain and speedy recovery.
- 2) Prisoners of war whose mental or physical health, according to medical opinion, is seriously threatened by continued captivity, but whose accommodation in a neutral country might remove such a threat.

The conditions which prisoners of war accommodated in a neutral country must fulfil in order to permit their repatriation shall be fixed, as shall likewise their status, by agreement between the Powers concerned. In general, prisoners of war who have been accommodated in a neutral country, and who belong to the following categories, should be repatriated:

- 1) those whose state of health has deteriorated so as to fulfil the conditions laid down for direct repatriation;
- 2) those whose mental or physical powers remain, even after treatment, considerably impaired.

If no special agreements are concluded between the Parties to the conflict concerned, to determine the cases of disablement or sickness entailing direct repatriation or accommodation in a neutral country, such cases shall be settled in accordance with the principles laid down in the Model Agreement concerning direct repatriation and accommodation in neutral countries of wounded and sick prisoners of war and in the Regulations concerning Mixed Medical Commissions annexed to the present Convention.

*Internment
in a neutral
country*

ART. 111. — The Detaining Power, the Power on which the prisoners of war depend, and a neutral Power agreed upon by these two Powers, shall endeavour to conclude agreements which will enable prisoners of war to be interned in the territory of the said neutral Power until the close of hostilities.

*Mixed
Medical
Commissions*

ART. 112. — Upon the outbreak of hostilities, Mixed Medical Commissions shall be appointed to examine sick and wounded prisoners of war, and to make all appropriate decisions regarding them. The appointment, duties and functioning of these Commissions shall be in conformity with the provisions of the Regulations annexed to the present Convention.

However, prisoners of war who, in the opinion of the medical authorities of the Detaining Power, are manifestly seriously injured

or seriously sick, may be repatriated without having to be examined by a Mixed Medical Commission.

ART. 113. — Besides those who are designated by the medical authorities of the Detaining Power, wounded or sick prisoners of war belonging to the categories listed below shall be entitled to present themselves for examination by the Mixed Medical Commissions provided for in the foregoing Article:

*Prisoners
entitled to
examination
by Mixed
Medical
Commissions*

- 1) Wounded and sick proposed by a physician or surgeon who is of the same nationality, or a national of a Party to the conflict allied with the Power on which the said prisoners depend, and who exercises his functions in the camp.
- 2) Wounded and sick proposed by their prisoners' representative.
- 3) Wounded and sick proposed by the Power on which they depend, or by an organization duly recognized by the said Power and giving assistance to the prisoners.

Prisoners of war who do not belong to one of the three foregoing categories may nevertheless present themselves for examination by Mixed Medical Commissions, but shall be examined only after those belonging to the said categories.

The physician or surgeon of the same nationality as the prisoners who present themselves for examination by the Mixed Medical Commission, likewise the prisoners' representative of the said prisoners, shall have permission to be present at the examination.

ART. 114. — Prisoners of war who meet with accidents shall, unless the injury is self-inflicted, have the benefit of the provisions of this Convention as regards repatriation or accommodation in a neutral country.

*Prisoners
meeting with
accidents*

ART. 115. — No prisoner of war on whom a disciplinary punishment has been imposed and who is eligible for repatriation or for accommodation in a neutral country, may be kept back on the plea that he has not undergone his punishment.

*Prisoners
serving a
sentence*

Prisoners of war detained in connection with a judicial prosecution or conviction and who are designated for repatriation or accommodation in a neutral country, may benefit by such measures before the end of the proceedings or the completion of the punishment, if the Detaining Power consents.

Parties to the conflict shall communicate to each other the names of those who will be detained until the end of the proceedings or the completion of the punishment.

*Costs of
repatriation*

ART. 116. — The costs of repatriating prisoners of war or of transporting them to a neutral country shall be borne, from the frontiers of the Detaining Power, by the Power on which the said prisoners depend.

*Activity after
repatriation*

ART. 117. — No repatriated person may be employed on active military service.

SECTION II

RELEASE AND REPATRIATION OF PRISONERS OF WAR AT THE CLOSE OF HOSTILITIES

*Release and
repatriation*

ART. 118. — Prisoners of war shall be released and repatriated without delay after the cessation of active hostilities.

In the absence of stipulations to the above effect in any agreement concluded between the Parties to the conflict with a view to the cessation of hostilities, or failing any such agreement, each of the Detaining Powers shall itself establish and execute without delay a plan of repatriation in conformity with the principle laid down in the foregoing paragraph.

In either case, the measures adopted shall be brought to the knowledge of the prisoners of war.

The costs of repatriation of prisoners of war shall in all cases be equitably apportioned between the Detaining Power and the Power on which the prisoners depend. This apportionment shall be carried out on the following basis:

- a) If the two Powers are contiguous, the Power on which the prisoners of war depend shall bear the costs of repatriation from the frontiers of the Detaining Power.
- b) If the two Powers are not contiguous, the Detaining Power shall bear the costs of transport of prisoners of war over its own territory as far as its frontier or its port of embarkation nearest to the territory of the Power on which the prisoners of war depend. The Parties concerned shall agree between themselves as to the equitable apportionment of the remaining costs of the repatriation. The conclusion of this agreement shall in no circumstances justify any delay in the repatriation of the prisoners of war.

ART. 119. — Repatriation shall be effected in conditions similar to those laid down in Articles 46 to 48 inclusive of the present Convention for the transfer of prisoners of war, having regard to the provisions of Article 118 and to those of the following paragraphs.

*Details of
procedure*

On repatriation, any articles of value impounded from prisoners of war under Article 18, and any foreign currency which has not been converted into the currency of the Detaining Power, shall be restored to them. Articles of value and foreign currency which, for any reason whatever, are not restored to prisoners of war on repatriation, shall be despatched to the Information Bureau set up under Article 122.

Prisoners of war shall be allowed to take with them their personal effects, and any correspondence and parcels which have arrived for them. The weight of such baggage may be limited, if the conditions of repatriation so require, to what each prisoner can reasonably carry. Each prisoner shall in all cases be authorized to carry at least twenty-five kilograms.

The other personal effects of the repatriated prisoner shall be left in the charge of the Detaining Power which shall have them forwarded to him as soon as it has concluded an agreement to this effect, regulating the conditions of transport and the payment of the costs involved, with the Power on which the prisoner depends.

Prisoners of war against whom criminal proceedings for an indictable offence are pending may be detained until the end of such proceedings, and, if necessary, until the completion of the punishment. The same shall apply to prisoners of war already convicted for an indictable offence.

Parties to the conflict shall communicate to each other the names of any prisoners of war who are detained until the end of the proceedings or until punishment has been completed.

By agreement between the Parties to the conflict, commissions shall be established for the purpose of searching for dispersed prisoners of war and of assuring their repatriation with the least possible delay.

SECTION III

DEATH OF PRISONERS OF WAR

ART. 120. — Wills of prisoners of war shall be drawn up so as to satisfy the conditions of validity required by the legislation of their country of origin, which will take steps to inform the Detaining Power of its requirements in this respect. At the request of the

*Wills, death
certificates,
burial,
cremation*

prisoner of war and, in all cases, after death, the will shall be transmitted without delay to the Protecting Power; a certified copy shall be sent to the Central Agency.

Death certificates, in the form annexed to the present Convention, or lists certified by a responsible officer, of all persons who die as prisoners of war shall be forwarded as rapidly as possible to the Prisoner of War Information Bureau established in accordance with Article 122. The death certificates or certified lists shall show particulars of identity as set out in the third paragraph of Article 17, and also the date and place of death, the cause of death, the date and place of burial and all particulars necessary to identify the graves.

The burial or cremation of a prisoner of war shall be preceded by a medical examination of the body with a view to confirming death and enabling a report to be made and, where necessary, establishing identity.

The detaining authorities shall ensure that prisoners of war who have died in captivity are honourably buried, if possible according to the rites of the religion to which they belonged, and that their graves are respected, suitably maintained and marked so as to be found at any time. Wherever possible, deceased prisoners of war who depended on the same Power shall be interred in the same place.

Deceased prisoners of war shall be buried in individual graves unless unavoidable circumstances require the use of collective graves. Bodies may be cremated only for imperative reasons of hygiene, on account of the religion of the deceased or in accordance with his express wish to this effect. In case of cremation, the fact shall be stated and the reasons given in the death certificate of the deceased.

In order that graves may always be found, all particulars of burials and graves shall be recorded with a Graves Registration Service established by the Detaining Power. Lists of graves and particulars of the prisoners of war interred in cemeteries and elsewhere shall be transmitted to the Power on which such prisoners of war depended. Responsibility for the care of these graves and for records of any subsequent moves of the bodies shall rest on the Power controlling the territory, if a Party to the present Convention. These provisions shall also apply to the ashes, which shall be kept by the Graves Registration Service until proper disposal thereof in accordance with the wishes of the home country.

*Prisoners
killed or
injured in
special
circumstances*

ART. 121. — Every death or serious injury of a prisoner of war caused or suspected to have been caused by a sentry, another prisoner of war, or any other person, as well as any death the cause of which is unknown, shall be immediately followed by an official enquiry by the Detaining Power.

A communication on this subject shall be sent immediately to the Protecting Power. Statements shall be taken from witnesses, especially from those who are prisoners of war, and a report including such statements shall be forwarded to the Protecting Power.

If the enquiry indicates the guilt of one or more persons, the Detaining Power shall take all measures for the prosecution of the person or persons responsible.

PART V

INFORMATION BUREAUX AND RELIEF SOCIETIES FOR PRISONERS OF WAR

ART. 122. — Upon the outbreak of a conflict and in all cases of occupation, each of the Parties to the conflict shall institute an official Information Bureau for prisoners of war who are in its power. Neutral or non-belligerent Powers who may have received within their territory persons belonging to one of the categories referred to in Article 4, shall take the same action with respect to such persons. The Power concerned shall ensure that the Prisoners of War Information Bureau is provided with the necessary accommodation, equipment and staff to ensure its efficient working. It shall be at liberty to employ prisoners of war in such a Bureau under the conditions laid down in the Section of the present Convention dealing with work by prisoners of war.

*National
Bureaux*

Within the shortest possible period, each of the Parties to the conflict shall give its Bureau the information referred to in the fourth, fifth and sixth paragraphs of this Article regarding any enemy person belonging to one of the categories referred to in Article 4, who has fallen into its power. Neutral or non-belligerent Powers shall take the same action with regard to persons belonging to such categories whom they have received within their territory.

The Bureau shall immediately forward such information by the most rapid means to the Powers concerned, through the intermediary of the Protecting Powers and likewise of the Central Agency provided for in Article 123.

This information shall make it possible quickly to advise the next of kin concerned. Subject to the provisions of Article 17, the information shall include, in so far as available to the Information Bureau, in respect of each prisoner of war, his surname, first names,

rank, army, regimental, personal or serial number, place and full date of birth, indication of the Power on which he depends, first name of the father and maiden name of the mother, name and address of the person to be informed and the address to which correspondence for the prisoner may be sent.

The Information Bureau shall receive from the various departments concerned information regarding transfers, releases, repatriations, escapes, admissions to hospital, and deaths, and shall transmit such information in the manner described in the third paragraph above.

Likewise, information regarding the state of health of prisoners of war who are seriously ill or seriously wounded shall be supplied regularly, every week if possible.

The Information Bureau shall also be responsible for replying to all enquiries sent to it concerning prisoners of war, including those who have died in captivity; it will make any enquiries necessary to obtain the information which is asked for if this is not in its possession.

All written communications made by the Bureau shall be authenticated by a signature or a seal.

The Information Bureau shall furthermore be charged with collecting all personal valuables, including sums in currencies other than that of the Detaining Power and documents of importance to the next of kin, left by prisoners of war who have been repatriated or released, or who have escaped or died, and shall forward the said valuables to the Powers concerned. Such articles shall be sent by the Bureau in sealed packets which shall be accompanied by statements giving clear and full particulars of the identity of the person to whom the articles belonged, and by a complete list of the contents of the parcel. Other personal effects of such prisoners of war shall be transmitted under arrangements agreed upon between the Parties to the conflict concerned.

*Central
Agency*

ART. 123. — A Central Prisoners of War Information Agency shall be created in a neutral country. The International Committee of the Red Cross shall, if it deems necessary, propose to the Powers concerned the organization of such an Agency.

The function of the Agency shall be to collect all the information it may obtain through official or private channels respecting prisoners of war, and to transmit it as rapidly as possible to the country of origin of the prisoners of war or to the Power on which they depend. It shall receive from the Parties to the conflict all facilities for effecting such transmissions.

The High Contracting Parties, and in particular those whose nationals benefit by the services of the Central Agency, are requested to give the said Agency the financial aid it may require.

The foregoing provisions shall in no way be interpreted as restricting the humanitarian activities of the International Committee of the Red Cross, or of the relief Societies provided for in Article 125.

ART. 124. — The national Information Bureaux and the Central Information Agency shall enjoy free postage for mail, likewise all the exemptions provided for in Article 74, and further, so far as possible, exemption from telegraphic charges or, at least, greatly reduced rates.

*Exemption
from charges*

ART. 125. — Subject to the measures which the Detaining Powers may consider essential to ensure their security or to meet any other reasonable need, the representatives of religious organizations, relief societies, or any other organization assisting prisoners of war, shall receive from the said Powers, for themselves and their duly accredited agents, all necessary facilities for visiting the prisoners, distributing relief supplies and material, from any source, intended for religious, educational or recreative purposes, and for assisting them in organizing their leisure time within the camps. Such societies or organizations may be constituted in the territory of the Detaining Power or in any other country, or they may have an international character.

*Relief
societies
and other
organizations*

The Detaining Power may limit the number of societies and organizations whose delegates are allowed to carry out their activities in its territory and under its supervision, on condition, however, that such limitation shall not hinder the effective operation of adequate relief to all prisoners of war.

The special position of the International Committee of the Red Cross in this field shall be recognized and respected at all times.

As soon as relief supplies or material intended for the above-mentioned purposes are handed over to prisoners of war, or very shortly afterwards, receipts for each consignment, signed by the prisoners' representative, shall be forwarded to the relief society or organization making the shipment. At the same time, receipts for these consignments shall be supplied by the administrative authorities responsible for guarding the prisoners.

PART VI

EXECUTION OF THE CONVENTION

SECTION I

GENERAL PROVISIONS

Supervision

ART. 126. — Representatives or delegates of the Protecting Powers shall have permission to go to all places where prisoners of war may be, particularly to places of internment, imprisonment and labour, and shall have access to all premises occupied by prisoners of war; they shall also be allowed to go to the places of departure, passage and arrival of prisoners who are being transferred. They shall be able to interview the prisoners, and in particular the prisoners' representatives, without witnesses, either personally or through an interpreter.

Representatives and delegates of the Protecting Powers shall have full liberty to select the places they wish to visit. The duration and frequency of these visits shall not be restricted. Visits may not be prohibited except for reasons of imperative military necessity, and then only as an exceptional and temporary measure.

The Detaining Power and the Power on which the said prisoners of war depend may agree, if necessary, that compatriots of these prisoners of war be permitted to participate in the visits.

The delegates of the International Committee of the Red Cross shall enjoy the same prerogatives. The appointment of such delegates shall be submitted to the approval of the Power detaining the prisoners of war to be visited.

*Dissemination
of the
Convention*

ART. 127. — The High Contracting Parties undertake, in time of peace as in time of war, to disseminate the text of the present Convention as widely as possible in their respective countries, and, in particular, to include the study thereof in their programmes of military and, if possible, civil instruction, so that the principles thereof may become known to all their armed forces and to the entire population.

Any military or other authorities, who in time of war assume responsibilities in respect of prisoners of war, must possess the text of the Convention and be specially instructed as to its provisions.

ART. 128. — The High Contracting Parties shall communicate to one another through the Swiss Federal Council and, during hostilities, through the Protecting Powers, the official translations of the present Convention, as well as the laws and regulations which they may adopt to ensure the application thereof.

*Translations.
Rules of
application*

ART. 129. — The High Contracting Parties undertake to enact any legislation necessary to provide effective penal sanctions for persons committing, or ordering to be committed, any of the grave breaches of the present Convention defined in the following Article.

*Penal
sanctions*

Each High Contracting Party shall be under the obligation to search for persons alleged to have committed, or to have ordered to be committed, such grave breaches, and shall bring such persons, regardless of their nationality, before its own courts. It may also, if it prefers, and in accordance with the provisions of its own legislation, hand such persons over for trial to another High Contracting Party concerned, provided such High Contracting Party has made out a *prima facie* case.

*I.
General
observations*

Each High Contracting Party shall take measures necessary for the suppression of all acts contrary to the provisions of the present Convention other than the grave breaches defined in the following Article.

In all circumstances, the accused persons shall benefit by safeguards of proper trial and defence, which shall not be less favourable than those provided by Article 105 and those following of the present Convention.

ART. 130. — Grave breaches to which the preceding Article relates shall be those involving any of the following acts, if committed against persons or property protected by the Convention: wilful killing, torture or inhuman treatment, including biological experiments, wilfully causing great suffering or serious injury to body or health, compelling a prisoner of war to serve in the forces of the hostile Power, or wilfully depriving a prisoner of war of the rights of fair and regular trial prescribed in this Convention.

*II
Grave
breaches*

ART. 131. — No High Contracting Party shall be allowed to absolve itself or any other High Contracting Party of any liability incurred by itself or by another High Contracting Party in respect of breaches referred to in the preceding Article.

*III.
Responsi-
bilities of the
Contracting
Parties*

ART. 132. — At the request of a Party to the conflict, an enquiry shall be instituted, in a manner to be decided between the interested Parties, concerning any alleged violation of the Convention.

*Enquiry
procedure*

If agreement has not been reached concerning the procedure for the enquiry, the Parties should agree on the choice of an umpire who will decide upon the procedure to be followed.

Once the violation has been established, the Parties to the conflict shall put an end to it and shall repress it with the least possible delay.

SECTION II

FINAL PROVISIONS

Languages

ART. 133. — The present Convention is established in English and in French. Both texts are equally authentic.

The Swiss Federal Council shall arrange for official translations of the Convention to be made in the Russian and Spanish languages.

Relation to the 1929 Convention

ART. 134. — The present Convention replaces the Convention of July 27, 1929, in relations between the High Contracting Parties.

Relation to the Hague Convention

ART. 135. — In the relations between the Powers which are bound by the Hague Convention respecting the Laws and Customs of War on Land, whether that of July 29, 1899, or that of October 18, 1907, and which are parties to the present Convention, this last Convention shall be complementary to Chapter II of the Regulations annexed to the above-mentioned Conventions of the Hague.

Signature

ART. 136. — The present Convention, which bears the date of this day, is open to signature until February 12, 1950, in the name of the Powers represented at the Conference which opened at Geneva on April 21, 1949; furthermore, by Powers not represented at that Conference, but which are parties to the Convention of July 27, 1929.

Ratification

ART. 137. — The present Convention shall be ratified as soon as possible and the ratifications shall be deposited at Berne.

A record shall be drawn up of the deposit of each instrument of ratification and certified copies of this record shall be transmitted by the Swiss Federal Council to all the Powers in whose name the Convention has been signed, or whose accession has been notified.

ART. 138. — The present Convention shall come into force six months after not less than two instruments of ratification have been deposited.

*Coming
into force*

Thereafter, it shall come into force for each High Contracting Party six months after the deposit of the instrument of ratification.

ART. 139. — From the date of its coming into force, it shall be open to any Power in whose name the present Convention has not been signed, to accede to this Convention.

Accession

ART. 140. — Accessions shall be notified in writing to the Swiss Federal Council, and shall take effect six months after the date on which they are received.

*Notification
of accessions*

The Swiss Federal Council shall communicate the accessions to all the Powers in whose name the Convention has been signed, or whose accession has been notified.

ART. 141. — The situations provided for in Articles 2 and 3 shall give immediate effect to ratifications deposited and accessions notified by the Parties to the conflict before or after the beginning of hostilities or occupation. The Swiss Federal Council shall communicate by the quickest method any ratifications or accessions received from Parties to the conflict.

*Immediate
effect*

ART. 142. — Each of the High Contracting Parties shall be at liberty to denounce the present Convention.

Denunciation

The denunciation shall be notified in writing to the Swiss Federal Council, which shall transmit it to the Governments of all the High Contracting Parties.

The denunciation shall take effect one year after the notification thereof has been made to the Swiss Federal Council. However, a denunciation of which notification has been made at a time when the denouncing Power is involved in a conflict shall not take effect until peace has been concluded, and until after operations connected with the release and repatriation of the persons protected by the present Convention have been terminated.

The denunciation shall have effect only in respect of the denouncing Power. It shall in no way impair the obligations which the Parties to the conflict shall remain bound to fulfil by virtue of the principles of the law of nations, as they result from the usages established among civilized peoples, from the laws of humanity and the dictates of the public conscience.

*Registration
with the
United
Nations*

ART. 143. — The Swiss Federal Council shall register the present Convention with the Secretariat of the United Nations. The Swiss Federal Council shall also inform the Secretariat of the United Nations of all ratifications, accessions and denunciations received by it with respect to the present Convention.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, having deposited their respective full powers, have signed the present Convention.

DONE at Geneva this twelfth day of August 1949, in the English and French languages. The original shall be deposited in the Archives of the Swiss Confederation. The Swiss Federal Council shall transmit certified copies thereof to each of the signatory and acceding States.

ANNEX I

MODEL AGREEMENT CONCERNING DIRECT REPATRIATION AND ACCOMMODATION IN NEUTRAL COUNTRIES OF WOUNDED AND SICK PRISONERS OF WAR (see Article 110)

I. PRINCIPLES FOR DIRECT REPATRIATION AND ACCOMMODATION IN NEUTRAL COUNTRIES

A. DIRECT REPATRIATION

The following shall be repatriated direct:

- 1) All prisoners of war suffering from the following disabilities as the result of trauma: loss of limb, paralysis, articular or other disabilities, when this disability is at least the loss of a hand or a foot, or the equivalent of the loss of a hand or a foot.

Without prejudice to a more generous interpretation, the following shall be considered as equivalent to the loss of a hand or a foot:

- a) Loss of a hand or of all the fingers, or of the thumb and forefinger of one hand; loss of a foot, or of all the toes and metatarsals of one foot.
 - b) Ankylosis, loss of osseous tissue, cicatricial contracture preventing the functioning of one of the large articulations or of all the digital joints of one hand.
 - c) Pseudarthrosis of the long bones.
 - d) Deformities due to fracture or other injury which seriously interfere with function and weight-bearing power.
- 2) All wounded prisoners of war whose condition has become chronic, to the extent that prognosis appears to exclude recovery—in spite of treatment—within one year from the date of the injury, as, for example, in case of:
 - a) Projectile in the heart, even if the Mixed Medical Commission should fail, at the time of their examination, to detect any serious disorders.
 - b) Metallic splinter in the brain or the lungs, even if the Mixed Medical Commission cannot, at the time of examination, detect any local or general reaction.
 - c) Osteomyelitis, when recovery cannot be foreseen in the course of the year following the injury, and which seems likely to result in ankylosis of a joint, or other impairments equivalent to the loss of a hand or a foot.
 - d) Perforating and suppurating injury to the large joints.
 - e) Injury to the skull, with loss or shifting of bony tissue.
 - f) Injury or burning of the face with loss of tissue and functional lesions.

- g) Injury to the spinal cord.
 - h) Lesion of the peripheral nerves, the sequelae of which are equivalent to the loss of a hand or foot, and the cure of which requires more than a year from the date of injury, for example: injury to the brachial or lumbosacral plexus, the median or sciatic nerves, likewise combined injury to the radial and cubital nerves or to the lateral popliteal nerve (N. peroneus communis) and medial popliteal nerve (N. tibialis); etc. The separate injury of the radial (musculo-spiral), cubital, lateral or medial popliteal nerves shall not, however, warrant repatriation except in case of contractures or of serious neurotrophic disturbance.
 - i) Injury to the urinary system, with incapacitating results.
- 3) All sick prisoners of war whose condition has become chronic to the extent that prognosis seems to exclude recovery—in spite of treatment—within one year from the inception of the disease, as, for example, in case of:
- a) Progressive tuberculosis of any organ which, according to medical prognosis, cannot be cured, or at least considerably improved by treatment in a neutral country.
 - b) Exudate pleurisy.
 - c) Serious diseases of the respiratory organs of non-tubercular etiology, presumed incurable, for example: serious pulmonary emphysema, with or without bronchitis; chronic asthma;* chronic bronchitis* lasting more than one year in captivity; bronchiectasis;* etc.
 - d) Serious chronic affections of the circulatory system, for example: valvular lesions and myocarditis,* which have shown signs of circulatory failure during captivity, even though the Mixed Medical Commission cannot detect any such signs at the time of examination; affections of the pericardium and the vessels (Buerger's disease, aneurism of the large vessels); etc.
 - e) Serious chronic affections of the digestive organs, for example: gastric or duodenal ulcer; sequelae of gastric operations performed in captivity; chronic gastritis enteritis or colitis, having lasted more than one year and seriously affecting the general condition; cirrhosis of the liver; chronic cholecystopathy;* etc.
 - f) Serious chronic affections of the genito-urinary organs, for example: chronic diseases of the kidney with consequent disorders; nephrectomy because of a tubercular kidney; chronic pyelitis or chronic cystitis; hydronephrosis or pyonephrosis; chronic grave gynaecological conditions; normal pregnancy and obstetrical disorder, where it is impossible to accommodate in a neutral country; etc.

* The decision of the Mixed Medical Commission shall be based to a great extent on the records kept by camp physicians and surgeons of the same nationality as the prisoners of war, or on an examination by medical specialists of the Detaining Power.

- g) Serious chronic diseases of the central and peripheral nervous system, for example: all obvious psychoses and psychoneuroses, such as serious hysteria, serious captivity psychoneurosis, etc., duly verified by a specialist;* any epilepsy duly verified by the camp physician;* cerebral arteriosclerosis; chronic neuritis lasting more than one year; etc.
- h) Serious chronic diseases of the neuro-vegetative system, with considerable diminution of mental or physical fitness, noticeable loss of weight and general asthenia.
- i) Blindness of both eyes, or of one eye when the vision of the other is less than 1 in spite of the use of corrective glasses; diminution of visual acuity in cases where it is impossible to restore it by correction to an acuity of 1/2 in at least one eye;* other grave ocular affections, for example: glaucoma, iritis, choroiditis; trachoma; etc.
- k) Auditive disorders, such as total unilateral deafness, if the other ear does not discern the ordinary spoken word at a distance of one metre;* etc.
- l) Serious affections of metabolism, for example: diabetes mellitus requiring insulin treatment; etc.
- m) Serious disorders of the endocrine glands, for example: thyrotoxicosis; hypothyrosis; Addison's disease; Simmonds' cachexia; tetany; etc.
- n) Grave and chronic disorders of the blood-forming organs.
- o) Serious case of chronic intoxication, for example: lead poisoning, mercury poisoning, morphinism, cocaineism, alcoholism; gas or radiation poisoning; etc.
- p) Chronic affections of locomotion, with obvious functional disorders, for example: arthritis deformans; primary and secondary progressive chronic polyarthritis; rheumatism with serious clinical symptoms; etc.
- q) Serious chronic skin diseases, not amenable to treatment.
- r) Any malignant growth.
- s) Serious chronic infectious diseases, persisting for one year after their inception, for example: malaria with decided organic impairment, amoebic or bacillary dysentery with grave disorders; tertiary visceral syphilis resistant to treatment; leprosy; etc.
- t) Serious avitaminosis or serious inanition.

* The decision of the Mixed Medical Commission shall be based to a great extent on the records kept by camp physicians and surgeons of the same nationality as the prisoners of war, or on an examination by medical specialists of the Detaining Power.

B. ACCOMMODATION IN NEUTRAL COUNTRIES

The following shall be eligible for accommodation in a neutral country:

- 1) All wounded prisoners of war who are not likely to recover in captivity, but who might be cured or whose condition might be considerably improved by accommodation in a neutral country.
- 2) Prisoners of war suffering from any form of tuberculosis, of whatever organ, and whose treatment in a neutral country would be likely to lead to recovery or at least to considerable improvement, with the exception of primary tuberculosis cured before captivity.
- 3) Prisoners of war suffering from affections requiring treatment of the respiratory, circulatory, digestive, nervous, sensory, genito-urinary, cutaneous, locomotive organs, etc., if such treatment would clearly have better results in a neutral country than in captivity.
- 4) Prisoners of war who have undergone a nephrectomy in captivity for a non-tubercular renal affection; cases of osteomyelitis, on the way to recovery or latent; diabetes mellitus not requiring insulin treatment; etc.
- 5) Prisoners of war suffering from war or captivity neuroses.
Cases of captivity neurosis which are not cured after three months of accommodation in a neutral country, or which after that length of time are not clearly on the way to complete cure, shall be repatriated.
- 6) All prisoners of war suffering from chronic intoxication (gases, metals, alkaloids, etc.), for whom the prospects of cure in a neutral country are especially favourable.
- 7) All women prisoners of war who are pregnant or mothers with infants and small children.

The following cases shall not be eligible for accommodation in a neutral country:

- 1) All duly verified chronic psychoses.
- 2) All organic or functional nervous affections considered to be incurable.
- 3) All contagious diseases during the period in which they are transmissible, with the exception of tuberculosis.

II. GENERAL OBSERVATIONS

- 1) The conditions given shall, in a general way, be interpreted and applied in as broad a spirit as possible.

Neuropathic and psychopathic conditions caused by war or captivity, as well as cases of tuberculosis in all stages, shall above all benefit by such liberal interpretation. Prisoners of war who have sustained several wounds, none

of which, considered by itself, justifies repatriation, shall be examined in the same spirit, with due regard for the psychic traumatism due to the number of their wounds.

- 2) All unquestionable cases giving the right to direct repatriation (amputation, total blindness or deafness, open pulmonary tuberculosis, mental disorder, malignant growth, etc.) shall be examined and repatriated as soon as possible by the camp physicians or by military medical commissions appointed by the Detaining Power.
- 3) Injuries and diseases which existed before the war and which have not become worse, as well as war injuries which have not prevented subsequent military service, shall not entitle to direct repatriation.
- 4) The provisions of this Annex shall be interpreted and applied in a similar manner in all countries party to the conflict. The Powers and authorities concerned shall grant to Mixed Medical Commissions all the facilities necessary for the accomplishment of their task.
- 5) The examples quoted under (I) above represent only typical cases. Cases which do not correspond exactly to these provisions shall be judged in the spirit of the provisions of Article 110 of the present Convention, and of the principles embodied in the present Agreement.

ANNEX II

REGULATIONS CONCERNING MIXED MEDICAL COMMISSIONS

(see Article 112)

ARTICLE 1. — The Mixed Medical Commissions provided for in Article 112 of the Convention shall be composed of three members, two of whom shall belong to a neutral country, the third being appointed by the Detaining Power. One of the neutral members shall take the chair.

ART. 2. — The two neutral members shall be appointed by the International Committee of the Red Cross, acting in agreement with the Protecting Power, at the request of the Detaining Power. They may be domiciled either in their country of origin, in any other neutral country, or in the territory of the Detaining Power.

ART. 3. — The neutral members shall be approved by the Parties to the conflict concerned, who shall notify their approval to the International Committee of the Red Cross and to the Protecting Power. Upon such notification, the neutral members shall be considered as effectively appointed.

ART. 4. — Deputy members shall also be appointed in sufficient number to replace the regular members in case of need. They shall be appointed at the same time as the regular members or, at least, as soon as possible.

ART. 5. — If for any reason the International Committee of the Red Cross cannot arrange for the appointment of the neutral members, this shall be done by the Power protecting the interests of the prisoners of war to be examined.

ART. 6. — So far as possible, one of the two neutral members shall be a surgeon and the other a physician.

ART. 7. — The neutral members shall be entirely independent of the Parties to the conflict, which shall grant them all facilities in the accomplishment of their duties.

ART. 8. — By agreement with the Detaining Power, the International Committee of the Red Cross, when making the appointments provided for in Articles 2 and 4 of the present Regulations, shall settle the terms of service of the nominees.

ART. 9. — The Mixed Medical Commissions shall begin their work as soon as possible after the neutral members have been approved, and in any case within a period of three months from the date of such approval.

ART. 10. — The Mixed Medical Commissions shall examine all the prisoners designated in Article 113 of the Convention. They shall propose repatriation, rejection, or reference to a later examination. Their decisions shall be made by a majority vote.

ART. 11. — The decisions made by the Mixed Medical Commissions in each specific case shall be communicated, during the month following their visit, to the Detaining Power, the Protecting Power and the International Committee of the Red Cross. The Mixed Medical Commissions shall also inform each prisoner of war examined of the decision made, and shall issue to those whose repatriation has been proposed, certificates similar to the model appended to the present Convention.

ART. 12. — The Detaining Power shall be required to carry out the decisions of the Mixed Medical Commissions within three months of the time when it receives due notification of such decisions.

ART. 13. — If there is no neutral physician in a country where the services of a Mixed Medical Commission seem to be required, and if it is for any reason impossible to appoint neutral doctors who are resident in another country, the Detaining Power, acting in agreement with the Protecting Power, shall set up a Medical Commission which shall undertake the same duties as a Mixed Medical Commission, subject to the provisions of Articles 1, 2, 3, 4, 5 and 8 of the present Regulations.

ART. 14. — Mixed Medical Commissions shall function permanently and shall visit each camp at intervals of not more than six months.

ANNEX III

REGULATIONS CONCERNING COLLECTIVE RELIEF

(see Article 73)

ARTICLE 1. — Prisoners' representatives shall be allowed to distribute collective relief shipments for which they are responsible, to all prisoners of war administered by their camp, including those who are in hospitals, or in prisons or other penal establishments.

ART. 2. — The distribution of collective relief shipments shall be effected in accordance with the instructions of the donors and with a plan drawn up by the prisoners' representatives. The issue of medical stores shall, however, be made for preference in agreement with the senior medical officers, and the latter may, in hospitals and infirmaries, waive the said instructions, if the needs of their patients so demand. Within the limits thus defined, the distribution shall always be carried out equitably.

ART. 3. — The said prisoners' representatives or their assistants shall be allowed to go to the points of arrival of relief supplies near their camps, so as to enable the prisoners' representatives or their assistants to verify the quality as well as the quantity of the goods received, and to make out detailed reports thereon for the donors.

ART. 4. — Prisoners' representatives shall be given the facilities necessary for verifying whether the distribution of collective relief in all sub-divisions and annexes of their camps has been carried out in accordance with their instructions.

ART. 5. — Prisoners' representatives shall be allowed to fill up, and cause to be filled up by the prisoners' representatives of labour detachments or by the senior medical officers of infirmaries and hospitals, forms or questionnaires intended for the donors, relating to collective relief supplies (distribution, requirements, quantities, etc.). Such forms and questionnaires, duly completed, shall be forwarded to the donors without delay.

ART. 6. — In order to secure the regular issue of collective relief to the prisoners of war in their camp, and to meet any needs that may arise from the arrival of new contingents of prisoners, prisoners' representatives shall be allowed to build up and maintain adequate reserve stocks of collective relief. For this purpose, they shall have suitable warehouses at their disposal; each warehouse shall be provided with two locks, the prisoners' representative holding the keys of one lock and the camp commander the keys of the other.

ART. 7. — When collective consignments of clothing are available, each prisoner of war shall retain in his possession at least one complete set of clothes. If a prisoner has more than one set of clothes, the prisoners' representative shall be permitted to withdraw excess clothing from those with the largest number of sets, or particular articles in excess of one, if this is necessary in order to supply prisoners who are less well provided. He shall not, however, withdraw second sets of underclothing, socks or footwear, unless this is the only means of providing for prisoners of war with none.

ART. 8. — The High Contracting Parties, and the Detaining Powers in particular, shall authorize, as far as possible and subject to the regulations governing the supply of the population, all purchases of goods made in their territories for the distribution of collective relief to prisoners of war. They shall similarly facilitate the transfer of funds and other financial measures of a technical or administrative nature taken for the purpose of making such purchases.

ART. 9. — The foregoing provisions shall not constitute an obstacle to the right of prisoners of war to receive collective relief before their arrival in a camp or in the course of transfer, nor to the possibility of representatives of the Protecting Power, the International Committee of the Red Cross, or any other body giving assistance to prisoners which may be responsible for the forwarding of such supplies, ensuring the distribution thereof to the addressees by any other means that they may deem useful.

(See Article 4)

Remarks. — This card should be made out for preference in two or three languages, one of which is in international use. Actual size of the card: 13 by 10 centimetres. It should be folded along the dotted line.

Remarks. — This card should be made out for preference in two or three languages, one of which is in international use. Actual size of the card: 13 by 10 centimetres. It should be folded along the dotted line.

B. CAPTURE CARD*(See Article 70)*

1. Front

PRISONER OF WAR MAIL

Postage free

CAPTURE CARD FOR PRISONER OF WAR

IMPORTANT

This card must be completed by each prisoner immediately after being taken prisoner and each time his address is changed (by reason of transfer to a hospital or to another camp).

This card is distinct from the special card which each prisoner is allowed to send to his relatives.

CENTRAL PRISONERS
OF WAR AGENCY

International Committee
of the Red Cross

GENEVA
(Switzerland)

2. Reverse side

Write legibly and in
block letters

1. Power on which the
prisoner depends

2. Name 3. First names (in full) 4. First name of father

5. Date of birth 6. Place of birth

7. Rank

8. Service number

9. Address of next of kin

*10. Taken prisoner on: (or)
Coming from (Camp No., hospital, etc.)

*11. a) Good health—b) Not wounded—c) Recovered—d) Convalescent—e) Sick—
f) Slightly wounded—g) Seriously wounded.

12. My present address is: Prisoner No.

Name of camp

13. Date..... 14. Signature

* Strike out what is not applicable—Do not add any remarks—See explanations overleaf.

Remarks. — This form should be made out in two or three languages, particularly in the prisoner's own language and in that of the Detaining Power. Actual size of the form: 15 by 10.5 centimetres.

C. CORRESPONDENCE CARD AND LETTER

(See Article 71)

1. Front

PRISONER OF WAR MAIL POST CARD	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Postage free</div>
To.....	
<i>Sender:</i> Name and first names Place and date of birth Prisoner of War No. Name of camp Country where posted Place of Destination <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> Street Country..... Province or Department.....

2. Reverse side

NAME OF CAMP Date.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Write on the dotted lines only and as legibly as possible.

Remarks. — This form should be made out in two or three languages, particularly in the prisoner's own language and in that of the Detaining Power. Actual size of the form: 15 by 10 centimetres.

Remarks. — This form should be made out in two or three languages, particularly in the prisoner's own language and in that of the Detaining Power. It should be folded along the dotted line, the tab being inserted in the slit (marked by a line of asterisks); it then has the appearance of an envelope. Overleaf, it is lined like the postcard above (*Annex IV C1*); this space can contain about 250 words which the prisoner is free to write. Actual size of the folded form: 29 by 15 centimetres.

ANNEX IV

C. CORRESPONDENCE CARD AND LETTER
(See Article 71)

1. LETTER

PRISONER OF WAR MAIL

—

Postage free

To

Place

Street

Country

Department or Province

Country where posted

Name of camp

Prisoner of War No.

Date and place of birth

Name and first names

Sender:

ANNEX IV

D. NOTIFICATION OF DEATH

(See Article 120)

(Title of responsible authority)		NOTIFICATION OF DEATH	
		Power on which the prisoner depended	
Name and first names			
First name of father		
Place and date of birth		
Place and date of death		
Rank and service number (as given on identity disc)		
Address of next of kin		
Where and when taken prisoner		
Cause and circumstances of death		
Place of burial		
Is the grave marked and can it be found later by the relatives ?		
Are the personal effects of the deceased in the keeping of the Detaining Power or are they being forwarded together with this notification ?		
If forwarded, through what agency ?		
Can the person who cared for the deceased during sickness or during his last moments (doctor, nurse, minister of religion, fellow prisoner) give here or on an attached sheet a short account of the circumstances of the death and burial ?		
(Date, seal and signature of responsible authority)		Signature and address of two witnesses	
.....		

Remarks. — This form should be made out in two or three languages, particularly in the prisoner's own language and in that of the Detaining Power. Actual size of the form: 21 by 30 centimetres.

ANNEX IV

E. REPATRIATION CERTIFICATE

(see Annex II, Article 11)

REPATRIATION CERTIFICATE

Date:

Camp:

Hospital:

Surname:

First names:

Date of birth:

Rank:

Army number:

P. W. number:

Injury-Disease:

Decision of the Commission:

Chairman of the
Mixed Medical Commission:

A = direct repatriation

B = accommodation in a neutral country

NC = re-examination by next Commission

ANNEX V

MODEL REGULATIONS CONCERNING PAYMENTS SENT BY PRISONERS TO THEIR OWN COUNTRY

(see Article 63)

- 1) The notification referred to in the third paragraph of Article 63 will show:
 - a) number as specified in Article 17, rank, surname and first names of the prisoner of war who is the payer;
 - b) the name and address of the payee in the country of origin;
 - c) the amount to be so paid in the currency of the country in which he is detained.
- 2) The notification will be signed by the prisoner of war, or his witnessed mark made upon it if he cannot write, and shall be countersigned by the prisoners' representative.
- 3) The camp commander will add to this notification a certificate that the prisoner of war concerned has a credit balance of not less than the amount registered as payable.
- 4) The notification may be made up in lists, each sheet of such lists witnessed by the prisoners' representative and certified by the camp commander.

IV

GENEVA CONVENTION RELATIVE TO THE PROTECTION OF CIVILIAN PERSONS IN TIME OF WAR OF 12 AUGUST 1949

PART I

General Provisions

Article 1	Respect for the Convention	169
Article 2	Application of the Convention	169
Article 3	Conflicts not of an international character	169
Article 4	Definition of protected persons	170
Article 5	Derogations	171
Article 6	Beginning and end of application	171
Article 7	Special agreements	171
Article 8	Non-renunciation of rights	172
Article 9	Protecting Powers	172
Article 10	Activities of the International Committee of the Red Cross	172
Article 11	Substitutes for Protecting Powers	172
Article 12	Conciliation procedure	173

PART II

General Protection of Populations against certain Consequences of War

Article 13	Field of application of Part II	174
Article 14	Hospital and safety zones and localities	174
Article 15	Neutralized zones	174
Article 16	Wounded and sick: I. General protection	175
Article 17	II. Evacuation	175
Article 18	III. Protection of hospitals	175
Article 19	IV. Discontinuance of protection of hospitals	176
Article 20	V. Hospital staff	176
Article 21	VI. Land and sea transport	176
Article 22	VII. Air transport	177
Article 23	Consignments of medical supplies, food and clothing	177
Article 24	Measures relating to child welfare	178
Article 25	Family news	178
Article 26	Dispersed families	178

PART III

Status and Treatment of Protected Persons

SECTION I –	<i>Provisions common to the Territories of the Parties to the Conflict and to Occupied Territories</i>	
Article 27	Treatment: I. General observations	179
Article 28	II. Danger zones	179
Article 29	III. Responsibilities	180
Article 30	Application to Protecting Powers and relief organizations.....	180
Article 31	Prohibition of coercion.....	180
Article 32	Prohibition of corporal punishment, torture, etc.....	180
Article 33	Individual responsibility, collective penalties, pillage, reprisals	180
Article 34	Hostages	180
SECTION II –	<i>Aliens in the Territory of a Party to the Conflict</i>	
Article 35	Right to leave the territory	181
Article 36	Method of repatriation	181
Article 37	Persons in confinement	181
Article 38	Non-repatriated persons: I. General observations.....	182
Article 39	II. Means of existence.....	182
Article 40	III. Employment.....	182
Article 41	IV. Assigned residence. Internment	183
Article 42	V. Grounds for internment or assigned residence. Voluntary internment	183
Article 43	VI. Procedure	183
Article 44	VII. Refugees	184
Article 45	VIII. Transfer to another Power.....	184
Article 46	Cancellation of restrictive measures.....	184
SECTION III –	<i>Occupied Territories</i>	
Article 47	Inviolability of rights	185
Article 48	Special cases of repatriation	185
Article 49	Deportations, transfers, evacuations	185
Article 50	Children	186
Article 51	Enlistment. Labour	186
Article 52	Protection of workers.....	187
Article 53	Prohibited destruction	187
Article 54	Judges and public officials	187
Article 55	Food and medical supplies for the population	187
Article 56	Hygiene and public health	188
Article 57	Requisition of hospitals	188
Article 58	Spiritual assistance.....	188
Article 59	Relief: I. Collective relief	188

Article 60	II. Responsibilities of the Occupying Power	189
Article 61	III. Distribution.....	189
Article 62	IV. Individual relief.....	189
Article 63	National Red Cross and other relief societies	189
Article 64	Penal legislation: I. General observations.....	190
Article 65	II. Publication.....	190
Article 66	III. Competent courts	190
Article 67	IV. Applicable provisions	190
Article 68	V. Penalties. Death penalty.....	191
Article 69	VI. Deduction from sentence of period spent under arrest.....	191
Article 70	VII. Offences committed before occupation	191
Article 71	Penal procedure: I. General observations.....	192
Article 72	II. Right of defence.....	192
Article 73	III. Right of appeal	193
Article 74	IV. Assistance by the Protecting Power	193
Article 75	V. Death sentence	193
Article 76	Treatment of detainees.....	194
Article 77	Handing over of detainees at the close of occupation	194
Article 78	Security measures. Internment and assigned residence. Right of appeal.....	194
SECTION IV – <i>Regulations for the Treatment of Internees</i>		
CHAPTER I – GENERAL PROVISIONS		
Article 79	Cases of internment and applicable provisions	195
Article 80	Civil capacity.....	195
Article 81	Maintenance.....	195
Article 82	Grouping of internees.....	195
CHAPTER II – PLACES OF INTERNMENT		
Article 83	Location of places of internment. Marking of camps	196
Article 84	Separate internment.....	196
Article 85	Accommodation, hygiene	196
Article 86	Premises for religious services.....	197
Article 87	Canteens.....	197
Article 88	Air raid shelters. Protective measures.....	198
CHAPTER III – FOOD AND CLOTHING		
Article 89	Food	198
Article 90	Clothing.....	198
CHAPTER IV – HYGIENE AND MEDICAL ATTENTION		
Article 91	Medical attention	199

Article 92	Medical inspections	199
CHAPTER V – RELIGIOUS, INTELLECTUAL AND PHYSICAL ACTIVITIES		
Article 93	Religious duties	200
Article 94	Recreation, study, sports and games.....	200
Article 95	Working conditions	201
Article 96	Labour detachments	201
CHAPTER VI – PERSONAL PROPERTY AND FINANCIAL RESOURCES		
Article 97	Valuables and personal effects	202
Article 98	Financial resources and individual accounts	203
CHAPTER VII – ADMINISTRATION AND DISCIPLINE		
Article 99	Camp administration. Posting of the Convention and of orders	203
Article 100	General discipline	204
Article 101	Complaints and petitions	204
Article 102	Internee committees: I. Election of members	204
Article 103	II. Duties.....	205
Article 104	III. Prerogatives	205
CHAPTER VIII – RELATIONS WITH THE EXTERIOR		
Article 105	Notification of measures taken.....	205
Article 106	Internment card.....	206
Article 107	Correspondence.....	206
Article 108	Relief shipments: I. General principles.....	206
Article 109	II. Collective relief.....	207
Article 110	III. Exemption from postal and transport charges	207
Article 111	Special means of transport	208
Article 112	Censorship and examination.....	208
Article 113	Execution and transmission of legal documents	209
Article 114	Management of property.....	209
Article 115	Facilities for preparation and conduct of cases.....	209
Article 116	Visits.....	209
CHAPTER IX – PENAL AND DISCIPLINARY SANCTIONS		
Article 117	General provisions. Applicable legislation	209
Article 118	Penalties	210
Article 119	Disciplinary punishments.....	210
Article 120	Escapes	210
Article 121	Connected offences.....	211
Article 122	Investigations. Confinement awaiting hearing.....	211

Article 123	Competent authorities. Procedure.....	211
Article 124	Premises for disciplinary punishments	212
Article 125	Essential safeguards	212
Article 126	Provisions applicable to judicial proceedings	212

CHAPTER X – TRANSFERS OF INTERNEES

Article 127	Conditions.....	213
Article 128	Method.....	213

CHAPTER XI – DEATHS

Article 129	Wills. Death certificates	214
Article 130	Burial. Cremation.....	214
Article 131	Internees killed or injured in special circumstances.....	215

CHAPTER XII – RELEASE, REPATRIATION AND ACCOMMODATION IN
NEUTRAL COUNTRIES

Article 132	During hostilities or occupation	215
Article 133	After the close of hostilities	215
Article 134	Repatriation and return to last place of residence	216
Article 135	Costs.....	216

SECTION V – *Information Bureaux and Central Agency*

Article 136	National Bureaux	216
Article 137	Transmission of information	217
Article 138	Particulars required	217
Article 139	Forwarding of personal valuables.....	217
Article 140	Central Agency.....	218
Article 141	Exemption from charges.....	218

PART IV

Execution of the Convention

SECTION I – *General Provisions*

Article 142	Relief societies and other organizations.....	219
Article 143	Supervision	219
Article 144	Dissemination of the Convention	220
Article 145	Translations. Rules of application	220
Article 146	Penal sanctions: I. General observations.....	220
Article 147	II. Grave breaches.....	221
Article 148	III. Responsibilities of the Contracting Parties	221
Article 149	Enquiry procedure	221

SECTION II – *Final Provisions*

Article 150	Languages.....	221
Article 151	Signature	222
Article 152	Ratification.....	222
Article 153	Coming into force	222
Article 154	Relation with the Hague Conventions.....	222
Article 155	Accession.....	222
Article 156	Notification of accessions	222
Article 157	Immediate effect	222
Article 158	Denunciation	223
Article 159	Registration with the United Nations.....	223

ANNEX I

Draft Agreement relating to Hospital and Safety Zones and Localities.....	224
---	-----

ANNEX II

Draft Regulations concerning Collective Relief.....	227
---	-----

ANNEX III

I. Internment Card.....	229
II. Letter	230
III. Correspondence Card	231

IV

GENEVA CONVENTION RELATIVE TO THE PROTECTION OF CIVILIAN PERSONS IN TIME OF WAR OF 12 AUGUST 1949

PART I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. — The High Contracting Parties undertake to respect and to ensure respect for the present Convention in all circumstances.

*Respect
for the
Convention¹*

ART. 2. — In addition to the provisions which shall be implemented in peacetime, the present Convention shall apply to all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them.

*Application
of the
Convention*

The Convention shall also apply to all cases of partial or total occupation of the territory of a High Contracting Party, even if the said occupation meets with no armed resistance.

Although one of the Powers in conflict may not be a party to the present Convention, the Powers who are parties thereto shall remain bound by it in their mutual relations. They shall furthermore be bound by the Convention in relation to the said Power, if the latter accepts and applies the provisions thereof.

ART. 3. — In the case of armed conflict not of an international character occurring in the territory of one of the High Contracting Parties, each Party to the conflict shall be bound to apply, as a minimum, the following provisions:

*Conflicts
not of an
international
character*

- 1) Persons taking no active part in the hostilities, including members of armed forces who have laid down their arms and those placed *hors de combat* by sickness, wounds, detention, or any other cause, shall in all circumstances be treated

¹ The marginal notes or titles of articles have been drafted by the Swiss Federal Department of Foreign Affairs.

humanely, without any adverse distinction founded on race, colour, religion or faith, sex, birth or wealth, or any other similar criteria.

To this end, the following acts are and shall remain prohibited at any time and in any place whatsoever with respect to the above-mentioned persons:

- a) violence to life and person, in particular murder of all kinds, mutilation, cruel treatment and torture;
- b) taking of hostages;
- c) outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment;
- d) the passing of sentences and the carrying out of executions without previous judgment pronounced by a regularly constituted court, affording all the judicial guarantees which are recognized as indispensable by civilized peoples.

2) The wounded and sick shall be collected and cared for.

An impartial humanitarian body, such as the International Committee of the Red Cross, may offer its services to the Parties to the conflict.

The Parties to the conflict should further endeavour to bring into force, by means of special agreements, all or part of the other provisions of the present Convention.

The application of the preceding provisions shall not affect the legal status of the Parties to the conflict.

*Definition of
protected
persons*

ART. 4. — Persons protected by the Convention are those who at a given moment and in any manner whatsoever, find themselves, in case of a conflict or occupation, in the hands of ~~persons~~ a Party to the conflict or Occupying Power of which they are not nationals.

Nationals of a State which is not bound by the Convention are not protected by it. Nationals of a neutral State who find themselves in the territory of a belligerent State, and nationals of a co-belligerent State, shall not be regarded as protected persons while the State of which they are nationals has normal diplomatic representation in the State in whose hands they are.

The provisions of Part II are, however, wider in application, as defined in Article 13.

Persons protected by the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949, or by the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea of August 12, 1949,

or by the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949, shall not be considered as protected persons within the meaning of the present Convention.

ART. 5. — Where, in the territory of a Party to the conflict, the latter is satisfied that an individual protected person is definitely suspected of or engaged in activities hostile to the security of the State, such individual person shall not be entitled to claim such rights and privileges under the present Convention as would, if exercised in the favour of such individual person, be prejudicial to the security of such State.

Derogations

Where in occupied territory an individual protected person is detained as a spy or saboteur, or as a person under definite suspicion of activity hostile to the security of the Occupying Power, such person shall, in those cases where absolute military security so requires, be regarded as having forfeited rights of communication under the present Convention.

In each case, such persons shall nevertheless be treated with humanity, and in case of trial, shall not be deprived of the rights of fair and regular trial prescribed by the present Convention. They shall also be granted the full rights and privileges of a protected person under the present Convention at the earliest date consistent with the security of the State or Occupying Power, as the case may be.

ART. 6. — The present Convention shall apply from the outset of any conflict or occupation mentioned in Article 2.

*Beginning
and end of
application*

In the territory of Parties to the conflict, the application of the present Convention shall cease on the general close of military operations.

In the case of occupied territory, the application of the present Convention shall cease one year after the general close of military operations; however, the Occupying Power shall be bound, for the duration of the occupation, to the extent that such Power exercises the functions of government in such territory, by the provisions of the following Articles of the present Convention: 1 to 12, 27, 29 to 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 to 77, 143.

Protected persons whose release, repatriation or re-establishment may take place after such dates shall meanwhile continue to benefit by the present Convention.

ART. 7. — In addition to the agreements expressly provided for in Articles 11, 14, 15, 17, 36, 108, 109, 132, 133 and 149, the High Contracting Parties may conclude other special agreements for all matters concerning which they may deem it suitable to make

*Special
agreements*

separate provision. No special agreement shall adversely affect the situation of protected persons, as defined by the present Convention, nor restrict the rights which it confers upon them.

Protected persons shall continue to have the benefit of such agreements as long as the Convention is applicable to them, except where express provisions to the contrary are contained in the aforesaid or in subsequent agreements, or where more favourable measures have been taken with regard to them by one or other of the Parties to the conflict.

*Non-
renunciation
of rights*

ART. 8. — Protected persons may in no circumstances renounce in part or in entirety the rights secured to them by the present Convention, and by the special agreements referred to in the foregoing Article, if such there be.

*Protecting
Powers*

ART. 9. — The present Convention shall be applied with the co-operation and under the scrutiny of the Protecting Powers whose duty it is to safeguard the interests of the Parties to the conflict. For this purpose, the Protecting Powers may appoint, apart from their diplomatic or consular staff, delegates from amongst their own nationals or the nationals of other neutral Powers. The said delegates shall be subject to the approval of the Power with which they are to carry out their duties.

The Parties to the conflict shall facilitate to the greatest extent possible the task of the representatives or delegates of the Protecting Powers.

The representatives or delegates of the Protecting Powers shall not in any case exceed their mission under the present Convention. They shall, in particular, take account of the imperative necessities of security of the State wherein they carry out their duties.

*Activities
of the
International
Committee of
the Red Cross*

ART. 10. — The provisions of the present Convention constitute no obstacle to the humanitarian activities which the International Committee of the Red Cross or any other impartial humanitarian organization may, subject to the consent of the Parties to the conflict concerned, undertake for the protection of civilian persons and for their relief.

*Substitutes
for Protecting
Powers*

ART. 11. — The High Contracting Parties may at any time agree to entrust to an international organization which offers all guarantees of impartiality and efficacy the duties incumbent on the Protecting Powers by virtue of the present Convention.

When persons protected by the present Convention do not benefit or cease to benefit, no matter for what reason, by the

activities of a Protecting Power or of an organization provided for in the first paragraph above, the Detaining Power shall request a neutral State, or such an organization, to undertake the functions performed under the present Convention by a Protecting Power designated by the Parties to a conflict.

If protection cannot be arranged accordingly, the Detaining Power shall request or shall accept, subject to the provisions of this Article, the offer of the services of a humanitarian organization, such as the International Committee of the Red Cross, to assume the humanitarian functions performed by Protecting Powers under the present Convention.

Any neutral Power or any organization invited by the Power concerned or offering itself for these purposes, shall be required to act with a sense of responsibility towards the Party to the conflict on which persons protected by the present Convention depend, and shall be required to furnish sufficient assurances that it is in a position to undertake the appropriate functions and to discharge them impartially.

No derogation from the preceding provisions shall be made by special agreements between Powers one of which is restricted, even temporarily, in its freedom to negotiate with the other Power or its allies by reason of military events, more particularly where the whole, or a substantial part, of the territory of the said Power is occupied.

Whenever in the present Convention mention is made of a Protecting Power, such mention applies to substitute organizations in the sense of the present Article.

The provisions of this Article shall extend and be adapted to cases of nationals of a neutral State who are in occupied territory or who find themselves in the territory of a belligerent State in which the State of which they are nationals has not normal diplomatic representation.

ART. 12. — In cases where they deem it advisable in the interest of protected persons, particularly in cases of disagreement between the Parties to the conflict as to the application or interpretation of the provisions of the present Convention, the Protecting Powers shall lend their good offices with a view to settling the disagreement.

*Conciliation
procedure*

For this purpose, each of the Protecting Powers may, either at the invitation of one Party or on its own initiative, propose to the Parties to the conflict a meeting of their representatives, and in particular of the authorities responsible for protected persons, possibly on neutral territory suitably chosen. The Parties to the conflict shall be bound to give effect to the proposals made to them

for this purpose. The Protecting Powers may, if necessary, propose for approval by the Parties to the conflict, a person belonging to a neutral Power or delegated by the International Committee of the Red Cross, who shall be invited to take part in such a meeting.

PART II

GENERAL PROTECTION OF POPULATIONS AGAINST CERTAIN CONSEQUENCES OF WAR

*Field of
application
of Part II*

ART. 13. — The provisions of Part II cover the whole of the populations of the countries in conflict, without any adverse distinction based, in particular, on race, nationality, religion or political opinion, and are intended to alleviate the sufferings caused by war.

*Hospital and
safety zones
and localities*

ART. 14. — In time of peace, the High Contracting Parties and, after the outbreak of hostilities, the Parties thereto, may establish in their own territory and, if the need arises, in occupied areas, hospital and safety zones and localities so organized as to protect from the effects of war, wounded, sick and aged persons, children under fifteen, expectant mothers and mothers of children under seven.

Upon the outbreak and during the course of hostilities, the Parties concerned may conclude agreements on mutual recognition of the zones and localities they have created. They may for this purpose implement the provisions of the Draft Agreement annexed to the present Convention, with such amendments as they may consider necessary.

The Protecting Powers and the International Committee of the Red Cross are invited to lend their good offices in order to facilitate the institution and recognition of these hospital and safety zones and localities.

*Neutralized
zones*

ART. 15. — Any Party to the conflict may, either direct or through a neutral State or some humanitarian organization, propose to the adverse Party to establish, in the regions where fighting is taking place, neutralized zones intended to shelter from the effects of war the following persons, without distinction:

- a) wounded and sick combatants or non-combatants;

- b) civilian persons who take no part in hostilities, and who, while they reside in the zones, perform no work of a military character.

When the Parties concerned have agreed upon the geographical position, administration, food supply and supervision of the proposed neutralized zone, a written agreement shall be concluded and signed by the representatives of the Parties to the conflict. The agreement shall fix the beginning and the duration of the neutralization of the zone.

ART. 16. — The wounded and sick, as well as the infirm, and expectant mothers, shall be the object of particular protection and respect.

*Wounded
and sick*

As far as military considerations allow, each Party to the conflict shall facilitate the steps taken to search for the killed and wounded, to assist the shipwrecked and other persons exposed to grave danger, and to protect them against pillage and ill-treatment.

*I.
General
protection*

ART. 17. — The Parties to the conflict shall endeavour to conclude local agreements for the removal from besieged or encircled areas, of wounded, sick, infirm, and aged persons, children and maternity cases, and for the passage of ministers of all religions, medical personnel and medical equipment on their way to such areas.

*II.
Evacuation*

ART. 18. — Civilian hospitals organized to give care to the wounded and sick, the infirm and maternity cases, may in no circumstances be the object of attack, but shall at all times be respected and protected by the Parties to the conflict.

*III.
Protection
of hospitals*

States which are Parties to a conflict shall provide all civilian hospitals with certificates showing that they are civilian hospitals and that the buildings which they occupy are not used for any purpose which would deprive these hospitals of protection in accordance with Article 19.

Civilian hospitals shall be marked by means of the emblem provided for in Article 38 of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949, but only if so authorized by the State.

The Parties to the conflict shall, in so far as military considerations permit, take the necessary steps to make the distinctive emblems indicating civilian hospitals clearly visible to the enemy land, air and naval forces in order to obviate the possibility of any hostile action.

In view of the dangers to which hospitals may be exposed by being close to military objectives, it is recommended that such hospitals be situated as far as possible from such objectives.

IV.
*Discontinu-
ance of
protection
of hospitals*

ART. 19. — The protection to which civilian hospitals are entitled shall not cease unless they are used to commit, outside their humanitarian duties, acts harmful to the enemy. Protection may, however, cease only after due warning has been given, naming, in all appropriate cases, a reasonable time limit, and after such warning has remained unheeded.

The fact that sick or wounded members of the armed forces are nursed in these hospitals, or the presence of small arms and ammunition taken from such combatants and not yet handed to the proper service, shall not be considered to be acts harmful to the enemy.

V.
Hospital staff

ART. 20. — Persons regularly and solely engaged in the operation and administration of civilian hospitals, including the personnel engaged in the search for, removal and transporting of and caring for wounded and sick civilians, the infirm and maternity cases, shall be respected and protected.

In occupied territory and in zones of military operations, the above personnel shall be recognizable by means of an identity card certifying their status, bearing the photograph of the holder and embossed with the stamp of the responsible authority, and also by means of a stamped, water-resistant armlet which they shall wear on the left arm while carrying out their duties. This armlet shall be issued by the State and shall bear the emblem provided for in Article 38 of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949.

Other personnel who are engaged in the operation and administration of civilian hospitals shall be entitled to respect and protection and to wear the armlet, as provided in and under the conditions prescribed in this Article, while they are employed on such duties. The identity card shall state the duties on which they are employed.

The management of each hospital shall at all times hold at the disposal of the competent national or occupying authorities an up-to-date list of such personnel.

VI.
*Land and sea
transport*

ART. 21. — Convoys of vehicles or hospital trains on land or specially provided vessels on sea, conveying wounded and sick civilians, the infirm and maternity cases, shall be respected and

protected in the same manner as the hospitals provided for in Article 18, and shall be marked, with the consent of the State, by the display of the distinctive emblem provided for in Article 38 of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949.

ART. 22. — Aircraft exclusively employed for the removal of wounded and sick civilians, the infirm and maternity cases, or for the transport of medical personnel and equipment, shall not be attacked, but shall be respected while flying at heights, times and on routes specifically agreed upon between all the Parties to the conflict concerned.

They may be marked with the distinctive emblem provided for in Article 38 of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949.

Unless agreed otherwise, flights over enemy or enemy-occupied territory are prohibited.

Such aircraft shall obey every summons to land. In the event of a landing thus imposed, the aircraft with its occupants may continue its flight after examination, if any.

ART. 23. — Each High Contracting Party shall allow the free passage of all consignments of medical and hospital stores and objects necessary for religious worship intended only for civilians of another High Contracting Party, even if the latter is its adversary. It shall likewise permit the free passage of all consignments of essential foodstuffs, clothing and tonics intended for children under fifteen, expectant mothers and maternity cases.

The obligation of a High Contracting Party to allow the free passage of the consignments indicated in the preceding paragraph is subject to the condition that this Party is satisfied that there are no serious reasons for fearing:

- a) that the consignments may be diverted from their destination,
- b) that the control may not be effective, or
- c) that a definite advantage may accrue to the military efforts or economy of the enemy through the substitution of the above-mentioned consignments for goods which would otherwise be provided or produced by the enemy or through the release of such material, services or facilities as would otherwise be required for the production of such goods.

The Power which allows the passage of the consignments indicated in the first paragraph of this Article may make such

VII.
Air transport

*Consignments
of medical
supplies, food
and clothing*

permission conditional on the distribution to the persons benefited thereby being made under the local supervision of the Protecting Powers.

Such consignments shall be forwarded as rapidly as possible, and the Power which permits their free passage shall have the right to prescribe the technical arrangements under which such passage is allowed.

*Measures
relating to
child welfare*

ART. 24. — The Parties to the conflict shall take the necessary measures to ensure that children under fifteen, who are orphaned or are separated from their families as a result of the war, are not left to their own resources, and that their maintenance, the exercise of their religion and their education are facilitated in all circumstances. Their education shall, as far as possible, be entrusted to persons of a similar cultural tradition.

The Parties to the conflict shall facilitate the reception of such children in a neutral country for the duration of the conflict with the consent of the Protecting Power, if any, and under due safeguards for the observance of the principles stated in the first paragraph.

They shall, furthermore, endeavour to arrange for all children under twelve to be identified by the wearing of identity discs, or by some other means.

Family news

ART. 25. — All persons in the territory of a Party to the conflict, or in a territory occupied by it, shall be enabled to give news of a strictly personal nature to members of their families, wherever they may be, and to receive news from them. This correspondence shall be forwarded speedily and without undue delay.

If, as a result of circumstances, it becomes difficult or impossible to exchange family correspondence by the ordinary post, the Parties to the conflict concerned shall apply to a neutral intermediary, such as the Central Agency provided for in Article 140, and shall decide in consultation with it how to ensure the fulfilment of their obligations under the best possible conditions, in particular with the co-operation of the National Red Cross (Red Crescent, Red Lion and Sun) Societies.

If the Parties to the conflict deem it necessary to restrict family correspondence, such restrictions shall be confined to the compulsory use of standard forms containing twenty-five freely chosen words, and to the limitation of the number of these forms despatched to one each month.

*Dispersed
families*

ART. 26. — Each Party to the conflict shall facilitate enquiries made by members of families dispersed owing to the war, with the

object of renewing contact with one another and of meeting, if possible. It shall encourage, in particular, the work of organizations engaged on this task provided they are acceptable to it and conform to its security regulations.

PART III

STATUS AND TREATMENT OF PROTECTED PERSONS

SECTION I

PROVISIONS COMMON TO THE TERRITORIES OF THE PARTIES TO THE CONFLICT AND TO OCCUPIED TERRITORIES

ART. 27. — Protected persons are entitled, in all circumstances, to respect for their persons, their honour, their family rights, their religious convictions and practices, and their manners and customs. They shall at all times be humanely treated, and shall be protected especially against all acts of violence or threats thereof and against insults and public curiosity.

Women shall be especially protected against any attack on their honour, in particular against rape, enforced prostitution, or any form of indecent assault.

Without prejudice to the provisions relating to their state of health, age and sex, all protected persons shall be treated with the same consideration by the Party to the conflict in whose power they are, without any adverse distinction based, in particular, on race, religion or political opinion.

However, the Parties to the conflict may take such measures of control and security in regard to protected persons as may be necessary as a result of the war.

ART. 28. — The presence of a protected person may not be used to render certain points or areas immune from military operations.

Treatment

*I.
General
observations*

*II.
Danger zones*

III.
Responsibilities

ART. 29. — The Party to the conflict in whose hands protected persons may be, is responsible for the treatment accorded to them by its agents, irrespective of any individual responsibility which may be incurred.

*Application
to Protecting
Powers and
relief
organizations*

ART. 30. — Protected persons shall have every facility for making application to the Protecting Powers, the International Committee of the Red Cross, the National Red Cross (Red Crescent, Red Lion and Sun) Society of the country where they may be, as well as to any organization that might assist them.

These several organizations shall be granted all facilities for that purpose by the authorities, within the bounds set by military or security considerations.

Apart from the visits of the delegates of the Protecting Powers and of the International Committee of the Red Cross, provided for by Article 143, the Detaining or Occupying Powers shall facilitate as much as possible visits to protected persons by the representatives of other organizations whose object is to give spiritual aid or material relief to such persons.

*Prohibition
of coercion*

ART. 31. — No physical or moral coercion shall be exercised against protected persons, in particular to obtain information from them or from third parties.

*Prohibition
of corporal
punishment,
torture, etc.*

ART. 32. — The High Contracting Parties specifically agree that each of them is prohibited from taking any measure of such a character as to cause the physical suffering or extermination of protected persons in their hands. This prohibition applies not only to murder, torture, corporal punishment, mutilation and medical or scientific experiments not necessitated by the medical treatment of a protected person, but also to any other measures of brutality whether applied by civilian or military agents.

*Individual
responsibility,
collective
penalties,
pillage,
reprisals*

ART. 33. — No protected person may be punished for an offence he or she has not personally committed. Collective penalties and likewise all measures of intimidation or of terrorism are prohibited.

Pillage is prohibited.

Reprisals against protected persons and their property are prohibited.

Hostages

ART. 34. — The taking of hostages is prohibited.

SECTION II

ALIENS IN THE TERRITORY
OF A PARTY TO THE CONFLICT

ART. 35. — All protected persons who may desire to leave the territory at the outset of, or during a conflict, shall be entitled to do so, unless their departure is contrary to the national interests of the State. The applications of such persons to leave shall be decided in accordance with regularly established procedures and the decision shall be taken as rapidly as possible. Those persons permitted to leave may provide themselves with the necessary funds for their journey and take with them a reasonable amount of their effects and articles of personal use.

*Right to leave
the territory*

If any such person is refused permission to leave the territory, he shall be entitled to have such refusal reconsidered as soon as possible by an appropriate court or administrative board designated by the Detaining Power for that purpose.

Upon request, representatives of the Protecting Power shall, unless reasons of security prevent it, or the persons concerned object, be furnished with the reasons for refusal of any request for permission to leave the territory and be given, as expeditiously as possible, the names of all persons who have been denied permission to leave.

ART. 36. — Departures permitted under the foregoing Article shall be carried out in satisfactory conditions as regards safety, hygiene, sanitation and food. All costs in connection therewith, from the point of exit in the territory of the Detaining Power, shall be borne by the country of destination, or, in the case of accommodation in a neutral country, by the Power whose nationals are benefited. The practical details of such movements may, if necessary, be settled by special agreements between the Powers concerned.

*Method of
repatriation*

The foregoing shall not prejudice such special agreements as may be concluded between Parties to the conflict concerning the exchange and repatriation of their nationals in enemy hands.

ART. 37. — Protected persons who are confined pending proceedings or serving a sentence involving loss of liberty, shall during their confinement be humanely treated.

*Persons in
confinement*

As soon as they are released, they may ask to leave the territory in conformity with the foregoing Articles.

*Non-
repatriated
persons*

*I.
General
observations*

ART. 38. — With the exception of special measures authorized by the present Convention, in particular by Articles 27 and 41 thereof, the situation of protected persons shall continue to be regulated, in principle, by the provisions concerning aliens in time of peace. In any case, the following rights shall be granted to them:

- 1) They shall be enabled to receive the individual or collective relief that may be sent to them.
- 2) They shall, if their state of health so requires, receive medical attention and hospital treatment to the same extent as the nationals of the State concerned.
- 3) They shall be allowed to practise their religion and to receive spiritual assistance from ministers of their faith.
- 4) If they reside in an area particularly exposed to the dangers of war, they shall be authorized to move from that area to the same extent as the nationals of the State concerned.
- 5) Children under fifteen years, pregnant women and mothers of children under seven years shall benefit by any preferential treatment to the same extent as the nationals of the State concerned.

*II.
Means of
existence*

ART. 39. — Protected persons who, as a result of the war, have lost their gainful employment, shall be granted the opportunity to find paid employment. That opportunity shall, subject to security considerations and to the provisions of Article 40, be equal to that enjoyed by the nationals of the Power in whose territory they are.

Where a Party to the conflict applies to a protected person methods of control which result in his being unable to support himself, and especially if such a person is prevented for reasons of security from finding paid employment on reasonable conditions, the said Party shall ensure his support and that of his dependents.

Protected persons may in any case receive allowances from their home country, the Protecting Power, or the relief societies referred to in Article 30.

*III.
Employment*

ART. 40. — Protected persons may be compelled to work only to the same extent as nationals of the Party to the conflict in whose territory they are.

If protected persons are of enemy nationality, they may only be compelled to do work which is normally necessary to ensure the feeding, sheltering, clothing, transport and health of human beings and which is not directly related to the conduct of military operations.

In the cases mentioned in the two preceding paragraphs, protected persons compelled to work shall have the benefit of the same working conditions and of the same safeguards as national workers, in particular as regards wages, hours of labour, clothing and equipment, previous training and compensation for occupational accidents and diseases.

If the above provisions are infringed, protected persons shall be allowed to exercise their right of complaint in accordance with Article 30.

ART. 41. — Should the Power in whose hands protected persons may be consider the measures of control mentioned in the present Convention to be inadequate, it may not have recourse to any other measure of control more severe than that of assigned residence or internment, in accordance with the provisions of Articles 42 and 43.

In applying the provisions of Article 39, second paragraph, to the cases of persons required to leave their usual places of residence by virtue of a decision placing them in assigned residence elsewhere, the Detaining Power shall be guided as closely as possible by the standards of welfare set forth in Part III, Section IV of this Convention.

ART. 42. — The internment or placing in assigned residence of protected persons may be ordered only if the security of the Detaining Power makes it absolutely necessary.

If any person, acting through the representatives of the Protecting Power, voluntarily demands internment, and if his situation renders this step necessary, he shall be interned by the Power in whose hands he may be.

ART. 43. — Any protected person who has been interned or placed in assigned residence shall be entitled to have such action reconsidered as soon as possible by an appropriate court or administrative board designated by the Detaining Power for that purpose. If the internment or placing in assigned residence is maintained, the court or administrative board shall periodically, and at least twice yearly, give consideration to his or her case, with a view to the favourable amendment of the initial decision, if circumstances permit.

Unless the protected persons concerned object, the Detaining Power shall, as rapidly as possible, give the Protecting Power the names of any protected persons who have been interned or subjected to assigned residence, or who have been released from internment or assigned residence. The decisions of the courts or

IV.
*Assigned
residence.
Internment*

V.
*Grounds for
internment
or assigned
residence.
Voluntary
internment*

VI.
Procedure

boards mentioned in the first paragraph of the present Article shall also, subject to the same conditions, be notified as rapidly as possible to the Protecting Power.

VII.
Refugees

ART. 44. — In applying the measures of control mentioned in the present Convention, the Detaining Power shall not treat as enemy aliens exclusively on the basis of their nationality *de jure* of an enemy State, refugees who do not, in fact, enjoy the protection of any government.

VIII.
*Transfer to
another
Power*

ART. 45. — Protected persons shall not be transferred to a Power which is not a party to the Convention.

This provision shall in no way constitute an obstacle to the repatriation of protected persons, or to their return to their country of residence after the cessation of hostilities.

Protected persons may be transferred by the Detaining Power only to a Power which is a party to the present Convention and after the Detaining Power has satisfied itself of the willingness and ability of such transferee Power to apply the present Convention. If protected persons are transferred under such circumstances, responsibility for the application of the present Convention rests on the Power accepting them, while they are in its custody. Nevertheless, if that Power falls to carry out the provisions of the present Convention in any important respect, the Power by which the protected persons were transferred shall, upon being so notified by the Protecting Power, take effective measures to correct the situation or shall request the return of the protected persons. Such request must be complied with.

In no circumstances shall a protected person be transferred to a country where he or she may have reason to fear persecution for his or her political opinions or religious beliefs.

The provisions of this Article do not constitute an obstacle to the extradition, in pursuance of extradition treaties concluded before the outbreak of hostilities, of protected persons accused of offences against ordinary criminal law.

*Cancellation
of restrictive
measures*

ART. 46. — In so far as they have not been previously withdrawn, restrictive measures taken regarding protected persons shall be cancelled as soon as possible after the close of hostilities.

Restrictive measures affecting their property shall be cancelled, in accordance with the law of the Detaining Power, as soon as possible after the close of hostilities.

SECTION III

OCCUPIED TERRITORIES

ART. 47. — Protected persons who are in occupied territory shall not be deprived, in any case or in any manner whatsoever, of the benefits of the present Convention by any change introduced, as the result of the occupation of a territory, into the institutions or government of the said territory, nor by any agreement concluded between the authorities of the occupied territories and the Occupying Power, nor by any annexation by the latter of the whole or part of the occupied territory.

*Inviolability
of rights*

ART. 48. — Protected persons who are not nationals of the Power whose territory is occupied, may avail themselves of the right to leave the territory subject to the provisions of Article 35, and decisions thereon shall be taken according to the procedure which the Occupying Power shall establish in accordance with the said Article.

*Special
cases of
repatriation*

ART. 49. — Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.

*Deportations,
transfers,
evacuations*

Nevertheless, the Occupying Power may undertake total or partial evacuation of a given area if the security of the population or imperative military reasons so demand. Such evacuations may not involve the displacement of protected persons outside the bounds of the occupied territory except when for material reasons it is impossible to avoid such displacement. Persons thus evacuated shall be transferred back to their homes as soon as hostilities in the area in question have ceased.

The Occupying Power undertaking such transfers or evacuations shall ensure, to the greatest practicable extent, that proper accommodation is provided to receive the protected persons, that the removals are effected in satisfactory conditions of hygiene, health, safety and nutrition, and that members of the same family are not separated.

The Protecting Power shall be informed of any transfers and evacuations as soon as they have taken place.

The Occupying Power shall not detain protected persons in an area particularly exposed to the dangers of war unless the security of the population or imperative military reasons so demand.

The Occupying Power shall not deport or transfer parts of its own civilian population into the territory it occupies.

Children

ART. 50. — The Occupying Power shall, with the co-operation of the national and local authorities, facilitate the proper working of all institutions devoted to the care and education of children.

The Occupying Power shall take all necessary steps to facilitate the identification of children and the registration of their parentage. It may not, in any case, change their personal status, nor enlist them in formations or organizations subordinate to it.

Should the local institutions be inadequate for the purpose, the Occupying Power shall make arrangements for the maintenance and education, if possible by persons of their own nationality, language and religion, of children who are orphaned or separated from their parents as a result of the war and who cannot be adequately cared for by a near relative or friend.

A special section of the Bureau set up in accordance with Article 136 shall be responsible for taking all necessary steps to identify children whose identity is in doubt. Particulars of their parents or other near relatives should always be recorded if available.

The Occupying Power shall not hinder the application of any preferential measures in regard to food, medical care and protection against the effects of war, which may have been adopted prior to the occupation in favour of children under fifteen years, expectant mothers, and mothers of children under seven years.

*Enlistment.
Labour*

ART. 51. — The Occupying Power may not compel protected persons to serve in its armed or auxiliary forces. No pressure or propaganda which aims at securing voluntary enlistment is permitted.

The Occupying Power may not compel protected persons to work unless they are over eighteen years of age, and then only on work which is necessary either for the needs of the army of occupation, or for the public utility services, or for the feeding, sheltering, clothing, transportation or health of the population of the occupied country. Protected persons may not be compelled to undertake any work which would involve them in the obligation of taking part in military operations. The Occupying Power may not compel protected persons to employ forcible means to ensure the security of the installations where they are performing compulsory labour.

The work shall be carried out only in the occupied territory where the persons whose services have been requisitioned are. Every such person shall, so far as possible, be kept in his usual place of employment. Workers shall be paid a fair wage and the work shall be proportionate to their physical and intellectual capacities. The legislation in force in the occupied country concerning working conditions, and safeguards as regards, in particular, such matters as wages, hours of work, equipment, preliminary training and compensation for occupational accidents and diseases, shall be

applicable to the protected persons assigned to the work referred to in this Article.

In no case shall requisition of labour lead to a mobilization of workers in an organization of a military or semi-military character.

ART. 52. — No contract, agreement or regulation shall impair the right of any worker, whether voluntary or not and wherever he may be, to apply to the representatives of the Protecting Power in order to request the said Power's intervention.

*Protection
of workers*

All measures aiming at creating unemployment or at restricting the opportunities offered to workers in an occupied territory, in order to induce them to work for the Occupying Power, are prohibited.

ART. 53. — Any destruction by the Occupying Power of real or personal property belonging individually or collectively to private persons, or to the State, or to other public authorities, or to social or co-operative organizations, is prohibited, except where such destruction is rendered absolutely necessary by military operations.

*Prohibited
destruction*

ART. 54. — The Occupying Power may not alter the status of public officials or judges in the occupied territories, or in any way apply sanctions to or take any measures of coercion or discrimination against them, should they abstain from fulfilling their functions for reasons of conscience.

*Judges
and public
officials*

This prohibition does not prejudice the application of the second paragraph of Article 51. It does not affect the right of the Occupying Power to remove public officials from their posts.

ART. 55. — To the fullest extent of the means available to it, the Occupying Power has the duty of ensuring the food and medical supplies of the population; it should, in particular, bring in the necessary foodstuffs, medical stores and other articles if the resources of the occupied territory are inadequate.

*Food
and medical
supplies
for the
population*

The Occupying Power may not requisition foodstuffs, articles or medical supplies available in the occupied territory, except for use by the occupation forces and administration personnel, and then only if the requirements of the civilian population have been taken into account. Subject to the provisions of other international Conventions, the Occupying Power shall make arrangements to ensure that fair value is paid for any requisitioned goods.

The Protecting Power shall, at any time, be at liberty to verify the state of the food and medical supplies in occupied territories, except where temporary restrictions are made necessary by imperative military requirements.

*Hygiene and
public health*

ART. 56. — To the fullest extent of the means available to it, the Occupying Power has the duty of ensuring and maintaining, with the co-operation of national and local authorities, the medical and hospital establishments and services, public health and hygiene in the occupied territory, with particular reference to the adoption and application of the prophylactic and preventive measures necessary to combat the spread of contagious diseases and epidemics. Medical personnel of all categories shall be allowed to carry out their duties.

If new hospitals are set up in occupied territory and if the competent organs of the occupied State are not operating there, the occupying authorities shall, if necessary, grant them the recognition provided for in Article 18. In similar circumstances, the occupying authorities shall also grant recognition to hospital personnel and transport vehicles under the provisions of Articles 20 and 21.

In adopting measures of health and hygiene and in their implementation, the Occupying Power shall take into consideration the moral and ethical susceptibilities of the population of the occupied territory.

*Requisition
of hospitals*

ART. 57. — The Occupying Power may requisition civilian hospitals only temporarily and only in cases of urgent necessity for the care of military wounded and sick, and then on condition that suitable arrangements are made in due time for the care and treatment of the patients and for the needs of the civilian population for hospital accommodation.

The material and stores of civilian hospitals cannot be requisitioned so long as they are necessary for the needs of the civilian population.

*Spiritual
assistance*

ART. 58. — The Occupying Power shall permit ministers of religion to give spiritual assistance to the members of their religious communities.

The Occupying Power shall also accept consignments of books and articles required for religious needs and shall facilitate their distribution in occupied territory.

Relief
I.
*Collective
relief*

ART. 59. — If the whole or part of the population of an occupied territory is inadequately supplied, the Occupying Power shall agree to relief schemes on behalf of the said population, and shall facilitate them by all the means at its disposal.

Such schemes, which may be undertaken either by States or by impartial humanitarian organizations such as the International Committee of the Red Cross, shall consist, in particular, of the provision of consignments of foodstuffs, medical supplies and clothing.

All Contracting Parties shall permit the free passage of these consignments and shall guarantee their protection.

A Power granting free passage to consignments on their way to territory occupied by an adverse Party to the conflict shall, however, have the right to search the consignments, to regulate their passage according to prescribed times and routes, and to be reasonably satisfied through the Protecting Power that these consignments are to be used for the relief of the needy population and are not to be used for the benefit of the Occupying Power.

ART. 60. — Relief consignments shall in no way relieve the Occupying Power of any of its responsibilities under Articles 55, 56 and 59. The Occupying Power shall in no way whatsoever divert relief consignments from the purpose for which they are intended, except in cases of urgent necessity, in the interests of the population of the occupied territory and with the consent of the Protecting Power.

*II.
Responsibilities of the
Occupying
Power*

ART. 61. — The distribution of the relief consignments referred to in the foregoing Articles shall be carried out with the co-operation and under the supervision of the Protecting Power. This duty may also be delegated, by agreement between the Occupying Power and the Protecting Power, to a neutral Power, to the International Committee of the Red Cross or to any other impartial humanitarian body.

*III.
Distribution*

Such consignments shall be exempt in occupied territory from all charges, taxes or customs duties unless these are necessary in the interests of the economy of the territory. The Occupying Power shall facilitate the rapid distribution of these consignments.

All Contracting Parties shall endeavour to permit the transit and transport, free of charge, of such relief consignments on their way to occupied territories.

ART. 62. — Subject to imperative reasons of security, protected persons in occupied territories shall be permitted to receive the individual relief consignments sent to them.

*IV.
Individual
relief*

ART. 63. — Subject to temporary and exceptional measures imposed for urgent reasons of security by the Occupying Power:

*National
Red Cross
and other
relief
societies*

- a) recognized National Red Cross (Red Crescent, Red Lion and Sun) Societies shall be able to pursue their activities in accordance with Red Cross Principles, as defined by the International Red Cross Conferences. Other relief societies shall be permitted to continue their humanitarian activities under similar conditions;

- b) the Occupying Power may not require any changes in the personnel or structure of these societies, which would prejudice the aforesaid activities.

The same principles shall apply to the activities and personnel of special organizations of a non-military character, which already exist or which may be established, for the purpose of ensuring the living conditions of the civilian population by the maintenance of the essential public utility services, by the distribution of relief and by the organization of rescues.

*Penal
legislation*

*I.
General
observations*

ART. 64. — The penal laws of the occupied territory shall remain in force, with the exception that they may be repealed or suspended by the Occupying Power in cases where they constitute a threat to its security or an obstacle to the application of the present Convention. Subject to the latter consideration and to the necessity for ensuring the effective administration of justice, the tribunals of the occupied territory shall continue to function in respect of all offences covered by the said laws.

The Occupying Power may, however, subject the population of the occupied territory to provisions which are essential to enable the Occupying Power to fulfil its obligations under the present Convention, to maintain the orderly government of the territory, and to ensure the security of the Occupying Power, of the members and property of the occupying forces or administration, and likewise of the establishments and lines of communication used by them.

*II.
Publication*

ART. 65. — The penal provisions enacted by the Occupying Power shall not come into force before they have been published and brought to the knowledge of the inhabitants in their own language. The effect of these penal provisions shall not be retroactive.

*III.
Competent
courts*

ART. 66. — In case of a breach of the penal provisions promulgated by it by virtue of the second paragraph of Article 64, the Occupying Power may hand over the accused to its properly constituted, non-political military courts, on condition that the said courts sit in the occupied country. Courts of appeal shall preferably sit in the occupied country.

*IV.
Applicable
provisions*

ART. 67. — The courts shall apply only those provisions of law which were applicable prior to the offence, and which are in accordance with general principles of law, in particular the principle that the penalty shall be proportionate to the offence. They shall

take into consideration the fact that the accused is not a national of the Occupying Power.

ART. 68. — Protected persons who commit an offence which is solely intended to harm the Occupying Power, but which does not constitute an attempt on the life or limb of members of the occupying forces or administration, nor a grave collective danger, nor seriously damage the property of the occupying forces or administration or the installations used by them, shall be liable to internment or simple imprisonment, provided the duration of such internment or imprisonment is proportionate to the offence committed. Furthermore, internment or imprisonment shall, for such offences, be the only measure adopted for depriving protected persons of liberty. The courts provided for under Article 66 of the present Convention may at their discretion convert a sentence of imprisonment to one of internment for the same period.

*V.
Penalties.
Death
penalty*

The penal provisions promulgated by the Occupying Power in accordance with Articles 64 and 65 may impose the death penalty on a protected person only in cases where the person is guilty of espionage, of serious acts of sabotage against the military installations of the Occupying Power or of intentional offences which have caused the death of one or more persons, provided that such offences were punishable by death under the law of the occupied territory in force before the occupation began.

The death penalty may not be pronounced against a protected person unless the attention of the court has been particularly called to the fact that since the accused is not a national of the Occupying Power, he is not bound to it by any duty of allegiance.

In any case, the death penalty may not be pronounced against a protected person who was under eighteen years of age at the time of the offence.

ART. 69. — In all cases, the duration of the period during which a protected person accused of an offence is under arrest awaiting trial or punishment shall be deducted from any period of imprisonment awarded.

*VI.
Deduction
from
sentence of
period spent
under arrest*

ART. 70. — Protected persons shall not be arrested, prosecuted or convicted by the Occupying Power for acts committed or for opinions expressed before the occupation, or during a temporary interruption thereof, with the exception of breaches of the laws and customs of war.

*VII.
Offences
committed
before
occupation*

Nationals of the Occupying Power who, before the outbreak of hostilities, have sought refuge in the territory of the occupied State,

shall not be arrested, prosecuted, convicted or deported from the occupied territory, except for offences committed after the outbreak of hostilities, or for offences under common law committed before the outbreak of hostilities which, according to the law of the occupied State, would have justified extradition in time of peace.

*Penal
procedure*

ART. 71. — No sentence shall be pronounced by the competent courts of the Occupying Power except after a regular trial.

*I.
General
observations*

Accused persons who are prosecuted by the Occupying Power shall be promptly informed, in writing, in a language which they understand, of the particulars of the charges preferred against them, and shall be brought to trial as rapidly as possible. The Protecting Power shall be informed of all proceedings instituted by the Occupying Power against protected persons in respect of charges involving the death penalty or imprisonment for two years or more; it shall be enabled, at any time, to obtain information regarding the state of such proceedings. Furthermore, the Protecting Power shall be entitled, on request, to be furnished with all particulars of these and of any other proceedings instituted by the Occupying Power against protected persons.

The notification to the Protecting Power, as provided for in the second paragraph above, shall be sent immediately, and shall in any case reach the Protecting Power three weeks before the date of the first hearing. Unless, at the opening of the trial, evidence is submitted that the provisions of this Article are fully complied with, the trial shall not proceed. The notification shall include the following particulars:

- a) description of the accused;
- b) place of residence or detention;
- c) specification of the charge or charges (with mention of the penal provisions under which it is brought);
- d) designation of the court which will hear the case;
- e) place and date of the first hearing.

*II.
Right of
defence*

ART. 72. — Accused persons shall have the right to present evidence necessary to their defence and may, in particular, call witnesses. They shall have the right to be assisted by a qualified advocate or counsel of their own choice, who shall be able to visit them freely and shall enjoy the necessary facilities for preparing the defence.

Failing a choice by the accused, the Protecting Power may provide him with an advocate or counsel. When an accused person

has to meet a serious charge and the Protecting Power is not functioning, the Occupying Power, subject to the consent of the accused, shall provide an advocate or counsel.

Accused persons shall, unless they freely waive such assistance, be aided by an interpreter, both during preliminary investigation and during the hearing in court. They shall have the right at any time to object to the interpreter and to ask for his replacement.

ART. 73. — A convicted person shall have the right of appeal provided for by the laws applied by the court. He shall be fully informed of his right to appeal or petition and of the time limit within which he may do so.

The penal procedure provided in the present Section shall apply, as far as it is applicable, to appeals. Where the laws applied by the court make no provision for appeals, the convicted person shall have the right to petition against the finding and sentence to the competent authority of the Occupying Power.

ART. 74. — Representatives of the Protecting Power shall have the right to attend the trial of any protected person, unless the hearing has, as an exceptional measure, to be held *in camera* in the interests of the security of the Occupying Power, which shall then notify the Protecting Power. A notification in respect of the date and place of trial shall be sent to the Protecting Power.

Any judgment involving a sentence of death, or imprisonment for two years or more, shall be communicated, with the relevant grounds, as rapidly as possible to the Protecting Power. The notification shall contain a reference to the notification made under Article 71, and, in the case of sentences of imprisonment, the name of the place where the sentence is to be served. A record of judgments other than those referred to above shall be kept by the court and shall be open to inspection by representatives of the Protecting Power. Any period allowed for appeal in the case of sentences involving the death penalty, or imprisonment of two years or more, shall not run until notification of judgment has been received by the Protecting Power.

ART. 75. — In no case shall persons condemned to death be deprived of the right of petition for pardon or reprieve.

No death sentence shall be carried out before the expiration of a period of at least six months from the date of receipt by the Protecting Power of the notification of the final judgment confirming such death sentence, or of an order denying pardon or reprieve.

III.
*Right of
appeal*

IV.
*Assistance
by the
Protecting
Power*

V.
*Death
sentence*

The six months period of suspension of the death sentence herein prescribed may be reduced in individual cases in circumstances of grave emergency involving an organized threat to the security of the Occupying Power or its forces, provided always that the Protecting Power is notified of such reduction and is given reasonable time and opportunity to make representations to the competent occupying authorities in respect of such death sentences.

*Treatment
of detainees*

ART. 76. — Protected persons accused of offences shall be detained in the occupied country, and if convicted they shall serve their sentences therein. They shall, if possible, be separated from other detainees and shall enjoy conditions of food and hygiene which will be sufficient to keep them in good health, and which will be at least equal to those obtaining in prisons in the occupied country.

They shall receive the medical attention required by their state of health.

They shall also have the right to receive any spiritual assistance which they may require.

Women shall be confined in separate quarters and shall be under the direct supervision of women.

Proper regard shall be paid to the special treatment due to minors.

Protected persons who are detained shall have the right to be visited by delegates of the Protecting Power and of the International Committee of the Red Cross, in accordance with the provisions of Article 143.

Such persons shall have the right to receive at least one relief parcel monthly.

*Handing over
of detainees
at the close of
occupation*

ART. 77. — Protected persons who have been accused of offences or convicted by the courts in occupied territory, shall be handed over at the close of occupation, with the relevant records, to the authorities of the liberated territory.

*Security
measures.
Internment
and assigned
residence.
Right of
appeal*

ART. 78. — If the Occupying Power considers it necessary, for imperative reasons of security, to take safety measures concerning protected persons, it may, at the most, subject them to assigned residence or to internment.

Decisions regarding such assigned residence or internment shall be made according to a regular procedure to be prescribed by the Occupying Power in accordance with the provisions of the present Convention. This procedure shall include the right of appeal for the parties concerned. Appeals shall be decided with the least possible

delay. In the event of the decision being upheld, it shall be subject to periodical review, if possible every six months, by a competent body set up by the said Power.

Protected persons made subject to assigned residence and thus required to leave their homes shall enjoy the full benefit of Article 39 of the present Convention.

SECTION IV

REGULATIONS FOR THE TREATMENT OF INTERNEES

CHAPTER I

General Provisions

ART. 79. — The Parties to the conflict shall not intern protected persons, except in accordance with the provisions of Articles 41, 42, 43, 68 and 78.

*Cases of
internment
and applicable
provisions*

ART. 80. — Internees shall retain their full civil capacity and shall exercise such attendant rights as may be compatible with their status.

Civil capacity

ART. 81. — Parties to the conflict who intern protected persons shall be bound to provide free of charge for their maintenance, and to grant them also the medical attention required by their state of health.

Maintenance

No deduction from the allowances, salaries or credits due to the internees shall be made for the repayment of these costs.

The Detaining Power shall provide for the support of those dependent on the internees, if such dependents are without adequate means of support or are unable to earn a living.

ART. 82. — The Detaining Power shall, as far as possible, accommodate the internees according to their nationality, language

*Grouping
of internees*

and customs. Internees who are nationals of the same country shall not be separated merely because they have different languages.

Throughout the duration of their internment, members of the same family, and in particular parents and children, shall be lodged together in the same place of internment, except when separation of a temporary nature is necessitated for reasons of employment or health or for the purposes of enforcement of the provisions of Chapter IX of the present Section. Internees may request that their children who are left at liberty without parental care shall be interned with them.

Wherever possible, interned members of the same family shall be housed in the same premises and given separate accommodation from other internees, together with facilities for leading a proper family life.

CHAPTER II

Places of Internment

*Location
of places of
internment.
Marking
of camps*

ART. 83. — The Detaining Power shall not set up places of internment in areas particularly exposed to the dangers of war.

The Detaining Power shall give the enemy Powers, through the intermediary of the Protecting Powers, all useful information regarding the geographical location of places of internment.

Whenever military considerations permit, internment camps shall be indicated by the letters IC, placed so as to be clearly visible in the daytime from the air. The Powers concerned may, however, agree upon any other system of marking. No place other than an internment camp shall be marked as such.

*Separate
internment*

ART. 84. — Internees shall be accommodated and administered separately from prisoners of war and from persons deprived of liberty for any other reason.

*Accommoda-
tion, hygiene*

ART. 85. — The Detaining Power is bound to take all necessary and possible measures to ensure that protected persons shall, from the outset of their internment, be accommodated in buildings or quarters which afford every possible safeguard as regards hygiene and health, and provide efficient protection against the rigours of the climate and the effects of the war. In no case shall permanent places of internment be situated in unhealthy areas or in districts

the climate of which is injurious to the internees. In all cases where the district, in which a protected person is temporarily interned, is in an unhealthy area or has a climate which is harmful to his health, he shall be removed to a more suitable place of internment as rapidly as circumstances permit.

The premises shall be fully protected from dampness, adequately heated and lighted, in particular between dusk and lights out. The sleeping quarters shall be sufficiently spacious and well ventilated, and the internees shall have suitable bedding and sufficient blankets, account being taken of the climate, and the age, sex, and state of health of the internees.

Internees shall have for their use, day and night, sanitary conveniences which conform to the rules of hygiene and are constantly maintained in a state of cleanliness. They shall be provided with sufficient water and soap for their daily personal toilet and for washing their personal laundry; installations and facilities necessary for this purpose shall be granted to them. Showers or baths shall also be available. The necessary time shall be set aside for washing and for cleaning.

Whenever it is necessary, as an exceptional and temporary measure, to accommodate women internees who are not members of a family unit in the same place of internment as men, the provision of separate sleeping quarters and sanitary conveniences for the use of such women internees shall be obligatory.

ART. 86. — The Detaining Power shall place at the disposal of interned persons, of whatever denomination, premises suitable for the holding of their religious services.

*Premises
for religious
services*

ART. 87. — Canteens shall be installed in every place of internment, except where other suitable facilities are available. Their purpose shall be to enable internees to make purchases, at prices not higher than local market prices, of foodstuffs and articles of everyday use, including soap and tobacco, such as would increase their personal well-being and comfort.

Canteens

Profits made by canteens shall be credited to a welfare fund to be set up for each place of internment, and administered for the benefit of the internees attached to such place of internment. The Internee Committee provided for in Article 102 shall have the right to check the management of the canteen and of the said fund.

When a place of internment is closed down, the balance of the welfare fund shall be transferred to the welfare fund of a place of internment for internees of the same nationality, or, if such a place does not exist, to a central welfare fund which shall be administered

for the benefit of all internees remaining in the custody of the Detaining Power. In case of a general release, the said profits shall be kept by the Detaining Power, subject to any agreement to the contrary between the Powers concerned.

*Air raid
shelters.
Protective
measures*

ART. 88. — In all places of internment exposed to air raids and other hazards of war, shelters adequate in number and structure to ensure the necessary protection shall be installed. In case of alarms, the internees shall be free to enter such shelters as quickly as possible, excepting those who remain for the protection of their quarters against the aforesaid hazards. Any protective measures taken in favour of the population shall also apply to them.

All due precautions must be taken in places of internment against the danger of fire.

CHAPTER III

Food and Clothing

Food

ART. 89. — Daily food rations for internees shall be sufficient in quantity, quality and variety to keep internees in a good state of health and prevent the development of nutritional deficiencies. Account shall also be taken of the customary diet of the internees.

Internees shall also be given the means by which they can prepare for themselves any additional food in their possession.

Sufficient drinking water shall be supplied to internees. The use of tobacco shall be permitted.

Internees who work shall receive additional rations in proportion to the kind of labour which they perform.

Expectant and nursing mothers and children under fifteen years of age shall be given additional food, in proportion to their physiological needs.

Clothing

ART. 90. — When taken into custody, internees shall be given all facilities to provide themselves with the necessary clothing, footwear and change of underwear, and later on, to procure further supplies if required. Should any internees not have sufficient clothing, account being taken of the climate, and be unable to procure any, it shall be provided free of charge to them by the Detaining Power.

The clothing supplied by the Detaining Power to internees and the outward markings placed on their own clothes shall not be ignominious nor expose them to ridicule.

Workers shall receive suitable working outfits, including protective clothing, whenever the nature of their work so requires.

CHAPTER IV

Hygiene and Medical Attention

ART. 91. — Every place of internment shall have an adequate infirmary, under the direction of a qualified doctor, where internees may have the attention they require, as well as an appropriate diet. Isolation wards shall be set aside for cases of contagious or mental diseases.

*Medical
attention*

Maternity cases and internees suffering from serious diseases, or whose condition requires special treatment, a surgical operation or hospital care, must be admitted to any institution where adequate treatment can be given and shall receive care not inferior to that provided for the general population.

Internees shall, for preference, have the attention of medical personnel of their own nationality.

Internees may not be prevented from presenting themselves to the medical authorities for examination. The medical authorities of the Detaining Power shall, upon request, issue to every internee who has undergone treatment an official certificate showing the nature of his illness or injury, and the duration and nature of the treatment given. A duplicate of this certificate shall be forwarded to the Central Agency provided for in Article 140.

Treatment, including the provision of any apparatus necessary for the maintenance of internees in good health, particularly dentures and other artificial appliances and spectacles, shall be free of charge to the internee.

ART. 92. — Medical inspections of internees shall be made at least once a month. Their purpose shall be, in particular, to supervise the general state of health, nutrition and cleanliness of internees, and to detect contagious diseases, especially tuberculosis, malaria, and venereal diseases. Such inspections shall include, in particular, the checking of weight of each internee and, at least once a year, radioscopic examination.

*Medical
inspections*

CHAPTER V

Religious, Intellectual and Physical Activities*Religious
duties*

ART. 93. — Internees shall enjoy complete latitude in the exercise of their religious duties, including attendance at the services of their faith, on condition that they comply with the disciplinary routine prescribed by the detaining authorities.

Ministers of religion who are interned shall be allowed to minister freely to the members of their community. For this purpose, the Detaining Power shall ensure their equitable allocation amongst the various places of internment in which there are internees speaking the same language and belonging to the same religion. Should such ministers be too few in number, the Detaining Power shall provide them with the necessary facilities, including means of transport, for moving from one place to another, and they shall be authorized to visit any internees who are in hospital. Ministers of religion shall be at liberty to correspond on matters concerning their ministry with the religious authorities in the country of detention and, as far as possible, with the international religious organizations of their faith. Such correspondence shall not be considered as forming a part of the quota mentioned in Article 107. It shall, however, be subject to the provisions of Article 112.

When internees do not have at their disposal the assistance of ministers of their faith, or should these latter be too few in number, the local religious authorities of the same faith may appoint, in agreement with the Detaining Power, a minister of the internees' faith or, if such a course is feasible from a denominational point of view, a minister of similar religion or a qualified layman. The latter shall enjoy the facilities granted to the ministry he has assumed. Persons so appointed shall comply with all regulations laid down by the Detaining Power in the interests of discipline and security.

*Recreation,
study, sports
and games*

ART. 94. — The Detaining Power shall encourage intellectual, educational and recreational pursuits, sports and games amongst internees, whilst leaving them free to take part in them or not. It shall take all practicable measures to ensure the exercise thereof, in particular by providing suitable premises.

All possible facilities shall be granted to internees to continue their studies or to take up new subjects. The education of children and young people shall be ensured; they shall be allowed to attend schools either within the place of internment or outside.

Internees shall be given opportunities for physical exercise, sports and outdoor games. For this purpose, sufficient open spaces

shall be set aside in all places of internment. Special playgrounds shall be reserved for children and young people.

ART. 95. — The Detaining Power shall not employ internees as workers, unless they so desire. Employment which, if undertaken under compulsion by a protected person not in internment, would involve a breach of Articles 40 or 51 of the present Convention, and employment on work which is of a degrading or humiliating character are in any case prohibited.

*Working
conditions*

After a working period of six weeks, internees shall be free to give up work at any moment, subject to eight days' notice.

These provisions constitute no obstacle to the right of the Detaining Power to employ interned doctors, dentists and other medical personnel in their professional capacity on behalf of their fellow internees, or to employ internees for administrative and maintenance work in places of internment and to detail such persons for work in the kitchens or for other domestic tasks, or to require such persons to undertake duties connected with the protection of internees against aerial bombardment or other war risks. No internee may, however, be required to perform tasks for which he is, in the opinion of a medical officer, physically unsuited.

The Detaining Power shall take entire responsibility for all working conditions, for medical attention, for the payment of wages, and for ensuring that all employed internees receive compensation for occupational accidents and diseases. The standards prescribed for the said working conditions and for compensation shall be in accordance with the national laws and regulations, and with the existing practice; they shall in no case be inferior to those obtaining for work of the same nature in the same district. Wages for work done shall be determined on an equitable basis by special agreements between the internees, the Detaining Power, and, if the case arises, employers other than the Detaining Power, due regard being paid to the obligation of the Detaining Power to provide for free maintenance of internees and for the medical attention which their state of health may require. Internees permanently detailed for categories of work mentioned in the third paragraph of this Article shall be paid fair wages by the Detaining Power. The working conditions and the scale of compensation for occupational accidents and diseases to internees, thus detailed, shall not be inferior to those applicable to work of the same nature in the same district.

ART. 96. — All labour detachments shall remain part of and dependent upon a place of internment. The competent authorities

*Labour
detachments*

of the Detaining Power and the commandant of a place of internment shall be responsible for the observance in a labour detachment of the provisions of the present Convention. The commandant shall keep an up-to-date list of the labour detachments subordinate to him and shall communicate it to the delegates of the Protecting Power, of the International Committee of the Red Cross and of other humanitarian organizations who may visit the places of internment.

CHAPTER VI

Personal Property and Financial Resources

*Valuables
and personal
effects*

ART. 97. — Internees shall be permitted to retain articles of personal use. Monies, cheques, bonds, etc., and valuables in their possession may not be taken from them except in accordance with established procedure. Detailed receipts shall be given therefor.

The amounts shall be paid into the account of every internee as provided for in Article 98. Such amounts may not be converted into any other currency unless legislation in force in the territory in which the owner is interned so requires or the internee gives his consent.

Articles which have above all a personal or sentimental value may not be taken away.

A woman internee shall not be searched except by a woman.

On release or repatriation, internees shall be given all articles, monies or other valuables taken from them during internment and shall receive in currency the balance of any credit to their accounts kept in accordance with Article 98, with the exception of any articles or amounts withheld by the Detaining Power by virtue of its legislation in force. If the property of an internee is so withheld, the owner shall receive a detailed receipt.

Family or identity documents in the possession of internees may not be taken away without a receipt being given. At no time shall internees be left without identity documents. If they have none, they shall be issued with special documents drawn up by the detaining authorities, which will serve as their identity papers until the end of their internment.

Internees may keep on their persons a certain amount of money, in cash or in the shape of purchase coupons, to enable them to make purchases.

ART. 98. — All internees shall receive regular allowances, sufficient to enable them to purchase goods and articles, such as tobacco, toilet requisites, etc. Such allowances may take the form of credits or purchase coupons.

*Financial
resources and
individual
accounts*

Furthermore, internees may receive allowances from the Power to which they owe allegiance, the Protecting Powers, the organizations which may assist them, or their families, as well as the income on their property in accordance with the law of the Detaining Power. The amount of allowances granted by the Power to which they owe allegiance shall be the same for each category of internees (infirm, sick, pregnant women, etc.), but may not be allocated by that Power or distributed by the Detaining Power on the basis of discriminations between internees which are prohibited by Article 27 of the present Convention.

The Detaining Power shall open a regular account for every internee, to which shall be credited the allowances named in the present Article, the wages earned and the remittances received, together with such sums taken from him as may be available under the legislation in force in the territory in which he is interned. Internees shall be granted all facilities consistent with the legislation in force in such territory to make remittances to their families and to other dependants. They may draw from their accounts the amounts necessary for their personal expenses, within the limits fixed by the Detaining Power. They shall at all times be afforded reasonable facilities for consulting and obtaining copies of their accounts. A statement of accounts shall be furnished to the Protecting Power on request, and shall accompany the internee in case of transfer.

CHAPTER VII

Administration and Discipline

ART. 99. — Every place of internment shall be put under the authority of a responsible officer, chosen from the regular military forces or the regular civil administration of the Detaining Power. The officer in charge of the place of internment must have in his possession a copy of the present Convention in the official language, or one of the official languages, of his country and shall be responsible for its application. The staff in control of internees shall be instructed in the provisions of the present Convention and of the administrative measures adopted to ensure its application.

*Camp
administra-
tion.
Posting of the
Convention
and of orders*

The text of the present Convention and the texts of special agreements concluded under the said Convention shall be posted inside the place of internment, in a language which the internees understand, or shall be in the possession of the Internee Committee.

Regulations, orders, notices and publications of every kind shall be communicated to the internees and posted inside the places of internment, in a language which they understand.

Every order and command addressed to internees individually must likewise be given in a language which they understand.

*General
discipline*

ART. 100. — The disciplinary regime in places of internment shall be consistent with humanitarian principles, and shall in no circumstances include regulations imposing on internees any physical exertion dangerous to their health or involving physical or moral victimization. Identification by tattooing or imprinting signs or markings on the body, is prohibited.

In particular, prolonged standing and roll-calls, punishment drill, military drill and manœuvres, or the reduction of food rations, are prohibited.

*Complaints
and petitions*

ART. 101. — Internees shall have the right to present to the authorities in whose power they are, any petition with regard to the conditions of internment to which they are subjected.

They shall also have the right to apply without restriction through the Internee Committee or, if they consider it necessary, direct to the representatives of the Protecting Power, in order to indicate to them any points on which they may have complaints to make with regard to the conditions of internment.

Such petitions and complaints shall be transmitted forthwith and without alteration, and even if the latter are recognized to be unfounded, they may not occasion any punishment.

Periodic reports on the situation in places of internment and as to the needs of the internees may be sent by the Internee Committees to the representatives of the Protecting Powers.

*Internee
Committees*

*I.
Election of
members*

ART. 102. — In every place of internment, the internees shall freely elect by secret ballot every six months, the members of a Committee empowered to represent them before the Detaining and the Protecting Powers, the International Committee of the Red Cross and any other organization which may assist them. The members of the Committee shall be eligible for re-election.

Internees so elected shall enter upon their duties after their election has been approved by the detaining authorities. The reasons for any refusals or dismissals shall be communicated to the Protecting Powers concerned.

ART. 103. — The Internee Committees shall further the physical, spiritual and intellectual well-being of the internees.

*II.
Duties*

In case the internees decide, in particular, to organize a system of mutual assistance amongst themselves, this organization would be within the competence of the Committees in addition to the special duties entrusted to them under other provisions of the present Convention.

ART. 104. — Members of Internee Committees shall not be required to perform any other work, if the accomplishment of their duties is rendered more difficult thereby.

*III.
Prerogatives*

Members of Internee Committees may appoint from amongst the internees such assistants as they may require. All material facilities shall be granted to them, particularly a certain freedom of movement necessary for the accomplishment of their duties (visits to labour detachments, receipt of supplies, etc.).

All facilities shall likewise be accorded to members of Internee Committees for communication by post and telegraph with the detaining authorities, the Protecting Powers, the International Committee of the Red Cross and their delegates, and with the organizations which give assistance to internees, Committee members in labour detachments shall enjoy similar facilities for communication with their Internee Committee in the principal place of internment. Such communications shall not be limited, nor considered as forming a part of the quota mentioned in Article 107.

Members of Internee Committees who are transferred shall be allowed a reasonable time to acquaint their successors with current affairs.

CHAPTER VIII

Relations with the Exterior

ART. 105. — Immediately upon interning protected persons, the Detaining Powers shall inform them, the Power to which they owe allegiance and their Protecting Power of the measures taken for executing the provisions of the present Chapter. The Detaining Powers shall likewise inform the Parties concerned of any subsequent modifications of such measures.

*Notification
of measures
taken*

*Internment
card*

ART. 106. — As soon as he is interned, or at the latest not more than one week after his arrival in a place of internment, and likewise in cases of sickness or transfer to another place of internment or to a hospital, every internee shall be enabled to send direct to his family, on the one hand, and to the Central Agency provided for by Article 140, on the other, an internment card similar, if possible, to the model annexed to the present Convention, informing his relatives of his detention, address and state of health. The said cards shall be forwarded as rapidly as possible and may not be delayed in any way.

Correspondence

ART. 107. — Internees shall be allowed to send and receive letters and cards. If the Detaining Power deems it necessary to limit the number of letters and cards sent by each internee, the said number shall not be less than two letters and four cards monthly; these shall be drawn up so as to conform as closely as possible to the models annexed to the present Convention. If limitations must be placed on the correspondence addressed to internees, they may be ordered only by the Power to which such internees owe allegiance, possibly at the request of the Detaining Power. Such letters and cards must be conveyed with reasonable despatch; they may not be delayed or retained for disciplinary reasons.

Internees who have been a long time without news, or who find it impossible to receive news from their relatives, or to give them news by the ordinary postal route, as well as those who are at a considerable distance from their homes, shall be allowed to send telegrams, the charges being paid by them in the currency at their disposal. They shall likewise benefit by this provision in cases which are recognized to be urgent.

As a rule, internees' mail shall be written in their own language. The Parties to the conflict may authorize correspondence in other languages.

*Relief
shipments**I.
General
principles*

ART. 108. — Internees shall be allowed to receive, by post or by any other means, individual parcels or collective shipments containing in particular foodstuffs, clothing, medical supplies, as well as books and objects of a devotional, educational or recreational character which may meet their needs. Such shipments shall in no way free the Detaining Power from the obligations imposed upon it by virtue of the present Convention.

Should military necessity require the quantity of such shipments to be limited, due notice thereof shall be given to the Protecting Power and to the International Committee of the Red Cross, or to any other organization giving assistance to the internees and responsible for the forwarding of such shipments.

The conditions for the sending of individual parcels and collective shipments shall, if necessary, be the subject of special agreements between the Powers concerned, which may in no case delay the receipt by the internees of relief supplies. Parcels of clothing and foodstuffs may not include books. Medical relief supplies shall, as a rule, be sent in collective parcels.

ART. 109. — In the absence of special agreements between Parties to the conflict regarding the conditions for the receipt and distribution of collective relief shipments, the regulations concerning collective relief which are annexed to the present Convention shall be applied.

The special agreements provided for above shall in no case restrict the right of Internee Committees to take possession of collective relief shipments intended for internees, to undertake their distribution and to dispose of them in the interests of the recipients.

Nor shall such agreements restrict the right of representatives of the Protecting Powers, the International Committee of the Red Cross, or any other organization giving assistance to internees and responsible for the forwarding of collective shipments, to supervise their distribution to the recipients.

ART. 110. — All relief shipments for internees shall be exempt from import, customs and other dues.

All matter sent by mail, including relief parcels sent by parcel post and remittances of money, addressed from other countries to internees or despatched by them through the post office, either direct or through the Information Bureaux provided for in Article 136 and the Central Information Agency provided for in Article 140, shall be exempt from all postal dues both in the countries of origin and destination and in intermediate countries. To this end, in particular, the exemption provided by the Universal Postal Convention of 1947 and by the agreements of the Universal Postal Union in favour of civilians of enemy nationality detained in camps or civilian prisons, shall be extended to the other interned persons protected by the present Convention. The countries not signatory to the above-mentioned agreements shall be bound to grant freedom from charges in the same circumstances.

The cost of transporting relief shipments which are intended for internees and which, by reason of their weight or any other cause, cannot be sent through the post office, shall be borne by the Detaining Power in all the territories under its control. Other Powers which are Parties to the present Convention shall bear the cost of transport in their respective territories.

*II.
Collective
relief*

*III.
Exemption
from postal
and
transport
charges*

Costs connected with the transport of such shipments, which are not covered by the above paragraphs, shall be charged to the senders.

The High Contracting Parties shall endeavour to reduce, so far as possible, the charges for telegrams sent by internees, or addressed to them.

*Special
means of
transport*

ART. 111. — Should military operations prevent the Powers concerned from fulfilling their obligation to ensure the conveyance of the mail and relief shipments provided for in Articles 106, 107, 108 and 113, the Protecting Powers concerned, the International Committee of the Red Cross or any other organization duly approved by the Parties to the conflict may undertake the conveyance of such shipments by suitable means (rail, motor vehicles, vessels or aircraft, etc.). For this purpose, the High Contracting Parties shall endeavour to supply them with such transport, and to allow its circulation, especially by granting the necessary safe-conducts.

Such transport may also be used to convey:

- a) correspondence, lists and reports exchanged between the Central Information Agency referred to in Article 140 and the National Bureaux referred to in Article 136;
- b) correspondence and reports relating to internees which the Protecting Powers, the International Committee of the Red Cross or any other organization assisting the internees exchange either with their own delegates or with the Parties to the conflict.

These provisions in no way detract from the right of any Party to the conflict to arrange other means of transport if it should so prefer, nor preclude the granting of safe-conducts, under mutually agreed conditions, to such means of transport.

The costs occasioned by the use of such means of transport shall be borne, in proportion to the importance of the shipments, by the Parties to the conflict whose nationals are benefited thereby.

*Censorship
and
examination*

ART. 112. — The censoring of correspondence addressed to internees or despatched by them shall be done as quickly as possible.

The examination of consignments intended for internees shall not be carried out under conditions that will expose the goods contained in them to deterioration. It shall be done in the presence of the addressee, or of a fellow-internee duly delegated by him. The delivery to internees of individual or collective consignments shall not be delayed under the pretext of difficulties of censorship.

Any prohibition of correspondence ordered by the Parties to the conflict either for military or political reasons, shall be only temporary and its duration shall be as short as possible.

ART. 113. — The Detaining Powers shall provide all reasonable facilities for the transmission, through the Protecting Power or the Central Agency provided for in Article 140, or as otherwise required, of wills, powers of attorney, letters of authority, or any other documents intended for internees or despatched by them.

*Execution
and
transmission
of legal
documents*

In all cases the Detaining Powers shall facilitate the execution and authentication in due legal form of such documents on behalf of internees, in particular by allowing them to consult a lawyer.

ART. 114. — The Detaining Power shall afford internees all facilities to enable them to manage their property, provided this is not incompatible with the conditions of internment and the law which is applicable. For this purpose, the said Power may give them permission to leave the place of internment in urgent cases and if circumstances allow.

*Management
of property*

ART. 115. — In all cases where an internee is a party to proceedings in any court, the Detaining Power shall, if he so requests, cause the court to be informed of his detention and shall, within legal limits, ensure that all necessary steps are taken to prevent him from being in any way prejudiced, by reason of his internment, as regards the preparation and conduct of his case or as regards the execution of any judgment of the court.

*Facilities for
preparation
and conduct
of cases*

ART. 116. — Every internee shall be allowed to receive visitors, especially near relatives, at regular intervals and as frequently as possible.

Visits

As far as is possible, internees shall be permitted to visit their homes in urgent cases, particularly in cases of death or serious illness of relatives.

CHAPTER IX

Penal and Disciplinary Sanctions

ART. 117. — Subject to the provisions of the present Chapter, the laws in force in the territory in which they are detained will continue to apply to internees who commit offences during internment.

*General
provisions.
Applicable
legislation*

If general laws, regulations or orders declare acts committed by internees to be punishable, whereas the same acts are not

punishable when committed by persons who are not internees, such acts shall entail disciplinary punishments only.

No internee may be punished more than once for the same act, or on the same count.

Penalties

ART. 118. — The courts or authorities shall in passing sentence take as far as possible into account the fact that the defendant is not a national of the Detaining Power. They shall be free to reduce the penalty prescribed for the offence with which the internee is charged and shall not be obliged, to this end, to apply the minimum sentence prescribed.

Imprisonment in premises without daylight, and, in general, all forms of cruelty without exception are forbidden.

Internees who have served disciplinary or judicial sentences shall not be treated differently from other internees.

The duration of preventive detention undergone by an internee shall be deducted from any disciplinary or judicial penalty involving confinement to which he may be sentenced.

Internee Committees shall be informed of all judicial proceedings instituted against internees whom they represent, and of their result.

*Disciplinary
punishments*

ART. 119. — The disciplinary punishments applicable to internees shall be the following:

- 1) A fine which shall not exceed 50 per cent of the wages which the internee would otherwise receive under the provisions of Article 95 during a period of not more than thirty days.
- 2) Discontinuance of privileges granted over and above the treatment provided for by the present Convention.
- 3) Fatigue duties, not exceeding two hours daily, in connection with the maintenance of the place of internment.
- 4) Confinement.

In no case shall disciplinary penalties be inhuman, brutal or dangerous for the health of internees. Account shall be taken of the internee's age, sex and state of health.

The duration of any single punishment shall in no case exceed a maximum of thirty consecutive days, even if the internee is answerable for several breaches of discipline when his case is dealt with, whether such breaches are connected or not.

Escapes

ART. 120. — Internees who are recaptured after having escaped or when attempting to escape, shall be liable only to disciplinary punishment in respect of this act, even if it is a repeated offence.

Article 118, paragraph 3, notwithstanding, internees punished as a result of escape or attempt to escape, may be subjected to special surveillance, on condition that such surveillance does not affect the state of their health, that it is exercised in a place of internment and that it does not entail the abolition of any of the safeguards granted by the present Convention.

Internees who aid and abet an escape, or attempt to escape, shall be liable on this count to disciplinary punishment only.

ART. 121. — Escape, or attempt to escape, even if it is a repeated offence, shall not be deemed an aggravating circumstance in cases where an internee is prosecuted for offences committed during his escape.

*Connected
offences*

The Parties to the conflict shall ensure that the competent authorities exercise leniency in deciding whether punishment inflicted for an offence shall be of a disciplinary or judicial nature, especially in respect of acts committed in connection with an escape, whether successful or not.

ART. 122. — Acts which constitute offences against discipline shall be investigated immediately. This rule shall be applied, in particular, in cases of escape or attempt to escape. Recaptured internees shall be handed over to the competent authorities as soon as possible.

*Investigations.
Confinement
awaiting
hearing*

In case of offences against discipline, confinement awaiting trial shall be reduced to an absolute minimum for all internees, and shall not exceed fourteen days. Its duration shall in any case be deducted from any sentence of confinement.

The provisions of Articles 124 and 125 shall apply to internees who are in confinement awaiting trial for offences against discipline.

ART. 123. — Without prejudice to the competence of courts and higher authorities, disciplinary punishment may be ordered only by the commandant of the place of internment, or by a responsible officer or official who replaces him, or to whom he has delegated his disciplinary powers.

*Competent
authorities.
Procedure*

Before any disciplinary punishment is awarded, the accused internee shall be given precise information regarding the offences of which he is accused, and given an opportunity of explaining his conduct and of defending himself. He shall be permitted, in particular, to call witnesses and to have recourse, if necessary, to the services of a qualified interpreter. The decision shall be announced in the presence of the accused and of a member of the Internee Committee.

The period elapsing between the time of award of a disciplinary punishment and its execution shall not exceed one month.

When an internee is awarded a further disciplinary punishment, a period of at least three days shall elapse between the execution of any two of the punishments, if the duration of one of these is ten days or more.

A record of disciplinary punishments shall be maintained by the commandant of the place of internment and shall be open to inspection by representatives of the Protecting Power.

*Premises for
disciplinary
punishments*

ART. 124. — Internees shall not in any case be transferred to penitentiary establishments (prisons, penitentiaries, convict prisons, etc.) to undergo disciplinary punishment therein.

The premises in which disciplinary punishments are undergone shall conform to sanitary requirements; they shall in particular be provided with adequate bedding. Internees undergoing punishment shall be enabled to keep themselves in a state of cleanliness.

Women internees undergoing disciplinary punishment shall be confined in separate quarters from male internees and shall be under the immediate supervision of women.

*Essential
safeguards*

ART. 125. — Internees awarded disciplinary punishment shall be allowed to exercise and to stay in the open air at least two hours daily.

They shall be allowed, if they so request, to be present at the daily medical inspections. They shall receive the attention which their state of health requires and, if necessary, shall be removed to the infirmary of the place of internment or to a hospital.

They shall have permission to read and write, likewise to send and receive letters. Parcels and remittances of money, however, may be withheld from them until the completion of their punishment; such consignments shall meanwhile be entrusted to the Internee Committee, who will hand over to the infirmary the perishable goods contained in the parcels.

No internee given a disciplinary punishment may be deprived of the benefit of the provisions of Articles 107 and 143 of the present Convention.

*Provisions
applicable to
judicial
proceedings*

ART. 126. — The provisions of Articles 71 to 76 inclusive shall apply, by analogy, to proceedings against internees who are in the national territory of the Detaining Power.

CHAPTER X

Transfers of Internees

ART. 127. — The transfer of internees shall always be effected humanely. As a general rule, it shall be carried out by rail or other means of transport, and under conditions at least equal to those obtaining for the forces of the Detaining Power in their changes of station. If, as an exceptional measure, such removals have to be effected on foot, they may not take place unless the internees are in a fit state of health, and may not in any case expose them to excessive fatigue.

Conditions

The Detaining Power shall supply internees during transfer with drinking water and food sufficient in quantity, quality and variety to maintain them in good health, and also with the necessary clothing, adequate shelter and the necessary medical attention. The Detaining Power shall take all suitable precautions to ensure their safety during transfer, and shall establish before their departure a complete list of all internees transferred.

Sick, wounded or infirm internees and maternity cases shall not be transferred if the journey would be seriously detrimental to them, unless their safety imperatively so demands.

If the combat zone draws close to a place of internment, the internees in the said place shall not be transferred unless their removal can be carried out in adequate conditions of safety, or unless they are exposed to greater risks by remaining on the spot than by being transferred.

When making decisions regarding the transfer of internees, the Detaining Power shall take their interests into account and, in particular, shall not do anything to increase the difficulties of repatriating them or returning them to their own homes.

ART. 128. — In the event of transfer, internees shall be officially advised of their departure and of their new postal address. Such notification shall be given in time for them to pack their luggage and inform their next of kin.

Method

They shall be allowed to take with them their personal effects, and the correspondence and parcels which have arrived for them. The weight of such baggage may be limited if the conditions of transfer so require, but in no case to less than twenty-five kilograms per internee.

Mail and parcels addressed to their former place of internment shall be forwarded to them without delay.

The commandant of the place of internment shall take, in agreement with the Internee Committee, any measures needed to

ensure the transport of the internees' community property and of the luggage the internees are unable to take with them in consequence of restrictions imposed by virtue of the second paragraph.

CHAPTER XI

Deaths

Wills, Death certificates

ART. 129. — The wills of internees shall be received for safekeeping by the responsible authorities; and in the event of the death of an internee his will shall be transmitted without delay to a person whom he has previously designated.

Deaths of internees shall be certified in every case by a doctor, and a death certificate shall be made out, showing the causes of death and the conditions under which it occurred.

An official record of the death, duly registered, shall be drawn up in accordance with the procedure relating thereto in force in the territory where the place of internment is situated, and a duly certified copy of such record shall be transmitted without delay to the Protecting Power as well as to the Central Agency referred to in Article 140.

Burial. Cremation

ART. 130. — The detaining authorities shall ensure that internees who die while interned are honourably buried, if possible according to the rites of the religion to which they belonged and that their graves are respected, properly maintained, and marked in such a way that they can always be recognized.

Deceased internees shall be buried in individual graves unless unavoidable circumstances require the use of collective graves. Bodies may be cremated only for imperative reasons of hygiene, on account of the religion of the deceased or in accordance with his expressed wish to this effect. In case of cremation, the fact shall be stated and the reasons given in the death certificate of the deceased. The ashes shall be retained for safekeeping by the detaining authorities and shall be transferred as soon as possible to the next of kin on their request.

As soon as circumstances permit, and not later than the close of hostilities, the Detaining Power shall forward lists of graves of deceased internees to the Powers on whom the deceased internees depended, through the Information Bureaux provided for in Article 136. Such lists shall include all particulars necessary for the

identification of the deceased internees, as well as the exact location of their graves.

ART. 131. — Every death or serious injury of an internee, caused or suspected to have been caused by a sentry, another internee or any other person, as well as any death the cause of which is unknown, shall be immediately followed by an official enquiry by the Detaining Power.

*Internees
killed
or injured
in special
circum-
stances*

A communication on this subject shall be sent immediately to the Protecting Power. The evidence of any witnesses shall be taken, and a report including such evidence shall be prepared and forwarded to the said Protecting Power.

If the enquiry indicates the guilt of one or more persons, the Detaining Power shall take all necessary steps to ensure the prosecution of the person or persons responsible.

CHAPTER XII

Release, Repatriation and Accommodation in Neutral Countries

ART. 132. — Each interned person shall be released by the Detaining Power as soon as the reasons which necessitated his internment no longer exist.

*During
hostilities or
occupation*

The Parties to the conflict shall, moreover, endeavour during the course of hostilities, to conclude agreements for the release, the repatriation, the return to places of residence or the accommodation in a neutral country of certain classes of internees, in particular children, pregnant women and mothers with infants and young children, wounded and sick, and internees who have been detained for a long time.

ART. 133. — Internment shall cease as soon as possible after the close of hostilities.

*After the
close of
hostilities*

Internees in the territory of a Party to the conflict, against whom penal proceedings are pending for offences not exclusively subject to disciplinary penalties, may be detained until the close of such proceedings and, if circumstances require, until the completion of the penalty. The same shall apply to internees who have been previously sentenced to a punishment depriving them of liberty.

By agreement between the Detaining Power and the Powers concerned, committees may be set up after the close of hostilities, or of the occupation of territories, to search for dispersed internees.

*Repatriation
and return to
last place of
residence*

ART. 134. — The High Contracting Parties shall endeavour, upon the close of hostilities or occupation, to ensure the return of all internees to their last place of residence, or to facilitate their repatriation.

Costs

ART. 135. — The Detaining Power shall bear the expense of returning released internees to the places where they were residing when interned, or, if it took them into custody while they were in transit or on the high seas, the cost of completing their journey or of their return to their point of departure.

Where a Detaining Power refuses permission to reside in its territory to a released internee who previously had his permanent domicile therein, such Detaining Power shall pay the cost of the said internee's repatriation. If, however, the internee elects to return to his country on his own responsibility or in obedience to the Government of the Power to which he owes allegiance, the Detaining Power need not pay the expenses of his journey beyond the point of his departure from its territory. The Detaining Power need not pay the costs of repatriation of an internee who was interned at his own request.

If internees are transferred in accordance with Article 45, the transferring and receiving Powers shall agree on the portion of the above costs to be borne by each.

The foregoing shall not prejudice such special agreements as may be concluded between Parties to the conflict concerning the exchange and repatriation of their nationals in enemy hands.

SECTION V

INFORMATION BUREAUX AND CENTRAL AGENCY

*National
Bureaux*

ART. 136. — Upon the outbreak of a conflict and in all cases of occupation, each of the Parties to the conflict shall establish an official Information Bureau responsible for receiving and transmitting information in respect of the protected persons who are in its power.

Each of the Parties to the conflict shall, within the shortest possible period, give its Bureau information of any measure taken by it concerning any protected persons who are kept in custody for more than two weeks, who are subjected to assigned residence or who are interned. It shall, furthermore, require its various

departments concerned with such matters to provide the aforesaid Bureau promptly with information concerning all changes pertaining to these protected persons, as, for example, transfers, releases, repatriations, escapes, admittances to hospitals, births and deaths.

ART. 137. — Each national Bureau shall immediately forward information concerning protected persons by the most rapid means to the Powers of whom the aforesaid persons are nationals, or to Powers in whose territory they resided, through the intermediary of the Protecting Powers and likewise through the Central Agency provided for in Article 140. The Bureaux shall also reply to all enquiries which may be received regarding protected persons.

*Transmission
of
information*

Information Bureaux shall transmit information concerning a protected person unless its transmission might be detrimental to the person concerned or to his or her relatives. Even in such a case, the information may not be withheld from the Central Agency which, upon being notified of the circumstances, will take the necessary precautions indicated in Article 140.

All communications in writing made by any Bureau shall be authenticated by a signature or a seal.

ART. 138. — The information received by the national Bureau and transmitted by it shall be of such a character as to make it possible to identify the protected person exactly and to advise his next of kin quickly. The information in respect of each person shall include at least his surname, first names, place and date of birth, nationality, last residence and distinguishing characteristics, the first name of the father and the maiden name of the mother, the date, place and nature of the action taken with regard to the individual, the address at which correspondence may be sent to him and the name and address of the person to be informed.

*Particulars
required*

Likewise, information regarding the state of health of internees who are seriously ill or seriously wounded shall be supplied regularly and if possible every week.

ART. 139. — Each national Information Bureau shall, furthermore, be responsible for collecting all personal valuables left by protected persons mentioned in Article 136, in particular those who have been repatriated or released, or who have escaped or died; it shall forward the said valuables to those concerned, either direct, or, if necessary, through the Central Agency. Such articles shall be sent by the Bureau in sealed packets which shall be accompanied by statements giving clear and full identity particulars of the person to

*Forwarding
of personal
valuables*

whom the articles belonged, and by a complete list of the contents of the parcel. Detailed records shall be maintained of the receipt and despatch of all such valuables.

*Central
Agency*

ART. 140. — A Central Information Agency for protected persons, in particular for internees, shall be created in a neutral country. The International Committee of the Red Cross shall, if it deems necessary, propose to the Powers concerned the organization of such an Agency, which may be the same as that provided for in Article 123 of the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949.

The function of the Agency shall be to collect all information of the type set forth in Article 136 which it may obtain through official or private channels and to transmit it as rapidly as possible to the countries of origin or of residence of the persons concerned, except in cases where such transmissions might be detrimental to the persons whom the said information concerns, or to their relatives. It shall receive from the Parties to the conflict all reasonable facilities for effecting such transmissions.

The High Contracting Parties, and in particular those whose nationals benefit by the services of the Central Agency, are requested to give the said Agency the financial aid it may require.

The foregoing provisions shall in no way be interpreted as restricting the humanitarian activities of the International Committee of the Red Cross and of the relief Societies described in Article 142.

*Exemption
from charges*

ART. 141. — The national Information Bureaux and the Central Information Agency shall enjoy free postage for all mail, likewise the exemptions provided for in Article 110, and further, so far as possible, exemption from telegraphic charges or, at least, greatly reduced rates.

PART IV

EXECUTION OF THE CONVENTION

SECTION I

GENERAL PROVISIONS

ART. 142. — Subject to the measures which the Detaining Powers may consider essential to ensure their security or to meet any other reasonable need, the representatives of religious organizations, relief societies, or any other organizations assisting the protected persons, shall receive from these Powers, for themselves or their duly accredited agents, all facilities for visiting the protected persons, for distributing relief supplies and material from any source, intended for educational, recreational or religious purposes, or for assisting them in organizing their leisure time within the places of internment. Such societies or organizations may be constituted in the territory of the Detaining Power, or in any other country, or they may have an international character.

*Relief
societies
and other
organizations*

The Detaining Power may limit the number of societies and organizations whose delegates are allowed to carry out their activities in its territory and under its supervision, on condition, however, that such limitation shall not hinder the supply of effective and adequate relief to all protected persons.

The special position of the International Committee of the Red Cross in this field shall be recognized and respected at all times.

ART. 143. — Representatives or delegates of the Protecting Powers shall have permission to go to all places where protected persons are, particularly to places of internment, detention and work.

Supervision

They shall have access to all premises occupied by protected persons and shall be able to interview the latter without witnesses, personally or through an interpreter.

Such visits may not be prohibited except for reasons of imperative military necessity, and then only as an exceptional and temporary measure. Their duration and frequency shall not be restricted.

Such representatives and delegates shall have full liberty to select the places they wish to visit. The Detaining or Occupying Power, the

Protecting Power and when occasion arises the Power of origin of the persons to be visited, may agree that compatriots of the internees shall be permitted to participate in the visits.

The delegates of the International Committee of the Red Cross shall also enjoy the above prerogatives. The appointment of such delegates shall be submitted to the approval of the Power governing the territories where they will carry out their duties.

*Dissemination
of the
Convention*

ART. 144. — The High Contracting Parties undertake, in time of peace as in time of war, to disseminate the text of the present Convention as widely as possible in their respective countries, and, in particular, to include the study thereof in their programmes of military and, if possible, civil instruction, so that the principles thereof may become known to the entire population.

Any civilian, military, police or other authorities, who in time of war assume responsibilities in respect of protected persons, must possess the text of the Convention and be specially instructed as to its provisions.

*Translations.
Rules of
application*

ART. 145. — The High Contracting Parties shall communicate to one another through the Swiss Federal Council and, during hostilities, through the Protecting Powers, the official translations of the present Convention, as well as the laws and regulations which they may adopt to ensure the application thereof.

*Penal
sanctions*

*I.
General
observations*

ART. 146. — The High Contracting Parties undertake to enact any legislation necessary to provide effective penal sanctions for persons committing, or ordering to be committed, any of the grave breaches of the present Convention defined in the following Article.

Each High Contracting Party shall be under the obligation to search for persons alleged to have committed, or to have ordered to be committed, such grave breaches, and shall bring such persons, regardless of their nationality, before its own courts. It may also, if it prefers, and in accordance with the provisions of its own legislation, hand such persons over for trial to another High Contracting Party concerned, provided such High Contracting Party has made out a *prima facie* case.

Each High Contracting Party shall take measures necessary for the suppression of all acts contrary to the provisions of the present Convention other than the grave breaches defined in the following Article.

In all circumstances, the accused persons shall benefit by safeguards of proper trial and defence, which shall not be less favourable than those provided by Article 105 and those following

of the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949.

ART. 147. — Grave breaches to which the preceding Article relates shall be those involving any of the following acts, if committed against persons or property protected by the present Convention: wilful killing, torture or inhuman treatment, including biological experiments, wilfully causing great suffering or serious injury to body or health, unlawful deportation or transfer or unlawful confinement of a protected person, compelling a protected person to serve in the forces of a hostile Power, or wilfully depriving a protected person of the rights of fair and regular trial prescribed in the present Convention, taking of hostages and extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly.

*II.
Grave
breaches*

ART. 148. — No High Contracting Party shall be allowed to absolve itself or any other High Contracting Party of any liability incurred by itself or by another High Contracting Party in respect of breaches referred to in the preceding Article.

*III.
Responsi-
bilities of the
Contracting
Parties*

ART. 149. — At the request of a Party to the conflict, an enquiry shall be instituted, in a manner to be decided between the interested Parties, concerning any alleged violation of the Convention.

*Enquiry
procedure*

If agreement has not been reached concerning the procedure for the enquiry, the Parties should agree on the choice of an umpire who will decide upon the procedure to be followed. Once the violation has been established, the Parties to the conflict shall put an end to it and shall repress it with the least possible delay.

SECTION II

FINAL PROVISIONS

ART. 150. — The present Convention is established in English and in French. Both texts are equally authentic.

Languages

The Swiss Federal Council shall arrange for official translations of the Convention to be made in the Russian and Spanish languages.

Signature **ART. 151.** — The present Convention, which bears the date of this day, is open to signature until February 12, 1950, in the name of the Powers represented at the Conference which opened at Geneva on April 21, 1949.

Ratification **ART. 152.** — The present Convention shall be ratified as soon as possible and the ratifications shall be deposited at Berne.

A record shall be drawn up of the deposit of each instrument of ratification and certified copies of this record shall be transmitted by the Swiss Federal Council to all the Powers in whose name the Convention has been signed, or whose accession has been notified.

Coming into force **ART. 153.** — The present Convention shall come into force six months after not less than two instruments of ratification have been deposited.

Thereafter, it shall come into force for each High Contracting Party six months after the deposit of the instrument of ratification.

Relation with the Hague Conventions **ART. 154.** — In the relations between the Powers who are bound by the Hague Conventions respecting the Laws and Customs of War on Land, whether that of July 29, 1899, or that of October 18, 1907, and who are parties to the present Convention, this last Convention shall be supplementary to Sections II and III of the Regulations annexed to the above-mentioned Conventions of The Hague.

Accession **ART. 155.** — From the date of its coming into force, it shall be open to any Power in whose name the present Convention has not been signed, to accede to this Convention.

Notification of accessions **ART. 156.** — Accessions shall be notified in writing to the Swiss Federal Council, and shall take effect six months after the date on which they are received.

The Swiss Federal Council shall communicate the accessions to all the Powers in whose name the Convention has been signed, or whose accession has been notified.

Immediate effect **ART. 157.** — The situations provided for in Articles 2 and 3 shall give immediate effect to ratifications deposited and accessions notified by the Parties to the conflict before or after the beginning of hostilities or occupation. The Swiss Federal Council shall communicate by the quickest method any ratifications or accessions received from Parties to the conflict.

ART. 158. — Each of the High Contracting Parties shall be at liberty to denounce the present Convention.

Denunciation

The denunciation shall be notified in writing to the Swiss Federal Council, which shall transmit it to the Governments of all the High Contracting Parties.

The denunciation shall take effect one year after the notification thereof has been made to the Swiss Federal Council. However, a denunciation of which notification has been made at a time when the denouncing Power is involved in a conflict shall not take effect until peace has been concluded, and until after operations connected with the release, repatriation and re-establishment of the persons protected by the present Convention have been terminated.

The denunciation shall have effect only in respect of the denouncing Power. It shall in no way impair the obligations which the Parties to the conflict shall remain bound to fulfil by virtue of the principles of the law of nations, as they result from the usages established among civilized peoples, from the laws of humanity and the dictates of the public conscience.

ART. 159. — The Swiss Federal Council shall register the present Convention with the Secretariat of the United Nations. The Swiss Federal Council shall also inform the Secretariat of the United Nations of all ratifications, accessions and denunciations received by it with respect to the present Convention.

*Registration
with the
United
Nations*

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, having deposited their respective full powers, have signed the present Convention.

DONE at Geneva this twelfth day of August 1949, in the English and French languages. The original shall be deposited in the Archives of the Swiss Confederation. The Swiss Federal Council shall transmit certified copies thereof to each of the signatory and acceding States.

ANNEX I

DRAFT AGREEMENT RELATING TO HOSPITAL AND SAFETY ZONES AND LOCALITIES

ARTICLE 1. — Hospital and safety zones shall be strictly reserved for the persons mentioned in Article 23 of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949, and in Article 14 of the Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of August 12, 1949, and for the personnel entrusted with the organization and administration of these zones and localities and with the care of the persons therein assembled.

Nevertheless, persons whose permanent residence is within such zones shall have the right to stay there.

ART. 2. — No persons residing, in whatever capacity, in a hospital and safety zone shall perform any work, either within or without the zone, directly connected with military operations or the production of war material.

ART. 3. — The Power establishing a hospital and safety zone shall take all necessary measures to prohibit access to all persons who have no right of residence or entry therein.

ART. 4. — Hospital and safety zones shall fulfil the following conditions:

- a) They shall comprise only a small part of the territory governed by the Power which has established them.
- b) They shall be thinly populated in relation to the possibilities of accommodation.
- c) They shall be far removed and free from all military objectives, or large industrial or administrative establishments.
- d) They shall not be situated in areas which, according to every probability, may become important for the conduct of the war.

ART. 5. — Hospital and safety zones shall be subject to the following obligations:

- a) The lines of communication and means of transport which they possess shall not be used for the transport of military personnel or material, even in transit.
- b) They shall in no case be defended by military means.

ART. 6. — Hospital and safety zones shall be marked by means of oblique red bands on a white ground, placed on the buildings and outer precincts.

Zones reserved exclusively for the wounded and sick may be marked by means of the Red Cross (Red Crescent, Red Lion and Sun) emblem on a white ground.

They may be similarly marked at night by means of appropriate illumination.

ART. 7. — The Powers shall communicate to all the High Contracting Parties in peacetime or on the outbreak of hostilities, a list of the hospital and safety zones in the territories governed by them. They shall also give notice of any new zones set up during hostilities.

As soon as the adverse Party has received the above-mentioned notification, the zone shall be regularly established.

If, however, the adverse Party considers that the conditions of the present agreement have not been fulfilled, it may refuse to recognize the zone by giving immediate notice thereof to the Party responsible for the said zone, or may make its recognition of such zone dependent upon the institution of the control provided for in Article 8.

ART. 8. — Any Power having recognized one or several hospital and safety zones instituted by the adverse Party shall be entitled to demand control by one or more Special Commissions, for the purpose of ascertaining if the zones fulfil the conditions and obligations stipulated in the present agreement.

For this purpose, members of the Special Commissions shall at all times have free access to the various zones and may even reside there permanently. They shall be given all facilities for their duties of inspection.

ART. 9. — Should the Special Commissions note any facts which they consider contrary to the stipulations of the present agreement, they shall at once draw the attention of the Power governing the said zone to these facts, and shall fix a time limit of five days within which the matter should be rectified. They shall duly notify the Power who has recognized the zone.

If, when the time limit has expired, the Power governing the zone has not complied with the warning, the adverse Party may declare that it is no longer bound by the present agreement in respect of the said zone.

ART. 10. — Any Power setting up one or more hospital and safety zones, and the adverse Parties to whom their existence has been notified, shall nominate or have nominated by the Protecting Powers or by other neutral Powers, persons eligible to be members of the Special Commissions mentioned in Articles 8 and 9.

ART. 11. — In no circumstances may hospital and safety zones be the object of attack. They shall be protected and respected at all times by the Parties to the conflict.

ART. 12. — In the case of occupation of a territory, the hospital and safety zones therein shall continue to be respected and utilized as such.

Their purpose may, however, be modified by the Occupying Power, on condition that all measures are taken to ensure the safety of the persons accommodated.

ART. 13. — The present agreement shall also apply to localities which the Powers may utilize for the same purposes as hospital and safety zones.

ANNEX II

DRAFT REGULATIONS CONCERNING COLLECTIVE RELIEF

ARTICLE 1. — The Internee Committees shall be allowed to distribute collective relief shipments for which they are responsible, to all internees who are dependent for administration on the said Committee's place of internment, including those internees who are in hospitals, or in prisons or other penitentiary establishments.

ART. 2. — The distribution of collective relief shipments shall be effected in accordance with the instructions of the donors and with a plan drawn up by the Internee Committees. The issue of medical stores shall, however, be made for preference in agreement with the senior medical officers, and the latter may, in hospitals and infirmaries, waive the said instructions, if the needs of their patients so demand. Within the limits thus defined, the distribution shall always be carried out equitably.

ART. 3. — Members of Internee Committees shall be allowed to go to the railway stations or other points of arrival of relief supplies near their places of internment so as to enable them to verify the quantity as well as the quality of the goods received and to make out detailed reports thereon for the donors.

ART. 4. — Internee Committees shall be given the facilities necessary for verifying whether the distribution of collective relief in all sub-divisions and annexes of their places of internment has been carried out in accordance with their instructions.

ART. 5. — Internee Committees shall be allowed to complete, and to cause to be completed by members of the Internee Committees in labour detachments or by the senior medical officers of infirmaries and hospitals, forms or questionnaires intended for the donors, relating to collective relief supplies (distribution, requirements, quantities, etc.). Such forms and questionnaires, duly completed, shall be forwarded to the donors without delay.

ART. 6. — In order to secure the regular distribution of collective relief supplies to the internees in their place of internment, and to meet any needs that may arise through the arrival of fresh parties of internees, the Internee Committees shall be allowed to create and maintain sufficient reserve stocks of collective relief. For this purpose, they shall have suitable warehouses at their disposal; each warehouse shall be provided with two locks, the Internee Committee holding the keys of one lock, and the commandant of the place of internment the keys of the other.

ART. 7. — The High Contracting Parties, and the Detaining Powers in particular, shall, so far as is in any way possible and subject to the regulations governing the food supply of the population, authorize purchases of goods to be made in their territories for the distribution of collective relief to the internees. They shall likewise facilitate the transfer of funds and other financial measures of a technical or administrative nature taken for the purpose of making such purchases.

ART. 8. — The foregoing provisions shall not constitute an obstacle to the right of internees to receive collective relief before their arrival in a place of internment or in the course of their transfer, nor to the possibility of representatives of the Protecting Power, or of the International Committee of the Red Cross or any other humanitarian organization giving assistance to internees and responsible for forwarding such supplies, ensuring the distribution thereof to the recipients by any other means they may deem suitable.

ANNEX III

I. INTERNMENT CARD

1. Front

CIVILIAN INTERNEE MAIL

Postage free

POST CARD

IMPORTANT

This card must be completed by each internee immediately on being interned and each time his address is altered by reason of transfer to another place of internment or to a hospital.

This card is not the same as the special card which each internee is allowed to send to his relatives.

CENTRAL INFORMATION AGENCY
FOR PROTECTED PERSONS

INTERNATIONAL COMMITTEE
OF THE RED CROSS

2. Reverse side

Write legibly and in block letters — 1. Nationality

2. Surname

3. First names (*in full*)

4. First name of father

5. Date of birth 6. Place of birth.....

7. Occupation

8. Address before detention.....

9. Address of next of kin

10. Interned on: *
(or)

Coming from (hospital, etc.) on:

11. State of health *

12. Present address

13. Date..... 14. Signature.....

* Strike out what is not applicable. Do not add any remarks. See explanations on other side of card.

(Size of internment card — 10 x 15 cm)

ANNEX III

II. LETTER

CIVILIAN INTERNEE SERVICE

—
Postage free

To

Street and number

Place of destination (*in block capitals*)

Province or Department

Country (*in block capitals*)

Sender:
Surname and first names
Date and place of birth
Internment address

(Size of letter — 29 x 15 cm)

ANNEX III

III. CORRESPONDENCE CARD

1. Front

CIVILIAN INTERNEE MAIL

Postage free

POST CARD

Sender:

Surname and first names

Date and place of birth

Internment address

To

Street and number

Place of destination (*in block capitals*)

Province or Department

Country (*in block capitals*)

2. Reverse side

Date:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Write on the dotted lines only and as legibly as possible

(Size of correspondence card — 10 x15 cm)

V

PROTOCOL ADDITIONAL TO THE GENEVA CONVENTIONS OF 12 AUGUST 1949, AND RELATING TO THE PROTECTION OF VICTIMS OF INTERNATIONAL ARMED CONFLICTS (PROTOCOL I), OF 8 JUNE 1977

Preamble	239
-----------------	-------	-----

PART I

General provisions

Article 1	General principles and scope of application	240
Article 2	Definitions	240
Article 3	Beginning and end of application	241
Article 4	Legal status of the Parties to the conflict.....	241
Article 5	Appointment of Protecting Powers and of their substitute	241
Article 6	Qualified persons.....	242
Article 7	Meetings.....	243

PART II

Wounded, sick and shipwrecked

SECTION I – *General protection*

Article 8	Terminology.....	243
Article 9	Field of application	245
Article 10	Protection and care	245
Article 11	Protection of persons.....	245
Article 12	Protection of medical units	246
Article 13	Discontinuance of protection of civilian medical units.....	247
Article 14	Limitations on requisition of civilian medical units	247
Article 15	Protection of civilian medical and religious personnel	248
Article 16	General protection of medical duties.....	248
Article 17	Role of the civilian population and of aid societies.....	248
Article 18	Identification.....	249
Article 19	Neutral and other States not Parties to the conflict	250
Article 20	Prohibition of reprisals	250

SECTION II – *Medical transportation*

Article 21	Medical vehicles	250
------------	------------------------	-----

Article 22	Hospital ships and coastal rescue craft	250
Article 23	Other medical ships and craft	251
Article 24	Protection of medical aircraft.....	252
Article 25	Medical aircraft in areas not controlled by an adverse Party....	252
Article 26	Medical aircraft in contact or similar zones.....	252
Article 27	Medical aircraft in areas controlled by an adverse Party	252
Article 28	Restrictions on operations of medical aircraft.....	253
Article 29	Notifications and agreements concerning medical aircraft.....	253
Article 30	Landing and inspection of medical aircraft.....	254
Article 31	Neutral or other States not Parties to the conflict	254

SECTION III – *Missing and dead persons*

Article 32	General principle	256
Article 33	Missing persons	256
Article 34	Remains of deceased.....	257

PART III

Methods and means of warfare

Combatant and prisoner-of-war status

SECTION I – *Methods and means of warfare*

Article 35	Basic rules	258
Article 36	New weapons	258
Article 37	Prohibition of perfidy	258
Article 38	Recognized emblems	259
Article 39	Emblems of nationality.....	259
Article 40	Quarter	259
Article 41	Safeguard of an enemy <i>hors de combat</i>	259
Article 42	Occupants of aircraft	260

SECTION II – *Combatant and prisoner-of-war status*

Article 43	Armed forces.....	260
Article 44	Combatants and prisoners of war	261
Article 45	Protection of persons who have taken part in hostilities.....	262
Article 46	Spies.....	262
Article 47	Mercenaries.....	263

PART IV

Civilian population

SECTION I – *General protection against effects of hostilities*

CHAPTER I – BASIC RULE AND FIELD OF APPLICATION

Article 48	Basic rule	264
Article 49	Definition of attacks and scope of application.....	264

CHAPTER II – CIVILIANS AND CIVILIAN POPULATION

Article 50	Definition of civilians and civilian population	265
Article 51	Protection of the civilian population	265

CHAPTER III – CIVILIAN OBJECTS

Article 52	General protection of civilian objects	266
Article 53	Protection of cultural objects and of places of worship.....	267
Article 54	Protection of objects indispensable to the survival of the civilian population	267
Article 55	Protection of the natural environment.....	267
Article 56	Protection of works and installations containing dangerous forces.....	268

CHAPTER IV – PRECAUTIONARY MEASURES

Article 57	Precautions in attack.....	269
Article 58	Precautions against the effects of attacks	270

CHAPTER V – LOCALITIES AND ZONES UNDER SPECIAL PROTECTION

Article 59	Non-defended localities.....	270
Article 60	Demilitarized zones	271

CHAPTER VI – CIVIL DEFENCE

Article 61	Definitions and scope	272
Article 62	General protection	273
Article 63	Civil defence in occupied territories	274
Article 64	Civilian civil defence organizations of neutral or other States not Parties to the conflict and international co-ordinating organizations.....	274
Article 65	Cessation of protection.....	275
Article 66	Identification.....	275
Article 67	Members of the armed forces and military units assigned to civil defence organizations.....	276

SECTION II –	<i>Relief in favour of the civilian population</i>	
Article 68	Field of application	277
Article 69	Basic needs in occupied territories.....	277
Article 70	Relief actions.....	278
Article 71	Personnel participating in relief actions.....	278
SECTION III –	<i>Treatment of persons in the power of a Party to the conflict</i>	
CHAPTER I –	FIELD OF APPLICATION AND PROTECTION OF PERSONS AND OBJETS	
Article 72	Field of application	279
Article 73	Refugees and stateless persons	279
Article 74	Reunion of dispersed families	280
Article 75	Fundamental guarantees.....	280
CHAPTER II –	MEASURES IN FAVOUR OF WOMEN AND CHILDREN	
Article 76	Protection of women	282
Article 77	Protection of children	282
Article 78	Evacuation of children	283
CHAPTER III –	JOURNALISTS	
Article 79	Measures of protection for journalists	284

PART V

Execution of the Conventions and of this Protocol

SECTION I –	<i>General Provisions</i>	
Article 80	Measures for execution	285
Article 81	Activities of the Red Cross and other humanitarian organizations.....	285
Article 82	Legal advisers in armed forces.....	286
Article 83	Dissemination	286
Article 84	Rules of application.....	286
SECTION II –	<i>Repression of breaches of the Conventions and of this Protocol</i>	
Article 85	Repression of breaches of this Protocol	287
Article 86	Failure to act.....	288
Article 87	Duty of commanders	288
Article 88	Mutual assistance in criminal matters.....	289
Article 89	Co-operation.....	289
Article 90	International Fact-Finding Commission.....	289
Article 91	Responsibility.....	291

PART VI

Final provisions

Article 92	Signature	292
Article 93	Ratification	292
Article 94	Accession	292
Article 95	Entry into force	292
Article 96	Treaty relations upon entry into force of this Protocol	292
Article 97	Amendment	293
Article 98	Revision of Annex I	293
Article 99	Denunciation	294
Article 100	Notifications	294
Article 101	Registration	295
Article 102	Authentic texts	295

ANNEX I

Regulations concerning identification 296

Article 1	General provisions	296
-----------	--------------------------	-----

CHAPTER I – IDENTITY CARDS

Article 2	Identity card for permanent civilian medical and religious personnel	296
Article 3	Identity card for temporary civilian medical and religious personnel	297

CHAPTER II – THE DISTINCTIVE EMBLEM

Article 4	Shape	299
Article 5	Use	299

CHAPTER III – DISTINCTIVE SIGNALS

Article 6	Use	300
Article 7	Light signal	300
Article 8	Radio signal	301
Article 9	Electronic identification	301

CHAPTER IV – COMMUNICATIONS

Article 10	Radiocommunications	302
Article 11	Use of international codes	302
Article 12	Other means of communication	303
Article 13	Flight plans	303
Article 14	Signals and procedures for the interception of medical aircraft	303

CHAPTER V – CIVIL DEFENCE

Article 15	Identity card	304
Article 16	International distinctive sign	306

CHAPTER VI – WORKS AND INSTALLATIONS CONTAINING DANGEROUS FORCES

Article 17	International special sign	307
------------	----------------------------------	-----

ANNEX II

Identity card for journalists on dangerous professional missions	308
---	------------

V

PROTOCOL ADDITIONAL TO THE GENEVA CONVENTIONS OF 12 AUGUST 1949, AND RELATING TO THE PROTECTION OF VICTIMS OF INTERNATIONAL ARMED CONFLICTS (PROTOCOL I), OF 8 JUNE 1977

PREAMBLE

The High Contracting Parties,

Proclaiming their earnest wish to see peace prevail among peoples,

Recalling that every State has the duty, in conformity with the Charter of the United Nations, to refrain in its international relations from the threat or use of force against the sovereignty, territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations,

Believing it necessary nevertheless to reaffirm and develop the provisions protecting the victims of armed conflicts and to supplement measures intended to reinforce their application,

Expressing their conviction that nothing in this Protocol or in the Geneva Conventions of 12 August 1949 can be construed as legitimizing or authorizing any act of aggression or any other use of force inconsistent with the Charter of the United Nations,

Reaffirming further that the provisions of the Geneva Conventions of 12 August 1949 and of this Protocol must be fully applied in all circumstances to all persons who are protected by those instruments, without any adverse distinction based on the nature or origin of the armed conflict or on the causes espoused by or attributed to the Parties to the conflict,

Have agreed on the following:

PART I

GENERAL PROVISIONS*Article 1 — General principles and scope of application*

1. The High Contracting Parties undertake to respect and to ensure respect for this Protocol in all circumstances.
2. In cases not covered by this Protocol or by other international agreements, civilians and combatants remain under the protection and authority of the principles of international law derived from established custom, from the principles of humanity and from the dictates of public conscience.
3. This Protocol, which supplements the Geneva Conventions of 12 August 1949 for the protection of war victims, shall apply in the situations referred to in Article 2 common to those Conventions.
4. The situations referred to in the preceding paragraph include armed conflicts in which peoples are fighting against colonial domination and alien occupation and against racist régimes in the exercise of their right of self-determination, as enshrined in the Charter of the United Nations and the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations.

Article 2 — Definitions

For the purposes of this Protocol:

- a) “First Convention”, “Second Convention”, “Third Convention” and “Fourth Convention” mean, respectively, the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of 12 August 1949; the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea of 12 August 1949; the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of 12 August 1949; the Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of 12 August 1949; “the Conventions” means the four Geneva Conventions of 12 August 1949 for the protection of war victims;
- b) “rules of international law applicable in armed conflict” means the rules applicable in armed conflict set forth in international agreements to which the Parties to the conflict are Parties and the generally recognized principles and rules of international law which are applicable to armed conflict;
- c) “Protecting Power” means a neutral or other State not a Party to the conflict which has been designated by a Party to the conflict and accepted by the adverse Party and has agreed to carry out the functions assigned to a Protecting Power under the Conventions and this Protocol;

- d) “substitute” means an organization acting in place of a Protecting Power in accordance with Article 5.

Article 3 — Beginning and end of application

Without prejudice to the provisions which are applicable at all times:

- a) the Conventions and this Protocol shall apply from the beginning of any situation referred to in Article 1 of this Protocol;
- b) the application of the Conventions and of this Protocol shall cease, in the territory of Parties to the conflict, on the general close of military operations and, in the case of occupied territories, on the termination of the occupation, except, in either circumstance, for those persons whose final release, repatriation or re-establishment takes place thereafter. These persons shall continue to benefit from the relevant provisions of the Conventions and of this Protocol until their final release, repatriation or re-establishment.

Article 4 — Legal status of the Parties to the conflict

The application of the Conventions and of this Protocol, as well as the conclusion of the agreements provided for therein, shall not affect the legal status of the Parties to the conflict. Neither the occupation of a territory nor the application of the Conventions and this Protocol shall affect the legal status of the territory in question.

Article 5 — Appointment of Protecting Powers and of their substitute

1. It is the duty of the Parties to a conflict from the beginning of that conflict to secure the supervision and implementation of the Conventions and of this Protocol by the application of the system of Protecting Powers, including *inter alia* the designation and acceptance of those Powers, in accordance with the following paragraphs. Protecting Powers shall have the duty of safeguarding the interests of the Parties to the conflict.
2. From the beginning of a situation referred to in Article 1, each Party to the conflict shall without delay designate a Protecting Power for the purpose of applying the Conventions and this Protocol and shall, likewise without delay and for the same purpose, permit the activities of a Protecting Power which has been accepted by it as such after designation by the adverse Party.
3. If a Protecting Power has not been designated or accepted from the beginning of a situation referred to in Article 1, the International Committee of the Red Cross, without prejudice to the right of any other impartial humanitarian organization to do likewise, shall offer its good offices to the Parties to the conflict with a view to the designation without delay of a Protecting Power to which the Parties to the conflict consent. For that purpose it may, *inter alia*, ask each Party to provide it with a list of at least five States which that Party considers acceptable to act as

Protecting Power on its behalf in relation to an adverse Party, and ask each adverse Party to provide a list of at least five States which it would accept as the Protecting Power of the first Party; these lists shall be communicated to the Committee within two weeks after the receipt of the request; it shall compare them and seek the agreement of any proposed State named on both lists.

4. If, despite the foregoing, there is no Protecting Power, the Parties to the conflict shall accept without delay an offer which may be made by the International Committee of the Red Cross or by any other organization which offers all guarantees of impartiality and efficacy, after due consultations with the said Parties and taking into account the result of these consultations, to act as a substitute. The functioning of such a substitute is subject to the consent of the Parties to the conflict; every effort shall be made by the Parties to the conflict to facilitate the operations of the substitute in the performance of its tasks under the Conventions and this Protocol.
5. In accordance with Article 4, the designation and acceptance of Protecting Powers for the purpose of applying the Conventions and this Protocol shall not affect the legal status of the Parties to the conflict or of any territory, including occupied territory.
6. The maintenance of diplomatic relations between Parties to the conflict or the entrusting of the protection of a Party's interests and those of its nationals to a third State in accordance with the rules of international law relating to diplomatic relations is no obstacle to the designation of Protecting Powers for the purpose of applying the Conventions and this Protocol.
7. Any subsequent mention in this Protocol of a Protecting Power includes also a substitute.

Article 6 — Qualified persons

1. The High Contracting Parties shall, also in peacetime, endeavour, with the assistance of the national Red Cross (Red Crescent, Red Lion and Sun) Societies, to train qualified personnel to facilitate the application of the Conventions and of this Protocol, and in particular the activities of the Protecting Powers.
2. The recruitment and training of such personnel are within domestic jurisdiction.
3. The International Committee of the Red Cross shall hold at the disposal of the High Contracting Parties the lists of persons so trained which the High Contracting Parties may have established and may have transmitted to it for that purpose.
4. The conditions governing the employment of such personnel outside the national territory shall, in each case, be the subject of special agreements between the Parties concerned.

Article 7 — Meetings

The depositary of this Protocol shall convene a meeting of the High Contracting Parties, at the request of one or more of the said Parties and upon the approval of the majority of the said Parties, to consider general problems concerning the application of the Conventions and of the Protocol.

PART II

WOUNDED, SICK AND SHIPWRECKED

SECTION I

GENERAL PROTECTION

Article 8 — Terminology

For the purposes of this Protocol:

- a) “wounded” and “sick” mean persons, whether military or civilian, who, because of trauma, disease or other physical or mental disorder or disability, are in need of medical assistance or care and who refrain from any act of hostility. These terms also cover maternity cases, new-born babies and other persons who may be in need of immediate medical assistance or care, such as the infirm or expectant mothers, and who refrain from any act of hostility;
- b) “shipwrecked” means persons, whether military or civilian, who are in peril at sea or in other waters as a result of misfortune affecting them or the vessel or aircraft carrying them and who refrain from any act of hostility. These persons, provided that they continue to refrain from any act of hostility, shall continue to be considered shipwrecked during their rescue until they acquire another status under the Conventions or this Protocol;
- c) “medical personnel” means those persons assigned, by a Party to the conflict, exclusively to the medical purposes enumerated under sub-paragraph e) or to the administration of medical units or to the operation or administration of medical transports. Such assignments may be either permanent or temporary. The term includes:
 - i) medical personnel of a Party to the conflict, whether military or civilian, including those described in the First and Second Conventions, and those assigned to civil defence organizations;

- ii) medical personnel of national Red Cross (Red Crescent, Red Lion and Sun) Societies and other national voluntary aid societies duly recognized and authorized by a Party to the conflict;
- iii) medical personnel of medical units or medical transports described in Article 9, paragraph 2;
- d) “religious personnel” means military or civilian persons, such as chaplains, who are exclusively engaged in the work of their ministry and attached:
 - i) to the armed forces of a Party to the conflict;
 - ii) to medical units or medical transports of a Party to the conflict;
 - iii) to medical units or medical transports described in Article 9, paragraph 2; or
 - iv) to civil defence organizations of a Party to the conflict.

The attachment of religious personnel may be either permanent or temporary, and the relevant provisions mentioned under sub-paragraph *k*) apply to them;

- e) “medical units” means establishments and other units, whether military or civilian, organized for medical purposes, namely the search for, collection, transportation, diagnosis or treatment — including first-aid treatment — of the wounded, sick and shipwrecked, or for the prevention of disease. The term includes, for example, hospitals and other similar units, blood transfusion centres, preventive medicine centres and institutes, medical depots and the medical and pharmaceutical stores of such units. Medical units may be fixed or mobile, permanent or temporary;
- f) “medical transportation” means the conveyance by land, water or air of the wounded, sick, shipwrecked, medical personnel, religious personnel, medical equipment or medical supplies protected by the Conventions and by this Protocol;
- g) “medical transports” means any means of transportation, whether military or civilian, permanent or temporary, assigned exclusively to medical transportation and under the control of a competent authority of a Party to the conflict;
- h) “medical vehicles” means any medical transports by land;
- i) “medical ships and craft” means any medical transports by water;
- j) “medical aircraft” means any medical transports by air;
- k) “permanent medical personnel”, “permanent medical units” and “permanent medical transports” mean those assigned exclusively to medical purposes for an indeterminate period. “Temporary medical personnel”, “temporary medical units” and “temporary medical transports” mean those devoted exclusively to medical purposes for limited periods during the whole of such periods. Unless otherwise specified, the terms “medical personnel”, “medical units” and “medical transports” cover both permanent and temporary categories;

- l) “distinctive emblem” means the distinctive emblem of the red cross, red crescent or red lion and sun on a white ground when used for the protection of medical units and transports, or medical and religious personnel, equipment or supplies;
- m) “distinctive signal” means any signal or message specified for the identification exclusively of medical units or transports in Chapter III of Annex I to this Protocol.

Article 9 — Field of application

1. This Part, the provisions of which are intended to ameliorate the condition of the wounded, sick and shipwrecked, shall apply to all those affected by a situation referred to in Article 1, without any adverse distinction founded on race, colour, sex, language, religion or belief, political or other opinion, national or social origin, wealth, birth or other status, or on any other similar criteria.
2. The relevant provisions of Articles 27 and 32 of the First Convention shall apply to permanent medical units and transports (other than hospital ships, to which Article 25 of the Second Convention applies) and their personnel made available to a Party to the conflict for humanitarian purposes:
 - a) by a neutral or other State which is not a Party to that conflict;
 - b) by a recognized and authorized aid society of such a State;
 - c) by an impartial international humanitarian organization.

Article 10 — Protection and care

1. All the wounded, sick and shipwrecked, to whichever Party they belong, shall be respected and protected.
2. In all circumstances they shall be treated humanely and shall receive, to the fullest extent practicable and with the least possible delay, the medical care and attention required by their condition. There shall be no distinction among them founded on any grounds other than medical ones.

Article 11 — Protection of persons

1. The physical or mental health and integrity of persons who are in the power of the adverse Party or who are interned, detained or otherwise deprived of liberty as a result of a situation referred to in Article 1 shall not be endangered by any unjustified act or omission. Accordingly, it is prohibited to subject the persons described in this Article to any medical procedure which is not indicated by the state of health of the person concerned and which is not consistent with generally accepted medical standards which would be applied under similar medical circumstances to persons who are nationals of the Party conducting the procedure and who are in no way deprived of liberty.

2. It is, in particular, prohibited to carry out on such persons, even with their consent:
 - a) physical mutilations;
 - b) medical or scientific experiments;
 - c) removal of tissue or organs for transplantation,except where these acts are justified in conformity with the conditions provided for in paragraph 1.
3. Exceptions to the prohibition in paragraph 2 c) may be made only in the case of donations of blood for transfusion or of skin for grafting, provided that they are given voluntarily and without any coercion or inducement, and then only for therapeutic purposes. under conditions consistent with generally accepted medical standards and controls designed for the benefit of both the donor and the recipient.
4. Any wilful act or omission which seriously endangers the physical or mental health or integrity of any person who is in the power of a Party other than the one on which he depends and which either violates any of the prohibitions in paragraphs 1 and 2 or fails to comply with the requirements of paragraph 3 shall be a grave breach of this Protocol.
5. The persons described in paragraph 1 have the right to refuse any surgical operation. In case of refusal, medical personnel shall endeavour to obtain a written statement to that effect, signed or acknowledged by the patient.
6. Each Party to the conflict shall keep a medical record for every donation of blood for transfusion or skin for grafting by persons referred to in paragraph 1, if that donation is made under the responsibility of that Party. In addition, each Party to the conflict shall endeavour to keep a record of all medical procedures undertaken with respect to any person who is interned, detained or otherwise deprived of liberty as a result of a situation referred to in Article 1. These records shall be available at all times for inspection by the Protecting Power.

Article 12 — Protection of medical units

1. Medical units shall be respected and protected at all times and shall not be the object of attack.
2. Paragraph 1 shall apply to civilian medical units, provided that they:
 - a) belong to one of the Parties to the conflict;
 - b) are recognized and authorized by the competent authority of one of the Parties to the conflict; or
 - c) are authorized in conformity with Article 9, paragraph 2, of this Protocol or Article 27 of the First Convention.

3. The Parties to the conflict are invited to notify each other of the location of their medical units. The absence of such notification shall not exempt any of the Parties from the obligation to comply with the provisions of paragraph 1.
4. Under no circumstances shall medical units be used in an attempt to shield military objectives from attack. Whenever possible, the Parties to the conflict shall ensure that medical units are so sited that attacks against military objectives do not imperil their safety.

Article 13 — Discontinuance of protection of civilian medical units

1. The protection to which civilian medical units are entitled shall not cease unless they are used to commit, outside their humanitarian function, acts harmful to the enemy. Protection may, however, cease only after a warning has been given setting, whenever appropriate, a reasonable time-limit, and after such warning has remained unheeded.
2. The following shall not be considered as acts harmful to the enemy:
 - a) that the personnel of the unit are equipped with light individual weapons for their own defence or for that of the wounded and sick in their charge;
 - b) that the unit is guarded by a picket or by sentries or by an escort;
 - c) that small arms and ammunition taken from the wounded and sick, and not yet handed to the proper service, are found in the units;
 - d) that members of the armed forces or other combatants are in the unit for medical reasons.

Article 14 — Limitations on requisition of civilian medical units

1. The Occupying Power has the duty to ensure that the medical needs of the civilian population in occupied territory continue to be satisfied.
2. The Occupying Power shall not, therefore, requisition civilian medical units, their equipment, their *matériel* or the services of their personnel, so long as these resources are necessary for the provision of adequate medical services for the civilian population and for the continuing medical care of any wounded and sick already under treatment.
3. Provided that the general rule in paragraph 2 continues to be observed, the Occupying Power may requisition the said resources, subject to the following particular conditions:
 - a) that the resources are necessary for the adequate and immediate medical treatment of the wounded and sick members of the armed forces of the Occupying Power or of prisoners of war;
 - b) that the requisition continues only while such necessity exists; and
 - c) that immediate arrangements are made to ensure that the medical needs of the civilian population, as well as those of any wounded and sick under treatment who are affected by the requisition, continue to be satisfied.

Article 15 — Protection of civilian medical and religious personnel

1. Civilian medical personnel shall be respected and protected.
2. If needed, all available help shall be afforded to civilian medical personnel in an area where civilian medical services are disrupted by reason of combat activity.
3. The Occupying Power shall afford civilian medical personnel in occupied territories every assistance to enable them to perform, to the best of their ability, their humanitarian functions. The Occupying Power may not require that, in the performance of those functions, such personnel shall give priority to the treatment of any person except on medical grounds. They shall not be compelled to carry out tasks which are not compatible with their humanitarian mission.
4. Civilian medical personnel shall have access to any place where their services are essential, subject to such supervisory and safety measures as the relevant Party to the conflict may deem necessary.
5. Civilian religious personnel shall be respected and protected. The provisions of the Conventions and of this Protocol concerning the protection and identification of medical personnel shall apply equally to such persons.

Article 16 — General protection of medical duties

1. Under no circumstances shall any person be punished for carrying out medical activities compatible with medical ethics, regardless of the person benefiting therefrom.
2. Persons engaged in medical activities shall not be compelled to perform acts or to carry out work contrary to the rules of medical ethics or to other medical rules designed for the benefit of the wounded and sick or to the provisions of the Conventions or of this Protocol, or to refrain from performing acts or from carrying out work required by those rules and provisions.
3. No person engaged in medical activities shall be compelled to give to anyone belonging either to an adverse Party, or to his own Party except as required by the law of the latter Party, any information concerning the wounded and sick who are, or who have been, under his care, if such information would, in his opinion, prove harmful to the patients concerned or to their families. Regulations for the compulsory notification of communicable diseases shall, however, be respected.

Article 17 — Role of the civilian population and of aid societies

1. The civilian population shall respect the wounded, sick and shipwrecked, even if they belong to the adverse Party, and shall commit no act of violence against them. The civilian population and aid societies, such as national Red Cross (Red Crescent, Red Lion and Sun) Societies, shall be permitted, even on their own

initiative, to collect and care for the wounded, sick and shipwrecked, even in invaded or occupied areas. No one shall be harmed, prosecuted, convicted or punished for such humanitarian acts.

2. The Parties to the conflict may appeal to the civilian population and the aid societies referred to in paragraph 1 to collect and care for the wounded, sick and shipwrecked, and to search for the dead and report their location; they shall grant both protection and the necessary facilities to those who respond to this appeal. If the adverse Party gains or regains control of the area, that Party also shall afford the same protection and facilities for so long as they are needed.

Article 18 — Identification

1. Each Party to the conflict shall endeavour to ensure that medical and religious personnel and medical units and transports are identifiable.
2. Each Party to the conflict shall also endeavour to adopt and to implement methods and procedures which will make it possible to recognize medical units and transports which use the distinctive emblem and distinctive signals.
3. In occupied territory and in areas where fighting is taking place or is likely to take place, civilian medical personnel and civilian religious personnel should be recognizable by the distinctive emblem and an identity card certifying their status.
4. With the consent of the competent authority, medical units and transports shall be marked by the distinctive emblem. The ships and craft referred to in Article 22 of this Protocol shall be marked in accordance with the provisions of the Second Convention.
5. In addition to the distinctive emblem, a Party to the conflict may, as provided in Chapter III of Annex 1 to this Protocol, authorize the use of distinctive signals to identify medical units and transports. Exceptionally, in the special cases covered in that Chapter, medical transports may use distinctive signals without displaying the distinctive emblem.
6. The application of the provisions of paragraphs 1 to 5 of this Article is governed by Chapters I to III of Annex I to this Protocol. Signals designated in Chapter III of the Annex for the exclusive use of medical units and transports shall not, except as provided therein, be used for any purpose other than to identify the medical units and transports specified in that Chapter.
7. This Article does not authorize any wider use of the distinctive emblem in peacetime than is prescribed in Article 44 of the First Convention.
8. The provisions of the Conventions and of this Protocol relating to supervision of the use of the distinctive emblem and to the prevention and repression of any misuse thereof shall be applicable to distinctive signals.

Article 19 — Neutral and other States not Parties to the conflict

Neutral and other States not Parties to the conflict shall apply the relevant provisions of this Protocol to persons protected by this Part who may be received or interned within their territory, and to any dead of the Parties to that conflict whom they may find.

Article 20 — Prohibition of reprisals

Reprisals against the persons and objects protected by this Part are prohibited.

SECTION II

MEDICAL TRANSPORTATION

Article 21 — Medical vehicles

Medical vehicles shall be respected and protected in the same way as mobile medical units under the Conventions and this Protocol.

Article 22 — Hospital ships and coastal rescue craft

1. The provisions of the Conventions relating to:

- a) vessels described in Articles 22, 24, 25 and 27 of the Second Convention,
- b) their lifeboats and small craft,
- c) their personnel and crews, and
- d) the wounded, sick and shipwrecked on board,

shall also apply where these vessels carry civilian wounded, sick and shipwrecked who do not belong to any of the categories mentioned in Article 13 of the Second Convention. Such civilians shall not, however, be subject to surrender to any Party which is not their own, or to capture at sea. If they find themselves in the power of a Party to the conflict other than their own, they shall be covered by the Fourth Convention and by this Protocol.

2. The protection provided by the Conventions to vessels described in Article 25 of the Second Convention shall extend to hospital ships made available for humanitarian purposes to a Party to the conflict:

- a) by a neutral or other State which is not a Party to that conflict; or
- b) by an impartial international humanitarian organization,

provided that, in either case, the requirements set out in that Article are complied with.

3. Small craft described in Article 27 of the Second Convention shall be protected even if the notification envisaged by that Article has not been made. The Parties to the conflict are, nevertheless, invited to inform each other of any details of such craft which will facilitate their identification and recognition.

Article 23 — Other medical ships and craft

1. Medical ships and craft other than those referred to in Article 22 of this Protocol and Article 38 of the Second Convention shall, whether at sea or in other waters, be respected and protected in the same way as mobile medical units under the Conventions and this Protocol. Since this protection can only be effective if they can be identified and recognized as medical ships or craft, such vessels should be marked with the distinctive emblem and as far as possible comply with the second paragraph of Article 43 of the Second Convention.
2. The ships and craft referred to in paragraph 1 shall remain subject to the laws of war. Any warship on the surface able immediately to enforce its command may order them to stop, order them off, or make them take a certain course, and they shall obey every such command. Such ships and craft may not in any other way be diverted from their medical mission so long as they are needed for the wounded, sick and shipwrecked on board.
3. The protection provided in paragraph 1 shall cease only under the conditions set out in Articles 34 and 35 of the Second Convention. A clear refusal to obey a command given in accordance with paragraph 2 shall be an act harmful to the enemy under Article 34 of the Second Convention.
4. A Party to the conflict may notify any adverse Party as far in advance of sailing as possible of the name, description, expected time of sailing, course and estimated speed of the medical ship or craft, particularly in the case of ships of over 2,000 gross tons, and may provide any other information which would facilitate identification and recognition. The adverse Party shall acknowledge receipt of such information.
5. The provisions of Article 37 of the Second Convention shall apply to medical and religious personnel in such ships and craft.
6. The provisions of the Second Convention shall apply to the wounded, sick and shipwrecked belonging to the categories referred to in Article 13 of the Second Convention and in Article 44 of this Protocol who may be on board such medical ships and craft. Wounded, sick and shipwrecked civilians who do not belong to any of the categories mentioned in Article 13 of the Second Convention shall not be subject, at sea, either to surrender to any Party which is not their own, or to removal from such ships or craft; if they find themselves in the power of a Party to the conflict other than their own, they shall be covered by the Fourth Convention and by this Protocol.

Article 24 — Protection of medical aircraft

Medical aircraft shall be respected and protected, subject to the provisions of this Part.

Article 25 — Medical aircraft in areas not controlled by an adverse Party

In and over land areas physically controlled by friendly forces, or in and over sea areas not physically controlled by an adverse Party, the respect and protection of medical aircraft of a Party to the conflict is not dependent on any agreement with an adverse Party. For greater safety, however, a Party to the conflict operating its medical aircraft in these areas may notify the adverse Party, as provided in Article 29, in particular when such aircraft are making flights bringing them within range of surface-to-air weapons systems of the adverse Party.

Article 26 — Medical aircraft in contact or similar zones

1. In and over those parts of the contact zone which are physically controlled by friendly forces and in and over those areas the physical control of which is not clearly established, protection for medical aircraft can be fully effective only by prior agreement between the competent military authorities of the Parties to the conflict, as provided for in Article 29. Although, in the absence of such an agreement, medical aircraft operate at their own risk, they shall nevertheless be respected after they have been recognized as such.
2. “Contact zone” means any area on land where the forward elements of opposing forces are in contact with each other, especially where they are exposed to direct fire from the ground.

Article 27 — Medical aircraft in areas controlled by an adverse Party

1. The medical aircraft of a Party to the conflict shall continue to be protected while flying over land or sea areas physically controlled by an adverse Party, provided that prior agreement to such flights has been obtained from the competent authority of that adverse Party.
2. A medical aircraft which flies over an area physically controlled by an adverse Party without, or in deviation from the terms of, an agreement provided for in paragraph 1, either through navigational error or because of an emergency affecting the safety of the flight, shall make every effort to identify itself and to inform the adverse Party of the circumstances. As soon as such medical aircraft has been recognized by the adverse Party, that Party shall make all reasonable efforts to give the order to land or to alight on water, referred to in Article 30, paragraph 1, or to take other measures to safeguard its own interests, and, in either case, to allow the aircraft time for compliance, before resorting to an attack against the aircraft.

Article 28 — Restrictions on operations of medical aircraft

1. The Parties to the conflict are prohibited from using their medical aircraft to attempt to acquire any military advantage over an adverse Party. The presence of medical aircraft shall not be used in an attempt to render military objectives immune from attack.
2. Medical aircraft shall not be used to collect or transmit intelligence data and shall not carry any equipment intended for such purposes. They are prohibited from carrying any persons or cargo not included within the definition in Article 8, sub-paragraph *f*). The carrying on board of the personal effects of the occupants or of equipment intended solely to facilitate navigation, communication, or identification shall not be considered as prohibited.
3. Medical aircraft shall not carry any armament except small arms and ammunition taken from the wounded, sick and shipwrecked on board and not yet handed to the proper service, and such light individual weapons as may be necessary to enable the medical personnel on board to defend themselves and the wounded, sick and shipwrecked in their charge.
4. While carrying out the flights referred to in Articles 26 and 27, medical aircraft shall not, except by prior agreement with the adverse Party, be used to search for the wounded, sick and shipwrecked.

Article 29 — Notifications and agreements concerning medical aircraft

1. Notifications under Article 25, or requests for prior agreement under Articles 26, 27, 28 (paragraph 4), or 31 shall state the proposed number of medical aircraft, their flight plans and means of identification, and shall be understood to mean that every flight will be carried out in compliance with Article 28.
2. A Party which receives a notification given under Article 25 shall at once acknowledge receipt of such notification.
3. A Party which receives a request for prior agreement under Articles 26, 27, 28 (paragraph 4), or 31 shall, as rapidly as possible, notify the requesting Party:
 - a) that the request is agreed to;
 - b) that the request is denied; or
 - c) of reasonable alternative proposals to the request. It may also propose a prohibition or restriction of other flights in the area during the time involved. If the Party which submitted the request accepts the alternative proposals, it shall notify the other Party of such acceptance.
4. The Parties shall take the necessary measures to ensure that notifications and agreements can be made rapidly.
5. The Parties shall also take the necessary measures to disseminate rapidly the substance of any such notifications and agreements to the military units

concerned and shall instruct those units regarding the means of identification that will be used by the medical aircraft in question.

Article 30 — Landing and inspection of medical aircraft

1. Medical aircraft flying over areas which are physically controlled by an adverse Party, or over areas the physical control of which is not clearly established, may be ordered to land or to alight on water, as appropriate, to permit inspection in accordance with the following paragraphs. Medical aircraft shall obey any such order.
2. If such an aircraft lands or alights on water, whether ordered to do so or for other reasons, it may be subjected to inspection solely to determine the matters referred to in paragraphs 3 and 4. Any such inspection shall be commenced without delay and shall be conducted expeditiously. The inspecting Party shall not require the wounded and sick to be removed from the aircraft unless their removal is essential for the inspection. That Party shall in any event ensure that the condition of the wounded and sick is not adversely affected by the inspection or by the removal.
3. If the inspection discloses that the aircraft:
 - a) is a medical aircraft within the meaning of Article 8, sub-paragraph j),
 - b) is not in violation of the conditions prescribed in Article 28, and
 - c) has not flown without or in breach of a prior agreement where such agreement is required,the aircraft and those of its occupants who belong to the adverse Party or to a neutral or other State not a Party to the conflict shall be authorized to continue the flight without delay.
4. If the inspection discloses that the aircraft:
 - a) is not a medical aircraft within the meaning of Article 8, sub-paragraph j),
 - b) is in violation of the conditions prescribed in Article 28, or
 - c) has flown without or in breach of a prior agreement where such agreement is required,the aircraft may be seized. Its occupants shall be treated in conformity with the relevant provisions of the Conventions and of this Protocol. Any aircraft seized which had been assigned as a permanent medical aircraft may be used thereafter only as a medical aircraft.

Article 31 — Neutral or other States not Parties to the conflict

1. Except by prior agreement, medical aircraft shall not fly over or land in the territory of a neutral or other State not a Party to the conflict. However, with such an agreement, they shall be respected throughout their flight and also for the duration of any calls in the territory. Nevertheless they shall obey any summons to land or to alight on water, as appropriate.

2. Should a medical aircraft, in the absence of an agreement or in deviation from the terms of an agreement, fly over the territory of a neutral or other State not a Party to the conflict, either through navigational error or because of an emergency affecting the safety of the flight, it shall make every effort to give notice of the flight and to identify itself. As soon as such medical aircraft is recognized, that State shall make all reasonable efforts to give the order to land or to alight on water referred to in Article 30, paragraph 1, or to take other measures to safeguard its own interests, and, in either case, to allow the aircraft time for compliance, before resorting to an attack against the aircraft.
3. If a medical aircraft, either by agreement or in the circumstances mentioned in paragraph 2, lands or alights on water in the territory of a neutral or other State not Party to the conflict, whether ordered to do so or for other reasons, the aircraft shall be subject to inspection for the purposes of determining whether it is in fact a medical aircraft. The inspection shall be commenced without delay and shall be conducted expeditiously. The inspecting Party shall not require the wounded and sick of the Party operating the aircraft to be removed from it unless their removal is essential for the inspection. The inspecting Party shall in any event ensure that the condition of the wounded and sick is not adversely affected by the inspection or the removal. If the inspection discloses that the aircraft is in fact a medical aircraft, the aircraft with its occupants, other than those who must be detained in accordance with the rules of international law applicable in armed conflict, shall be allowed to resume its flight, and reasonable facilities shall be given for the continuation of the flight. If the inspection discloses that the aircraft is not a medical aircraft, it shall be seized and the occupants treated in accordance with paragraph 4.
4. The wounded, sick and shipwrecked disembarked, otherwise than temporarily, from a medical aircraft with the consent of the local authorities in the territory of a neutral or other State not a Party to the conflict shall, unless agreed otherwise between that State and the Parties to the conflict, be detained by that State where so required by the rules of international law applicable in armed conflict, in such a manner that they cannot again take part in the hostilities. The cost of hospital treatment and internment shall be borne by the State to which those persons belong.
5. Neutral or other States not Parties to the conflict shall apply any conditions and restrictions on the passage of medical aircraft over, or on the landing of medical aircraft in, their territory equally to all Parties to the conflict.

SECTION III

MISSING AND DEAD PERSONS

Article 32 — General principle

In the implementation of this Section, the activities of the High Contracting Parties, of the Parties to the conflict and of the international humanitarian organizations mentioned in the Conventions and in this Protocol shall be prompted mainly by the right of families to know the fate of their relatives.

Article 33 — Missing persons

1. As soon as circumstances permit, and at the latest from the end of active hostilities, each Party to the conflict shall search for the persons who have been reported missing by an adverse Party. Such adverse Party shall transmit all relevant information concerning such persons in order to facilitate such searches.
2. In order to facilitate the gathering of information pursuant to the preceding paragraph, each Party to the conflict shall, with respect to persons who would not receive more favourable consideration under the Conventions and this Protocol:
 - a) record the information specified in Article 138 of the Fourth Convention in respect of such persons who have been detained, imprisoned or otherwise held in captivity for more than two weeks as a result of hostilities or occupation, or who have died during any period of detention;
 - b) to the fullest extent possible, facilitate and, if need be, carry out the search for and the recording of information concerning such persons if they have died in other circumstances as a result of hostilities or occupation.
3. Information concerning persons reported missing pursuant to paragraph 1 and requests for such information shall be transmitted either directly or through the Protecting Power or the Central Tracing Agency of the International Committee of the Red Cross or national Red Cross (Red Crescent, Red Lion and Sun) Societies. Where the information is not transmitted through the International Committee of the Red Cross and its Central Tracing Agency, each Party to the conflict shall ensure that such information is also supplied to the Central Tracing Agency.
4. The Parties to the conflict shall endeavour to agree on arrangements for teams to search for, identify and recover the dead from battlefied areas, including arrangements, if appropriate, for such teams to be accompanied by personnel of the adverse Party while carrying out these missions in areas controlled by the adverse Party. Personnel of such teams shall be respected and protected while exclusively carrying out these duties.

Article 34 — Remains of deceased

1. The remains of persons who have died for reasons related to occupation or in detention resulting from occupation or hostilities and those of persons not nationals of the country in which they have died as a result of hostilities shall be respected, and the gravesites of all such persons shall be respected, maintained and marked as provided for in Article 130 of the Fourth Convention, where their remains or gravesites would not receive more favourable consideration under the Conventions and this Protocol.
2. As soon as circumstances and the relations between the adverse Parties permit, the High Contracting Parties in whose territories graves and, as the case may be, other locations of the remains of persons who have died as a result of hostilities or during occupation or in detention are situated, shall conclude agreements in order:
 - a) to facilitate access to the gravesites by relatives of the deceased and by representatives of official graves registration services and to regulate the practical arrangements for such access;
 - b) to protect and maintain such gravesites permanently;
 - c) to facilitate the return of the remains of the deceased and of personal effects to the home country upon its request or, unless that country objects, upon the request of the next of kin.
3. In the absence of the agreements provided for in paragraph 2 b) or c) and if the home country of such deceased is not willing to arrange at its expense for the maintenance of such gravesites, the High Contracting Party in whose territory the gravesites are situated may offer to facilitate the return of the remains of the deceased to the home country. Where such an offer has not been accepted the High Contracting Party may, after the expiry of five years from the date of the offer and upon due notice to the home country, adopt the arrangements laid down in its own laws relating to cemeteries and graves.
4. A High Contracting Party in whose territory the gravesites referred to in this Article are situated shall be permitted to exhume the remains only:
 - a) in accordance with paragraphs 2 c) and 3, or
 - b) where exhumation is a matter of overriding public necessity, including cases of medical and investigative necessity, in which case the High Contracting Party shall at all times respect the remains, and shall give notice to the home country of its intention to exhume the remains together with details of the intended place of reinterment.

PART III

**METHODS AND MEANS OF WARFARE
COMBATANT AND PRISONER-OF-WAR STATUS**

SECTION I

METHODS AND MEANS OF WARFARE

Article 35 — Basic rules

1. In any armed conflict, the right of the Parties to the conflict to choose methods or means of warfare is not unlimited.
2. It is prohibited to employ weapons, projectiles and material and methods of warfare of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering.
3. It is prohibited to employ methods or means of warfare which are intended, or may be expected, to cause widespread, long-term and severe damage to the natural environment.

Article 36 — New weapons

In the study, development, acquisition or adoption of a new weapon, means or method of warfare, a High Contracting Party is under an obligation to determine whether its employment would, in some or all circumstances, be prohibited by this Protocol or by any other rule of international law applicable to the High Contracting Party.

Article 37 — Prohibition of perfidy

1. It is prohibited to kill, injure or capture an adversary by resort to perfidy. Acts inviting the confidence of an adversary to lead him to believe that he is entitled to, or is obliged to accord, protection under the rules of international law applicable in armed conflict, with intent to betray that confidence, shall constitute perfidy. The following acts are examples of perfidy:
 - a) the feigning of an intent to negotiate under a flag of truce or of a surrender;
 - b) the feigning of an incapacitation by wounds or sickness;
 - c) the feigning of civilian, non-combatant status; and
 - d) the feigning of protected status by the use of signs, emblems or uniforms of the United Nations or of neutral or other States not Parties to the conflict.

2. Ruses of war are not prohibited. Such ruses are acts which are intended to mislead an adversary or to induce him to act recklessly but which infringe no rule of international law applicable in armed conflict and which are not perfidious because they do not invite the confidence of an adversary with respect to protection under that law. The following are examples of such ruses: the use of camouflage, decoys, mock operations and misinformation.

Article 38 — Recognized emblems

1. It is prohibited to make improper use of the distinctive emblem of the red cross, red crescent or red lion and sun or of other emblems, signs or signals provided for by the Conventions or by this Protocol. It is also prohibited to misuse deliberately in an armed conflict other internationally recognized protective emblems, signs or signals, including the flag of truce, and the protective emblem of cultural property.
2. It is prohibited to make use of the distinctive emblem of the United Nations, except as authorized by that Organization.

Article 39 — Emblems of nationality

1. It is prohibited to make use in an armed conflict of the flags or military emblems, insignia or uniforms of neutral or other States not Parties to the conflict.
2. It is prohibited to make use of the flags or military emblems, insignia or uniforms of adverse Parties while engaging in attacks or in order to shield, favour, protect or impede military operations.
3. Nothing in this Article or in Article 37, paragraph 1 *d*), shall affect the existing generally recognized rules of international law applicable to espionage or to the use of flags in the conduct of armed conflict at sea.

Article 40 — Quarter

It is prohibited to order that there shall be no survivors, to threaten an adversary therewith or to conduct hostilities on this basis.

Article 41 — Safeguard of an enemy hors de combat

1. A person who is recognized or who, in the circumstances, should be recognized to be *hors de combat* shall not be made the object of attack.
2. A person is *hors de combat* if:
 - a) he is in the power of an adverse Party;
 - b) he clearly expresses an intention to surrender; or
 - c) he has been rendered unconscious or is otherwise incapacitated by wounds or sickness, and therefore is incapable of defending himself;

provided that in any of these cases he abstains from any hostile act and does not attempt to escape.

3. When persons entitled to protection as prisoners of war have fallen into the power of an adverse Party under unusual conditions of combat which prevent their evacuation as provided for in Part III, Section I, of the Third Convention, they shall be released and all feasible precautions shall be taken to ensure their safety.

Article 42 — Occupants of aircraft

1. No person parachuting from an aircraft in distress shall be made the object of attack during his descent.
2. Upon reaching the ground in territory controlled by an adverse Party, a person who has parachuted from an aircraft in distress shall be given an opportunity to surrender before being made the object of attack, unless it is apparent that he is engaging in a hostile act.
3. Airborne troops are not protected by this Article.

SECTION II

COMBATANT AND PRISONER-OF-WAR STATUS

Article 43 — Armed forces

1. The armed forces of a Party to a conflict consist of all organized armed forces, groups and units which are under a command responsible to that Party for the conduct of its subordinates, even if that Party is represented by a government or an authority not recognized by an adverse Party. Such armed forces shall be subject to an internal disciplinary system which, *inter alia*, shall enforce compliance with the rules of international law applicable in armed conflict.
2. Members of the armed forces of a Party to a conflict (other than medical personnel and chaplains covered by Article 33 of the Third Convention) are combatants, that is to say, they have the right to participate directly in hostilities.
3. Whenever a Party to a conflict incorporates a paramilitary or armed law enforcement agency into its armed forces it shall so notify the other Parties to the conflict.

Article 44 — Combatants and prisoners of war

1. Any combatant, as defined in Article 43, who falls into the power of an adverse Party shall be a prisoner of war.
2. While all combatants are obliged to comply with the rules of international law applicable in armed conflict, violations of these rules shall not deprive a combatant of his right to be a combatant or, if he falls into the power of an adverse Party, of his right to be a prisoner of war, except as provided in paragraphs 3 and 4.
3. In order to promote the protection of the civilian population from the effects of hostilities, combatants are obliged to distinguish themselves from the civilian population while they are engaged in an attack or in a military operation preparatory to an attack. Recognizing, however, that there are situations in armed conflicts where, owing to the nature of the hostilities an armed combatant cannot so distinguish himself, he shall retain his status as a combatant, provided that, in such situations, he carries his arms openly:
 - a) during each military engagement, and
 - b) during such time as he is visible to the adversary while he is engaged in a military deployment preceding the launching of an attack in which he is to participate.

Acts which comply with the requirements of this paragraph shall not be considered as perfidious within the meaning of Article 37, paragraph 1 c).

4. A combatant who falls into the power of an adverse Party while failing to meet the requirements set forth in the second sentence of paragraph 3 shall forfeit his right to be a prisoner of war, but he shall, nevertheless, be given protections equivalent in all respects to those accorded to prisoners of war by the Third Convention and by this Protocol. This protection includes protections equivalent to those accorded to prisoners of war by the Third Convention in the case where such a person is tried and punished for any offences he has committed.
5. Any combatant who falls into the power of an adverse Party while not engaged in an attack or in a military operation preparatory to an attack shall not forfeit his rights to be a combatant and a prisoner of war by virtue of his prior activities.
6. This Article is without prejudice to the right of any person to be a prisoner of war pursuant to Article 4 of the Third Convention.
7. This Article is not intended to change the generally accepted practice of States with respect to the wearing of the uniform by combatants assigned to the regular, uniformed armed units of a Party to the conflict.
8. In addition to the categories of persons mentioned in Article 13 of the First and Second Conventions, all members of the armed forces of a Party to the conflict, as defined in Article 43 of this Protocol, shall be entitled to protection under

those Conventions if they are wounded or sick or, in the case of the Second Convention, shipwrecked at sea or in other waters.

Article 45 — Protection of persons who have taken part in hostilities

1. A person who takes part in hostilities and falls into the power of an adverse Party shall be presumed to be a prisoner of war, and therefore shall be protected by the Third Convention, if he claims the status of prisoner of war, or if he appears to be entitled to such status, or if the Party on which he depends claims such status on his behalf by notification to the detaining Power or to the Protecting Power. Should any doubt arise as to whether any such person is entitled to the status of prisoner of war, he shall continue to have such status and, therefore, to be protected by the Third Convention and this Protocol until such time as his status has been determined by a competent tribunal.
2. If a person who has fallen into the power of an adverse Party is not held as a prisoner of war and is to be tried by that Party for an offence arising out of the hostilities, he shall have the right to assert his entitlement to prisoner-of-war status before a judicial tribunal and to have that question adjudicated. Whenever possible under the applicable procedure, this adjudication shall occur before the trial for the offence. The representatives of the Protecting Power shall be entitled to attend the proceedings in which that question is adjudicated, unless, exceptionally, the proceedings are held *in camera* in the interest of State security. In such a case the detaining Power shall advise the Protecting Power accordingly.
3. Any person who has taken part in hostilities, who is not entitled to prisoner-of-war status and who does not benefit from more favourable treatment in accordance with the Fourth Convention shall have the right at all times to the protection of Article 75 of this Protocol. In occupied territory, any such person, unless he is held as a spy, shall also be entitled, notwithstanding Article 5 of the Fourth Convention, to his rights of communication under that Convention.

Article 46 — Spies

1. Notwithstanding any other provision of the Conventions or of this Protocol, any member of the armed forces of a Party to the conflict who falls into the power of an adverse Party while engaging in espionage shall not have the right to the status of prisoner of war and may be treated as a spy.
2. A member of the armed forces of a Party to the conflict who, on behalf of that Party and in territory controlled by an adverse Party, gathers or attempts to gather information shall not be considered as engaging in espionage if, while so acting, he is in the uniform of his armed forces.
3. A member of the armed forces of a Party to the conflict who is a resident of territory occupied by an adverse Party and who, on behalf of the Party on which he depends, gathers or attempts to gather information of military value within

that territory shall not be considered as engaging in espionage unless he does so through an act of false pretences or deliberately in a clandestine manner. Moreover, such a resident shall not lose his right to the status of prisoner of war and may not be treated as a spy unless he is captured while engaging in espionage.

4. A member of the armed forces of a Party to the conflict who is not a resident of territory occupied by an adverse Party and who has engaged in espionage in that territory shall not lose his right to the status of prisoner of war and may not be treated as a spy unless he is captured before he has rejoined the armed forces to which he belongs.

Article 47 — Mercenaries

1. A mercenary shall not have the right to be a combatant or a prisoner of war.
2. A mercenary is any person who:
 - a) is specially recruited locally or abroad in order to fight in an armed conflict;
 - b) does, in fact, take a direct part in the hostilities;
 - c) is motivated to take part in the hostilities essentially by the desire for private gain and, in fact, is promised, by or on behalf of a Party to the conflict, material compensation substantially in excess of that promised or paid to combatants of similar ranks and functions in the armed forces of that Party;
 - d) is neither a national of a Party to the conflict nor a resident of territory controlled by a Party to the conflict;
 - e) is not a member of the armed forces of a Party to the conflict; and
 - f) has not been sent by a State which is not a Party to the conflict on official duty as a member of its armed forces.

PART IV

CIVILIAN POPULATION

SECTION I

GENERAL PROTECTION AGAINST EFFECTS OF HOSTILITIES

CHAPTER I

*BASIC RULE AND FIELD OF APPLICATION**Article 48 — Basic rule*

In order to ensure respect for and protection of the civilian population and civilian objects, the Parties to the conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants and between civilian objects and military objectives and accordingly shall direct their operations only against military objectives.

Article 49 — Definition of attacks and scope of application

1. “Attacks” means acts of violence against the adversary, whether in offence or in defence.
2. The provisions of this Protocol with respect to attacks apply to all attacks in whatever territory conducted, including the national territory belonging to a Party to the conflict but under the control of an adverse Party.
3. The provisions of this Section apply to any land, air or sea warfare which may affect the civilian population, individual civilians or civilian objects on land. They further apply to all attacks from the sea or from the air against objectives on land but do not otherwise affect the rules of international law applicable in armed conflict at sea or in the air.
4. The provisions of this Section are additional to the rules concerning humanitarian protection contained in the Fourth Convention, particularly in Part II thereof, and in other international agreements binding upon the High Contracting Parties, as well as to other rules of international law relating to the protection of civilians and civilian objects on land, at sea or in the air against the effects of hostilities.

CHAPTER II

*CIVILIANS AND CIVILIAN POPULATION**Article 50 — Definition of civilians and civilian population*

1. A civilian is any person who does not belong to one of the categories of persons referred to in Article 4 A 1), 2), 3) and 6) of the Third Convention and in Article 43 of this Protocol. In case of doubt whether a person is a civilian, that person shall be considered to be a civilian.
2. The civilian population comprises all persons who are civilians.
3. The presence within the civilian population of individuals who do not come within the definition of civilians does not deprive the population of its civilian character.

Article 51 — Protection of the civilian population

1. The civilian population and individual civilians shall enjoy general protection against dangers arising from military operations. To give effect to this protection, the following rules, which are additional to other applicable rules of international law, shall be observed in all circumstances.
2. The civilian population as such, as well as individual civilians, shall not be the object of attack. Acts or threats of violence the primary purpose of which is to spread terror among the civilian population are prohibited.
3. Civilians shall enjoy the protection afforded by this Section, unless and for such time as they take a direct part in hostilities.
4. Indiscriminate attacks are prohibited. Indiscriminate attacks are:
 - a) those which are not directed at a specific military objective;
 - b) those which employ a method or means of combat which cannot be directed at a specific military objective; or
 - c) those which employ a method or means of combat the effects of which cannot be limited as required by this Protocol;and consequently, in each such case, are of a nature to strike military objectives and civilians or civilian objects without distinction.
5. Among others, the following types of attacks are to be considered as indiscriminate:
 - a) an attack by bombardment by any methods or means which treats as a single military objective a number of clearly separated and distinct military objectives located in a city, town, village or other area containing a similar concentration of civilians or civilian objects; and

- b) an attack which may be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to civilians, damage to civilian objects, or a combination thereof, which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated.
6. Attacks against the civilian population or civilians by way of reprisals are prohibited.
 7. The presence or movements of the civilian population or individual civilians shall not be used to render certain points or areas immune from military operations, in particular in attempts to shield military objectives from attacks or to shield, favour or impede military operations. The Parties to the conflict shall not direct the movement of the civilian population or individual civilians in order to attempt to shield military objectives from attacks or to shield military operations.
 8. Any violation of these prohibitions shall not release the Parties to the conflict from their legal obligations with respect to the civilian population and civilians, including the obligation to take the precautionary measures provided for in Article 57.

CHAPTER III

CIVILIAN OBJECTS

Article 52 — General protection of civilian objects

1. Civilian objects shall not be the object of attack or of reprisals. Civilian objects are all objects which are not military objectives as defined in paragraph 2.
2. Attacks shall be limited strictly to military objectives. In so far as objects are concerned, military objectives are limited to those objects which by their nature, location, purpose or use make an effective contribution to military action and whose total or partial destruction, capture or neutralization, in the circumstances ruling at the time, offers a definite military advantage.
3. In case of doubt whether an object which is normally dedicated to civilian purposes, such as a place of worship, a house or other dwelling or a school, is being used to make an effective contribution to military action, it shall be presumed not to be so used.

Article 53 — Protection of cultural objects and of places of worship

Without prejudice to the provisions of the Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict of 14 May 1954, and of other relevant international instruments, it is prohibited:

- a) to commit any acts of hostility directed against the historic monuments, works of art or places of worship which constitute the cultural or spiritual heritage of peoples;
- b) to use such objects in support of the military effort;
- c) to make such objects the object of reprisals.

Article 54 — Protection of objects indispensable to the survival of the civilian population

1. Starvation of civilians as a method of warfare is prohibited.
2. It is prohibited to attack, destroy, remove or render useless objects indispensable to the survival of the civilian population, such as foodstuffs, agricultural areas for the production of foodstuffs, crops, livestock, drinking water installations and supplies and irrigation works, for the specific purpose of denying them for their sustenance value to the civilian population or to the adverse Party, whatever the motive, whether in order to starve out civilians, to cause them to move away, or for any other motive.
3. The prohibitions in paragraph 2 shall not apply to such of the objects covered by it as are used by an adverse Party:
 - a) as sustenance solely for the members of its armed forces; or
 - b) if not as sustenance, then in direct support of military action, provided, however, that in no event shall actions against these objects be taken which may be expected to leave the civilian population with such inadequate food or water as to cause its starvation or force its movement.
4. These objects shall not be made the object of reprisals.
5. In recognition of the vital requirements of any Party to the conflict in the defence of its national territory against invasion, derogation from the prohibitions contained in paragraph 2 may be made by a Party to the conflict within such territory under its own control where required by imperative military necessity.

Article 55 — Protection of the natural environment

1. Care shall be taken in warfare to protect the natural environment against widespread, long-term and severe damage. This protection includes a prohibition of the use of methods or means of warfare which are intended or may be expected to cause such damage to the natural environment and thereby to prejudice the health or survival of the population.

2. Attacks against the natural environment by way of reprisals are prohibited.

Article 56 — Protection of works and installations containing dangerous forces

1. Works or installations containing dangerous forces, namely dams, dykes and nuclear electrical generating stations, shall not be made the object of attack, even where these objects are military objectives, if such attack may cause the release of dangerous forces and consequent severe losses among the civilian population. Other military objectives located at or in the vicinity of these works or installations shall not be made the object of attack if such attack may cause the release of dangerous forces from the works or installations and consequent severe losses among the civilian population.
2. The special protection against attack provided by paragraph 1 shall cease:
 - a) for a dam or a dyke only if it is used for other than its normal function and in regular, significant and direct support of military operations and if such attack is the only feasible way to terminate such support;
 - b) for a nuclear electrical generating station only if it provides electric power in regular, significant and direct support of military operations and if such attack is the only feasible way to terminate such support;
 - c) for other military objectives located at or in the vicinity of these works or installations only if they are used in regular, significant and direct support of military operations and if such attack is the only feasible way to terminate such support.
3. In all cases, the civilian population and individual civilians shall remain entitled to all the protection accorded them by international law, including the protection of the precautionary measures provided for in Article 57. If the protection ceases and any of the works, installations or military objectives mentioned in paragraph 1 is attacked, all practical precautions shall be taken to avoid the release of the dangerous forces.
4. It is prohibited to make any of the works, installations or military objectives mentioned in paragraph 1 the object of reprisals.
5. The Parties to the conflict shall endeavour to avoid locating any military objectives in the vicinity of the works or installations mentioned in paragraph 1. Nevertheless, installations erected for the sole purpose of defending the protected works or installations from attack are permissible and shall not themselves be made the object of attack, provided that they are not used in hostilities except for defensive actions necessary to respond to attacks against the protected works or installations and that their armament is limited to weapons capable only of repelling hostile action against the protected works or installations.
6. The High Contracting Parties and the Parties to the conflict are urged to conclude further agreements among themselves to provide additional protection for objects containing dangerous forces.

7. In order to facilitate the identification of the objects protected by this Article, the Parties to the conflict may mark them with a special sign consisting of a group of three bright orange circles placed on the same axis, as specified in Article 16 of Annex 1 to this Protocol. The absence of such marking in no way relieves any Party to the conflict of its obligations under this Article.

CHAPTER IV

PRECAUTIONARY MEASURES

Article 57 — Precautions in attack

1. In the conduct of military operations, constant care shall be taken to spare the civilian population, civilians and civilian objects.
2. With respect to attacks, the following precautions shall be taken:
 - a) those who plan or decide upon an attack shall:
 - i) do everything feasible to verify that the objectives to be attacked are neither civilians nor civilian objects and are not subject to special protection but are military objectives within the meaning of paragraph 2 of Article 52 and that it is not prohibited by the provisions of this Protocol to attack them;
 - ii) take all feasible precautions in the choice of means and methods of attack with a view to avoiding, and in any event to minimizing, incidental loss of civilian life, injury to civilians and damage to civilian objects;
 - iii) refrain from deciding to launch any attack which may be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to civilians, damage to civilian objects, or a combination thereof, which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated;
 - b) an attack shall be cancelled or suspended if it becomes apparent that the objective is not a military one or is subject to special protection or that the attack may be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to civilians, damage to civilian objects, or a combination thereof, which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated;
 - c) effective advance warning shall be given of attacks which may affect the civilian population, unless circumstances do not permit.
3. When a choice is possible between several military objectives for obtaining a similar military advantage, the objective to be selected shall be that the attack on which may be expected to cause the least danger to civilian lives and to civilian objects.

4. In the conduct of military operations at sea or in the air, each Party to the conflict shall, in conformity with its rights and duties under the rules of international law applicable in armed conflict, take all reasonable precautions to avoid losses of civilian lives and damage to civilian objects.
5. No provision of this Article may be construed as authorizing any attacks against the civilian population, civilians or civilian objects.

Article 58 — Precautions against the effects of attacks

The Parties to the conflict shall, to the maximum extent feasible:

- a) without prejudice to Article 49 of the Fourth Convention, endeavour to remove the civilian population, individual civilians and civilian objects under their control from the vicinity of military objectives;
- b) avoid locating military objectives within or near densely populated areas;
- c) take the other necessary precautions to protect the civilian population, individual civilians and civilian objects under their control against the dangers resulting from military operations.

CHAPTER V

LOCALITIES AND ZONES UNDER SPECIAL PROTECTION

Article 59 — Non-defended localities.

1. It is prohibited for the Parties to the conflict to attack, by any means whatsoever, non-defended localities.
2. The appropriate authorities of a Party to the conflict may declare as a non-defended locality any inhabited place near or in a zone where armed forces are in contact which is open for occupation by an adverse Party. Such a locality shall fulfil the following conditions:
 - a) all combatants, as well as mobile weapons and mobile military equipment, must have been evacuated;
 - b) no hostile use shall be made of fixed military installations or establishments;
 - c) no acts of hostility shall be committed by the authorities or by the population; and
 - d) no activities in support of military operations shall be undertaken.
3. The presence, in this locality, of persons specially protected under the Conventions and this Protocol, and of police forces retained for the sole purpose of maintaining law and order, is not contrary to the conditions laid down in paragraph 2.

4. The declaration made under paragraph 2 shall be addressed to the adverse Party and shall define and describe, as precisely as possible, the limits of the non-defended locality. The Party to the conflict to which the declaration is addressed shall acknowledge its receipt and shall treat the locality as a non-defended locality unless the conditions laid down in paragraph 2 are not in fact fulfilled, in which event it shall immediately so inform the Party making the declaration. Even if the conditions laid down in paragraph 2 are not fulfilled, the locality shall continue to enjoy the protection provided by the other provisions of this Protocol and the other rules of international law applicable in armed conflict.
5. The Parties to the conflict may agree on the establishment of non-defended localities even if such localities do not fulfil the conditions laid down in paragraph 2. The agreement should define and describe, as precisely as possible, the limits of the non-defended locality; if necessary, it may lay down the methods of supervision.
6. The Party which is in control of a locality governed by such an agreement shall mark it, so far as possible, by such signs as may be agreed upon with the other Party, which shall be displayed where they are clearly visible, especially on its perimeter and limits and on highways.
7. A locality loses its status as a non-defended locality when it ceases to fulfil the conditions laid down in paragraph 2 or in the agreement referred to in paragraph 5. In such an eventuality, the locality shall continue to enjoy the protection provided by the other provisions of this Protocol and the other rules of international law applicable in armed conflict.

Article 60 — Demilitarized zones

1. It is prohibited for the Parties to the conflict to extend their military operations to zones on which they have conferred by agreement the status of demilitarized zone, if such extension is contrary to the terms of this agreement.
2. The agreement shall be an express agreement, may be concluded verbally or in writing, either directly or through a Protecting Power or any impartial humanitarian organization, and may consist of reciprocal and concordant declarations. The agreement may be concluded in peacetime, as well as after the outbreak of hostilities, and should define and describe, as precisely as possible, the limits of the demilitarized zone and, if necessary, lay down the methods of supervision.
3. The subject of such an agreement shall normally be any zone which fulfils the following conditions:
 - a) all combatants, as well as mobile weapons and mobile military equipment, must have been evacuated;
 - b) no hostile use shall be made of fixed military installations or establishments;
 - c) no acts of hostility shall be committed by the authorities or by the population; and

d) any activity linked to the military effort must have ceased.

The Parties to the conflict shall agree upon the interpretation to be given to the condition laid down in sub-paragraph d) and upon persons to be admitted to the demilitarized zone other than those mentioned in paragraph 4.

4. The presence, in this zone, of persons specially protected under the Conventions and this Protocol, and of police forces retained for the sole purpose of maintaining law and order, is not contrary to the conditions laid down in paragraph 3.
5. The Party which is in control of such a zone shall mark it, so far as possible, by such signs as may be agreed upon with the other Party, which shall be displayed where they are clearly visible, especially on its perimeter and limits and on highways.
6. If the fighting draws near to a demilitarized zone, and if the Parties to the conflict have so agreed, none of them may use the zone for purposes related to the conduct of military operations or unilaterally revoke its status.
7. If one of the Parties to the conflict commits a material breach of the provisions of paragraphs 3 or 6, the other Party shall be released from its obligations under the agreement conferring upon the zone the status of demilitarized zone. In such an eventuality, the zone loses its status but shall continue to enjoy the protection provided by the other provisions of this Protocol and the other rules of international law applicable in armed conflict.

CHAPTER VI

CIVIL DEFENCE

Article 61 — Definitions and scope

For the purposes of this Protocol:

- a) “civil defence” means the performance of some or all of the under-mentioned humanitarian tasks intended to protect the civilian population against the dangers, and to help it to recover from the immediate effects, of hostilities or disasters and also to provide the conditions necessary for its survival. These tasks are:
 - i) warning;
 - ii) evacuation;
 - iii) management of shelters;
 - iv) management of blackout measures;

- v) rescue;
 - vi) medical services, including first aid, and religious assistance;
 - vii) fire-fighting;
 - viii) detection and marking of danger areas;
 - ix) decontamination and similar protective measures;
 - x) provision of emergency accommodation and supplies;
 - xi) emergency assistance in the restoration and maintenance of order in distressed areas;
 - xii) emergency repair of indispensable public utilities;
 - xiii) emergency disposal of the dead;
 - xiv) assistance in the preservation of objects essential for survival;
 - xv) complementary activities necessary to carry out any of the tasks mentioned above, including, but not limited to, planning and organization;
- b) “civil defence organizations” means those establishments and other units which are organized or authorized by the competent authorities of a Party to the conflict to perform any of the tasks mentioned under sub-paragraph *a*), and which are assigned and devoted exclusively to such tasks;
- c) “personnel” of civil defence organizations means those persons assigned by a Party to the conflict exclusively to the performance of the tasks mentioned under sub-paragraph *a*), including personnel assigned by the competent authority of that Party exclusively to the administration of these organizations;
- d) “*matériel*” of civil defence organizations means equipment, supplies and transports used by these organizations for the performance of the tasks mentioned under sub-paragraph *a*).

Article 62 — General protection

1. Civilian civil defence organizations and their personnel shall be respected and protected, subject to the provisions of this Protocol, particularly the provisions of this Section. They shall be entitled to perform their civil defence tasks except in case of imperative military necessity.
2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to civilians who, although not members of civilian civil defence organizations, respond to an appeal from the competent authorities and perform civil defence tasks under their control.
3. Buildings and *matériel* used for civil defence purposes and shelters provided for the civilian population are covered by Article 52. Objects used for civil defence purposes may not be destroyed or diverted from their proper use except by the Party to which they belong.

Article 63 — Civil defence in occupied territories

1. In occupied territories, civilian civil defence organizations shall receive from the authorities the facilities necessary for the performance of their tasks. In no circumstances shall their personnel be compelled to perform activities which would interfere with the proper performance of these tasks. The Occupying Power shall not change the structure or personnel of such organizations in any way which might jeopardize the efficient performance of their mission. These organizations shall not be required to give priority to the nationals or interests of that Power.
2. The Occupying Power shall not compel, coerce or induce civilian civil defence organizations to perform their tasks in any manner prejudicial to the interests of the civilian population.
3. The Occupying Power may disarm civil defence personnel for reasons of security.
4. The Occupying Power shall neither divert from their proper use nor requisition buildings or *matériel* belonging to or used by civil defence organizations if such diversion or requisition would be harmful to the civilian population.
5. Provided that the general rule in paragraph 4 continues to be observed, the Occupying Power may requisition or divert these resources, subject to the following particular conditions:
 - a) that the buildings or *matériel* are necessary for other needs of the civilian population; and
 - b) that the requisition or diversion continues only while such necessity exists.
6. The Occupying Power shall neither divert nor requisition shelters provided for the use of the civilian population or needed by such population.

Article 64 — Civilian civil defence organizations of neutral or other States not Parties to the conflict and international co-ordinating organizations

1. Articles 62, 63, 65 and 66 shall also apply to the personnel and *matériel* of civilian civil defence organizations of neutral or other States not Parties to the conflict which perform civil defence tasks mentioned in Article 61 in the territory of a Party to the conflict, with the consent and under the control of that Party. Notification of such assistance shall be given as soon as possible to any adverse Party concerned. In no circumstances shall this activity be deemed to be an interference in the conflict. This activity should, however, be performed with due regard to the security interests of the Parties to the conflict concerned.
2. The Parties to the conflict receiving the assistance referred to in paragraph 1 and the High Contracting Parties granting it should facilitate international co-ordination of such civil defence actions when appropriate. In such cases the relevant international organizations are covered by the provisions of this Chapter.

3. In occupied territories, the Occupying Power may only exclude or restrict the activities of civilian civil defence organizations of neutral or other States not Parties to the conflict and of international co-ordinating organizations if it can ensure the adequate performance of civil defence tasks from its own resources or those of the occupied territory.

Article 65 — Cessation of protection

1. The protection to which civilian civil defence organizations, their personnel, buildings, shelters and *matériel* are entitled shall not cease unless they commit or are used to commit, outside their proper tasks, acts harmful to the enemy. Protection may, however, cease only after a warning has been given setting, whenever appropriate, a reasonable time-limit, and after such warning has remained unheeded.
2. The following shall not be considered as acts harmful to the enemy:
 - a) that civil defence tasks are carried out under the direction or control of military authorities;
 - b) that civilian civil defence personnel co-operate with military personnel in the performance of civil defence tasks, or that some military personnel are attached to civilian civil defence organizations;
 - c) that the performance of civil defence tasks may incidentally benefit military victims, particularly those who are *hors de combat*.
3. It shall also not be considered as an act harmful to the enemy that civilian civil defence personnel bear light individual weapons for the purpose of maintaining order or for self-defence. However, in areas where land fighting is taking place or is likely to take place, the Parties to the conflict shall undertake the appropriate measures to limit these weapons to handguns, such as pistols or revolvers, in order to assist in distinguishing between civil defence personnel and combatants. Although civil defence personnel bear other light individual weapons in such areas, they shall nevertheless be respected and protected as soon as they have been recognized as such.
4. The formation of civilian civil defence organizations along military lines, and compulsory service in them, shall also not deprive them of the protection conferred by this Chapter.

Article 66 — Identification

1. Each Party to the conflict shall endeavour to ensure that its civil defence organizations, their personnel, buildings and *matériel*, are identifiable while they are exclusively devoted to the performance of civil defence tasks. Shelters provided for the civilian population should be similarly identifiable.
2. Each Party to the conflict shall also endeavour to adopt and implement methods and procedures which will make it possible to recognize civilian shelters as well

as civil defence personnel, buildings and *matériel* on which the international distinctive sign of civil defence is displayed.

3. In occupied territories and in areas where fighting is taking place or is likely to take place, civilian civil defence personnel should be recognizable by the international distinctive sign of civil defence and by an identity card certifying their status.
4. The international distinctive sign of civil defence is an equilateral blue triangle on an orange ground when used for the protection of civil defence organizations, their personnel, buildings and *matériel* and for civilian shelters.
5. In addition to the distinctive sign, Parties to the conflict may agree upon the use of distinctive signals for civil defence identification purposes.
6. The application of the provisions of paragraphs 1 to 4 is governed by Chapter V of Annex 1 to this Protocol.
7. In time of peace, the sign described in paragraph 4 may, with the consent of the competent national authorities, be used for civil defence identification purposes.
8. The High Contracting Parties and the Parties to the conflict shall take the measures necessary to supervise the display of the international distinctive sign of civil defence and to prevent and repress any misuse thereof.
9. The identification of civil defence medical and religious personnel, medical units and medical transports is also governed by Article 18.

Article 67 — Members of the armed forces and military units assigned to civil defence organizations

1. Members of the armed forces and military units assigned to civil defence organizations shall be respected and protected, provided that:
 - a) such personnel and such units are permanently assigned and exclusively devoted to the performance of any of the tasks mentioned in Article 61;
 - b) if so assigned, such personnel do not perform any other military duties during the conflict;
 - c) such personnel are clearly distinguishable from the other members of the armed forces by prominently displaying the international distinctive sign of civil defence, which shall be as large as appropriate, and such personnel are provided with the identity card referred to in Chapter V of Annex 1 to this Protocol certifying their status;
 - d) such personnel and such units are equipped only with light individual weapons for the purpose of maintaining order or for self-defence. The provisions of Article 65, paragraph 3 shall also apply in this case;
 - e) such personnel do not participate directly in hostilities, and do not commit, or are not used to commit, outside their civil defence tasks, acts harmful to the adverse Party;

- f)* such personnel and such units perform their civil defence tasks only within the national territory of their Party.

The non-observance of the conditions stated in *e)* above by any member of the armed forces who is bound by the conditions prescribed in *a)* and *b)* above is prohibited.

2. Military personnel serving within civil defence organizations shall, if they fall into the power of an adverse Party, be prisoners of war. In occupied territory they may, but only in the interest of the civilian population of that territory, be employed on civil defence tasks in so far as the need arises, provided however that, if such work is dangerous, they volunteer for such tasks.
3. The buildings and major items of equipment and transports of military units assigned to civil defence organizations shall be clearly marked with the international distinctive sign of civil defence. This distinctive sign shall be as large as appropriate.
4. The *matériel* and buildings of military units permanently assigned to civil defence organizations and exclusively devoted to the performance of civil defence tasks shall, if they fall into the hands of an adverse Party, remain subject to the laws of war. They may not be diverted from their civil defence purpose so long as they are required for the performance of civil defence tasks, except in case of imperative military necessity, unless previous arrangements have been made for adequate provision for the needs of the civilian population.

SECTION II

RELIEF IN FAVOUR OF THE CIVILIAN POPULATION

Article 68 — Field of application

The provisions of this Section apply to the civilian population as defined in this Protocol and are supplementary to Articles 23, 55, 59, 60, 61 and 62 and other relevant provisions of the Fourth Convention.

Article 69 — Basic needs in occupied territories

1. In addition to the duties specified in Article 55 of the Fourth Convention concerning food and medical supplies, the Occupying Power shall, to the fullest extent of the means available to it and without any adverse distinction, also ensure the provision of clothing, bedding, means of shelter, other supplies essential to the survival of the civilian population of the occupied territory and objects necessary for religious worship.

2. Relief actions for the benefit of the civilian population of occupied territories are governed by Articles 59, 60, 61, 62, 108, 109, 110 and 111 of the Fourth Convention, and by Article 71 of this Protocol, and shall be implemented without delay.

Article 70 — Relief actions

1. If the civilian population of any territory under the control of a Party to the conflict, other than occupied territory, is not adequately provided with the supplies mentioned in Article 69, relief actions which are humanitarian and impartial in character and conducted without any adverse distinction shall be undertaken, subject to the agreement of the Parties concerned in such relief actions. Offers of such relief shall not be regarded as interference in the armed conflict or as unfriendly acts. In the distribution of relief consignments, priority shall be given to those persons, such as children, expectant mothers, maternity cases and nursing mothers, who, under the Fourth Convention or under this Protocol, are to be accorded privileged treatment or special protection.
2. The Parties to the conflict and each High Contracting Party shall allow and facilitate rapid and unimpeded passage of all relief consignments, equipment and personnel provided in accordance with this Section, even if such assistance is destined for the civilian population of the adverse Party.
3. The Parties to the conflict and each High Contracting Party which allow the passage of relief consignments, equipment and personnel in accordance with paragraph 2:
 - a) shall have the right to prescribe the technical arrangements, including search, under which such passage is permitted;
 - b) may make such permission conditional on the distribution of this assistance being made under the local supervision of a Protecting Power;
 - c) shall, in no way whatsoever, divert relief consignments from the purpose for which they are intended nor delay their forwarding, except in cases of urgent necessity in the interest of the civilian population concerned.
4. The Parties to the conflict shall protect relief consignments and facilitate their rapid distribution.
5. The Parties to the conflict and each High Contracting Party concerned shall encourage and facilitate effective international co-ordination of the relief actions referred to in paragraph 1.

Article 71 — Personnel participating in relief actions

1. Where necessary, relief personnel may form part of the assistance provided in any relief action, in particular for the transportation and distribution of relief consignments; the participation of such personnel shall be subject to the approval of the Party in whose territory they will carry out their duties.

2. Such personnel shall be respected and protected.
3. Each Party in receipt of relief consignments shall, to the fullest extent practicable, assist the relief personnel referred to in paragraph 1 in carrying out their relief mission. Only in case of imperative military necessity may the activities of the relief personnel be limited or their movements temporarily restricted.
4. Under no circumstances may relief personnel exceed the terms of their mission under this Protocol. In particular they shall take account of the security requirements of the Party in whose territory they are carrying out their duties. The mission of any of the personnel who do not respect these conditions may be terminated.

SECTION III

TREATMENT OF PERSONS IN THE POWER OF A PARTY TO THE CONFLICT

CHAPTER I

FIELD OF APPLICATION AND PROTECTION OF PERSONS AND OBJECTS

Article 72 — Field of application

The provisions of this Section are additional to the rules concerning humanitarian protection of civilians and civilian objects in the power of a Party to the conflict contained in the Fourth Convention, particularly Parts I and III thereof, as well as to other applicable rules of international law relating to the protection of fundamental human rights during international armed conflict.

Article 73 — Refugees and stateless persons

Persons who, before the beginning of hostilities, were considered as stateless persons or refugees under the relevant international instruments accepted by the Parties concerned or under the national legislation of the State of refuge or State of residence shall be protected persons within the meaning of Parts I and III of the Fourth Convention, in all circumstances and without any adverse distinction.

Article 74 — Reunion of dispersed families

The High Contracting Parties and the Parties to the conflict shall facilitate in every possible way the reunion of families dispersed as a result of armed conflicts and shall encourage in particular the work of the humanitarian organizations engaged in this task in accordance with the provisions of the Conventions and of this Protocol and in conformity with their respective security regulations.

Article 75 — Fundamental guarantees

1. In so far as they are affected by a situation referred to in Article 1 of this Protocol, persons who are in the power of a Party to the conflict and who do not benefit from more favourable treatment under the Conventions or under this Protocol shall be treated humanely in all circumstances and shall enjoy, as a minimum, the protection provided by this Article without any adverse distinction based upon race, colour, sex, language, religion or belief, political or other opinion, national or social origin, wealth, birth or other status, or on any other similar criteria. Each Party shall respect the person, honour, convictions and religious practices of all such persons.
2. The following acts are and shall remain prohibited at any time and in any place whatsoever, whether committed by civilian or by military agents:
 - a) violence to the life, health, or physical or mental well-being of persons, in particular:
 - i) murder;
 - ii) torture of all kinds, whether physical or mental;
 - iii) corporal punishment; and
 - iv) mutilation;
 - b) outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment, enforced prostitution and any form of indecent assault;
 - c) the taking of hostages;
 - d) collective punishments; and
 - e) threats to commit any of the foregoing acts.
3. Any person arrested, detained or interned for actions related to the armed conflict shall be informed promptly, in a language he understands, of the reasons why these measures have been taken. Except in cases of arrest or detention for penal offences, such persons shall be released with the minimum delay possible and in any event as soon as the circumstances justifying the arrest, detention or internment have ceased to exist.
4. No sentence may be passed and no penalty may be executed on a person found guilty of a penal offence related to the armed conflict except pursuant to a conviction pronounced by an impartial and regularly constituted court respecting the generally recognized principles of regular judicial procedure, which include the following:

- a) the procedure shall provide for an accused to be informed without delay of the particulars of the offence alleged against him and shall afford the accused before and during his trial all necessary rights and means of defence;
 - b) no one shall be convicted of an offence except on the basis of individual penal responsibility;
 - c) no one shall be accused or convicted of a criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence under the national or international law to which he was subject at the time when it was committed; nor shall a heavier penalty be imposed than that which was applicable at the time when the criminal offence was committed; if, after the commission of the offence, provision is made by law for the imposition of a lighter penalty, the offender shall benefit thereby;
 - d) anyone charged with an offence is presumed innocent until proved guilty according to law;
 - e) anyone charged with an offence shall have the right to be tried in his presence;
 - f) no one shall be compelled to testify against himself or to confess guilt;
 - g) anyone charged with an offence shall have the right to examine, or have examined, the witnesses against him and to obtain the attendance and examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him;
 - h) no one shall be prosecuted or punished by the same Party for an offence in respect of which a final judgement acquitting or convicting that person has been previously pronounced under the same law and judicial procedure;
 - i) anyone prosecuted for an offence shall have the right to have the judgement pronounced publicly; and
 - j) a convicted person shall be advised on conviction of his judicial and other remedies and of the time-limits within which they may be exercised.
5. Women whose liberty has been restricted for reasons related to the armed conflict shall be held in quarters separated from men's quarters. They shall be under the immediate supervision of women. Nevertheless, in cases where families are detained or interned, they shall, whenever possible, be held in the same place and accommodated as family units.
6. Persons who are arrested, detained or interned for reasons related to the armed conflict shall enjoy the protection provided by this Article until final release, repatriation or re-establishment, even after the end of the armed conflict.
7. In order to avoid any doubt concerning the prosecution and trial of persons accused of war crimes or crimes against humanity, the following principles shall apply:
- a) persons who are accused of such crimes should be submitted for the purpose of prosecution and trial in accordance with the applicable rules of international law; and

- b)* any such persons who do not benefit from more favourable treatment under the Conventions or this Protocol shall be accorded the treatment provided by this Article, whether or not the crimes of which they are accused constitute grave breaches of the Conventions or of this Protocol.
- 8. No provision of this Article may be construed as limiting or infringing any other more favourable provision granting greater protection, under any applicable rules of international law, to persons covered by paragraph 1.

CHAPTER II

MEASURES IN FAVOUR OF WOMEN AND CHILDREN

Article 76 — Protection of women

1. Women shall be the object of special respect and shall be protected in particular against rape, forced prostitution and any other form of indecent assault.
2. Pregnant women and mothers having dependent infants who are arrested, detained or interned for reasons related to the armed conflict, shall have their cases considered with the utmost priority.
3. To the maximum extent feasible, the Parties to the conflict shall endeavour to avoid the pronouncement of the death penalty on pregnant women or mothers having dependent infants, for an offence related to the armed conflict. The death penalty for such offences shall not be executed on such women.

Article 77 — Protection of children

1. Children shall be the object of special respect and shall be protected against any form of indecent assault. The Parties to the conflict shall provide them with the care and aid they require, whether because of their age or for any other reason.
2. The Parties to the conflict shall take all feasible measures in order that children who have not attained the age of fifteen years do not take a direct part in hostilities and, in particular, they shall refrain from recruiting them into their armed forces. In recruiting among those persons who have attained the age of fifteen years but who have not attained the age of eighteen years, the Parties to the conflict shall endeavour to give priority to those who are oldest.
3. If, in exceptional cases, despite the provisions of paragraph 2, children who have not attained the age of fifteen years take a direct part in hostilities and fall into the power of an adverse Party, they shall continue to benefit from the special protection accorded by this Article, whether or not they are prisoners of war.

4. If arrested, detained or interned for reasons related to the armed conflict, children shall be held in quarters separate from the quarters of adults, except where families are accommodated as family units as provided in Article 75, paragraph 5.
5. The death penalty for an offence related to the armed conflict shall not be executed on persons who had not attained the age of eighteen years at the time the offence was committed.

Article 78 — Evacuation of children

1. No Party to the conflict shall arrange for the evacuation of children, other than its own nationals, to a foreign country except for a temporary evacuation where compelling reasons of the health or medical treatment of the children or, except in occupied territory, their safety, so require. Where the parents or legal guardians can be found, their written consent to such evacuation is required. If these persons cannot be found, the written consent to such evacuation of the persons who by law or custom are primarily responsible for the care of the children is required. Any such evacuation shall be supervised by the Protecting Power in agreement with the Parties concerned, namely, the Party arranging for the evacuation, the Party receiving the children and any Parties whose nationals are being evacuated. In each case, all Parties to the conflict shall take all feasible precautions to avoid endangering the evacuation.
2. Whenever an evacuation occurs pursuant to paragraph 1, each child's education, including his religious and moral education as his parents desire, shall be provided while he is away with the greatest possible continuity.
3. With a view to facilitating the return to their families and country of children evacuated pursuant to this Article, the authorities of the Party arranging for the evacuation and, as appropriate, the authorities of the receiving country shall establish for each child a card with photographs, which they shall send to the Central Tracing Agency of the International Committee of the Red Cross. Each card shall bear, whenever possible, and whenever it involves no risk of harm to the child, the following information:
 - a) surname(s) of the child;
 - b) the child's first name(s);
 - c) the child's sex;
 - d) the place and date of birth (or, if that date is not known, the approximate age);
 - e) the father's full name;
 - f) the mother's full name and her maiden name;
 - g) the child's next of kin;
 - h) the child's nationality;
 - i) the child's native language, and any other languages he speaks;

- j) the address of the child's family;
- k) any identification number for the child;
- l) the child's state of health;
- m) the child's blood group;
- n) any distinguishing features;
- o) the date on which and the place where the child was found;
- p) the date on which and the place from which the child left the country;
- q) the child's religion, if any;
- r) the child's present address in the receiving country;
- s) should the child die before his return, the date, place and circumstances of death and place of interment.

CHAPTER III

JOURNALISTS

Article 79 — Measures of protection for journalists

1. Journalists engaged in dangerous professional missions in areas of armed conflict shall be considered as civilians within the meaning of Article 50, paragraph 1.
2. They shall be protected as such under the Conventions and this Protocol, provided that they take no action adversely affecting their status as civilians, and without prejudice to the right of war correspondents accredited to the armed forces to the status provided for in Article 4 A 4) of the Third Convention.
3. They may obtain an identity card similar to the model in Annex II of this Protocol. This card, which shall be issued by the government of the State of which the journalist is a national or in whose territory he resides or in which the news medium employing him is located, shall attest to his status as a journalist.

PART V

EXECUTION OF THE CONVENTIONS AND OF THIS PROTOCOL

SECTION I

GENERAL PROVISIONS

Article 80 — Measures for execution

1. The High Contracting Parties and the Parties to the conflict shall without delay take all necessary measures for the execution of their obligations under the Conventions and this Protocol.
2. The High Contracting Parties and the Parties to the conflict shall give orders and instructions to ensure observance of the Conventions and this Protocol, and shall supervise their execution.

Article 81 — Activities of the Red Cross and other humanitarian organizations

1. The Parties to the conflict shall grant to the International Committee of the Red Cross all facilities within their power so as to enable it to carry out the humanitarian functions assigned to it by the Conventions and this Protocol in order to ensure protection and assistance to the victims of conflicts; the International Committee of the Red Cross may also carry out any other humanitarian activities in favour of these victims, subject to the consent of the Parties to the conflict concerned.
2. The Parties to the conflict shall grant to their respective Red Cross (Red Crescent, Red Lion and Sun) organizations the facilities necessary for carrying out their humanitarian activities in favour of the victims of the conflict, in accordance with the provisions of the Conventions and this Protocol and the Fundamental Principles of the Red Cross as formulated by the International Conferences of the Red Cross.
3. The High Contracting Parties and the Parties to the conflict shall facilitate in every possible way the assistance which Red Cross (Red Crescent, Red Lion and Sun) organizations and the League of Red Cross Societies¹ extend to the victims

¹ On 10 February 1992 the Swiss Federal Council, government of the State depositary of the 1949 Geneva Conventions, notified all States party to the Conventions that on 28 November 1991 the League of Red Cross and Red Crescent Societies had changed its name to "International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies".

of conflicts in accordance with the provisions of the Conventions and this Protocol and with the Fundamental Principles of the Red Cross as formulated by the International Conferences of the Red Cross.

4. The High Contracting Parties and the Parties to the conflict shall, as far as possible, make facilities similar to those mentioned in paragraphs 2 and 3 available to the other humanitarian organizations referred to in the Conventions and this Protocol which are duly authorized by the respective Parties to the conflict and which perform their humanitarian activities in accordance with the provisions of the Conventions and this Protocol.

Article 82 — Legal advisers in armed forces

The High Contracting Parties at all times, and the Parties to the conflict in time of armed conflict, shall ensure that legal advisers are available, when necessary, to advise military commanders at the appropriate level on the application of the Conventions and this Protocol and on the appropriate instruction to be given to the armed forces on this subject.

Article 83 — Dissemination

1. The High Contracting Parties undertake, in time of peace as in time of armed conflict, to disseminate the Conventions and this Protocol as widely as possible in their respective countries and, in particular, to include the study thereof in their programmes of military instruction and to encourage the study thereof by the civilian population, so that those instruments may become known to the armed forces and to the civilian population.
2. Any military or civilian authorities who, in time of armed conflict, assume responsibilities in respect of the application of the Conventions and this Protocol shall be fully acquainted with the text thereof.

Article 84 — Rules of application

The High Contracting Parties shall communicate to one another, as soon as possible, through the depositary and, as appropriate, through the Protecting Powers, their official translations of this Protocol, as well as the laws and regulations which they may adopt to ensure its application.

SECTION II

REPRESSION OF BREACHES OF THE CONVENTIONS
AND OF THIS PROTOCOL*Article 85 — Repression of breaches of this Protocol*

1. The provisions of the Conventions relating to the repression of breaches and grave breaches, supplemented by this Section, shall apply to the repression of breaches and grave breaches of this Protocol.
2. Acts described as grave breaches in the Conventions are grave breaches of this Protocol if committed against persons in the power of an adverse Party protected by Articles 44, 45 and 73 of this Protocol, or against the wounded, sick and shipwrecked of the adverse Party who are protected by this Protocol, or against those medical or religious personnel, medical units or medical transports which are under the control of the adverse Party and are protected by this Protocol.
3. In addition to the grave breaches defined in Article 11, the following acts shall be regarded as grave breaches of this Protocol, when committed wilfully, in violation of the relevant provisions of this Protocol, and causing death or serious injury to body or health:
 - a) making the civilian population or individual civilians the object of attack;
 - b) launching an indiscriminate attack affecting the civilian population or civilian objects in the knowledge that such attack will cause excessive loss of life, injury to civilians or damage to civilian objects, as defined in Article 57, paragraph 2 a) iii);
 - c) launching an attack against works or installations containing dangerous forces in the knowledge that such attack will cause excessive loss of life, injury to civilians or damage to civilian objects, as defined in Article 57, paragraph 2 a) iii);
 - d) making non-defended localities and demilitarized zones the object of attack;
 - e) making a person the object of attack in the knowledge that he is *hors de combat*;
 - f) the perfidious use, in violation of Article 37, of the distinctive emblem of the red cross, red crescent or red lion and sun or of other protective signs recognized by the Conventions or this Protocol.
4. In addition to the grave breaches defined in the preceding paragraphs and in the Conventions, the following shall be regarded as grave breaches of this Protocol, when committed wilfully and in violation of the Conventions or the Protocol:
 - a) the transfer by the Occupying Power of parts of its own civilian population into the territory it occupies, or the deportation or transfer of all or parts of the population of the occupied territory within or outside this territory, in violation of Article 49 of the Fourth Convention;

- b) unjustifiable delay in the repatriation of prisoners of war or civilians;
 - c) practices of *apartheid* and other inhuman and degrading practices involving outrages upon personal dignity, based on racial discrimination;
 - d) making the clearly-recognized historic monuments, works of art or places of worship which constitute the cultural or spiritual heritage of peoples and to which special protection has been given by special arrangement, for example, within the framework of a competent international organization, the object of attack, causing as a result extensive destruction thereof, where there is no evidence of the violation by the adverse Party of Article 53, subparagraph *b*), and when such historic monuments, works of art and places of worship are not located in the immediate proximity of military objectives;
 - e) depriving a person protected by the Conventions or referred to in paragraph 2 of this Article of the rights of fair and regular trial.
5. Without prejudice to the application of the Conventions and of this Protocol, grave breaches of these instruments shall be regarded as war crimes.

Article 86 — Failure to act

1. The High Contracting Parties and the Parties to the conflict shall repress grave breaches, and take measures necessary to suppress all other breaches, of the Conventions or of this Protocol which result from a failure to act when under a duty to do so.
2. The fact that a breach of the Conventions or of this Protocol was committed by a subordinate does not absolve his superiors from penal or disciplinary responsibility, as the case may be, if they knew, or had information which should have enabled them to conclude in the circumstances at the time, that he was committing or was going to commit such a breach and if they did not take all feasible measures within their power to prevent or repress the breach.

Article 87 — Duty of commanders

1. The High Contracting Parties and the Parties to the conflict shall require military commanders, with respect to members of the armed forces under their command and other persons under their control, to prevent and, where necessary, to suppress and report to competent authorities breaches of the Conventions and of this Protocol.
2. In order to prevent and suppress breaches, High Contracting Parties and Parties to the conflict shall require that, commensurate with their level of responsibility, commanders ensure that members of the armed forces under their command are aware of their obligations under the Conventions and this Protocol.
3. The High Contracting Parties and Parties to the conflict shall require any commander who is aware that subordinates or other persons under his control are going to commit or have committed a breach of the Conventions or of this

Protocol, to initiate such steps as are necessary to prevent such violations of the Conventions or this Protocol, and, where appropriate, to initiate disciplinary or penal action against violators thereof.

Article 88 — Mutual assistance in criminal matters

1. The High Contracting Parties shall afford one another the greatest measure of assistance in connexion with criminal proceedings brought in respect of grave breaches of the Conventions or of this Protocol.
2. Subject to the rights and obligations established in the Conventions and in Article 85, paragraph 1, of this Protocol, and when circumstances permit, the High Contracting Parties shall co-operate in the matter of extradition. They shall give due consideration to the request of the State in whose territory the alleged offence has occurred.
3. The law of the High Contracting Party requested shall apply in all cases.

The provisions of the preceding paragraphs shall not, however, affect the obligations arising from the provisions of any other treaty of a bilateral or multilateral nature which governs or will govern the whole or part of the subject of mutual assistance in criminal matters.

Article 89 — Co-operation

In situations of serious violations of the Conventions or of this Protocol, the High Contracting Parties undertake to act, jointly or individually, in co-operation with the United Nations and in conformity with the United Nations Charter.

Article 90 — International Fact-Finding Commission

1. *a)* An International Fact-Finding Commission (hereinafter referred to as “the Commission”) consisting of fifteen members of high moral standing and acknowledged impartiality shall be established.
- b)* When not less than twenty High Contracting Parties have agreed to accept the competence of the Commission pursuant to paragraph 2, the depositary shall then, and at intervals of five years thereafter, convene a meeting of representatives of those High Contracting Parties for the purpose of electing the members of the Commission. At the meeting, the representatives shall elect the members of the Commission by secret ballot from a list of persons to which each of those High Contracting Parties may nominate one person.
- c)* The members of the Commission shall serve in their personal capacity and shall hold office until the election of new members at the ensuing meeting.
- d)* At the election, the High Contracting Parties shall ensure that the persons to be elected to the Commission individually possess the qualifications required and that, in the Commission as a whole, equitable geographical representation is assured.

- e) In the case of a casual vacancy, the Commission itself shall fill the vacancy, having due regard to the provisions of the preceding sub-paragraphs.
 - f) The depositary shall make available to the Commission the necessary administrative facilities for the performance of its functions.
2. a) The High Contracting Parties may at the time of signing, ratifying or acceding to the Protocol, or at any other subsequent time, declare that they recognize *ipso facto* and without special agreement, in relation to any other High Contracting Party accepting the same obligation, the competence of the Commission to enquire into allegations by such other Party, as authorized by this Article.
- b) The declarations referred to above shall be deposited with the depositary, which shall transmit copies thereof to the High Contracting Parties.
- c) The Commission shall be competent to:
- i) enquire into any facts alleged to be a grave breach as defined in the Conventions and this Protocol or other serious violation of the Conventions or of this Protocol;
 - ii) facilitate, through its good offices, the restoration of an attitude of respect for the Conventions and this Protocol.
- d) In other situations, the Commission shall institute an enquiry at the request of a Party to the conflict only with the consent of the other Party or Parties concerned.
- e) Subject to the foregoing provisions of this paragraph, the provisions of Article 52 of the First Convention, Article 53 of the Second Convention, Article 132 of the Third Convention and Article 149 of the Fourth Convention shall continue to apply to any alleged violation of the Conventions and shall extend to any alleged violation of this Protocol.
3. a) Unless otherwise agreed by the Parties concerned, all enquiries shall be undertaken by a Chamber consisting of seven members appointed as follows:
- i) five members of the Commission, not nationals of any Party to the conflict, appointed by the President of the Commission on the basis of equitable representation of the geographical areas, after consultation with the Parties to the conflict;
 - ii) two *ad hoc* members, not nationals of any Party to the conflict, one to be appointed by each side.
- b) Upon receipt of the request for an enquiry, the President of the Commission shall specify an appropriate time-limit for setting up a Chamber. If any *ad hoc* member has not been appointed within the time-limit, the President shall immediately appoint such additional member or members of the Commission as may be necessary to complete the membership of the Chamber.

4.
 - a) The Chamber set up under paragraph 3 to undertake an enquiry shall invite the Parties to the conflict to assist it and to present evidence. The Chamber may also seek such other evidence as it deems appropriate and may carry out an investigation of the situation *in loco*.
 - b) All evidence shall be fully disclosed to the Parties, which shall have the right to comment on it to the Commission.
 - c) Each Party shall have the right to challenge such evidence.
5.
 - a) The Commission shall submit to the Parties a report on the findings of fact of the Chamber, with such recommendations as it may deem appropriate.
 - b) If the Chamber is unable to secure sufficient evidence for factual and impartial findings, the Commission shall state the reasons for that inability.
 - c) The Commission shall not report its findings publicly, unless all the Parties to the conflict have requested the Commission to do so.
6. The Commission shall establish its own rules, including rules for the presidency of the Commission and the presidency of the Chamber. Those rules shall ensure that the functions of the President of the Commission are exercised at all times and that, in the case of an enquiry, they are exercised by a person who is not a national of a Party to the conflict.
7. The administrative expenses of the Commission shall be met by contributions from the High Contracting Parties which made declarations under paragraph 2, and by voluntary contributions. The Party or Parties to the conflict requesting an enquiry shall advance the necessary funds for expenses incurred by a Chamber and shall be reimbursed by the Party or Parties against which the allegations are made to the extent of fifty per cent of the costs of the Chamber. Where there are counter-allegations before the Chamber each side shall advance fifty per cent of the necessary funds.

Article 91 — Responsibility

A Party to the conflict which violates the provisions of the Conventions or of this Protocol shall, if the case demands, be liable to pay compensation. It shall be responsible for all acts committed by persons forming part of its armed forces.

PART VI

FINAL PROVISIONS*Article 92 — Signature*

This Protocol shall be open for signature by the Parties to the Conventions six months after the signing of the Final Act and will remain open for a period of twelve months.

Article 93 — Ratification

This Protocol shall be ratified as soon as possible. The instruments of ratification shall be deposited with the Swiss Federal Council, depositary of the Conventions,

Article 94 — Accession

This Protocol shall be open for accession by any Party to the Conventions which has not signed it. The instruments of accession shall be deposited with the depositary.

Article 95 — Entry into force

1. This Protocol shall enter into force six months after two instruments of ratification or accession have been deposited.
2. For each Party to the Conventions thereafter ratifying or acceding to this Protocol, it shall enter into force six months after the deposit by such Party of its instrument of ratification or accession.

Article 96 — Treaty relations upon entry into force of this Protocol

1. When the Parties to the Conventions are also Parties to this Protocol, the Conventions shall apply as supplemented by this Protocol.
2. When one of the Parties to the conflict is not bound by this Protocol, the Parties to the Protocol shall remain bound by it in their mutual relations. They shall furthermore be bound by this Protocol in relation to each of the Parties which are not bound by it, if the latter accepts and applies the provisions thereof.
3. The authority representing a people engaged against a High Contracting Party in an armed conflict of the type referred to in Article 1, paragraph 4, may undertake to apply the Conventions and this Protocol in relation to that conflict by means of a unilateral declaration addressed to the depositary. Such declaration shall, upon its receipt by the depositary, have in relation to that conflict the following effects:
 - a) the Conventions and this Protocol are brought into force for the said authority as a Party to the conflict with immediate effect;

- b) the said authority assumes the same rights and obligations as those which have been assumed by a High Contracting Party to the Conventions and this Protocol; and
- c) the Conventions and this Protocol are equally binding upon all Parties to the conflict.

Article 97 — Amendment

1. Any High Contracting Party may propose amendments to this Protocol. The text of any proposed amendment shall be communicated to the depositary, which shall decide, after consultation with all the High Contracting Parties and the International Committee of the Red Cross, whether a conference should be convened to consider the proposed amendment.
2. The depositary shall invite to that conference all the High Contracting Parties as well as the Parties to the Conventions, whether or not they are signatories of this Protocol.

Article 98 — Revision of Annex I

1. Not later than four years after the entry into force of this Protocol and thereafter at intervals of not less than four years, the International Committee of the Red Cross shall consult the High Contracting Parties concerning Annex 1 to this Protocol and, if it considers it necessary, may propose a meeting of technical experts to review Annex 1 and to propose such amendments to it as may appear to be desirable. Unless, within six months of the communication of a proposal for such a meeting to the High Contracting Parties, one third of them object, the International Committee of the Red Cross shall convene the meeting, inviting also observers of appropriate international organizations. Such a meeting shall also be convened by the International Committee of the Red Cross at any time at the request of one third of the High Contracting Parties.
2. The depositary shall convene a conference of the High Contracting Parties and the Parties to the Conventions to consider amendments proposed by the meeting of technical experts if, after that meeting, the International Committee of the Red Cross or one third of the High Contracting Parties so request.
3. Amendments to Annex 1 may be adopted at such a conference by a two-thirds majority of the High Contracting Parties present and voting.
4. The depositary shall communicate any amendment so adopted to the High Contracting Parties and to the Parties to the Conventions. The amendment shall be considered to have been accepted at the end of a period of one year after it has been so communicated, unless within that period a declaration of non-acceptance of the amendment has been communicated to the depositary by not less than one third of the High Contracting Parties.

5. An amendment considered to have been accepted in accordance with paragraph 4 shall enter into force three months after its acceptance for all High Contracting Parties other than those which have made a declaration of non-acceptance in accordance with that paragraph. Any Party making such a declaration may at any time withdraw it and the amendment shall then enter into force for that Party three months thereafter.
6. The depositary shall notify the High Contracting Parties and the Parties to the Conventions of the entry into force of any amendment, of the Parties bound thereby, of the date of its entry into force in relation to each Party, of declarations of non-acceptance made in accordance with paragraph 4, and of withdrawals of such declarations.

Article 99 — Denunciation

1. In case a High Contracting Party should denounce this Protocol, the denunciation shall only take effect one year after receipt of the instrument of denunciation. If, however, on the expiry of that year the denouncing Party is engaged in one of the situations referred to in Article 1, the denunciation shall not take effect before the end of the armed conflict or occupation and not, in any case, before operations connected with the final release, repatriation or re-establishment of the persons protected by the Conventions or this Protocol have been terminated.
2. The denunciation shall be notified in writing to the depositary, which shall transmit it to all the High Contracting Parties.
3. The denunciation shall have effect only in respect of the denouncing Party.
4. Any denunciation under paragraph 1 shall not affect the obligations already incurred, by reason of the armed conflict, under this Protocol by such denouncing Party in respect of any act committed before this denunciation becomes effective.

Article 100 — Notifications

The depositary shall inform the High Contracting Parties as well as the Parties to the Conventions, whether or not they are signatories of this Protocol, of:

- a) signatures affixed to this Protocol and the deposit of instruments of ratification and accession under Articles 93 and 94;
- b) the date of entry into force of this Protocol under Article 95;
- c) communications and declarations received under Articles 84, 90 and 97;
- d) declarations received under Article 96, paragraph 3, which shall be communicated by the quickest methods; and
- e) denunciations under Article 99.

Article 101 — Registration

1. After its entry into force, this Protocol shall be transmitted by the depositary to the Secretariat of the United Nations for registration and publication, in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.
2. The depositary shall also inform the Secretariat of the United Nations of all ratifications, accessions and denunciations received by it with respect to this Protocol.

Article 102 — Authentic texts

The original of this Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the depositary, which shall transmit certified true copies thereof to all the Parties to the Conventions.